

## **BAB IV**

### **PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH**

#### **4.1. Urusan Wajib Yang Dilaksanakan**

##### **4.1.1. Urusan Pendidikan**

Pencapaian indikator kinerja daerah pada **Misi Kesatu** terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Bintan untuk urusan Pendidikan adalah sebagai berikut : Indeks Pendidikan sebesar **61,2 poin;(BPS)**; Angka Melek Huruf (AMH) **98,09% (BPS)**; Rasio Melek Huruf perempuan terhadap laki-laki usia 15-24 tahun yang diukur melalui Angka Melek Huruf **99,21% (BPS)**; Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) **8,36 Tahun**; Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A **107,52.%**; Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B **95,70%**; Angka pendidikan yang ditamatkan SD/MI/Paket A **26,51%**; Angka pendidikan yang ditamatkan SMP/MTs/Paket B **22,80%**; Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C **76,53%**; Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C **86,97%**; Angka pendidikan yang ditamatkan SMA/SMK/MA/Paket C **33,11%**; Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A **98,98%**; Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B **87,96%**; Angka partisipasi sekolah (Pendidikan Dasar) **99,35%**; Rasio anak perempuan terhadap terhadap anak laki-laki ditingkat pendidikan dasar, lanjutan dan tinggi yang diukur dari angka partisipasi murni anak perempuan terhadap anak laki-laki **93,52%**; Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah dasar per 10.000 penduduk (Pendidikan Dasar) **34,67%**; Persentase SD-SMP yang memiliki komputer yang bisa digunakan siswa untuk akses internet melalui komputer **87,20%**; Rasio guru per murid SD/MI (Pendidikan Dasar) **1:14**; Rasio guru per murid SLTP (Pendidikan Dasar) **1:12**; Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah menengah per 10.000 penduduk (Pendidikan Menengah) **34,67%**; Rasio guru per murid SLTA (Pendidikan Menengah) **1:11**; Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata (Pendidikan Menengah) **0,44**; Angka partisipasi sekolah (Pendidikan Menengah) **76,19%**;

Angka kelulusan SD 100%; Angka kelulusan SLTP 99,91%; Angka kelulusan SLTA 100%; Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV 79,73 %;

Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

### **1) Program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak**

Program ini bertujuan terwujudnya pelayanan pendidikan Anak Usia Dini yang bermutu, murah dan merata disetiap kecamatan. Secara lebih spesifik, program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan pendidikan melalui jalur formal seperti Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), jalur pendidikan non-formal berbentuk Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak (TPA) dan Pos PAUD, dan jalur informal yang berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan, dalam rangka membina, menumbuhkan dan mengembangkan seluruh potensi anak secara optimal agar memiliki kesiapan untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:

#### **a. Pelaksanaan Program**

- (1) Kegiatan Penyelenggaraan Kompetensi Anak Usia Dini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan olahraga Kabupaten Bintan dengan alokasi sebesar Rp.150.000.000 dengan realisasi sebesar Rp.141.102.618 (94,07%). Hasilnya adalah meningkatnya kreatifitas dan kemampuan anak usia dini melalui ajang lomba tari, lomba drum band dan lomba senam dengan jumlah peserta 500 siswa perwakilan dari PAUD Formal dan Non Formal yang ada di Kabupaten Bintan.
- (2) Kegiatan Pelatihan Tutor PAUD Se-Kabupaten Bintan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan dengan alokasi Rp.150.000.000 dengan realisasi sebesar Rp.112.767.150 (75,18%). Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk Pelatihan kepada Guru PAUD baik

Formal maupun Non Formal sebanyak 70 orang. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya mutu pendidik atau tutor PAUD yang berdampak langsung terhadap pola pikir dan kreatifitas Anak Usia Dini dalam proses pembentukan mental, membina, menumbuhkan dan mengembangkan seluruh potensi anak secara optimal agar memiliki kesiapan untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya.

- (3) Kegiatan Penyelenggaraan kompetensi dan kreatifitas Tenaga Pendidik (Guru PAUD) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan olahraga Kabupaten Bintan dengan realisasi sebesar Rp.72.100.000 dari pagu anggaran sebesar Rp.58.539.118 atau 81,19%. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk Pelatihan mendongeng. Hasilnya adalah meningkatnya kompetensi dan kreatifitas Tenaga Pendidik PAUD melalui pelatihan mendongeng dengan jumlah peserta 75 orang perwakilan dari PAUD Formal dan Non Formal yang ada di Kabupaten Bintan.
- (4) Kegiatan Penyediaan Operasional Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI) Kabupaten Bintan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan dengan pagu anggaran sebesar Rp.90.920.000,- realisasi sebesar Rp.85.936.910 dari atau 94,52%. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk Worskhop Kurikulum 2013 untuk Guru TK yang bertujuan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung mutu pendidik. Adapun hasilnya adalah meningkatnya kemampuan Guru TK dalam menyusun program semester, program pembelajaran harian, dan menyusun rencana mingguan peterlaksananya lomba melukis dan pelaksanaan Workshop yang melibatkan 150 guru TK.
- (5) Kegiatan Penyediaan Operasional Taman Kanak-kanak Se-Kabupaten Bintan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan dengan pagu anggaran sebesar

Rp.50.000.000 realisasi sebesar Rp.49.795.250 atau 99,59%. Tujuan kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan belajar mengajar di 2 TK Negeri Pembina. Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya proses belajar mengajar di 2 sekolah TK Pembina melalui penyediaan melalui pemberia dana Bantuan Operasional Sekolah Jenjang TK.

- (6) Kegiatan Workshop PAUD dan bunda PAUD tingkat Kecamatan , Kelurahan dan Desa Se- Kabupaten Bintan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan dengan alokasi Rp.137.800.000 dengan realisasi Rp.Rp.132.308.750 atau 96,02%. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk Sosialisasi dan Pelatihan kepada Bunda PAUD Desa/Kelurahan dan Kecamatan sebanyak 70 orang. Hasil dari kegiatan ini adalah terbentuknya satu persepsi dan pemahaman Bunda PAUD Se- Kabupaten Bintan dalam mengembangkan dan menumbukan PAUD di seluruh Desa/Kelurahan hingga Kecamatan.
- (7) Kegiatan Senam Massal Anak Usia Dini Kabupaten Bintan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan dengan pagu anggaran sebesar Rp.73.346.600,- realisasi sebesar Rp.72.078.940 dari atau 98,27%. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk Senam Massal yang diikuti 1.000 anak PAUD Formal dan Non Formal. Adapun hasilnya adalah meningkatnya meningkatnya kebugaran dan kreatifitas Anak Usia Dini.
- (8) Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana TK Amaliya dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan dengan pagu anggaran sebesar Rp.192.840.000,- dan realisasi sebesar Rp.179.516.543,- dari atau 93,09 %. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk rehabilitasi sedang gedung dan pembangunan pagar gedung TK

Amaliya. Tujuan kegiatan ini adalah menyediakan fasilitas penunjang pendidikan bagi siswa TK.

**b. Permasalahan dan Solusi**

- 1) Sampai saat ini sebagian besar dari tenaga pendidik PAUD (Kelompok Bermain dan Satuan PAUD Sejenis) yang ada masih lulusan SLTA yakni sebanyak 99% atau 471 orang. Solusinya adalah melakukan pelatihan bagi tenaga pendidik PAUD.
- 2) Masih minimnya Alat Peraga Edukatif (APE) Dalam dan Luar **(outdoor dan indoor)** bagi PAUD. Solusinya adalah melengkapi Alat Peraga Edukatif melalui bantuan pemerintah maupun masyarakat.

**2) Program Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**

Program ini bertujuan Terlaksananya percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, baik melalui jalur formal maupun non formal, yang mencakup SD termasuk SDLB, MI, dan Paket A serta SMP, MTs, dan Paket B, sehingga seluruh anak usia 7–15 tahun baik laki-laki maupun perempuan dapat memperoleh pendidikan, setidaknya sampai jenjang sekolah menengah pertama atau yang sederajat. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dititikberatkan pada (1) peningkatan partisipasi anak yang belum mendapatkan layanan pendidikan dasar terutama melalui penjangkauan anak-anak yang belum pernah sekolah pada jenjang SD termasuk SDLB/MI/Paket A dan peningkatan angka melanjutkan lulusan SD termasuk SDLB/MI/Paket A ke jenjang SMP/MTs/Paket B atau bentuk lain yang sederajat, (2) mempertahankan kinerja pendidikan yang telah dicapai terutama dengan menurunkan angka putus sekolah dan angka mengulang kelas, serta dengan meningkatkan kualitas pendidikan; dan (3) penyediaan tambahan layanan pendidikan bagi anak-anak yang tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi :

**a. Pelaksanaan Program**

- (1) Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Daerah Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiah dan Satuan Pendidikan Non Islam setara SD dan SMP dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan dengan pagu anggaran Rp.5.785.850.000,- dan realisasi Rp.5.546.683.706,- atau 95,87%. Hasil dari Kegiatan ini adalah meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SLB dan SMP/MTs di Kabupaten Bintan, melalui pemberian dana tambahan dalam bentuk Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri sebanyak 838 rombel dan SMP Negeri sebanyak 217 rombel. Adapun bentuk bantuan operasional daerah ini adalah penyediaan dana operasional, penyediaan seragam serta perlengkapan sekolah kepada siswa kurang mampu sebanyak 1.395 siswa untuk Jenjang SD dan 1.143 siswa untuk SMP, dan pengadaan media pembelajaran untuk proses pembelajaran bagi sekolah yang membutuhkan.

Pelaksanaan BOSDA diselenggarakan sejak tahun 2011, pada tahun 2015 dana BOSDA SD telah disalurkan kepada 830 rombel yang berasal dari 96 SDN/1 SLBN. Masing-masing rombel mendapatkan Rp.3.300.000/tahun dengan total dana sebesar Rp.2.430.200.000. Sedangkan BOSDA SMP pada tahun 2015 telah disalurkan kepada 219 rombel yang berasal dari 28 SMPN. Masing-masing rombel menerima Rp.5.500.000, dengan total Rp.1.063.300.000.

Tabel 4.1 : Penyaluran BOSDA Tingkat SD dan SMP Tahun 2015

TAHUN	SD			SMP		
	ROMBEL	PER ROMBEL (Rp)	TOTAL (Rp)	ROMBEL	PER ROMBEL (Rp)	TOTAL (Rp)
2011	753	2.872.000	2.162.616.000	185	5.115.000	946.275.000
2012	789	2.460.000	1.940.940.000	191	4.940.000	943.540.000
2013	794	3.000.000	2.382.000.000	208	5.000.000	1.040.000.000
2014	804	2.900.000	2.331.600.000	202	4.900.000	989.800.000
2015	830	3.300.000	2.430.200.000	219	5.500.000	1.063.300.000

Sumber : Dinas DIKPORA Kabupaten Bintan, Tahun 2016

- (2) Kegiatan Pelaksanaan Lomba Pidato Bahasa Inggris, Karya Ilmiah, Story Telling Tingkat SMP/MTS dan Olimpiade Sain Untuk SD/MI/SMP/MTs, Cerdas Cermat Untuk Tingkat SD/MI/SMP/MTs dengan pagu anggaran Rp.339.980.000,- dengan realisasi Rp.337.067.640,- atau 99.14%. Hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya siswa berprestasi di bidang sains dan matematika melalui ajang lomba Pidato Bahasa Inggris sebanyak 25 siswa dan Story Telling sebanyak 25 siswa untuk Tingkat SMP/MTS, Olimpiade Sain sebanyak 45 orang siswa Untuk SD/MI, dan 85 orang siswa untuk SMP/MTs, Cerdas Cermat sebanyak 40 orang siswa Tingkat SD/MI dan 40 orang siswa Tingkat SMP/MTs.
- (3) Kegiatan Bedah Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Mata Pelajaran yang di uji Nasionalkan Tingkat SD/MI dan SMP/MTs Se Kabupaten Bintan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan dengan pagu anggaran Rp.495.000.000,- dengan realisasi Rp.491.224.222,- atau 99,24%. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya kemampuan guru mata pelajaran dalam menyusun soal yang mengacu berdasarkan kisi Ujian Sekolah dan Ujian Nasional sebanyak 224 guru terdiri dari 54 guru SD/MI dan 170 guru SMP/MTs.
- (4) Kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional dan Festival Nasional SD/MI dan SMP/MTs dilaksanakan oleh Dinas

Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan dengan alokasi pagu anggaran Rp.400.000.000,- dengan realisasi Rp.399.237.250,- atau 99,81%. Output dari kegiatan ini adalah terselenggaranya Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) yang diikuti sebanyak 1.300 siswa SD dan SMP utusan dari 10 Kecamatan Se Kabupaten Bintan. Hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya utusan siswa berprestasi bidang olahraga dan seni ketingkat propinsi dengan rincian pencapaian prestasi sebagai berikut :

- Tingkat SMP (O2SN) : Pencak Silat (Juara Umum Putra), Bulutangkis (Juara 1 Ganda Campuran), Bola Voli ( Juara 2 Putra).
  - FLS2N Tingkat SMP : Seni Lukis ( Juara 2 Putra), MTQ (Juara 3 Putri, Juara 3 Putra), Cipta Puisi (Juara 3 Putri), Seni Tari (Juara 2).
  - Tingkat SD (O2SN) : Atletik : Lari Estafet (Juara 2 Putra), Renang (Juara 3 50 Meter Gaya Bebas, Gaya Dada, Gaya Punggung Putra, Juara 3 50 Meter Gaya Bebas, Gaya Dada, Gaya Punggung Putra ), Bulutangkis (Juara 2 Tunggal Putra, Juara 2 Tunggal Putri), Karate (Juara 1 Kelas Kumite Perorangan dan Kelas Kata Perorangan Putri, Juara 3 Kelas Kumite perorangan dan Kata Perorangan Putra), Futsal SD (Juara 1), Catur (Juara 3 Putra dan Putri), Tennis Meja (Juara 2 Putra, Juara 3 Putri),
- (5) Kegiatan Persiapan Pelaksanaan Try Out Ujian Nasional (UN) Tingkat SMP/MTs Tahun Pembelajaran 2014/2015 dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabuapten Bintan dengan alokasi sebesar Rp.241.270.000,- dengan realisasi Rp.237.544.214,- Output kegiatan ini adalah terlaksananya penyusunan soal oleh tim penyusunan soal untuk try out ujian



nasional siswa kelas 9 tahun pelajaran baru sebanyak 2.658 siswa SMP/MTs.

- (6) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS Serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupten Bintan dengan alokasi sebesar Rp.128.680.000,- dengan realisasi Rp.127.528.2906,- atau 99,10%. Hasil Kegiatan adalah meningkatnya pengendalian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dijenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyaluran dana BOSNAS dengan sasaran, 92 SD dan 28 SMP.

- **Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) Sekolah Dasar (SD);** Pelaksanaan BOSNAS Sekolah Dasar (SD) telah dilaksanakan dari tahun 2005 hingga tahun 2015. Pada tahun 2015 dana BOSNAS telah disalurkan kepada 91 SDN dengan total siswa yang menerima lebih kurang 18.391 siswa. Dengan masing-masing siswa mendapatkan Rp. 800.000/siswa dengan total dana BOSNAS Rp.14.602.800.000.

Tabel 4.2 : Penyaluran BOSNAS Tingkat SD Tahun 2015

TAHUN	SD					TOTAL (Rp)
	TW I	TW II	TW III	TW IV	PER SISWA (Rp)	
2005	-		12.567		117.500	1.476.622.500
2006	14.507		15.144		117.500	3.774.132.500
2007	14.637		15.309		127.000	4.125.156.000
2008	15.506		15.852		127.000	4.172.690.000
2009	15.806		16.228		198.500	6.358.749.000
2010	16.188		16.511		198.500	6.490.751.500
2011	16.453	16.325	16.787	6.787	397.000	6.585.436.000
2012	16.786	6.757	17.300	17.300	397.000	9.880.735.000
2013	17.300	17.300	17.242	18.300	580.000	10.170.590.000
2014	18.227	18.383	18.257	19.244	580.000	10.746.095.000
<b>2015</b>	<b>18.084</b>	<b>18.350</b>	<b>18.189</b>	<b>18.391</b>	<b>800.000</b>	<b>14.602.800.000</b>

Sumber : Dinas DIKPORA Kabupaten Bintan, Tahun 2016

- **Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) Sekolah Menengah Pertama (SMP);** Sedangkan untuk SMP pada tahu 2015, dana BOSNAS telah disalurkan kepada 30 SMPN dengan jumlah total siswa yang menerima lebih kurang 7.175 siswa. Masing-masing siswa mendapatkan Rp. 1.000.000/siswa dengan jumlah dana BOSNAS Rp. 6.740.250.000.

Tabel 4.3 : Penyaluran BOSNAS Tingkat SMP Tahun 2015

TAHUN	SMP					TOTAL (Rp)
	TW I	TW II	TW III	TW IV	PER SISWA (Rp)	
2005			3.812		162.250	618.497.000
2006	4.810		5.090		162.250	1.703.747.500
2007	4.480		4.844		177.000	1.748.908.000
2008	4.818		5.133		177.000	1.822.923.000
2009	5.707		5.409		285.000	2.988.510.000
2010	5.392		5.509		285.000	3.106.785.000
2011	5.509	5.458	5.416	5.416	570.000	3.106.357.500
2012	5.535	5.495	5.677	5.677	570.000	3.973.160.000
2013	5.677	5.677	5.513	6.261	710.000	4.105.220.000
2014	5.887	7.095	6.467	7.459	710.000	4.776.170.000
<b>2015</b>	<b>6.605</b>	<b>6.599</b>	<b>6.582</b>	<b>7.175</b>	<b>1.000.000</b>	<b>6.740.250.000</b>

Sumber : Dinas DIKPORA Kabupaten Bintan, Tahun 2016

- (7) Kegiatan Try Out Ujian Sekolah Dan Pelaksanaan Ujian Sekolah tingkat SD/MI Se-Kab Bintan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan dengan pagu anggaran Rp.355.545.000,- dengan realisasi Rp.350.652.572,- atau 98,62% Hasil Kegiatan ini adalah terlaksananya try out ujian nasional siswa kelas 6 sebanyak 9.790 siswa SD/MI.
- (8) Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Swasta Jenjang SD/MI dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan dengan pagu anggaran sebesar Rp.265.180.500,- dan realisasi Rp.230.595.500,- atau 86,96%. Hasil kegiatan ini adalah terlaksananya proses belajar dan mengajar pada SD/MI swasta sebanyak 12 sekolah, melalui pemberian biaya operasional sekolah kegiatan ini merupakan bentuk perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan terhadap perkembangan sekolah swasta untuk mendukung peningkatan Angka Partisipasi Kasar siswa.
- (9) Kegiatan Try Out dan Pelaksanaan UN (Ujian Nasional) SMP/MTs dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan dengan pagu anggaran Rp.278.770.000,- dengan realisasi Rp.274.635.868,- atau 98,52%. Output kegiatan

ini adalah terlaksananya try out dan ujian nasional yang diikuti sebanyak 2.658 siswa kelas 9 di 27 SMP dan 8 MTs tahun pelajaran 2014/2015.

- (10) Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Swasta Jenjang SMP/MTs dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan dengan pagu anggaran sebesar Rp.320.621.000 dan realisasi Rp.307.820.550,- atau 96,01%. Hasil kegiatan ini adalah terlaksananya proses belajar dan mengajar pada SMP/MTs swasta sebanyak 7 sekolah melalui pemberian biaya operasional sekolah. Kegiatan ini merupakan bentuk perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan terhadap perkembangan sekolah swasta untuk mendukung peningkatan Angka Partisipasi Kasar siswa.

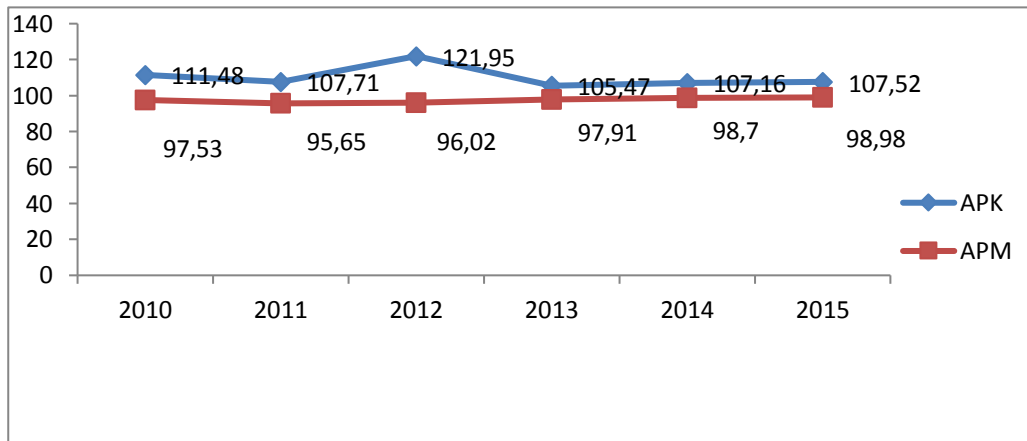
Dengan pencapaian indikator pembangunan daerah sebagai berikut :

**1) Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI**

Tolok ukur bidang pendidikan adalah indikator mutu pendidikan yang dapat dilihat dari tingginya angka partisipasi. Angka partisipasi tersebut terdiri atas **Angka Partisipasi Kasar (APK)** dan **Angka Partisipasi Murni (APM)**. Dari evaluasi belajar dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) mengalami fluktuatif. Untuk Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI pada tahun 2011 sebesar 107,70% meningkat pada tahun 2012 menjadi 121,95% menurun pada tahun 2013 menjadi 105,47% naik kembali pada tahun 2014 menjadi sebesar 107,16% dan pada tahun 2015 naik menjadi sebesar 107,52%. Sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) juga menunjukkan tren meningkat pada tahun 2011 sebesar 95,65% pada tahun 2012 meningkat menjadi 96,02 kemudian terus meningkat menjadi 97,91 pada tahun 2013, 98,70% pada tahun 2014 dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 98,98%. Ini artinya pada tahun 2015 ada

sebanyak 98,98% penduduk yang berusia 7-12 tahun telah tertampung di SD. Hal ini membuktikan bahwa jumlah murid SD yang dapat ditampung pada sekolah-sekolah SD yang ada sudah melebihi jumlah penduduk usia sekolah, namun demikian masih banyak murid SD yang berumur kurang atau melebihi usia 7-12 tahun yang masih mengikuti pendidikan SD/MI.

Grafik 4.1 : Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni SD/MI 2010-2015



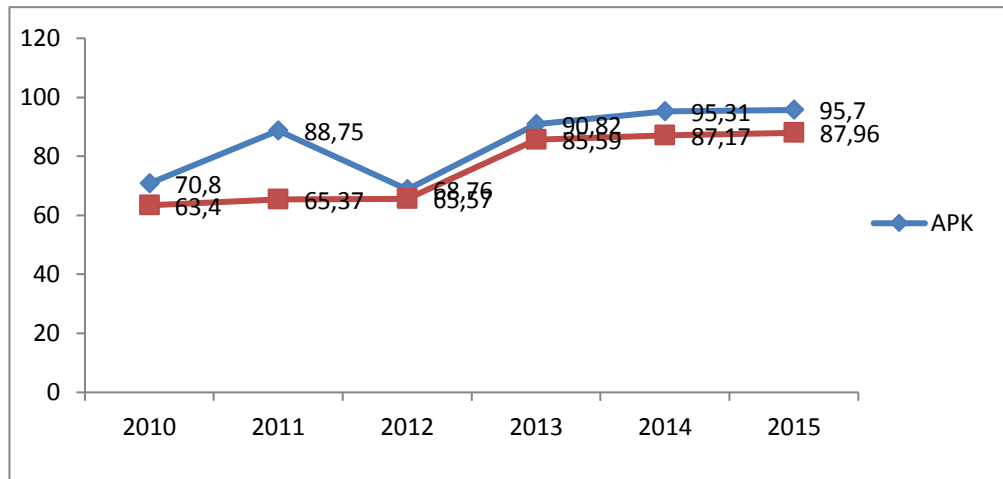
Sumber : Dinas DIKPORA Kabupaten Bintan, Tahun 2016

## 2) Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs

Untuk **Angka Partisipasi Kasar (APK)** dan **Angka Partisipasi Murni (APM)** dari tahun 2011 sampai dengan 2015 juga mengalami fluktuatif. Untuk Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs pada tahun 2011 sebesar 88,75%, pada tahun 2012 turun menjadi 68,76%, pada tahun 2013 KEMBALI meningkat menjadi 90,82%, pada tahun 2014 meningkat menjadi 95,31% dan pada tahun 2015 terus meningkat menjadi 95,70%. Sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) cenderung meningkat pada tahun 2011 65,37%, pada tahun 2012 meningkat tipis sebesar 68,76%, pada tahun 2013 meningkat signifikan menjadi 85,59%, pada tahun 2014 naik menjadi 87,17% dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 87,96%. Ini berarti ada sebanyak 76,95% penduduk yang berusia 13-15 tahun yang baru

tertampung di jenjang SLTP. Ini menunjukkan bahwa jumlah anak dapat ditampung pada sekolah-sekolah SMP/MTs sudah melebihi jumlah penduduk usia sekolah, namun masih banyak anak yang kurang atau melebihi usia 13-15 tahun yang masih mengikuti pendidikan SLTP.

Grafik 4.2 : Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni SMP/MTs 2011-2015



Sumber : Dinas DIKPORA Kabupaten Bintan, Tahun 2016

### 3) Rasio anak perempuan terhadap terhadap anak laki-laki ditingkat pendidikan dasar, lanjutan dan tinggi yang diukur dari angka partisipasi murni anak perempuan terhadap anak laki-laki

Rasio ini mencapai 93,52% pada tahun 2015, angka ini menunjukkan bahwa anak laki-laki lebih tinggi dibandingkan anak perempuan dalam partisipasi sekolah.

#### b. Permasalahan dan Solusi

Kurangnya pengembangan potensi dan kreatifitas dalam bidang Sains dan Seni solusinya adalah perlu diadakannya Lomba Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia dengan tujuan untuk menjaring minat dan bakat siswa dalam bidang penelitian, Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) dan perlu diadakannya Training Center (TC) agar siswa lebih siap untuk menghadapi lomba untuk Tingkat Provinsi dan Nasional.

### **3) Program Pendidikan Menengah**

Program ini bertujuan terwujudnya penyelenggaraan pendidikan Menengah yang bermutu dan bersandar Nasional di setiap kecamatan. Program pendidikan menengah didorong untuk mengantisipasi meningkatnya lulusan sekolah menengah pertama secara signifikan sebagai dampak positif pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, serta penguatan pendidikan vokasional baik melalui sekolah/madrasah umum maupun kejuruan dan pendidikan non-formal guna mempersiapkan lulusan yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi untuk masuk ke dunia kerja. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi :

#### **a. Pelaksanaan Program**

- (1) Kegiatan Pelaksanaan Try Out Ujian Nasional dan Pelaksanaan Ujian Nasional Tingkat SMA/MA/SMK Tahun Pelajaran 2014/2015 dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan dengan pagu anggaran Rp.322.189.000 dan realisasi Rp.310.588.810 atau 98,30%. Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya try out untuk siswa kelas 12 tahun pelajaran 2014/2015 dan terpenuhinya orientasi hasil ujian untuk 1.504 siswa kelas 12 SMA/MA/SMK Tahun Pelajaran 2014/2015. Tahun 2015 tingkat kelulusan di Kabupaten Bintan mencapai 100% untuk tingkat SMA/MA dan 100% untuk tingkat SMK.
- (2) Kegiatan Pelaksanaan Lomba Kreatifitas Siswa SMA/MA/SMK dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan dengan pagu anggaran Rp.243.340.000 dan realisasi Rp.241.565.910 atau 99,27%. Hasil dari kegiatan ini adalah terselenggaranya Lomba Kreatifitas Siswa SMA/MA/SMK yang diikuti sebanyak 228 siswa SMA/MA/SMK. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya daya kreatifitas, prestasi akademik dan non akademik, dan mutu siswa, serta menumbuhkan daya saing kompetisi, serta minat dan bakat

melalui ajang lomba olimpiade sains Nasional (OSN) sebanyak 27 orang dengan 9 mata pelajaran ke Tingkat Propinsi, olimpiade olah raga siswa Nasional (O2SN) sebanyak 16 orang dengan 5 cabang olah raga ( silat, tenis meja, bulu tangkis, lompat jauh, lari 100 meter) ke Tingkat Propinsi dan debat bahasa Inggris sebanyak 9 orang ke Tingkat Propinsi.

- (3) Kegiatan Penguatan Kompetensi Guru Ujian Nasional Tingkat SMK dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan dengan pagu anggaran Rp.109.724.000,- dan Realisasi Keuangan sebesar Rp.102.714.300,- atau 93,61%. Output dari kegiatan ini adalah meningkatnya lulusan SMK melalui pelaksanaan penguatan kompetensi guru mata pelajaran yang di Ujian Nasionalkan dan diikuti sebanyak 20 orang guru SMK.
- (4) Kegiatan Pemantapan Kemampuan Kompetensi Guru Mata Pelajaran yang diuji Nasionalkan Tingkat SMA/MA/SMK dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan dengan pagu anggaran Rp.352.985.800,- dan realisasi keuangan Rp.351.064.400,- atau 99,46%. Hasil Kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas lulusan jenjang SMA/MA/SMK melalui pelaksanaan penyegaran (refreshing) mata pelajaran yang diajarkan oleh masing-masing guru mata pelajaran khususnya mata pelajaran yang di ujinasionalkan untuk meningkatnya kompetensi guru sehingga berdampak langsung kepada peningkatan kualitas lulusan jenjang SMA/MA/SMK. Kegiatan ini diikuti 105 orang guru SMA/MA/SMK.
- (5) Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan dengan pagu anggaran Rp.1.961.736.200,- dan realisasi Rp.1.890.562.753,- atau 96,37%. Hasil dari Kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan



pendidikan serta mendukung manajemen berbasis sekolah melalui penyediaan dana tambahan di tingkat sekolah. Adapun bentuk bantuan operasional daerah ini adalah penyediaan dana operasional dan pengadaan media pembelajaran untuk proses pembelajaran sehingga diharapkan dapat meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK.

- **Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)**

Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) dilaksanakan sejak tahun 2011 yang bertujuan meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK. Total BOMM yang telah disalurkan pada tahun 2015 sebesar Rp.1.191.333.345 untuk SMAN dan Rp. 699.229.208 untuk SMKN.

Tabel 4.4 : Penyaluran BOMM SMA/SMK Negeri Tahun 2015

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH DANA
1	SMA N 1	337.770.000
2	SMA N 2	186.110.000
3	SMA N 3	121.920.000
4	SMA N 4	170.410.000
5	SMA N 5	239.000.000
6	SMA N 6	99.970.300
7	SMA N 7	35.800.000
8	SMA N 8	37.469.000
9	SMK N 1	309.120.000
10	SMK N 2	298.284.354
11	SMK N 3	87.520.000
12	SMK N 4	39.280.000
		<b>1.962.653.654</b>

Sumber : Dinas DIKPORA Kabupaten Bintan, Tahun 2016

- (6) Kegiatan Uji Kemampuan Siswa Tingkat SMA/MA/SMK Pra Ujian Nasional (Try Out I Kabupaten) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan dengan pagu anggaran Rp.258.668.813,- dan realisasi Rp.257.897.337,- atau 99,70%. Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya 2 kali try out ujian nasional siswa kelas 12 tahun pelajaran baru

sebanyak 1.504 siswa. Sehingga siswa lebih siap secara fisik dan mental dalam mengikuti Ujian Nasional.

- (7) Kegiatan Lomba Kompetensi Siswa SMK dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan dengan pagu anggaran sebelum sebesar Rp.100.000.000,- namun karena efisiensi anggaran pada ngaraan perubahan 2015 makan pagu anggaran menjadi Rp.6.850.000,- dengan realiasi Rp.6.850.000,- atau 100%. Hasil kegiatan ini terselenggaranya lomba Kompetensi Siswa SMK sebanyak 17 siswa SMK untuk mengikuti 17 cabang lomba dari 22 cabang lomba yang diselenggarakan oleh Propinsi Kepulauan Riau. Pada tahun 2015 Kabupaten Bintan meraih peringkat 2 sebanyak 4 cabang lomba dan 7 cabang lomba untuk peringkat 3. Tujuan kegiatan ini adalah mempromosikan perkembangan kualitas kinerja siswa SMK, memacu setiap SMK untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajarannya.
- (8) Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Swasta Jenjang SMA/MA/SMK dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan dengan pagu anggaran Rp.342.691.000,- dengan realiasi Rp.331.361.599,- atau 99,69%. Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya proses belajar dan mengajar pada SMA/MA/SMK swasta sebanyak 6 Sekolah yaitu SMK Perkapalan Bintan Utara, SMK Perikanan dan Kelautan Bintan Timur, SMK Muhammadiyah Bintan Utara, MA Al Furqon Gunung Kijang, MA Madani Toapaya, SMA YKPP Bintan Utara), melalui pemberian biaya operasional sekolah kegiatan ini merupakan bentuk perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan terhadap perkembangan sekolah swasta untuk mendukung peningkatan Angka Partisipasi Kasar.

Tabel 4.5 : Penyaluran BOMM SMA/SMK/MA swasta Tahun 2015

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH DANA
1	SMK MUHAMMADIYAH	47.770.000
2	SMA YKPP	89.852.700
3	SMK ERKAPALAN	84.739.500
4	MA MADANI	26.690.000
5	MA AL FURQON	25.000.000
6	SMK PERIKANAN DAN KELAUTAN	43.157.300
		<b>317.209.500</b>

Sumber : Dinas DIKPORA Kabupaten Bintan, Tahun 2016

- (9) Kegiatan Administrasi dan Verifikasi Data Siswa Miskin Beasiswa Kurang Mampu Jenjang SLTA dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan dengan pagu anggaran Rp.23.778.510,- dengan realisasi Rp.23.778.510,- atau 100%. Hasil kegiatan ini adalah terverifikasinya 2.857 orang jumlah yang akan diberikan bantuan/beasiswa baik melalui APBD, namun penyesuaian anggaran perubahan 2015 hanya 802 siswa yang diberikan beasiswa.
- (10) Kegiatan Pendalaman Materi Guru Mata Pelajaran Tingkat SMA dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan dengan pagu anggaran Rp.444.875.200,- dengan realisasi Rp.442.600.200,- atau 99,49%. Hasil dari kegiatan ini adalah Meningkatnya pemahaman guru SMA bidang studi non Ujian Nasional sebanyak 81 orang.

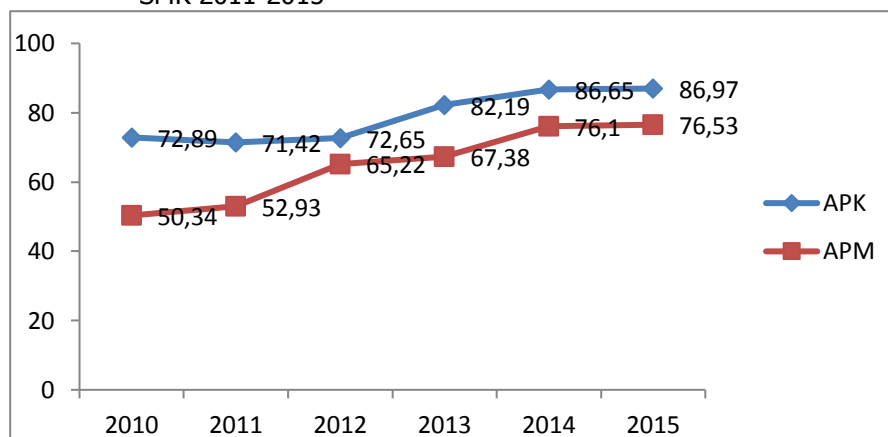
Dengan pencapaian indikator kinerja daerah sebagai berikut :

**1) Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK**

Untuk **Angka Partisipasi Kasar (APK)** dan **Angka Partisipasi Murni (APM)** dari tahun 2011 sampai dengan 2015 juga mengalami fluktuatif. Untuk Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK pada tahun 2011 sebesar 71,42%, pada tahun 2012 naik menjadi 72,65, pada tahun 2013 meningkat menjadi 82,19%, pada tahun 2014 meningkat menjadi 86,65% dan pada tahun 2015

menjadi 86,97%. Angka Partisipasi Murni (APM) pada tahun 2011 52,93%, pada tahun 2012 65,24%, pada tahun 2013 meningkat menjadi 67,38%, pada tahun 2014 turun meningkat sebesar 76,10% dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 76,53%. Ini berarti ada sebanyak 76,53% penduduk yang berusia 16-18 tahun yang baru tertampung di jenjang SLTA.

Grafik 4.3: Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni SMA/ MA/ SMK 2011-2015



Sumber : Dinas DIKPORA Kabupaten Bintan, Tahun 2016

## b. Permasalahan dan Solusi

### 1) Permasalahan

- a) Kebijakan pendistribusian Tenaga Pendidik yang tidak merata
- b) Masih kekurangan Tenaga Pendidik untuk Sekolah Kejuruan baik untuk mata pelajaran umum seperti PKn, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan lain-lain maupun mata pelajaran keahlian seperti Akuntansi, Teknik Komputer Jaringan, Teknolgi Perikanan dan lain-lain.
- c) Kurangnya pengembangan potensi dan kreatifitas dalam bidang Sains dan Seni.

### 2) Solusi

- a) Kebijakan pendistribusian Tenaga Pendidik perlu tinjau ulang agar menyesuaikan dengan kebutuhan sekolah.

- b) Perlu dilakukannya kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Perguruan Tinggi melalui pemberian beasiswa bagi putra-putri daerah berprestasi dalam menghasilkan Tenaga Pendidik sesuai jurusan yang dibutuhkan.
- c) Perlu diadakannya Lomba Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia dengan tujuan untuk menjangring minat dan bakat siswa dalam bidang penelitian, Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) dan perlu diadakannya Training Center (TC) agar siswa lebih siap untuk menghadapi lomba untuk Tingkat Provinsi dan Nasional.

#### **4) Program Pendidikan Non Formal**

##### **a. Pelaksanaan Program**

Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Non Formal dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan dengan pagu anggaran Rp.159.720.000,- dan realisasi Rp.155.791.322,- atau 97,54%. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pemberian bantuan sarana dan prasarana seperti meubiler, komputer, laptop dan printer untuk 2 Lembaga Kursus dan Pelatihan yaitu di Seri Kuala Lobam dan Bintan Utara.

##### **b. Permasalahan dan Solusi**

Dalam pelaksanaan program Pendidikan Non Formal tidak ada kendala yang berarti, sehingga program ini dapat dilaksanakan dengan baik.

#### **5) Program Peningkatan Mutu pendidikan dan Tenaga kependidikan**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan mutu Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan baik jumlah, kualitas, kompetensi dan profesionalisme tenaga kependidikan untuk mampu melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:

**a. Pelaksanaan Program**

- (1) Kegiatan Pembekalan Pendidikan dan Latihan Guru (PLPG) bagi Peserta Sertifikasi Guru dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan dengan pagu anggaran Rp.107.907.100,- dan realisasi Rp.99.521.800,- atau 92,23%. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kompetensi guru dan pemahaman tentang kualifikasi dan persyaratan administrasi Sertifikasi Guru Dalam Jabatan yang diikuti 100. Sedangkan hasilnya adalah terpenuhinya kelulusan seleksi sebanyak 97 orang yang telah lulus pemberkasan yang memenuhi standar kualifikasi dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Kemendikbud. Yang dinyatakan lulus dalam mengikuti Pendidikan dan Latihan Guru (PLPG) 92 orang di Rayon 105 Universitas Riau - Pekanbaru, dan 2 orang di Rayon 106 Universitas Negeri Padang.
- (2) Kegiatan PTK Berprestasi Tingkat Kab. Bintan yang oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan dengan pagu anggaran Rp.83.384.000 dan realisasi Rp.67.393.050 atau 80,82%. Hasil dari kegiatan ini adalah terpilihnya pemenang I untuk kategori Kepala Sekolah dan Guru Berprestasi untuk mewakili Kabupaten Bintan dalam pemilihan Guru dan Kepala Sekolah berprestasi untuk tingkat Provinsi. Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan diikuti oleh 22 orang peserta dari guru dan kepala sekolah di Kabupaten Bintan. Juara I Tingkat SMA untuk kategori Kepala Sekolah adalah Drs.Sunaryono, M.Pd, Untuk Kategori Guru SMA Juara 1 adalah Iman Sabarullah, S.Pd, untuk Tingkat SMK adalah Mulyeni, S.Pi dan untuk Tingkat SMP Kategori Guru adalah Rahmawati Scorpiona, S.Pd, Untuk Kategori Tingkat SD adalah Listiyani, S.Pd.

- (3) Kegiatan Update data pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan dengan pagu anggaran Rp.71.672.798 dengan realisasi Rp.70.966.110 atau 99,01%. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pendataan pendidikan untuk jenjang TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK se Kabuapten Bintan. Hasil kegiatan ini adalah pencetakan sebuah dokumen profil pendidikan sebanyak 10 buku.
- (4) Kegiatan Pembiayaan Pengelolaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan dengan pagu anggaran Rp.61.402.000 dan realisasi keuangan Rp.59.373.200 atau 99,94%. Hasil kegiatan ini adalah terdapat 35 orang guru yang telah diterbitkan SK kenaikan pangkatnya periode April 2015 dan Oktober 2015 sebanyak 57.
- (5) Kegiatan Peningkatan Kemampuan Guru dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan dengan pagu anggaran Rp.202.579.000 dan realisasi sebesar Rp.197.287.900 atau 97,39%. Output kegiatan ini adalah terselenggaranya Seminar Pendidikan dan memperingati Hari Guru Nasional. Hasil Kegiatan ini adalah meningkatnya kompetensi guru dalam memahami fungsi dan perannya melalui seminar pendidikan. Kegiatan ini diikuti sebanyak 100 orang terdiri guru, dan pengurus PGRI di Kabupaten Bintan.
- (6) Kegiatan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan dengan pagu anggaran Rp.206.214.000,- dan realisasi sebesar Rp.201.179.000,- atau 99,56%. Output dari kegiatan ini adalah terselenggaranya peringatan Hari Pendidikan Nasional. Hasil kegiatan ini adalah terciptanya peserta didik yang dapat menghargai jasa para pendidik kegiatan ini diikuti oleh

siswa jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK dan guru di Kabupaten Bintan yang dilaksanakan di Kecamatan Bintan Timur, dan meningkatnya pengetahuan Komite Sekolah tentang tugas dan fungsinya yang diikuti sebanyak 20 orang melalui Lokakarya Komite Sekolah.

- (7) Kegiatan Informasi Pendidikan Kabupaten Bintan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan dengan pagu anggaran Rp.50.000.000 dan realisasi sebesar Rp.50.000.000 atau 100%. Hasil Kegiatan ini adalah terpenuhinya penyeberluasan informasi bidang pendidikan melalui publikasi media cetak, gallery foto, banner, tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran pentingnya pendidikan di Kabupaten Bintan secara merata baik perkotaan maupun pedesaan.

Dengan pencapaian indikator kinerja daerah sebagai berikut :

- 1) Untuk meningkatkan kualitas pendidik telah dilaksanakan Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, hingga tahun 2015 **Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV** telah meningkat hingga 79,73 dari 50,06% ditahun 2011 dan sudah melebihi target RPJMD.
- 2) **Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah menengah per 10.000 penduduk (Pendidikan Menengah)** juga telah melampaui target RPJMD 2010-2015 yaitu 34,67 poin dari yang ditargetkan sebesar 28 poin. Begitu juga untuk **Rasio ketersediaan Sekolah Dasar per penduduk usia sekolah menengah per 10.000 penduduk (Pendidikan Dasar)** juga sudah melampaui target yaitu 73,94 poin dari target yang ditetapkan sebesar 62,00.
- 3) **Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata** pada tahun 2015 mencapai sebesar 0,44.



- 4) Angka kelulusan** semua jenjang sekolah selama lima tahun terakhir menunjukkan angka yang tinggi dengan capaian pada tahun 2015 pada SD/MI 100, SMP/MTs 99,91%, dan SMA/MA/SMK 100%. Angka ini dari tahun ketahun menunjukkan peningkatan pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs DAN SMA/MA/SMK.

**b. Permasalahan dan Solusi**

**1) Permasalahan**

- a. Kebijakan pendistribusian Tenaga Pendidik yang tidak merata.
- b. Seluruh guru Non PNS/Guru Tidak Tetap (GTT) yang bertugas di sekolah negeri belum memenuhi persyaratan mengikuti proses sertifikasi guru dalam jabatan.

**2) Solusi**

- a. Kebijakan pendistribusian Tenaga Pendidik perlu tinjau ulang agar menyesuaikan dengan kebutuhan sekolah.
- b. Perlu kebijakan Pemerintah Daerah agar guru Non PNS yang bertugas di sekolah negeri agar peningkatan status dari Guru Tidak Tetap menjadi Guru Honor Daerah sehingga dapat mengikuti proses sertifikasi.

**6) Program Penyediaan dan Pemberdayaan Sekolah dan Prasarana Pendidikan Lain**

Program ini bertujuan untuk terwujudnya kebutuhan sarana dan prasarana Pendidikan dan pada disetiap satuan pendidikan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi :

**a. Pelaksanaan Program**

- (1) Kegiatan Pengadaan/sewa mobilitas bus sekolah oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan dengan pagu anggaran Rp.3.683.939.419 dan Realisasi Keuangan Rp.3.600.113.117 atau 97,72%. Hasil Kegiatan ini adalah tersedianya sarana transportasi darat sebanyak 17 unit bus, untuk transportasi siswa sekolah di Kecamatan Bintan Timur,

Toapaya, Teluk Bintan, Bintan Utara, Gunung Kijang, Seri Kuala Lobam dan Teluk Sebong, Bintan Pesisir, Tambelan.

- (2) Kegiatan Sewa Alat Transportasi Angkutan Laut Sekolah oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan dengan pagu anggaran Rp.1.440.850.000 dan Realisasi Keuangan Rp.1.391.075.000 atau 96,55%. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya sarana dan prasarana penunjang sekolah. Hasil Kegiatan ini adalah terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang sekolah melalui Sewa Alat Transportasi Angkutan Laut Sekolah sebanyak 17 unit pompong (speed boat) bagi siswa-siswa yang tinggal daerah hinterland.
- (3) Kegiatan Pembangunan rumah dinas guru SMKN 4 dan SMKN 1 dilaksanakan oleh Sekolah secara swakelola melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan pagu anggaran Rp.1.380.100.000 dan realisasi Rp.1.363.098.000 atau 98,77%. Hasil Kegiatan ini adalah Terpenuhinya Rumah Dinas Guru sebanyak 4 unit di SMKN 4 Bintan dan 2 Unit di SMKN 1 Bintan.
- (4) Kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas SMAN 5 dilaksanakan oleh Sekolah secara swakelola melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan pagu anggaran Rp.815.515.400 dan realisasi Rp.765.708.000 atau 93,89%. Hasil Kegiatan ini terehabilitasinya ruang kelas pendukung proses pembelajaran sebanyak 10 ruang kelas.
- (5) Kegiatan Pengadaan Buku Rapor SD dan SMP dilaksanakan se Kabupaten Bintan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan dengan pagu anggaran Rp.93.325.000 dan realisasi Rp.89.101.240 atau 95,47%. Hasil Kegiatan ini terpenuhinya buku rapor sebanyak 800 untuk siswa SD dan 474 siswa SMP.
- (6) Kegiatan Penyediaan Pemonudukan Mahasiswa dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan

dengan dari pagu anggaran Rp.217.169.200 dan Realisasi Keuangan Rp.212.235.450.000 atau 97,73%. Hasil Kegiatan ini adalah tersedianya sarana tempat tinggal atau pemondokan bagi mahasiswa-mahasiswa dari Kabupaten Bintan yang melanjutkan pendidikan di Padang, Pekanbaru, Semarang, Bandung dan Yogyakarta, Tanjungpinang.

- (7) Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA 3 dan SMA 7 Bintan dilaksanakan oleh Sekolah secara swakelola melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan pagu anggaran Rp.862.877.300 dan realisasi Rp.789.592.000 atau 91,51%. Ouput dari kegiatan ini adalah tersedianya sarana dan prasara sekolah. Hasil Kegiatan ini adalah terbangunnya Ruang Kelas Baru di SMAN 3 Bintan sebanyak 2 ruang kelas baru dan di SMAN 7 Bintan sebanyak 2 ruang kelas baru beserta meubiler.
- (8) Kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas SMKN 2 Bintan dilaksanakan oleh dilaksanakan oleh Sekolah secara swakelola melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan pagu anggaran Rp.154.700.000 dan realisasi Rp.144.977.000 atau 93,71%. Ouput dari kegiatan ini adalah tersedianya fasilitas penunjang pendidikan. Hasil Kegiatan ini adalah terpenuhinya rehabilitasi ruang kelas sebanyak 2 ruang kelas.
- (9) Kegiatan Penambahan Ruang Administrasi dan Perkantoran SMKN 4 Bintan dilaksanakan Sekolah secara swakelola melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan pagu anggaran Rp.667.400.000 dan realisasi Rp.592.975.000 atau 88,85%. Ouput dari kegiatan ini adalah tersedianya fasilitas penunjang. Hasil Kegiatan ini adalah terpenuhinya/terbangunnya ruang administrasi dan perkantoran sebanyak 1 gedung.
- (10) Kegiatan Peralatan Olahraga SMA Bintan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan pagu anggaran

Rp.115.000.000 dan realisasi Rp.114.678.763 atau 84,69%. Ouput dari kegiatan ini adalah tersedianya sarana dan prasarana untuk sekolah. Hasil Kegiatan ini adalah tersedianya peralatan olahraga untuk 5 sekolah yaitu SMAN 6 Binta, SMAN 8 Bintan, SMAN 7 Bintan, SMAN 5 Bintan dan SMAN 4 Bintan masing-masing mendapatkan 1 set .

- (11) Kegiatan Pengadaan Peralatan Lab. IPA dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan pagu anggaran Rp.363.000.000 dan realisasi Rp.345.394.000 atau 95,15%. Ouput dari kegiatan ini adalah tersedianya sarana dan prasarana untuk sekolah. Hasil Kegiatan ini adalah terpenuhinya sarana penunjang pendidikan melalui pengadaan peralatan laboratorium IPA untuk 3 sekolah yaitu SMAN 1 Bintan, SMAN 3 Bintan dan SMAN 4 Bintan masing-masing mendapatkan 1 paket.
- (12) Kegiatan Pembangunan Lab. Biologi dan Lab Kimia dilaksanakan oleh Sekolah secara swakelola melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan pagu anggaran Rp.717.677.300 dan realisasi Rp.629.592.000 atau 87,73%. Ouput dari kegiatan ini adalah tersedianya sarana dan prasarana sekolah. Hasil Kegiatan ini adalah terpenuhinya/terbangunnya laboratorium Biologi di SMAN 3 Bintan dan laboratorium kimia di SMAN 2 Bintan.
- (13) Kegiatan Pengadaan Buku Referensi dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan pagu anggaran Rp.33.000.000 dan realisasi Rp.30.000.000 atau 90,91%. Ouput dari kegiatan ini adalah tersedianya sarana dan prasarana sekolah. Hasil Kegiatan ini adalah terpenuhinya sarana buku referensi di perpustakaan sekolah di SMAN 1 Bintan.
- (14) Kegiatan Pengadaan Peralatan Praktek Siswa Bidang Keahlian Teknologi dan Rekayasa SMK Bintan dilaksanakan oleh Dinas

Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan pagu anggaran Rp.968.000.000 dan realisasi Rp.799.700.000 atau 82,61%. Ouput dari kegiatan ini adalah tersedianya fasilitas penunjang pendidikan. Hasil Kegiatan ini adalah terpenuhinya peralatan pembelajaran praktek bidang teknologi untuk siswa SMKN 1 Bintan, SMKN 2 Bintan, SMKN 3 Bintan dan SMKN 4 Bintan.

- (15) Kegiatan Pengadaan Peralatan Praktek Siswa Bidang Keahlian Non Teknologi dan Rekayasa SMK Bintan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan pagu anggaran Rp.484.000.000 dan realisasi Rp.399.632.200 atau 82,57%. Ouput dari kegiatan ini adalah tersedianya fasilitas penunjang pendidikan. Hasil Kegiatan ini adalah terpenuhinya peralatan pembelajaran praktek bidang non teknologi untuk siswa SMKN 2 dan SMKN 3 Bintan.
- (16) Kegiatan Pengadaan Peralatan Olahraga SMKN 1 Bintan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan pagu anggaran Rp.24.343.000 dan realisasi Rp.19.823.100 atau 81,43%. Ouput dari kegiatan ini adalah tersedianya fasilitas penunjang pendidikan. Hasil Kegiatan ini adalah terpenuhinya sarana penunjang pendidikan melalui pengadaan peralatan olahraga untuk SMKN 1 Bintan sebanyak 1 paket.
- (17) Kegiatan Pembangunan Ruang Praktek Siswa SMKN 3 Bintan dilaksanakan oleh Sekolah secara swakelola melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan pagu anggaran Rp.292.720.000 dan realisasi Rp.287.716.000 atau 98,29%. Ouput dari kegiatan ini adalah tersedianya fasilita penunjang pendidikan. Hasil Kegiatan ini adalah terpenuhinya/terbangunnya ruang praktek siswa sebanyak 1 gedung di SMKN 3 Bintan.

- (18) Kegiatan Pengadaan Penerangan Listrik Sekolah (Penambahan Daya dan Instalasi Listrik) dan Pengadaan Mesin PhotoCopy SMKN 3 Bintan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan dengan pagu anggaran Rp.61.280.500 dan realisasi Rp.59.841.853 atau 97,65%. Ouput dari kegiatan ini adalah tersedianya daya listrik dan mesin foto copy di sekolah. Hasil Kegiatan ini adalah terpenuhinya penambahan daya listrik dan sarana mesin foto copy sebanyak 1 unit.
- (19) Kegiatan Pengadaan Buku Kurikulum 2013 Semester II SD/MI Tahun Pembelajaran 2014/2015 dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan dengan pagu anggaran Rp.143.655.785 dan realisasi Rp.142.492.950 atau 99,19%. Ouput dari kegiatan ini adalah tersedianya buku kurikulum 2013 untuk Sekolah Dasar. Hasil Kegiatan ini adalah terpenuhinya buku kurikulum 2013 sebagai fasilitas bahan ajar untuk 11.160 buku untuk siswa kelas 1, kelas 2, kelas 4 dan kelas 5.
- (20) Kegiatan Pengadaan Buku Kurikulum 2013 Semester II SMP/MTs Tahun Pelajaran 2014/2015 dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan dengan pagu anggaran Rp.98.589.329 dan realisasi Rp.15.326.000 atau 15,55%. Ouput dari kegiatan ini adalah tersedianya buku kurikulum 2013 untuk SMP. Hasil Kegiatan ini adalah berdasarkan hasil konsultasi dan surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no 179342/MPK/KR/2014 tentang Pelaksanaan Kurikulum 2013, dimana pada point 2 menyebutkan bahwa tetap menerapkan Kurikulum 2013 bagi sekolah-sekolah yang tiga semester sudah menerapkan, karena di Kabupaten Bintan hanya 3 sekolah yang menerapkan Kurikulum 2013 dan ketidakmampuan pihak 3 untuk

mensuplai buku, maka untuk belanja modal buku Kurikulum 2013 tidak dilaksanakan.

- (21) Kegiatan Pengadaan Kurikulum 2013 SMA dan SMK dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan dengan pagu anggaran Rp.118.274.245 dan realisasi Rp.104.344.661 atau 88,22%. Ouput dari kegiatan ini adalah tersedianya buku kurikulum 2013 bagi siswa dan guru. Hasil Kegiatan ini adalah terpenuhinya buku kurikulum 2013 untuk siswa dan buku pegangan guru sebanyak 9.162 buku untuk SMAN 1 Bintan, SMKN 1 Bintan dan SMKN 2 Bintan.
- (22) Kegiatan Operasional DAK Tingkat SMP dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan dengan pagu anggaran Rp.74.600.000 dan realisasi Rp.50.702.350 atau 67,97%. Ouput dari kegiatan ini adalah terlaksananya proses kegiatan Dana Alokasi Khusus untuk tingkat SMP di Kabupaten Bintan. Hasil Kegiatan ini adalah terlaksananya koordinasi, konsultasi, monitoring dan evaluasi kegiatan Dana Alokasi Khusus untuk SMP Negeri Se Kabupaten Bintan.
- (23) Kegiatan Operasional DAK SMA dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan dengan pagu anggaran Rp.69.000.000 dan realisasi Rp.67.905.650 atau 98,41%. Ouput dari kegiatan ini adalah terlaksananya proses kegiatan Dana Alokasi Khusus untuk tingkat SMA di Kabupaten Bintan. Hasil Kegiatan ini adalah terlaksananya koordinasi, konsultasi, monitoring dan evaluasi kegiatan Dana Alokasi Khusus untuk SMA Negeri Se Kabupaten Bintan.
- (24) Kegiatan Operasional DAK SMK dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan dengan pagu anggaran Rp.121.500.000 dan realisasi Rp.107.025.500 atau 88,09%. Ouput dari kegiatan ini adalah terlaksananya proses kegiatan Dana Alokasi Khusus untuk tingkat SMK di

Kabupaten Bintan. Hasil Kegiatan ini adalah terlaksananya koordinasi, konsultasi, monitoring dan evaluasi kegiatan Dana Alokasi Khusus untuk SMK Negeri Se Kabupaten Bintan.

- (25) Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN Bintan dilaksanakan oleh Sekolah secara swakelola melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan pagu anggaran Rp.1.713.512.000 dan realisasi Rp.1.713.483.500 atau 99,99%. Ouput dari kegiatan ini adalah tersedianya fasilitas ruang kelas baru untuk SMPN Bintan. Hasil Kegiatan ini adalah terpenuhinya fasilitas ruang kelas baru berserta meubiler untuk SMPN Bintan sebanyak 10 ruang kelas baru terdiri dari 2 Ruang kelas Baru di SMPN 4 Bintan, 3 Ruang Kelas Baru di SMPN 13 Bintan, 1 Ruang Kelas Baru di SMPN 21, 1 Ruang Kelas Baru di SMPN 9 Bintan, 2 Ruang kelas Baru di SMPN 24 Bintan dan 1 Ruang Kelas Baru di SMPN 26 Bintan.
- (26) Kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN Bintan dilaksanakan oleh Sekolah secara swakelola melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan pagu anggaran Rp.1.399.839.088 dan realisasi Rp.1.394.935.000 atau 99,65 Ouput dari kegiatan ini adalah tersedianya fasilitas ruang kelas baru untuk SMPN Bintan. Hasil Kegiatan ini adalah terpenuhinya rehabilitasi ruang kelas sebanyak 30 beserta meubiler untuk SMPN 1 Bintan, SMPN 2, SMPN 3 Bintan, SMPN 5 Bintan, SMPN 6 Bintan, SMPN 7 Bintan, SMPN 8 Bintan, SMPN 15 Bintan, SMPN 17 Bintan dan SMPN 18 Bintan.
- (27) Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas SMPN 8 Bintan dilaksanakan oleh Sekolah secara swakelola melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan pagu anggaran Rp.89.400.000 dan realisasi Rp.89.391.500 atau 99,99%. Ouput dari kegiatan ini adalah tersedianya fasilitas rumah dinas guru di SMPN 8 Bintan. Hasil Kegiatan ini adalah terpenuhinya rumah dinas guru di SMPN 8 Bintan sebanyak 1 Pintu.



- (28) Kegiatan Pengadaan Alat Pembelajaran SMPN Bintan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan pagu anggaran Rp.869.417.312 dan realisasi Rp.766.205.000 atau 88,13%. Ouput dari kegiatan ini adalah tersedianya fasilitas alat pembelajaran SMPN Bintan. Hasil Kegiatan ini adalah terpenuhinya alat pembelajaran IPA sebanyak 16 set, Untuk 8 sekolah yaitu SMPN 10 Bintan, SMPN 12 Bintan, SMPN 14 Bintan, SMPN 16 Bintan, SMPN 18 Bintan, SMPN 19 Bintan, SMPN 23 Bintan, SMPN 27 Bintan. Masing-masing mendapatkan peralatan Lab IPA dan Lab Biologi.
- (29) Kegiatan Pembangunan Ruang Majelis Guru SMPN 26 Bintan dilaksanakan oleh Sekolah secara swakelola melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan pagu anggaran Rp 412.969.600 dan realisasi Rp.343.625.000 atau 83,21%. Ouput dari kegiatan ini adalah tersedianya fasilitas majelis guru di SMPN 26 Bintan. Hasil Kegiatan ini adalah terpenuhinya ruang majelis guru di SMPN 26 Bintan sebanyak 1 unit.
- (30) Kegiatan Operasional DAK SD dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan dengan pagu anggaran Rp.153.582.600 dan realisasi Rp.128.451.375 atau 83,64%. Ouput dari kegiatan ini adalah terlaksananya proses kegiatan Dana Alokasi Khusus untuk tingkat SD di Kabupaten Bintan. Hasil Kegiatan ini adalah terlaksananya koordinasi, konsultasi, monitoring dan evaluasi kegiatan Dana Alokasi Khusus untuk SD Negeri Se Kabupaten Bintan.
- (31) Kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas Baru SDN Bintan dilaksanakan oleh Sekolah secara swakelola melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan pagu anggaran Rp.2.062.679.430 dan realisasi Rp.2.026.685.000 atau 98,25%. Ouput dari kegiatan ini adalah tersedianya fasilitas ruang kelas untuk SDN di Kabupaten Bintan.

Hasil Kegiatan ini adalah terpenuhinya rehabilitasi ruang kelas beserta meubiler untuk Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Bintan sebanyak 43 ruang kelas dengan rincian SDN 002 Bintan Utara Unit kelas, SDN 006 Bintan Utara 2 unit, SDN 012 Bintan Timur 2 unit, SDN 003 Mantang 2 unit, SDN 006 Toapaya 3 unit, SDN 004 Teluk Sebong 3 unit, SDN 006 Teluk Sebong 2 unit, SDN 008 Teluk Sebong 3 unit, SDN 001 Seri Kuala Lobam 3 unit, SDN 006 Teluk Bintan 3 unit, SDN 007 Teluk Bintan 2 unit, SDN 013 Teluk Bintan 3 unit, SDN 014 Teluk Bintan 2 unit, SDN 008 Gunung Kijang 1 unit, SDN 001 Toapaya 3 unit, SDN 002 Mantang unit.

- (32) Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi Ruang Kantor dan Majelis Guru SDN 002 Mantang dilaksanakan oleh Sekolah secara swakelola melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan pagu anggaran Rp.136.873.970 dan realisasi Rp.98.921.000 atau 72,27%. Ouput dari kegiatan ini adalah tersedianya fasilitas rehabiliasi ruang majelis guru dan kantor di SDN 002 Mantang. Hasil Kegiatan ini adalah terpenuhinya rehabilitasi ruang majelis guru dan kantor 1 unit.
- (33) Kegiatan Pembangunan Ruang Majelis Guru SDN Bintan dilaksanakan oleh Sekolah secara swakelola Dana Alokasi Khusus (DAK) melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan pagu anggaran Rp.1.293.532.000 dan realisasi Rp.1.085.479.000 atau 83,92%. Ouput dari kegiatan ini adalah tersedianya fasilitas ruang majelis guru SDN di Kabupaten Bintan. Hasil Kegiatan ini adalah terpenuhinya ruang majelis guru untuk SDN 012 Bintan Timur, SDN 011 Teluk Bintan, SDN 001 Toapaya masing-masing 1 unit.
- (34) Kegiatan Pembangunan Jamban SDN 001 Gunung Kijang dilaksanakan oleh Sekolah secara swakelola melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan pagu anggaran Rp.277.344.000 dan

realisasi Rp.65.211.696 atau 23,51%. Ouput dari kegiatan ini adalah tersedianya jamban untuk siswa SDN 001 Gunung Kijang. Hasil Kegiatan ini adalah terpenuhinya jamban siswa sebanyak 1 unit ( 4 pintu ).

- (35) Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas SDN 002 Mantang dilaksanakan oleh Sekolah secara swakelola melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan pagu anggaran Rp.184.896.000 dan realisasi Rp.184.856.000 atau 99,98%. Ouput dari kegiatan ini adalah tersedianya fasilitas rumah dinas guru. Hasil Kegiatan ini adalah terpenuhinya rumah dinas guru untuk SDN 002 Mantang sebanyak 1 unit (2 Pintu).
- (36) Kegiatan Pengadaan Alat Pembelajaran SDN Bintang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintang melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan pagu anggaran Rp.2.051.525.000 dan realisasi Rp.159.853.829 atau 70,21%. Ouput dari kegiatan ini adalah tersedianya alat pembelajaran untuk SDN di kabupaten Bintang. Hasil Kegiatan ini adalah terpenuhinya alat pembelajaran untuk SD Negeri se Kabupaten Bintang terdiri dari Alat Peraga Matematika sebanyak 90 set dan 65 set Alat Olahraga yang diperuntukkan bagi Sekolah Dasar Negeri Se Kabupaten Bintang. Namun alat olahraga tidak dilaksanakan karena gagal pelelangan.
- (37) Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN Bintang dilaksanakan oleh Sekolah secara swakelola melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan pagu anggaran Rp.4.487.832.000 dan realisasi Rp.4.311.963.720 atau 96,08%. Ouput dari kegiatan ini adalah tersedianya Ruang Kelas Baru untuk SD Negeri di Kabupaten Bintang. Hasil Kegiatan ini adalah terpenuhinya Ruang Kelas Baru untuk siswa SD Negeri di Kabupaten Bintang sebanyak 30 ruang kelas baru dengan rincian SDN 007 Bintang Utara 2 unit, SDN 009 Bintang Utara 2 unit, SDN 002 Teluk Sebong 2 unit, SDN

002 Teluk Bintang 1 unit, SDN 001 Toapaya 2 unit, SDN 004 Toapaya 4 unit, SDN 001 Bintang Timur 2 unit, SDN 010 Bintang Timur 2 unit, SDN 015 Bintang Timur 2 unit, SDN 017 Bintang Timur 3 Unit, SDN 008 Toapaya 2 unit, SDN 007 Teluk Sebong 2 unit, SDN 007 Gunung Kijang 2 unit, SDN 003 Bintang Utara 2 unit. Namun yang selesai 100% dikerjakan sebanyak 26 Ruang Kelas Baru dan 4 Ruang Kelas Baru tidak selesai dikerjakan yaitu di SDN 004 Toapaya dengan progres fisik pekerjaan 70%.

- (38) Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMKN 3 dan SMKN 2 Bintang dilaksanakan Sekolah secara swakelola melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan pagu anggaran Rp.787.060.000 dan realisasi Rp.779.515.000 atau 99,04%. Ouput dari kegiatan ini adalah tersedianya fasilitas penunjang pendidikan. Hasil Kegiatan ini adalah terpenuhinya/terbangunnya ruang kelas baru sebanyak 4 ruang kelas yaitu 2 ruang kelas di SMKN 3 Bintang dan 2 ruang kelas di SMKN 2 Bintang.
- (39) Kegiatan Pengadaan Tralis SMA Se- Kabupaten Bintang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintang dengan pagu anggaran Rp.247.978.935 dan realisasi Rp.246.236.450 atau 99,30%. Ouput dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengadaan teralis SMA. Hasil Kegiatan ini adalah terpenuhinya keamanan sarana belajar di dalam ruangan SMAN 2 Bintang dan SMAN 3 Bintang.
- (40) Kegiatan Pengadaan Tralis SMK Se- Kabupaten Bintang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintang dengan pagu anggaran Rp.227.688.935 dan realisasi Rp.159.853.829 atau 70,21%. Ouput dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengadaan teralis SMK. Hasil Kegiatan ini adalah terpenuhinya keamanan sarana belajar di dalam ruangan SMKN 1 Bintang dan SMKN 4 Bintang.

- (41) Kegiatan Pengadaan Laptop dan Proyektor SMA/MA/SMK dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan dengan dari pagu anggaran Rp.220.240.000 dan realisasi Rp.219.747.600 atau 99,78%. Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya sarana dan prasarana berupa 20 laptop dan 2 proyektor di SMKN 4 Bintan.
- (42) Kegiatan Pengadaan Tower dan Jaringan Internet SMKN 3 dan SMKN 4 Bintan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan dengan dari pagu anggaran Rp.158.500.000 dan realisasi Rp.155.618.394 atau 98,18%. Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya sarana Informasi dan Teknologi berupa pengadaan tower dan jaringan internet di SMKN 3 Bintan dan SMKN 4 Bintan.
- (43) Kegiatan Pengadaan Hand Traktor dan Penampungan Air Bersih SMKN 3 Bintan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan dengan dari pagu anggaran Rp.168.3355.000 dan realisasi Rp.112.496.450 atau 66,83%. Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya Hand Traktor sebagai alat praktek memabajak tanah bagi siswa agro bisnis dan holtikultura sebanyak 2 unit.
- (44) Kegiatan Pengadaan Tralis SMPN 11 Bintan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan dengan dari pagu anggaran Rp.87.490.000 dan realisasi Rp.86.696.774 atau 99,09%. Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya fasilitas teralis di ruang majelis guru.
- (45) Kegiatan Pembangunan Baru Miring SMPN 11 Bintan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan dengan dari pagu anggaran Rp.145.380.000 dan realisasi Rp.144.456.850 atau 99,37%. Hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya penimbunah tanah dan pembangunan batu miring untuk SMPN 11 Bintan sepanjang 75 M2.

- (46) Kegiatan Rehabilitasi Rumah Guru SMPN 8 Bintan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan dengan dari pagu anggaran Rp.183.560.000 dan realisasi Rp.175.621.970 atau 95,68%. Hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya rehabilitasi rumah dinas guru SMPN 8 Bintan sebanyak 1 unit.
- (47) Kegiatan Pembangunan Parkir SMPN 11 Bintan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan dengan dari pagu anggaran Rp.87.490.000 dan realisasi Rp.86.696.774 atau 99,09%. Hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya sarana parkir kendaraan bermotor untuk SMPN 11 Bintan sepanjang 100M2.
- (48) Kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 014 Teluk Bintan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan dengan dari pagu anggaran Rp.58.920.000 dan realisasi Rp.58.876.315 atau 99,93%. Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya rehabilitasi ruang kelas sebanyak 1 unit untuk SDN 014 Teluk Bintan.
- (49) Kegiatan Pembangunan Pagar SDN 007 Seri Kuala Lobam dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan dengan dari pagu anggaran Rp.215.950.000 dan realisasi Rp.215.750.725 atau 99,91%. Hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya pembangunan pagar sekolah sebagai sarana keamanan sepanjang 460M2.
- (50) Kegiatan Pembangunan Pagar SDN 018 Bintan Timur dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan dengan dari pagu anggaran Rp.139.280.000 dan realisasi Rp.139.236.350 atau 99,97%. Hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya pembangunan pagar sekolah sebagai sarana keamanan sepanjang 322,50 M2.

Dengan pencapaian indikator kinerja daerah sebagai berikut :

- 1) Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah dasar per 10.000 penduduk (Pendidikan Dasar);** Pada tahun 2015 rasio ini meningkat sebanyak 8,15% menjadi 73,94% dari 65,79%. Angka ini sudah melebihi target RPJMD yang ingin dicapai.
- 2) Dalam mengantisipasi perkembangan iptek yang telah merambah disegala bidang, Pemerintah Kabupaten Bintan juga sangat memperhatikan sektor pendidikan yaitu dengan upaya peningkatan sarana dan prasarana iptek khususnya di sekolah-sekolah di Kabupaten Bintan. Hingga tahun 2015 Persentase SD-SMP yang memiliki komputer yang bisa digunakan siswa untuk akses internet melalui komputer telah mencapai 87,20% dibanding tahun 2010 baru mencapai 73%.**
- 3) Rasio guru per murid SD/MI (Pendidikan Dasar)** dari tahun 2011 hingga 2014 telah sesuai dengan target 1:13, namun pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 1:14, ini menunjukkan bahwa pada jenjang SD/MI masih kekurangan guru. Sementara Rasio guru per murid SLTP (Pendidikan Dasar) sejak tahun 2011 hingga 2015 juga telah sesuai dengan target 1:12, begitu juga Rasio guru per murid SLTA (Pendidikan Menengah) mencapai 1:11.

#### **b. Permasalahan dan Solusi**

##### **1) Permasalahan**

- a. Masih kurangnya sarana transportasi darat untuk menjemput dan mengantar siswa ke sekolah. Pada saat ini transportasi darat yang tersedia sebanyak 17 unit bus dengan rute 8 kecamatan (Toapaya 3 unit, Teluk Bintan 3 Unit, Teluk Sebong 2 unit, Bintan Utara 2 Unit, Seri Kuala Lobam 1 Unit, Bintan Timur 3 Unit, Tambelan 2 Unit mini bus, Bintan Pesisir 1 Unit) sementara dibutuhkan 18 unit bus sekolah.
- b. Ketersediaan Alat Praktek pada sekolah Sekolah Kejuruan masih sangat minim.

- c. Masih kurangnya sarana transportasi laut untuk menjemput dan mengantar siswa ke sekolah. Pada saat ini transportasi laut yang tersedia sebanyak 16 unit pompong dengan rute 5 kecamatan sementara dibutuhkan 20 unit pompong.
- d. Masih kurangnya sarana pembelajaran seperti Ruang Kelas Baru untuk SMAN 8 Bintang 3 RKB, SMAN 6 Bintang 2 RKB, SMKN 3 Bintang 1 RKB, SMAN 1 Bintang 2 RKB 1 Perpustakaan, 1 labor IPA, SMAN 6 2 RKB, perpustakaan SMAN 8 Bintang dan SMAN 7 Bintang masing-masing 1 unit, Laboratorium IPA SMAN 4 dan SMAN 8 Bintang masing-masing 1 unit, ruang pertemuan dan batu miring SMAN 1 Bintang, gudang penyimpanan alat praktek siswa SMKN 3 Bintang.
- e. Ketersediaan meja dan kursi baik siswa maupun guru pada jenjang Sekolah Dasar masih sangat minim, begitu juga dengan kebutuhan MCK.
- f. Ketersediaan bahan bacaan perpustakaan dan buku referensi masih sangat minim.
- g. Keterlambatan penyelesaian pembangunan ruang kelas baru sebanyak 4 unit melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan progres fisik 70% dikarenakan :
  - Juknis dan Juklak DAK Pendidikan 2015 diterima di akhir bulan MEI 2015.
  - Sehubungan teknis dan pelaksanaan pekerjaan mengacu pada Juknis dan Juklak, maka bertitik tolak dari itulah, proses perencanaan, dalam hal ini Sosialisasi kepada sekolah penyusunan gambar, perhitungan Reencana Anggaran Biaya oleh konsultan serta kesiapan sekolah untuk bekerja cukup memakan waktu
  - RKB di SDN 004 Toapaya ini sebanyak 4 Lokal bertingkat (RKB 2 Lantai), sehingga waktu yang dibutuhkan berbeda dengan pekerjaan RKB 1 Lantai.



- Karna berdasarkan hasil pengawasan dari konsultan Pengawas bahwa progres penyelesaian sangat rendah, yaitu baru (41%), maka untuk realisasi berikutnya dari DPPKD tidak menyetujui untuk dicairkan langsung hingga 100%, namun hanya hingga tahap ke 2 yaitu 70%. Hal ini juga dikarenakan waktu sudah tidak memungkinkan lagi.

## **2) Solusi**

- a. Perlu penambahan transportasi darat sebanyak 1 unit bus untuk menjemput dan mengantar siswa yang berada di Kecamatan Teluk Bintan.
- b. Perlu penambahan alat praktek pada Sekolah Kejuruan
- c. Perlu penambahan transportasi laut untuk menjemput dan mengantar siswa yang berada di Desa Mantang 1 Unit, Desa Numbing 2 Unit, Pangkil 1 Unit.
- d. Perlu penambahan ruang kelas baru, ruang perpustakaan, laboratorium IPA, ruang pertemuan dan gudang.
- e. Perlu penambahan meja dan kursi siswa beserta guru, serta penambahan dan perbaikan MCK.
- f. Perlu adanya penambahan bahan bacaan perpustakaan untuk guru dan siswa begitu juga buku referensi untuk guru.
- g. Untuk kekurangan dari 100% akan dianggarkan pada APBD Perubahan 2016.

## **7) Program Pembentukan Sekolah Menengah Kejuruan/ Pendidikan Tinggi Penunjang Sektor - sektor Unggulan**

### **a. Pelaksanaan Program**

Program ini bertujuan untuk terwujudnya mutu pendidikan menengah yang berbasis kompetensi.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:

- (1) Kegiatan Penyediaan Beasiswa Bagi Pendidikan Tinggi oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan dengan pagu anggaran Rp.812.000.000 dan Realisasi Keuangan

Rp.784.000.000 atau 98,00%. Hasil kegiatan ini adalah tersedianya tenaga terlatih bidang pariwisata dalam mendukung sektor pariwisata melalui pemberian beasiswa sebanyak untuk 58 orang, namun terealisasi 56 orang masing-masing sebesar Rp.14.000.000,- per siswa untuk melanjutkan pendidikan ke Sekolah Tinggi Pariwisata Bintan. Hanya 2 (dua) orang yang tidak diberi bantuan Dengan alasan mengundurkan diri.

- (2) Kegiatan Penyediaan Beasiswa Mahasiswa Berprestasi oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan dengan pagu anggaran Rp.99.062.000 dan Realisasi Keuangan Rp.50.937.300 atau 51,42%. Hasil kegiatan ini adalah tersedianya tenaga pendidik yang handal di Kabuapten sebanyak 5 orang. Namun yang terealisasi hanya 2 orang yaitu untuk melanjutkan pendidikan ke Universitas Negeri Padang dan Univeritas Islam Negeri Syarif Hidayatullah masing-masing sebesar Rp.15.000.000,- per siswa.

#### **b. Permasalahan dan Solusi**

Dalam pelaksanaan program pembentukan sekolah menengah kejuruan/pendidikan tinggi penunjang sektor - sektor unggulan tidak ada kendala serta permasalahan sehingga program dapat dilaksanakan sesuai rencana.

### **8) Program Kejar Paket**

Program ini bertujuan untuk terwujudnya pemerataan kesempatan dan peningkatan mutu penyelenggaraan program pendidikan non formal. Dengan usaha memberikan layanan pendidikan baik untuk laki-laki maupun perempuan sebagai pengganti, penambah dan/atau pelengkap pendidikan formal guna mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan non-formal meliputi pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan untuk penduduk dewasa,

pendidikan keluarga, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik secara lebih luas dan bervariasi. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:

**a. Pelaksanaan Program**

- (1) Kegiatan Penyelenggaraan Kelompok Belajar (Pokjar) Paket A dan Paket B oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan dengan pagu anggaran Rp92.080.000 dan realisasi Rp.81.493.050 atau 88,50%. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk penyediaan modul pembelajaran untuk Kelompok Belajar Paket A dan Paket B. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas proses belajar mengajar pada pendidikan kesetaraan melalui pelatihan Tutor Paket A dan Paket B yang diikuti sebanyak 6 Kelompok.
- (2) Kegiatan Penyelenggaraan Paket C setara SMA oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan dengan pagu anggaran Rp.92.440.000 dan realisasi Rp.90.304.920 atau 97,69. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk penyediaan modul pembelajaran untuk Kelompok Belajar Paket C. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas proses belajar mengajar pada pendidikan kesetaraan melalui pelatihan Tutor Paket C yang diikuti sebanyak 7 Kelompok.
- (3) Kegiatan Penyelenggaraan Keaksaraan Fungsional (KF) oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan dengan pagu anggaran Rp.179.000.000 dan realisasi Rp.174.247.375 atau 96,92%. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pendidikan bagi 350 warga belajar yang dibagi dalam 35 kelompok setiap kelompok terdiri dari 10 orang yang dilaksanakan selama 6 bulan. Hasil dari kegiatan ini adalah berkurangnya tingkat buta aksara di Kabupaten Bintan sebanyak 350 orang.

- (4) Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Paket A, Paket B dan Paket C oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan dengan dengan pagu anggaran Rp.97.325.000 dan realisasi Rp.97.197.580 atau 100%. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk monitoring Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan. Hasil Kegiatan adalah terlaksananya pemantauan dan pelaksanaan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) di 5 lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang melaksanakan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket A, 11 Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Paket B dan 13 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Lembaga Paket C.

**b. Permasalahan dan Solusi**

**1)Permasalahan**

- a) Kurangnya pengembangan Life Skill untuk warga belajar agar kualitas lulusan dari Paket A,B dan C setara dengan sekolah Formal.
- b) Tidak adanya tutor tetap yang memiliki latar belakang pendidikan keguruan khususnya pada matapelajaran IPA dan Bahasa Inggris.
- c) Usaha peningkatan kemampuan tutor yang tidak merata.
- d) Belum tersedianya ruang belajar oleh sebagian besar Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
- e) Jumlah modul dan bahan ajar yang sangat minim.

**2)Solusi**

- a) Perlu diadakannya kegiatan Life Skill untuk mendukung kecakapan dan kemampuan individu agar lebih kompetitif.
- b) Melakukan perekrutan tenaga tutor tetap yang memiliki latar belakang yang sesuai dengan disiplin ilmu dan diberikan insentif oleh Pemerintah Daerah.

- c) Peningkatan kemampuan tutor melalui Kegiatan Pelatihan Kompetensi Tutor Paket bagi yang belum pernah mengikuti.
- d) Penekanan kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang menerima bantuan dari dana APBN untuk menyediakan ruang belajar yang memadai.
- e) Penambahan modul dan bahan ajar sebagai bahan pengayaan materi dalam proses pembelajaran.

#### **4.1.2. Urusan Kesehatan**

Pencapaian indikator kinerja daerah pada **Misi Satu** terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Bintan untuk urusan Kesehatan adalah sebagai berikut : Angka Kelangsungan Hidup Bayi **99%**; Persentase balita gizi buruk **0,21%**; Angka Usia Harapan Hidup **69,99 Tahun**; Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup **226**; Persentase pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan **96.4%**; Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup **10,3**; Persentase balita gizi kurang **2,57%**; Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan **100%**; Cakupan kunjungan bayi **85,75%**; Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani **100%**; Angka kematian balita **1,9**; Cakupan pelayanan Ibu Nifas **95,1%**; Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 **95.4%**; Cakupan Pelayanan Anak Balita (minimal 8 kali) **71%**; Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani **100%**; Persentase anak di bawah satu tahun yang diimunisasi campak **97,2%**; Anak usia 12-23 bulan yang diimunisasi campak **100%**; Persentase desa/kel yang terkena KLB dilaksanakan penyelidikan epidemiologi < 24 jam **100%**; Persentase desa yang mencapai UCI **100%**; Persentase kasus TB paru (BTA positif) yang ditangani **100%**; Persentase kasus DBD yang ditangani **100%**; Prevalensi malaria dan angka kematiannya **0.06/0**; Angka penemuan penderita tuberkulosis BTA positif baru. **41.3%**; Prevalensi tuberkulosis dan angka kematian penderita tuberkulosis dengan sebab apa pun selama pengobatan OAT per 100.000 penduduk **95/2,6**; Prevalensi HIV/AIDS **0,03 %**; Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih **89,2**; Rasio Posyandu per 1000 balita **11,7**; Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per 100.000 penduduk **75,15**; Rasio rumah sakit per

100.000 penduduk **1,31**; Cakupan puskesmas. **150%**; Cakupan pembantu puskesmas **168,63.0%**; Rasio dokter per 100.000 penduduk **56,2**; Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin **100%**; Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin **100%**; Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota **100%**; **Persentase Desa Siaga Aktif. 100%**; Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat **100%**.

Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

## **1) Program Upaya Kesehatan Masyarakat**

### **a. Pelaksanaan Program**

- (1) Kegiatan Operasional UPTD Puskesmas Kijang dan Jaringannya dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.279.645.000,- realisasi sebesar Rp.254.715.565,- atau 91.09%. Hasil kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas melalui kegiatan operasional UPTD Puskesmas Kijang dan Jaringannya berupa : pembayaran listrik, telepon/internet, air, surat kabar, Bahan Bakar Minyak (BBM), alat tulis kantor. Tersedianya 1 unit brankas, 2 unit laptop, 3 unit alat pendingin, 2 unit meubelair dan alat kedokteran umum.
- (2) Kegiatan Operasional UPTD Puskesmas Kelong dan Jaringannya dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.279.645.000,- realisasi sebesar Rp.250.635.898,- atau 89.63%. Hasil kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas melalui kegiatan operasional UPTD Puskesmas Kelong dan Jaringannya berupa : pembayaran listrik, telepon/internet, air, cetak, penggandaan. Tersedianyan 2 unit laptop, 1 unit printer, 1 unit lemari dan 3 unit *Air Conditioner*.

- (3) Kegiatan Operasional UPTD Puskesmas Mantang dan Jaringannya dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.293.220.000,- realisasi sebesar Rp.292.675.397,- atau 99.81%. Hasil kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas melalui kegiatan operasional UPTD Puskesmas Mantang dan Jaringannya berupa : pembayaran honorarium panitia pelaksanaan kegiatan, listrik, telepon/internet, air, cetak, penggandaan. Tersedianya makan minum rapat, 1 unit lemari, 1 unit rumah incinerator.
- (4) Kegiatan Operasional UPTD Puskesmas Toapaya dan Jaringannya dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.217.200.000,- realisasi sebesar Rp.214.798.050,- atau 98.89%. Hasil kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas melalui kegiatan operasional UPTD Puskesmas Toapaya dan Jaringannya berupa : pembayaran listrik, telepon/internet, air, pajak kendaraan dinas, cetak, penggandaan. Tersedianya alat tulis kantor, bahan bakar minyak (BBM), 1 unit filling besi metal, 1 unit meubelair, 1 unit alat pendingin, 1 unit computer, 1 unit printer dan 1 unit rumah incenerator.
- (5) Kegiatan Operasional UPTD Puskesmas Kawal dan Jaringannya dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.293.220.000,- realisasi sebesar Rp.289.943.474,- atau 98.88%. Hasil kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas melalui kegiatan operasional UPTD Puskesmas Kawal dan Jaringannya berupa : pembayaran listrik, telepon/internet, air, pajak kendaraan dinas, cetak, penggandaan, bahan bakar minyak. Tersedianya 1 unit lemari dan personal computer.

- (6) Kegiatan UPTD Operasional Puskesmas Teluk Bintan dan Jaringannya dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.218.670.625,- realisasi sebesar Rp.218.235.442,- atau 99.8%. Hasil kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas melalui kegiatan operasional UPTD Puskesmas Teluk Bintan dan Jaringannya berupa : pembayaran listrik, telepon/internet, air, bahan bakar minyak, cetak, penggandaan, jasa TV kabel. Tersedianya personal komputer, printer, lemari dan mebeulair.
- (7) Kegiatan Operasional Puskesmas Teluk Sebong dan Jaringannya dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.217.200.000,- realisasi sebesar Rp.214.409.273,- atau 98.72%. Hasil kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas melalui kegiatan operasional UPTD Puskesmas Teluk Sebong dan Jaringannya berupa : pembayaran honorarium panitia pelaksana kegiatan, listrik, telepon/internet, air, bahan bakar minyak, cetak, penggandaan, majalah, pajak kendaraan dinas. Tersedianya 1 unit komputer/notebook, printer, ups, rumah incenerator.
- (8) Kegiatan Operasional UPTD Puskesmas Teluk Sasah dan Jaringannya dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.217.200.000,- realisasi sebesar Rp.213.830.940,- atau 98.45%. Hasil kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas melalui kegiatan operasional UPTD Puskesmas Teluk Sasah dan Jaringannya berupa : pembayaran listrik, telepon/internet, air, pembelian alat tulis kantor, bahan bakar minyak, alat kedokteran umum, 1 unit Alat pendingin (AC), 2 unit mebeulair, 2 unit loker, 1 unit komputer/notebook.



- (9) Kegiatan Operasional UPTD Puskesmas Tanjung Uban dan Jaringannya dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.293.220.000,- realisasi sebesar Rp.292.464.690,- atau 99.74%. Hasil kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas melalui kegiatan operasional UPTD Puskesmas Tanjung Uban dan Jaringannya berupa : pembelian alat tulis kantor, bahan bakar minyak dan gas, cetak, penggandaan.
- (10) Kegiatan Operasional UPTD Puskesmas Tambelan dan Jaringannya dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.327.157.500,- realisasi sebesar Rp.324.272.809,- atau 99.12%. Hasil kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas melalui kegiatan operasional UPTD Puskesmas Tambelan dan Jaringannya berupa : pembayaran listrik, telepon/internet, air, jasa TV kabel, pembelian almari, printer.
- (11) Kegiatan Operasional UPTD Puskesmas Berakit dan Jaringannya dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.186.792.000,- realisasi sebesar Rp.180.643.449,- atau 96.71%. Hasil kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas melalui kegiatan operasional Puskesmas Berakit dan Jaringannya berupa : pembayaran listrik, telepon/internet, air, majalah, pembelian komputer, mebeulair, lemari.
- (12) Kegiatan Operasional UPTD Puskesmas Sri Bintan dan Jaringannya dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.211.770.000,- realisasi sebesar Rp.210.459.950,- atau 99.38%. Hasil kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas melalui kegiatan operasional UPTD Puskesmas Sri Bintan dan

Jaringannya berupa : pembayaran listrik, telepon/internet, air, pembelian komputer, lemari, AC.

- (13) Kegiatan Operasional UPTD Puskesmas Kuala Sempang dan Jaringannya dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.184.620.000,- realisasi sebesar Rp.183.992.960,- atau 99.66%. Hasil kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas melalui kegiatan operasional UPTD Puskesmas Kuala Sempang dan Jaringannya berupa : pembayaran listrik, telepon/internet, air, pembelian printer, lemari.
- (14) Kegiatan Operasional UPTD Puskesmas Sei. Lekop dan Jaringannya dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.175.049.625,- realisasi sebesar Rp.143.250.060,- atau 81.83%. Hasil kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas melalui kegiatan operasional UPTD Puskesmas Sei Lekop dan Jaringannya berupa : pembayaran listrik, telepon/internet, majalah, air, pembelian printer, lemari, kipas angin, alat laboratorium.
- (15) Kegiatan Operasional UPTD Puskesmas Numbing dan Jaringannya dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.321.049.625,- realisasi sebesar Rp.300.094.625,- atau 93.47%. Hasil kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas melalui kegiatan operasional UPTD Puskesmas Numbing dan Jaringannya berupa : pembayaran internet, sewa mobilitas air, air, komputer, lemari.
- (16) Kegiatan Operasional UPT Gudang Farmasi dan jaringannya dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.205.495.000,- realisasi sebesar Rp.189.840.106,- atau 92,38%. Hasil kegiatan ini adalah

meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas melalui kegiatan operasional UPT Gudang Farmasi berupa : pembayaran listrik, telepon/internet, air, majalah, paket pengiriman, pembelian alat tulis kantor.

- (17) Kegiatan peningkatan pelayanan dan penanggulanagn masalah kesehatan (P3K) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.186.800.000,- realisasi sebesar Rp.168.977.175,- atau 90.46%. Hasil kegiatan berupa terlaksananya pelayanan P3K di acara-acara tingkat Kecamatan, Kabupaten, Nasional dan Internasional.
- (18) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar kepada Masyarakat di UPTD Puskesmas Kijang dan Jaringannya dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.349.124.904,- realisasi sebesar Rp.325.652.200,- atau 93.28%. Hasil kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas melalui kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar kepada Masyarakat di Puskesmas Kijang dan Jaringannya berupa pemberian honorarium kepada pengelola data, pengelola administrasi SPM, koordinator UKM dan koordinator UKP, uang saku dan transportasi PNS dan Non PNS. Tersedianya alat tulis kantor, alat kebersihan, cetak, penggandaan dan souvenir.
- (19) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar kepada Masyarakat di UPTD Puskesmas Kelong dan Jaringannya dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.300.424.592,- realisasi sebesar Rp.294.438.100,- atau 98.01%. Hasil kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas melalui kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar kepada Masyarakat di Puskesmas Kelong dan Jaringannya berupa pemberian honorarium kepada pengelola data, pengelola

administrasi SPM, koordinator UKM dan koordinator UKP, insentif jaga medis/paramedis. Selain itu juga telah disediakan sewa sarana mobilitas air untuk perjalanan dokter ke Mapur.

- (20) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar kepada Masyarakat di UPTD Puskesmas Mantang dan Jaringannya dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.297.181.864,- realisasi sebesar Rp.295.719.900,- atau 99.51%. Hasil kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas melalui kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar kepada Masyarakat di Puskesmas Mantang dan Jaringannya pemberian honorarium kepada pengelola data, pengelola administrasi SPM, koordinator UKM dan koordinator UKP. Selain itu juga telah disediakan insentif jaga, sewa sarana mobilitas air.
- (21) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar kepada Masyarakat di UPTD Puskesmas Toapaya dan Jaringannya dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.231.315.285,- realisasi sebesar Rp.226.272.500,- atau 97.82%. Hasil kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas melalui kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar kepada Masyarakat di UPTD Puskesmas Toapaya dan Jaringannya pemberian honorarium kepada pengelola data, pengelola administrasi SPM, koordinator UKM dan koordinator UKP. Selain itu juga telah disediakan insentif dan hadiah perlombaan.
- (22) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar kepada Masyarakat di UPTD Puskesmas Kawal dan Jaringannya dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.308.926.954,- realisasi sebesar Rp.308.172.700,- atau 99.76%. Hasil kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas melalui

kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar kepada Masyarakat di UPTD Puskesmas Kawal dan Jaringannya pemberian honorarium kepada pengelola data, pengelola administrasi SPM, koordinator UKM dan koordinator UKP. Selain itu juga telah disediakan insentif jaga, bahan bakar minyak.

- (23) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar kepada Masyarakat di UPTD Puskesmas Teluk Bintan dan Jaringannya dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.251.353.682,- realisasi sebesar Rp.250.645.490,- atau 99.72%. Hasil kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas melalui kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar kepada Masyarakat di UPTD Puskesmas Teluk Bintan dan Jaringannya pemberian honorarium kepada pengelola data, pengelola administrasi SPM, koordinator UKM dan koordinator UKP. Selain itu juga telah disediakan insentif jaga, sewa sarana mobilitas air.
- (24) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar kepada Masyarakat di UPTD Puskesmas Teluk Sebong dan Jaringannya dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.226.822.978,- realisasi sebesar Rp.226.075.400,- atau 99.67%. Hasil kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas melalui kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar kepada Masyarakat di UPTD Puskesmas Teluk Sebong dan Jaringannya pemberian honorarium kepada pengelola data, pengelola administrasi SPM, koordinator UKM dan koordinator UKP. Selain itu juga telah disediakan insentif jaga medis/paramedis, hadiah.
- (25) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar kepada Masyarakat di UPTD Puskesmas Teluk Sasah dan Jaringannya dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.232.399.136,- realisasi sebesar

Rp.222.610.150,- atau 95.79%. Hasil kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas melalui kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar kepada Masyarakat di Puskesmas Teluk Sasah dan Jaringan nya berupa : honorarium pelaksana kegiatan, insentif jaga, pembelian komputer, AC.

- (26) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar kepada Masyarakat di UPTD Puskesmas Tanjung Uban dan Jaringan nya dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.335.872.311,- realisasi sebesar Rp.331.714.450,- atau 98.76%. Hasil kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas melalui kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar kepada Masyarakat di UPTD Puskesmas Tanjung Uban dan Jaringan nya pemberian honorarium kepada pengelola data, pengelola administrasi SPM, koordinator UKM dan koordinator UKP. Selain itu juga telah diberikan insentif bagi petugas jaga, pembelian bahan keperluan dapur, makan minum pasien.
- (27) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar kepada Masyarakat di UPTD Puskesmas Tambelan dan Jaringan nya dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.299.861.569,- realisasi sebesar Rp.299.754.750,- atau 99.96%. Hasil kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas melalui kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar kepada Masyarakat di UPTD Puskesmas Tambelan dan Jaringan nya berupa pemberian honorarium kepada pengelola data, pengelola administrasi SPM, koordinator UKM dan koordinator UKP. Selain itu juga telah diberikan insentif bagi petugas jaga, pembelian kipas angin dan printer.

- (28) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar kepada Masyarakat di UPTD Puskesmas Berakit dan Jaringannya dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.198.873.750,- realisasi sebesar Rp.190.446.000,- atau 95.76%. Hasil kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas melalui kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar kepada Masyarakat di UPTD Puskesmas Berakit dan Jaringannya berupa pemberian honorarium kepada pengelola data, pengelola administrasi SPM, koordinator UKM dan koordinator UKP. Selain itu juga telah diberikan insentif bagi petugas jaga.
- (29) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar kepada Masyarakat di UPTD Puskesmas Sri Bintan dan Jaringannya dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.231.385.875,- realisasi sebesar Rp.229.764.400,- atau 99.13%. Hasil kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas melalui kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar kepada Masyarakat di UPTD Puskesmas Sri Bintan dan Jaringannya berupa pemberian honorarium kepada pengelola data, pengelola administrasi SPM, koordinator UKM dan koordinator UKP. Selain itu juga telah diberikan insentif jaga bagi medis/paramedis.
- (30) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar kepada Masyarakat di UPTD Puskesmas Kuala Sempang dan Jaringannya dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.199.408.266,- realisasi sebesar Rp.199.308.400,- atau 99.95%. Hasil kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas melalui kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar kepada Masyarakat di UPTD Puskesmas Kuala Sempang dan Jaringannya berupa pemberian honorarium kepada pengelola data,

pengelola administrasi SPM, koordinator UKM dan koordinator UKP. Selain itu juga telah diberikan insentif bagi petugas jaga.

- (31) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar kepada Masyarakat di UPTD Puskesmas Sei. Lekop dan Jaringannya dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.214.555.251,- realisasi sebesar Rp.207.462.060,- atau 96.69%. Hasil kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas melalui kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar kepada Masyarakat di UPTD Puskesmas Sei Lekop dan Jaringannya berupa pemberian honorarium kepada pengelola data, pengelola administrasi SPM, koordinator UKM dan koordinator UKP. Selain itu juga telah diberikan insentif bagi petugas jaga.
- (32) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar kepada Masyarakat di UPTD Puskesmas Numbing dan Jaringannya dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.260.640.000,- realisasi sebesar Rp.242.441.050,- atau 93.02%. Hasil kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas melalui kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar kepada Masyarakat di UPTD Puskesmas Numbing dan Jaringannya berupa pemberian honorarium kepada pengelola data, pengelola administrasi SPM, koordinator UKM dan koordinator UKP. Selain itu juga telah diberikan insentif bagi petugas jaga dan sewa mobilitas air.
- (33) Kegiatan Pembinaan pemeriksaan upaya kesehatan kerja dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.64.812.672,- realisasi sebesar Rp.63.598.400 atau 98,13%. Hasil kegiatan adalah meningkatnya kesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerja di Kabupaten Bintan. Kegiatan dilaksanakan melalui bimbingan



teknis, monitoring dan evaluasi ke Puskesmas se-Kabupaten Bintan serta pengadaan alat proteksi diri untuk pos UKK dan peternak.

- (34) Kegiatan Pelayanan Pasien Rawat Inap dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.37.245.275,- realisasi sebesar Rp.36.251.600 atau 97,33%. Hasil kegiatan adalah terpenuhinya kinerja pelayanan rawat inap di Puskesmas. Kegiatan yang dilaksanakan adalah bimbingan teknis ke Puskesmas perawatan, pertemuan review dan evaluasi kegiatan pelayanan pasien rawat inap yang diikuti oleh 21 peserta yang berasal dari 7 Puskesmas perawatan.
- (35) Kegiatan Peningkatan mutu dan akses pelayanan bagi keluarga rawan (perkesmas) dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.70.454.250,- realisasi sebesar Rp.68.954.000 atau 97,87%. Hasil kegiatan adalah tercapainya cakupan perkesmas di Kabupaten Bintan pada 150 keluarga dengan 4 kali kunjungan per keluarga. Kegiatan dilaksanakan melalui bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi kegiatan Perkesmas di Puskesmas.
- (36) Kegiatan Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional/ komplementer alternatif dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.61.337.280,- realisasi sebesar Rp.61.136.550 atau 99,67%. Hasil kegiatan adalah terbinanya pelayanan kesehatan swasta dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kegiatan dilaksanakan melalui pertemuan peningkatan kapasitas pengelola program Puskesmas yang diikuti oleh 15 pemegang program selama 1 (satu) hari.
- (37) Kegiatan pembentukan keluarga donor sukarela dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.339.521.429,- realisasi sebesar Rp.321.989.900,- atau 94,84%. Hasil kegiatan ini adalah terbentuknya keluarga donor darah sukarela di Kabupaten Bintan sebanyak 1.200 keluarga, melalui pelaksanaan; (a) Sosialisasi

tentang manfaat mendonor di 12 Desa/Kelurahan (b) Pendataan golongan darah pada masyarakat di 12 Desa/Kelurahan yang diikuti oleh 180 orang dan (c) Penjaringan donor darah dilakukan sebanyak tiga kali di Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Bintan Timur, Kecamatan Gunung Kijang dan Kecamatan teluk Bintan yang diikuti sebanyak 1.200 orang. Jumlah keluarga donor darah sampai dengan tahun 2015 sebanyak 390 keluarga atau berkisar 1.954 orang. Dari jumlah keluarga Donor Darah Sukarela yang ada di Kabupaten Bintan yang mengikuti Kegiatan Donor Darah sebanyak 378 orang Pendonor Donor Darah yang terdiri dari Wanita : 59 Orang (16%), Pria : 319 Orang (84%) dan sampel diskriminasi terhadap HIV didominasi oleh Pria berjumlah 3 Orang (Persentase 0,01%).

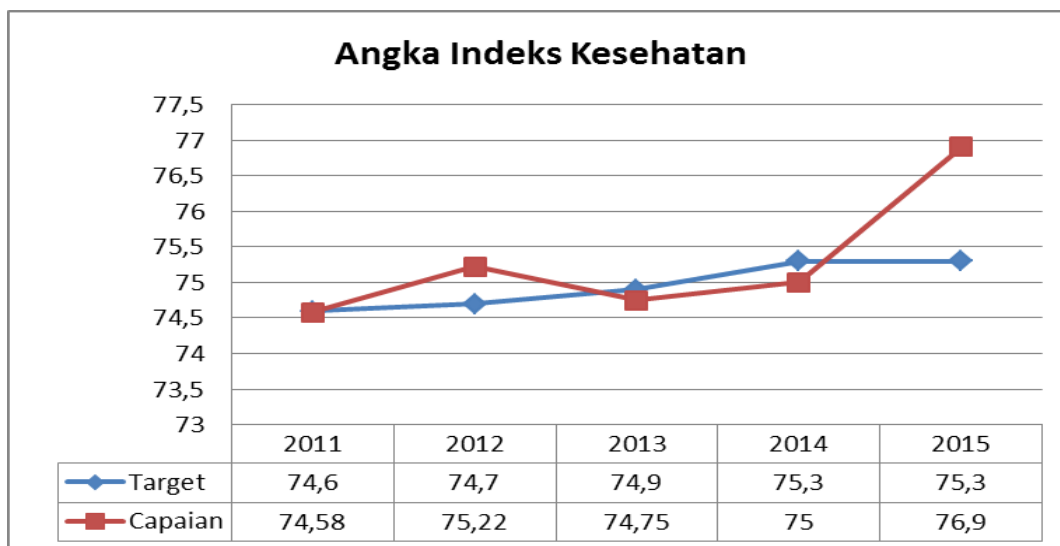
- (38) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.59.000.000,- realisasi sebesar Rp.35.419.750 atau 60.03%. Hasil kegiatan ini adalah telah terlaksananya bakti sosial berupa pengobatan gratis di Pangkil, Mapur, Talang Besar dan Gin Kecil dibantu oleh tenaga medis dari IDI.
- (39) Kegiatan Operasional Rumah Singgah Pemkab Bintan di Kalimantan Barat dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.233.743.400,- realisasi sebesar Rp.201.434.250 atau 86,18%. Hasil kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan rumah singgah melalui operasional rumah singgah Pemkab Bintan di Kalimantan Barat berupa: tersedianya listrik, Bahan Bakar Minyak (BBM), perawatan rumah singgah.
- (40) Kegiatan Operasional Rumah Singgah Pemkab Bintan di Jakarta dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.365.616.380,- realisasi sebesar Rp.313.970.810 atau 85,87%. Hasil kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan rumah singgah melalui

operasional rumah singgah Pemkab Bintan di Jakarta berupa: tersedianya listrik, Bahan Bakar Minyak (BBM), perawatan rumah singgah. Selain itu juga 4 unit kipas angin, 4 unit exhaust fan, 2 unit televisi 32', 5 set sprei ukuran 120 x 200, 4 set sprei ukuran 180 x 200, 10 buah bantal dan guling, 2 unit kursi roda, 3 unit tabung oksigen, 2 unit tandu pasien, 2 unit tempat tidur pasien dan 1 set alat emergency.

Dengan pencapaian indikator kinerja daerah sebagai berikut :

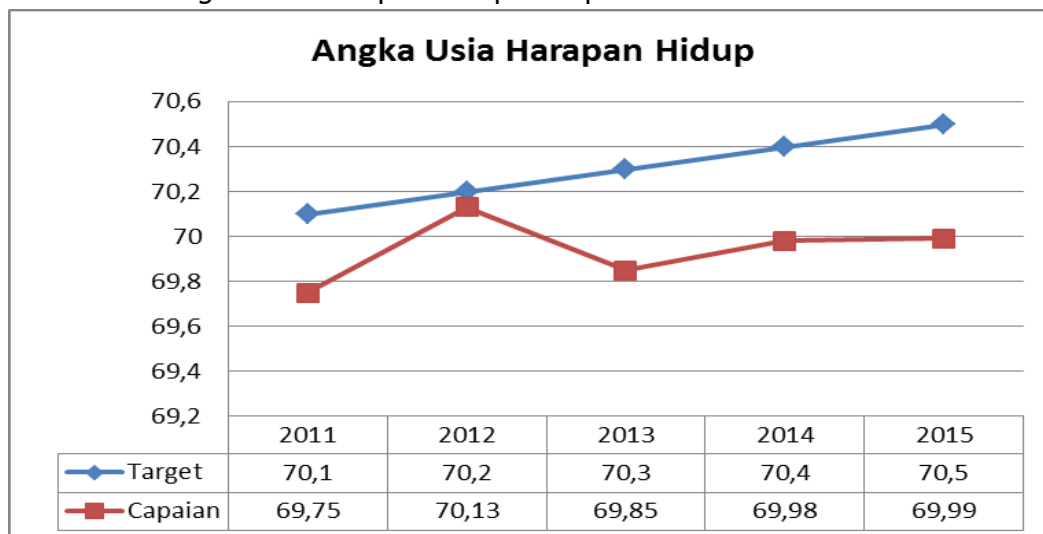
### (1) Angka Indeks Kesehatan dan Angka Usia Harapan Hidup

Grafik 4.4 : Angka Indeks Kesehatan Kabupaten Bintan



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bintan Tahun 2016

Grafik 4.5 : Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Bintan



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bintan Tahun 2016

Pencapaian Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Bintan dari tahun 2011 hingga tahun 2015 menunjukkan peningkatan. Perkembangan positif ini sangat mempengaruhi angka Indeks Kesehatan (IK) Kabupaten Bintan. Menurut data BPS Kabupaten Bintan capaian AHH Kabupaten Bintan tahun 2015 AHH mencapai 69,99 dengan IK sebesar 76,9. Sedangkan tahun 2014 AHH mencapai 69,98 dengan IK mencapai 75,0. Angka Harapan Hidup (AHH) dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Bintan berusaha keras untuk menekan Angka Kematian Bayi maupun Angka Kematian Ibu saat melahirkan setiap tahunnya dalam rangka membantu mendorong Angka Harapan Hidup.

## **b. Permasalahan dan Solusi**

### **1) Permasalahan**

- a. Pelaksanaan pembinaan dan pemeriksaan upaya kesehatan kerja belum optimal, beberapa Puskesmas belum menerapkan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja/K3.
- b. Masih minimnya pelaksanaan pembinaan tentang upaya kesehatan kerja yang ada di beberapa klinik perusahaan.
- c. Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan kesehatan di Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) karena sebagian besar kader belum mendapatkan pelatihan.
- d. Pelaksanaan pelayanan pasien Rawat Inap belum optimal
- e. Beberapa Puskesmas Rawat Inap belum melengkapai Standar Prosedur Operational (SPO).
- f. Puskesmas belum melengkapi data keluarga rawan yang rentan terhadap masalah kesehatan.
- g. Belum semua klinik pengobatan tradisional terdata

## **2) Solusi**

- a. Melaksanakan pembinaan upaya kesehatan kerja di Puskesmas agar menerapkan Manajemen K3 secara berkesinambungan sehingga Pelayanan Pos UKK dapat berjalan optimal.
- b. Pembuatan SPO sesuai dengan standar pelayanan sehingga dapat memberikan asuhan keperawatan yang baik
- c. Melaksanakan koordinasi dengan dokter keluarga dan klinik pengobatan tradisional dalam pengumpulan data

## **2) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat**

### **a. Pelaksanaan Program**

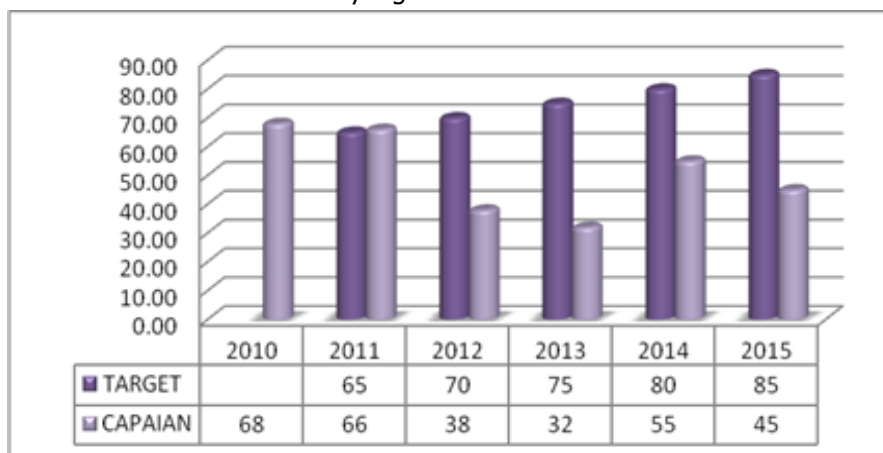
- (1) Kegiatan pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.299.504.178,-; dengan realisasi sebesar Rp.291.730.500,-; atau 97,04%. Hasil kegiatan ini adalah telah dilaksanakannya; pemutaran film kesehatan (media audio visual) pada masyarakat umum dan institusi pendidikan sebanyak 16 kali di 10 Kecamatan, dengan berbagai judul film seperti warung sehat, bahaya rokok, PHBS, Aku Bangga Aku Tahu (HIV-AIDS), Kesehatan Ibu dan Anak, dan lain-lain. Selain itu promosi dan informasi sadar hidup sehat, telah dipasang 100 lembar spanduk (media cetak) dan 2.000 lembar leaflet, pemutaran radio spot (media massa elektronik/RRI) sebanyak 120 kali penyiaran, 4 kali dialog interaktif dan 400 lembar.
- (2) Kegiatan Pelayanan dan Pengembangan UKS dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.364.009.100,- realisasi sebesar 357.808.570,- atau 98,30%. Hasil kegiatan adalah cakupan penjangkaran kesehatan SD/MI dari 108 SD/MI adalah 3.546 siswa kelas 1 (100 persen), cakupan penjangkaran sekolah lanjutan dari 57 sekolah lanjutan adalah siswa kelas VII dan siswa kelas X, yaitu: 4.693 orang yang terjaring 3.833 (81.67

persen). Pemeriksaan kesehatan berkala siswa kelas II dan kelas VI SD sasarannya 17.618 orang, yang diperiksa 16.451 orang (93.38 persen), Pelatihan dokter kecil 737 murid dari 17.618 (4.18 persen), Pembekalan Pramuka Saka Bakti Husada (SBH) menghasilkan 42 orang yang mendapatkan Tanda Kecakapan Khusus (TKK) dari 194 anggota (21.65%). Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Desa Siaga dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.278.378.000,- realisasi sebesar Rp.273.412.060 atau 98.22%. Hasil kegiatan ini adalah meningkatnya tahapan desa siaga di Kabupaten Bintan, sehingga jumlah tahapan desa siaga Kabupaten Bintan sampai dengan akhir tahun 2015 dengan rincian : tidak ada lagi desa dengan tahapan pratama, 14 Desa/ Kelurahan tahapan madya (27.45%), 13 Desa/ Kelurahan tahapan purnama (25.50%), 24 Desa/ Kelurahan tahapan mandiri (47.06%).

Dengan pencapaian 147ndicator kinerja pembangunan daerah Bidang Kesehatan sebagai berikut:

### (1) Persentase Desa Yang Melaksanakan PHBS

Grafik 4.6 : Persentase desa yang melaksanakan PHBS



Sumber: Seksi Promosi Kesehatan

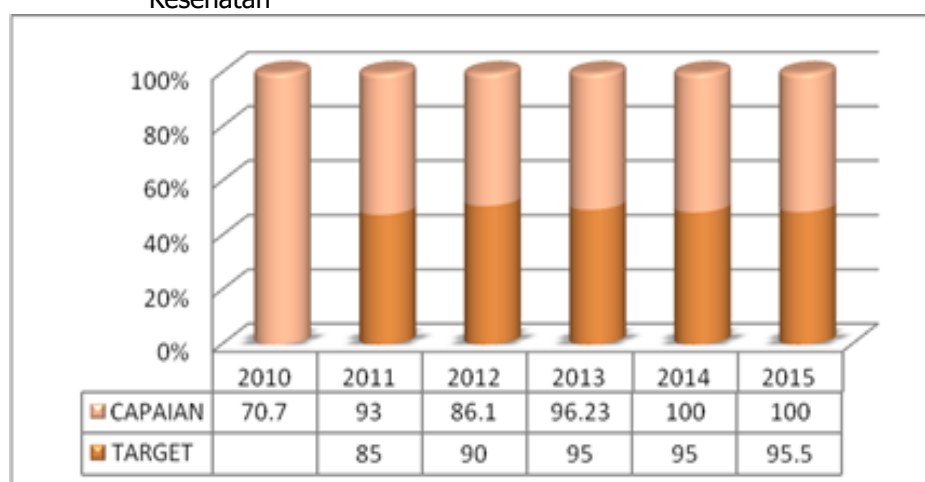
Persentase Desa/Kelurahan rumah tangga yang ber-PHBS tahun 2015 sebanyak 45 persen dari 51 Desa/Kelurahan atau berkisar 23 Desa/Kelurahan. Penurunan ini karena adanya perubahan indikator

dan peningkatan pemahaman tentang PHBS oleh koordinator dan petugas yang memantau dilapangan serta peningkatan jumlah rumah tangga yang dipantau. Hasil survey PHBS dari 20.668 RT, 11.607 diantaranya merokok di dalam rumah (52,52 persen), tidak memberi ASI eksklusif (28,05 persen) dari 9.559 RT. Beberapa permasalahan yang menyebabkan hal tersebut adalah sebagai berikut: (1) Sarana/alat bantu penyuluhan (media audio visual) di tingkat Kabupaten maupun Puskesmas masih kurang, baik kuantitas maupun kualitasnya, (2) Kurang tersedianya film penyuluhan kesehatan yang sesuai dengan karakteristik dan budaya masyarakat setempat, (3) Masih kurangnya tenaga ahli promosi kesehatan baik di tingkat Dinas Kesehatan maupun di Puskesmas, (4) Masih ada beberapa Desa yang sulit di jangkau karena geografis dan akses menuju desa tersebut masih sulit dan (5) Masyarakat kurang peduli terhadap upaya promotif dan preventif dalam meningkatkan kesehatannya sendiri dan keluarga menuju tingkat sehat wellbeing serta belum adanya Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KRT). Untuk mengatasi hal tersebut beberapa alternatif yang dilakukan adalah sebagai berikut; (1) Pengusulan pemenuhan kebutuhan audio visual, (2) Koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam penyediaan VCD film maupun softcopy film yang memuat informasi kesehatan terbaru, (3) Bimbingan teknis terhadap petugas promosi kesehatan di tingkat Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Polindes, (4) Pengusulan kendaraan operasional promosi kesehatan lengkap dengan alat bantu audio visual, (5) Bekerja sama dengan Tim Penggerak PKK, Desa Siaga dan Kader Kesehatan untuk mengumpulkan masyarakat apabila ada kegiatan penyuluhan dan pemberian informasi kesehatan/pemutaran film dan (6) Pelatihan tenaga promosi kesehatan di tingkat Puskesmas tentang teknik dan metode promosi

kesehatan serta (7) Adanya Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

## (2) Persentase SD/MI Yang Melaksanakan Penjaringan/Pemeriksaan Kesehatan

Grafik 4.7 : Persentase SD/MI Yang Melaksanakan Penjaringan/Pemeriksaan Kesehatan



Sumber: Seksi Upaya Kesehatan Sekolah

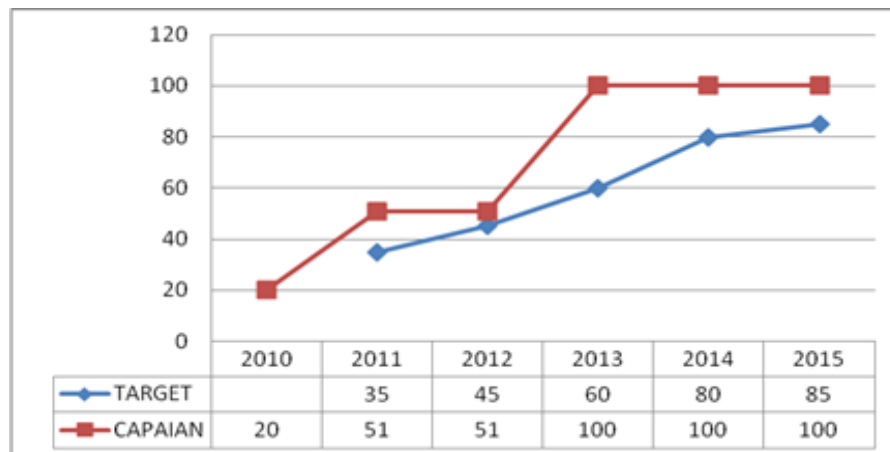
Persentase SD/MI yang melaksanakan penjaringan/ pemeriksaan kesehatan di tahun 2015 mencapai 100 persen. Hal ini dikarenakan meningkatnya kemitraan antara Puskesmas dan pihak sekolah serta penjaringan murid baru SD/MI termasuk dalam kegiatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan dengan target 100 persen. Jumlah SD/MI yang menjadi sasaran kegiatan penjaringan murid SD/MI sebanyak 108 sekolah di 15 wilayah kerja Puskesmas dengan rincian sebagai berikut; 17 SD/MI di UPTD Puskesmas Kijang, 5 SD/MI di UPTD Puskesmas Kelong, 2 SD/MI di UPTD Puskesmas Numbing, 8 SD/MI di UPTD Puskesmas Mantang, 7 SD/MI di UPTD Puskesmas Sei Lekop, 6 SD/MI di UPTD Puskesmas Toapaya, 6 SD/MI di UPTD Puskesmas Teluk Bintan, 10 SD/MI di UPTD Puskesmas Kawal, 3 SD/MI di UPTD Puskesmas Berakit, 7 SD/MI di UPTD Puskesmas Sri Bintan, 4 SD/MI di UPTD Puskesmas Teluk Sebong, 11 SD/MI di UPTD Puskesmas Tanjung Uban, 5 SD/MI di UPTD Puskesmas Teluk Sasah,



9 SD/MI di UPTD Puskesmas Kuala Sempang dan 8 SD/MI di UPTD Puskesmas Tambelan.

### (3) Persentase Desa Siaga Aktif

Grafik 4.8 : Persentase Desa Siaga Aktif



Sumber: Seksi Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat

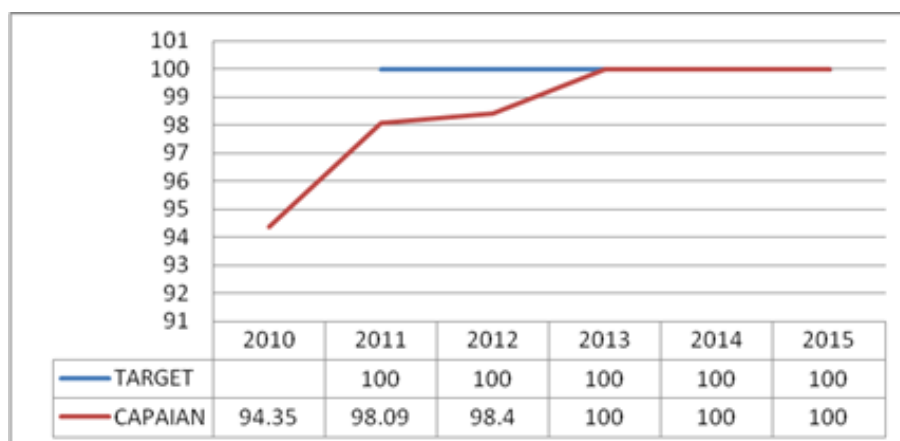
Desa dan kelurahan Siaga Aktif merupakan pengembangan dari Desa Siaga, yaitu Desa atau Kelurahan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Penduduknya dapat mengakses dengan mudah pelayanan kesehatan dasar yang memberikan pelayanan setiap hari melalui Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau sarana kesehatan yang ada di wilayah tersebut seperti, Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu (Pustu), Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), atau sarana kesehatan lainnya.
- Penduduknya mengembangkan Usaha Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) dan melaksanakan survailans berbasis masyarakat (meliputi pemantauan penyakit, kesehatan ibu dan anak, gizi, lingkungan dan perilaku), kedaduratan kesehatan dan penanggulangan bencana, serta penyehatan lingkungan sehingga masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Desa dan Kelurahan Siaga Aktif merupakan salah satu indikator dalam Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten dan Kota. Target yang harus dicapai pada tahun 2015 adalah diatas 80 persen desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Bintan telah menjadi Desa dan Kelurahan Siaga Aktif, dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1529/Menkes/SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. Untuk Kabupaten Bintan 100% dari desa dan kelurahan yang ada telah menjadi desa siaga aktif sejak mulai dicanangkan karena telah terpenuhinya seluruh kriteria untuk menjadi desa dan kelurahan siaga aktif.

#### (4) Cakupan Penjaringan Kesehatan SD dan Setingkat

Grafik 4.9 : Cakupan Penjaringan Kesehatan SD dan Setingkat



Sumber: Seksi Upaya Kesehatan Sekolah

Cakupan penjaringan murid SD/MI di Kabupaten Binta tahun 2015 mencapai target yang ditetapkan yaitu 100 persen. Ini karena meningkatnya kemitraan/kerjasama antara Puskesmas sebagai pelaksana teknis dengan pihak sekolah.

Jumlah siswa SD setingkat yang menjadi sasaran penjaringan kesehatan sebanyak 3.546 orang yang tersebar di 15 wilayah kerja UPTD Puskesmas dengan rincian sebagai berikut; UPTD Puskesmas Kijang sebanyak 645 siswa, UPTD Puskesmas Kelong 100 siswa, UPTD Puskesmas Mantang 101 siswa, UPTD Puskesmas Sei Lekop 339

siswa, UPTD Puskesmas Toapaya 257 siswa, UPTD Puskesmas Kawal 335 siswa, UPTD Puskesmas Teluk Bintan 112 siswa, UPTD Puskesmas Berakit 81 siswa, UPTD Puskesmas Sri Bintan 145 siswa, UPTD Puskesmas Teluk Sebong 204 siswa, UPTD Puskesmas Tanjung Uban 516 siswa, UPTD Puskesmas Teluk Sasah 336 siswa, UPTD Puskesmas Kuala Sempang 139 siswa, UPTD Puskesmas Numbing 112 siswa dan UPTD Puskesmas Tambelan 124 siswa.

Dari hasil penjangkaran tersebut diketahui status gizi murid 3.546 (100 persen) dengan kategori normal sebanyak 89,09 persen, gemuk/obesitas 4,17 persen, kurus 6,54 persen dan kurus sekali 0,20 persen. Tajam penglihatan 100 persen normal, tajam pendengaran 99,72 persen, selebihnya ada gangguan pendengaran yang ringan 0 persen, sedang 0,17 persen dan berat 0 persen. Gangguan di rongga mulut LB 3,5 persen, karies gigi 64,75 persen selanjutnya juga ditemukan anemia dan 1,07 persen, kecacingan 0,11 persen. Gangguan emosi mental ditemukan pada 3 anak (0,08 persen) di Tambelan dan Kuala Sempang. Secara umum status kesehatan siswa SD setingkat baik (99,66 persen) untuk mengikuti pelajaran.

## **b. Permasalahan dan Solusi**

### **1) Permasalahan**

- a. Masih minimnya sarana/alat bantu penyuluhan (media audio visual)
- b. Masih kurangnya tenaga ahli promosi kesehatan di tingkat Puskesmas.
- c. Masyarakat yang kurang peduli terhadap upaya preventif dan promotif dalam meningkatkan derajat kesehatan dan masih terdapatnya kebiasaan, sikap, budaya masyarakat yang kurang sesuai dengan perilaku hidup bersih dan sehat.

### **2) Solusi**

- a. Perlu pengadaan untuk melengkapi saran alat bantu penyuluhan seperti kendaraan roda empat dan peralatan pendukung lainnya
- b. Melakukan pembinaan kepada sumber daya yang ada dan melakukan penerimaan tenaga di bidang promosi jika diperlukan.
- c. Melakukan pendekatan budaya dan kearifan lokal dalam pemberdayaan masyarakat agar dapat memelihara, meningkatkan serta melindungi kesehatan diri dan lingkungannya.

### **3) Program Peningkatan Gizi dan Kesehatan Keluarga**

#### **a. Pelaksanaan Program**

- (1) Kegiatan penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.76.201.000; dengan realisasi sebesar Rp.69.795.450; atau 91,59%. Hasil kegiatan ini adalah terlaksananya surveilans gizi serta tersedianya data informasi masalah gizi masyarakat melalui pelaksanaan pertemuan surveilan gizi, penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi bagi seluruh tenaga pelaksana gizi Puskesmas, kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi data gizi, bimbingan teknis dan pelatihan pemetaan gizi bagi TPG, serta monitoring dan evaluasi. Hasil pemetaan yang dilakukan ditemukan jumlah balita kurang gizi sebanyak 297 balita.
- (2) Kegiatan Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A (KVA) dan Kekurang Zat Gizi Mikro Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp.771.204.00; dengan realisasi sebesar Rp.768.577.980; atau 99,66%. Hasil kegiatan ini adalah tersedianya PMT Pemulihan bagi balita kurang gizi berupa susu sebanyak 1.118 kotak untuk 400 balita, tersedianya alat antropometri balita berupa 50 buah mikrotis dan 30 buah lengthboard. Selain itu terlaksananya pertemuan review

- penanggulangan KEP untuk seluruh TPG, terselenggaranya Lomba Balita Indonesia yang diikuti 28 peserta dari 14 Puskesmas dengan kelompok umur 6-24 bulan dan 2-5 tahun.
- (3) Kegiatan revitalisasi operasional posyandu dan pengembangan TOGA/UPGK dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.260.160.575; dengan realisasi sebesar Rp.2.259.560.550; atau 99,97%. Hasil kegiatan ini adalah tersdistribusi makan dan minum serta honor kader di 162 Posyandu (masing-masing Posyandu 9 kader) selama 12 bulan serta amplimeeting/soundsystem untuk 37 Posyandu. Terlaksananya pertemuan tentang PMBA, ASI Eksklusif dan penyuluhan yang diikuti oleh TPG, Bidan Koordinator dan pengelola Program Anak serta terlaksananya bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, konsultasi program ke Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- (4) Kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan ibu dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.365.100.000; dengan realisasi sebesar Rp.364.583.350; atau 99,86%. Hasil kegiatan ini adalah terlaksananya pertemuan Audit Maternal Perinatal (AMP), pertemuan evaluasi persalinan oleh tenaga kesehatan melalui P4K dan kemitraan dukun, pertemuan evaluasi Rumah Tunggu Kelahiran (RTK), pertemuan review kesehatan ibu dan anak dan tersedianya buku KIA sebagai alat untuk memantau kesehatan tumbuh kembang janin mulai dari kandungan, bayi lahir sampai anak berusia 5 tahun.
- (5) Kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan Anak (Bayi) dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.333.500.000; dengan realisasi sebesar Rp.333.128.400; atau 99,89%. Hasil kegiatan ini adalah terlaksananya pertemuan Tata Laksana kasus kekerasan terhadap anak, kegiatan orientasi kelas ibu balita, kegiatan Sosialisasi Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh

Kembang (SDIDTK), Prosedur Tetap (Protap) pelayanan kesehatan anak dan pertemuan review program anak.

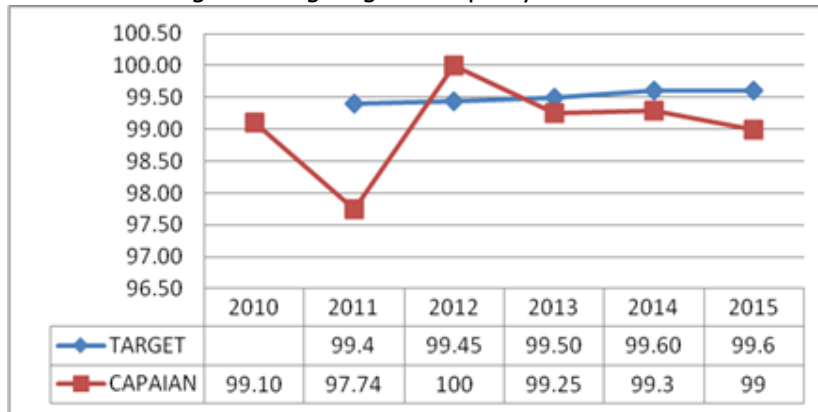
- (6) Kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan Usia Lanjut (Usila) dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.308.152.500; dengan realisasi sebesar Rp.306.784.180; atau 99,6%. Hasil kegiatan ini adalah terlaksananya evaluasi program usila sebanyak 1 kali, terlaksananya pelatihan peningkatan kompetensi dalam rangka integrasi layanan stimulasi kognitif lanjut usia bagi tenaga kesehatan yang diikuti oleh 30 peserta terdiri dari 15 orang pengelola program usila dan 15 orang dokter umum di 15 Puskesmas se-Kabupaten Bintan, terlaksananya kegiatan pembinaan kader dalam rangka integrasi layanan stimulasi kognitif lansia yang diikuti oleh 100 kader Posyandu Lansia sehingga dapat meningkatkan jumlah Lansia yang mendapatkan pelayanan kesehatan.
- (7) Kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan Remaja dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.173.064.960; dengan realisasi sebesar Rp.173.063.510; atau 99,9%. Hasil kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan pelatihan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) bagi konselor sebaya yang diikuti 50 orang peserta dari setiap SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Bintan.
- (8) Kegiatan peningkatan pembinaan pelayanan kesehatan reproduksi (pelayanan medik KB) dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.78.164.850; dengan realisasi sebesar Rp.77.662.395; atau 99,36%. Hasil kegiatan ini adalah terlaksananya review program KB untuk meningkatkan cakupan KB yang diikuti oleh pengelola program dan Bidan Koordinator.
- (9) Kegiatan penguatan sistem pelayanan Kesehatan ibu dan Anak di Daerah Terpencil dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.82.355.000; dengan realisasi sebesar Rp.82.079.110; atau 96,66%. Hasil kegiatan ini adalah terlaksananya penyuluhan

kesehatan ibu hamil di wilayah Kabupaten Bintan dan pertemuan ilmiah tahunan bidan di Jakarta.

Dengan pencapaian indikator kinerja daerah sebagai berikut:

### (1) Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Grafik 4.10 : Angka Kelangsungan Hidup Bayi 2010-2015



Sumber: Seksi Kesehatan Ibu dan Anak dan Pelayanan Medik KB

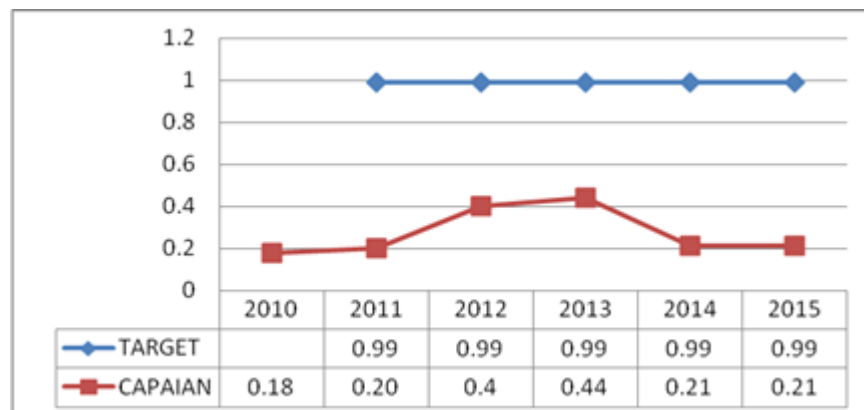
Angka kelangsungan Hidup bayi di Kabupaten Bintan tahun 2015 yaitu 99 persen, bila dibanding tahun sebelumnya terjadi penurunan sebesar 0,3 persen yaitu : 99,3 persen (2014), angka ini masih belum mencapai target RPJMD tahun 2015 yaitu 99,6 persen.

Angka kelangsungan hidup bayi Kabupaten Bintan terendah pada tahun 2011 yaitu 97,74 persen dan tertinggi di tahun 2012 yaitu 100 persen. Sedangkan untuk tahun 2012 sampai 2015 cenderung stagnan yaitu 99,25 persen, 99,3 persen dan 99 persen. Penurunan angka kelangsungan hidup bayi sangat dipengaruhi oleh Angka Kematian Bayi (AKB), makin kecil persentase AKB semakin tinggi angka kelangsungan hidup bayi.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan Angka Kelangsungan Hidup Bayi antara lain dengan meningkatkan kompetensi Bidan dalam memberikan Asuhan Kebidanan mulai dari masa kehamilan sampai masa persalinan melalui pelatihan dan meningkatkan pelayanan kesehatan bayi dan program lain yang mendukung.

## (2) Persentase Balita Gizi Buruk

Grafik 4.11 : Peresentase Balita Gizi Buruk



Sumber: Seksi Gizi Kesehatan Masyarakat

Balita gizi buruk adalah status gizi balita sangat kurus didasarkan (standar antropometri) indeks Berat Badan menurut Panjang Badan (BB/PB) atau Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB) yang merupakan padanan istilah severely wasted (sangat kurus) dengan nilai ambang batas  $z$  score  $< -3$  SD.

Prevalensi balita gizi buruk di Kabupaten Bintan tahun 2015 sebesar 0,21 persen (25 kasus dari 11.549 Balita yang ditimbang). Angka ini lebih rendah dibanding angka gizi buruk Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional tahun 2013 (Riskesdas 2013) dimana angka gizi buruk Provinsi Kepulauan Riau 6 persen dan angka gizi buruk Nasional 5,3 persen, sedangkan target Nasional adalah  $< 10$  (kurang dari sepuluh) persen.

Trend prevalensi gizi buruk Kabupaten Bintan lima tahun terakhir terlihat penurunan, prevalensi tertinggi pada tahun 2013 yaitu 0,44 persen atau 54 kasus dari 12.275 balita dan terendah pada tahun 2015 yaitu 0,21 persen atau 25 kasus dari 11.860 balita, terjadi penurunan sebesar 0,24 persen.

Kasus gizi buruk tahun 2015 ditemukan di 7 UPTD Puskesmas. Kasus terbanyak ditemukan di wilayah UPTD Puskesmas Teluk sasah yaitu 12 kasus, UPTD Puskesmas Kelong 5 kasus, UPTD Tambelan 1 kasus, UPTD Puskesmas Sei Lekop 2 kasus, UPTD Puskesmas



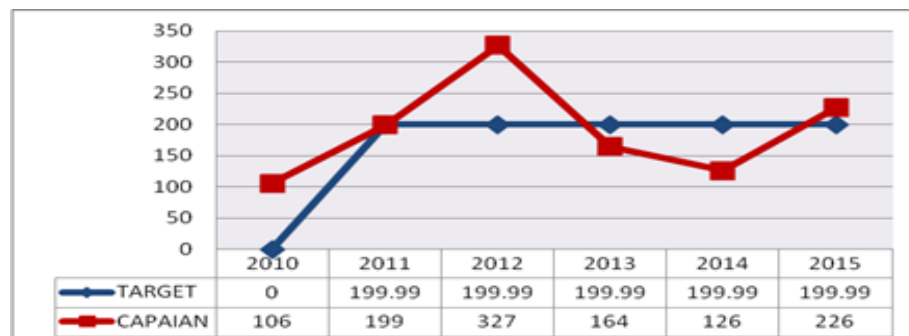
Numbing 3 kasus, UPTD Puskesmas Teluk Bintang 1 dan UPTD Puskesmas Berakit 1 kasus. Kasus gizi buruk yang ditemukan adalah non klinis dan sebagian besar disebabkan kurangnya asupan gizi karena faktor pola asuh anak dan kemiskinan.

Seluruh kasus balita gizi buruk yang ditemukan mendapat perawatan (100 persen) berupa rawat inap untuk kasus gizi buruk klinis dan rawat jalan untuk kasus gizi buruk non klinis.

Upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain: (1) Melaksanakan penyelidikan epidemiologi kasus oleh Tim Puskesmas, (2) Pemberian makanan tambahan pemulihan dan multivitamin, dan (3) Pembinaan gizi anak pada keluarga yang memiliki balita berupa penyuluhan tentang pola asuh dan manfaat gizi pada balita.

### (3) Angka Kematian Ibu Melahirkan Per 100.000 Kelahiran Hidup

Grafik 4.12 : Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100.000 Kelahiran Hidup, 2010-2015



Sumber: Seksi Kesehatan Ibu dan Anak dan Pelayanan Medik KB

Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Bintan tahun 2015 sebesar 226 per 100.000 Kelahiran Hidup (7 kasus), bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya terjadi penurunan dan peningkatan kasus. Kasus kematian ibu melahirkan tertinggi pada tahun 2012 yaitu sebanyak 10 kasus (327 per 100.000 KH dan terendah pada tahun 2014 sebanyak 4 kasus atau 126 per 100.000 KH, tetapi tahun 2015 angka kematian ibu melahirkan menjadi 7 kasus atau 226 per 100.000 KH. Angka tersebut lebih tinggi dari target RPJMD 2015 yaitu

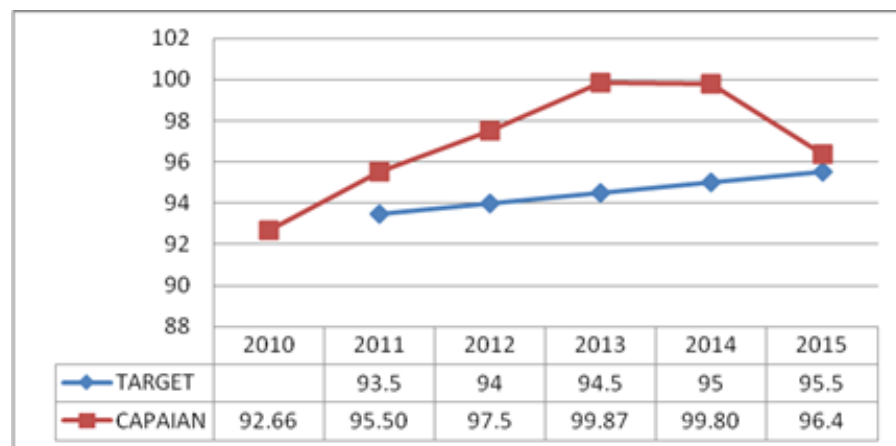
< 200 per 100.000 KH dan target MDG's 2015 yaitu 102 per 100.000 KH.

Dari 7 Kasus kematian Ibu di Kabupaten Bintan terjadi tersebar di beberapa wilayah kerja UPTD Puskesmas, antara lain; 2 orang di UPTD Tanjung Uban, 1 orang di UPTD Puskesmas Kijang, 1 orang di UPTD Puskesmas Teluk Sebong, 1 orang di UPTD Puskesmas Toapaya, 1 orang di UPTD Puskesmas Kelong dan 1 orang di UPTD Puskesmas Kuala Sempang. Bila ditelusuri dari penyebab kematian ibu dapat digambarkan sebagai berikut : (a) Penyebab Langsung yaitu: Eklamsi 2 kasus, Haemoragik Post Partum 2 kasus, dan Sectio Caesarea 1 kasus, (b) Penyebab tak langsung yaitu: Dengue Shock Syndrome 1 kasus dan Aspirasi 1 kasus. Semua kasus telah mendapat penanganan dan kematian terjadi di pelayanan kesehatan lanjutan yaitu : 1 orang di Rumah Sakit Angkatan Laut (RSAL), 1 orang di Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) Tanjung Uban, 1 orang di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bintan dan 4 orang di Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) Batu Delapan.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk menurunkan angka kematian ibu tersebut adalah : (a) Melakukan audit maternal melalui pengkajian dan menganalisa seluruh kasus kematian maternal oleh Tim AMP bekerjasama dengan dokter Spesialis Obstetri Gyneocology, (b) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam P4K, (c) Meningkatkan kompetensi bidan dalam memberikan Asuhan Kebidanan melalui pendidikan dan pelathan serta seminar, dan (d) Pemberian Makanan Tambahan ibu hamil berupa biskuit dan susu Ibu hamil.

#### (4) Persentase Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan

Grafik 4.13 : Persentase Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan, 2010 - 2015



Sumber: Seksi Kesehatan Ibu dan Anak dan Pelayanan Medik KB

Persentase Pertolongan Persalinan oleh tenaga Kesehatan (Linakes) di Kabupaten Bintan tahun 2015 sebesar 96,4 persen dari 3.104 persalinan. Jika dilihat persentase Linakes lima tahun, persentase Linakes tertinggi terdapat pada tahun 2013 yaitu sebesar 99.87 persen dan persentase Linakes terendah pada tahun 2011 yaitu 95.5 persen. Persentase Linakes tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 3.1 persen dari tahun 2014, angka ini lebih rendah jika dibanding tahun 2014 yaitu 99,80 persen, namun target RPJMD tahun 2015 sebesar >95 persen tercapai.

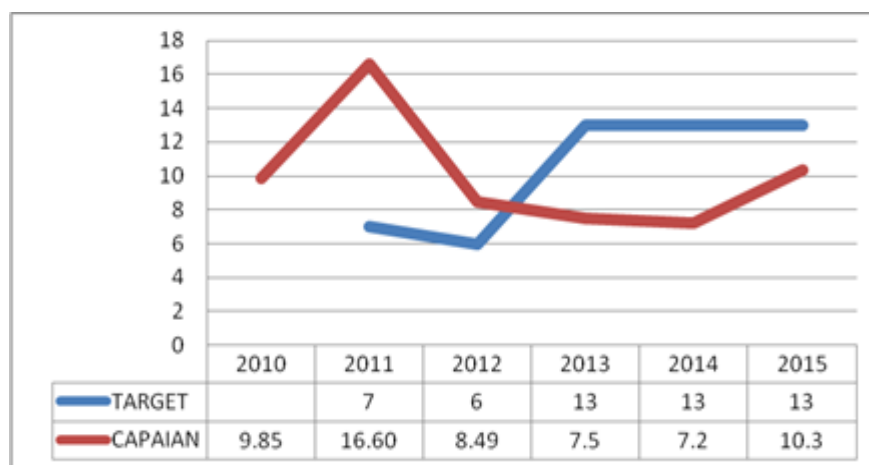
Penurunan ini disebabkan karena meningkatnya peserta KB Aktif tahun 2015 serta terdapat 1 ibu bersalin yang ditolong oleh dukun terlatih (paraji), kemudian dilakukan kunjungan atau perawatan nifas oleh tenaga kesehatan.

Upaya untuk meningkatkan cakupan Pn terus dilakukan dengan memberikan hasil evaluasi dan feedback melalui pertemuan review program serta bimbingan teknis dan monitoring ke Puskesmas, khususnya pada daerah yang memiliki capaian rendah agar dapat meningkatkan cakupan serta terdapat kesepakatan antara dukun dan tenaga kesehatan dalam merujuk persalinan ke Fasilitas Kesehatan.

Dalam upaya peningkatan cakupan Pn dilaksanakan berbagai kegiatan, yaitu : (1) Peningkatan cakupan Pn dan Kf melalui Kemitraan Bidan dan Dukun serta Rumah Tunggu Kelahiran, (2) Peningkatan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor kesehatan, (3) Peningkatan kerjasama dengan organisasi profesi, (4) Bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi bagi bidan koordinator dan bidan desa.

### **(5) Angka Kematian Bayi Per 1.000 Kelahiran Hidup**

Grafik 4.14: Angka Kematian Bayi Per 1.000 Kelahiran Hidup, 2010 – 2015



Sumber: Kesehatan Ibu dan Anak dan Pelayanan Medik KB

Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Bintan tahun 2015 sebesar 10,3 per 1.000 Kelahiran Hidup (32 kasus), angka ini dibawah target RPJMD Kabupaten Bintan 2015 setelah direvisi yaitu 13 per 1.000 KH dan target Angka Kematian Bayi (AKB) Nasional (MDG's 2015) yakni 23 per 1.000 Kelahiran Hidup.

Data Angka Kematian Bayi lima (5) tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang mengawatirkan yakni 16,60 per 1.000 KH menjadi 10,3 per 1.000 KH, terjadi peningkatan angka kematian bayi dari tahun sebelumnya (2014) sebesar 3,1 per 1.000 KH. Peningkatan kematian bayi 78 persen disebabkan penyebab tidak langsung.

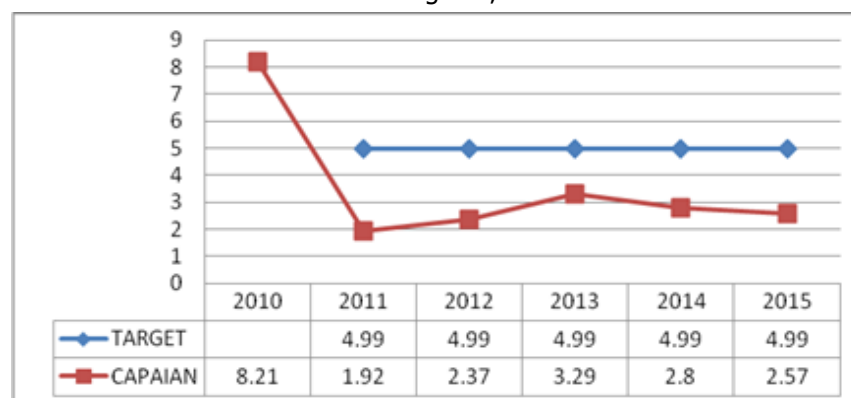
Dari 32 Kasus kematian Bayi di Kabupaten Bintan terjadi di UPTD Puskesmas Mantang 1 orang, UPTD Puskesmas Numbing 1 orang, UPTD Puskesmas Sei Lekop 3 orang, UPTD Puskesmas Toapaya 5

orang, UPTD Puskesmas Teluk Bintan 1 orang, UPTD Puskesmas Kawal 2 orang, UPTD Puskesmas Kelong 1 orang, UPTD Puskesmas Sri Bintan 1 orang, UPTD Puskesmas Teluk Sebong 3 orang, UPTD Puskesmas Tanjung Uban 4 orang, UPTD Puskesmas Kuala Sempang 2 orang, UPTD Puskesmas Teluk Sasah 6 orang, UPTD Puskesmas Tambelan 1 orang dan UPTD Puskesmas Berakit 1 orang. Bila ditelusuri dari penyebab kematian Bayi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut : (a) Penyebab langsung yaitu 7 kasus (25 persen) yang terdiri dari BBLR 5 Kasus, Asfiksia 2 Kasus dan infeksi 1 kasus serta (b) Penyebab tidak langsung yaitu 24 kasus (75 persen) yang terdiri dari Kelainan Kongenital 6 kasus, Diare 1 kasus, DBD 1 kasus, Pneumoni 1 kasus dan lain-lain sebanyak 15 kasus.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk menurunkan angka kematian bayi tersebut adalah : Meningkatkan kompetensi bidan dengan mengikut sertakan bidan dalam Pelatihan Basic Obstetric Neonatal Life Suport (BONELs) dan Orientasi manajemen Penatalaksanaan Asfiksia dan BBLR.

## (6) Persentase Balita Kurang Gizi

Grafik 4.15: Persentase Balita Kurang Gizi, 2010 – 2015



Sumber: Seksi Gizi Masyarakat

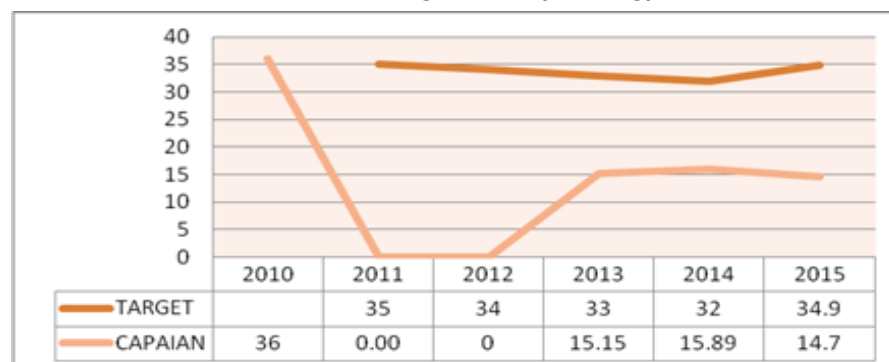
Prevalensi balita kurang gizi di Kabupaten Bintan tahun 2015 sebesar 2,57 persen yang berarti dari 11.549 Balita, 297 balita diantaranya mengalami kurang gizi. Jika dilihat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir trend prevalensi balita kurang gizi mengalami

penurunan. Pada tahun 2010 terdapat 1.050 balita yang mengalami kurang gizi atau berkisar 8,21 persen dari 11.200 balita dan ditahun 2015 balita yang mengalami kurang gizi sebanyak 297 balita atau berkisar 2,57 persen dari 11.549 balita. dibanding tahun 2013. Angka ini lebih rendah disbanding angka kurang gizi Provinsi dan Nasional tahun 2013 (Riskesdas, 2013) dimana angka balita kurang gizi Provinsi Kepulauan Riau 15,6 persen dan angka balita kurang gizi Nasional 19,9 persen. Sedangkan target Nasional sesuai RPJMN 2014 adalah 15 persen.

Jumlah kasus balita kurang gizi terbanyak ditemukan di wilayah UPTD Puskesmas Teluk Sasah 129 balita dan terendah UPTD Puskesmas Mantang 7 balita. Seluruh balita kurang gizi yang ditemukan telah diberi bantuan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pemulihan berupa susu multivitamin melalui anggaran APBD Kabupaten Bintan dan Anggaran Pengentasan Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau diikuti dengan Pemantauan status gizi balita dilaksanakann rutin setiap bulan serta penyuluhan kepada ibu balita di posyandu.

## (7) Persentase Balita Yang Pendek (Stunting)

Grafik 4.16 : Persentase Balita Yang Pendek (Stunting)



Sumber: Seksi Gizi Masyarakat

Presentase anak Balita yang pendek (stunting) di kabupaten Bintan tahun 2015 adalah 14,47 persen (1.703 balita). Angka balita stunting Kabupaten Bintan tahun 2015 cukup rendah jika dibandingkan dengan tahun 2014 (15,89 persen), angka Provinsi dan

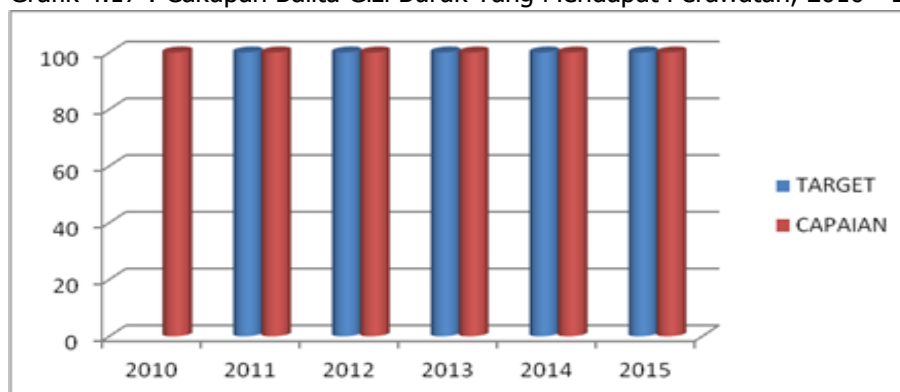
Nasional (Riskesdas, 2013) dimana angka stunting Provinsi Kepulauan Riau tahun 2013 sebesar 26,3 persen dan Nasional 37,2 persen. Target Nasional Balita pendek RPJMN tahun 2014 adalah 32 persen.

Turunnya angka stunting Kabupaten Bintan tahun 2015 berkaitan erat dengan revitalisasi operasional Posyandu dan pengembangan TOGA/UPGK, pemberian alat ukur panjang badan dan tinggi badan pada balita dan workshop tata cara pengelolaan Posyandu serta pengukuran antropometri.

Upaya yang dilakukan untuk mencegah kejadian balita pendek adalah sebagai berikut :(a) Meningkatkan pemenuhan gizi ibu hamil, ibu nifas serta bayi dan balita khususnya pada seribu (1.000) hari pertama, (b) Pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil minimal 90 tablet, (c) Pemberian Makanan Tambahan (PMT) ibu hamil berupa susu dan multivitamin ibu hamil, dan (d) Penyuluhan pentingnya pemberian ASI eksklusif, MP-ASI dan makanan pada seribu (1.000) hari pertama kehidupan bayi dan anak.

### **(8) Cakupan Balita Gizi Buruk Yang Mendapat Perawatan**

Grafik 4.17 : Cakupan Balita Gizi Buruk Yang Mendapat Perawatan, 2010 - 2015



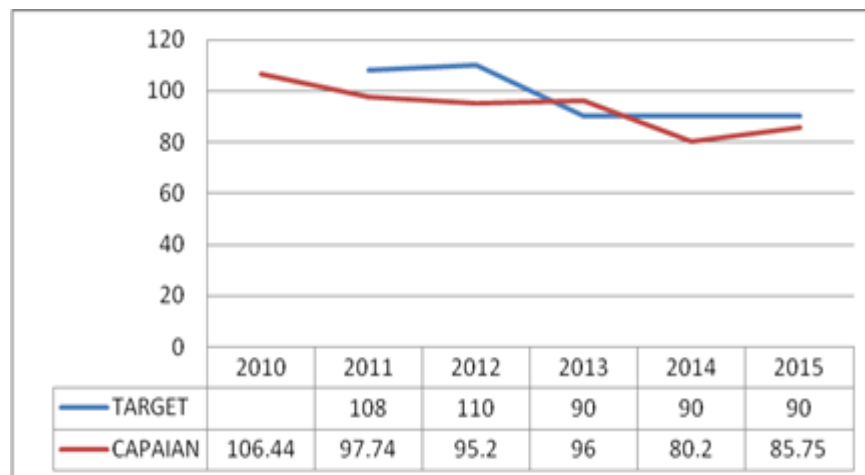
Sumber: Seksi Gizi Masyarakat

Seluruh Kasus balita gizi buruk yang ditemukan setiap tahunnya telah dilaksanakan perawatan sesuai dengan kasus yang ditemukan baik rawat inap maupun rawat jalan. Pemantauan dan perawatan kasus gizi buruk yang ditemukan tahun 2015 sebanyak 25 kasus telah sesuai dengan tatalaksana anak gizi buruk oleh Tim

Asuhan Gizi Puskesmas khususnya Puskesmas perawatan yang telah dilatih pada tahun 2013. Balita gizi buruk juga diberikan makanan tambahan pemulihan serta multi vitamin serta pembinaan gizi anak kepada keluarga balita.

### (9) Cakupan Kunjungan Bayi

Grafik 4.18 : Cakupan Kunjungan Bayi, 2010 – 2015



Sumber: Seksi Kesehatan Ibu dan Anak dan Pelayanan Medik KB

Cakupan kunjungan Bayi di Kabupaten Bintan pada tahun 2015 sebesar 85,75 persen, bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya 2011, 2012 dan 2013 terjadi penurunan yang signifikan yaitu dari 90 persen menjadi 80 persen di tahun 2014 dan 2015, sedangkan target cakupan kunjungan bayi dalam RPJMD Kabupaten Bintan tahun 2015 adalah 90 persen (Nasional sebesar 60 persen) dengan demikian bahwa target cakupan kunjungan bayi belum tercapai.

Peningkatan cakupan kunjungan bayi dikarenakan bayi yang mendapatkan pelayanan kesehatan belum memenuhi dengan standar pelayanan kesehatan bayi yaitu minimal bayi mendapat pelayanan kesehatan sebanyak 4 kali, mendapat vitamin A sekali setahun, mendapatkan pelayanan pemantauan perkembangan 2 kali dalam setahun (SDIDTK) dan mendapat konseling.



Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kunjungan bayi tersebut antara lain melalui sweeping atau kunjungan rumah, memaksimalkan pelayanan di Posyandu dan kelas ibu balita serta Pelatihan SDIDTK untuk tenaga kesehatan

#### (10) Cakupan Ibu Hamil dengan Komplikasi Yang Ditangani

Grafik 4.19 : Cakupan Ibu Hamil dengan Komplikasi Yang Ditangani, 2010 - 2015



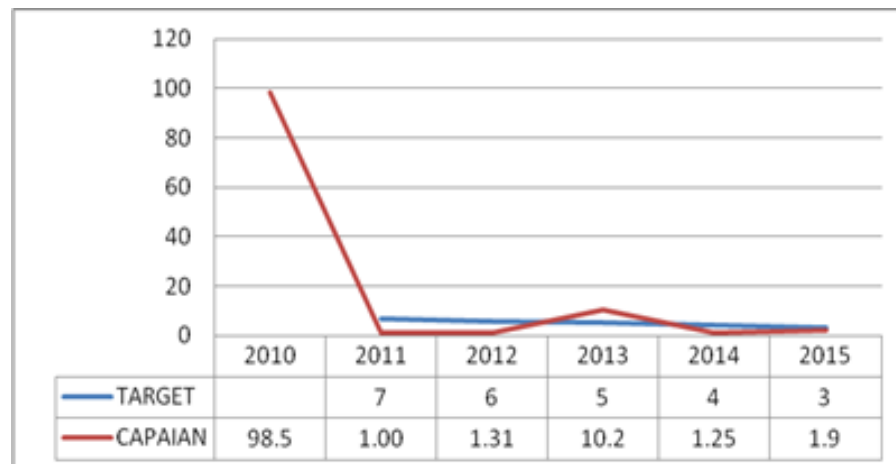
Sumber: Kesehatan Ibu dan Anak dan Pelayanan Medik KB

Angka penemuan ibu hamil dengan resiko tinggi tahun 2015 sebanyak 72,80 persen (573 Bumil resti), semua ibu hamil yang mengalami komplikasi pada kehamilan maupun persalinan sudah ditangani tidak hanya di Puskesmas, namun telah dilakukan rujukan ke Fasilitas Kesehatan yang lebih memadai yaitu Rumah Sakit.

Upaya-upaya yang telah dilakukan yaitu melakukan penjangkaran atau mendeteksi ibu hamil yang mempunyai resiko sedini mungkin dengan melibatkan lintas program dan organisasi profesi, mengoptimalkan P4K (Program Perencanaan Persalinan dan Penanganan Komplikasi) dengan memberdayakan kader posyandu dan setiap ibu hamil diwajibkan untuk di pemeriksa Hb, Golongan Darah, test HIV dan malaria serta memfasilitasi terbentuknya Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) terutama didaerah perbatasan.

## (11) Angka Kematian Balita

Grafik 4.20 : Angka Kematian Balita, 2010 - 2015



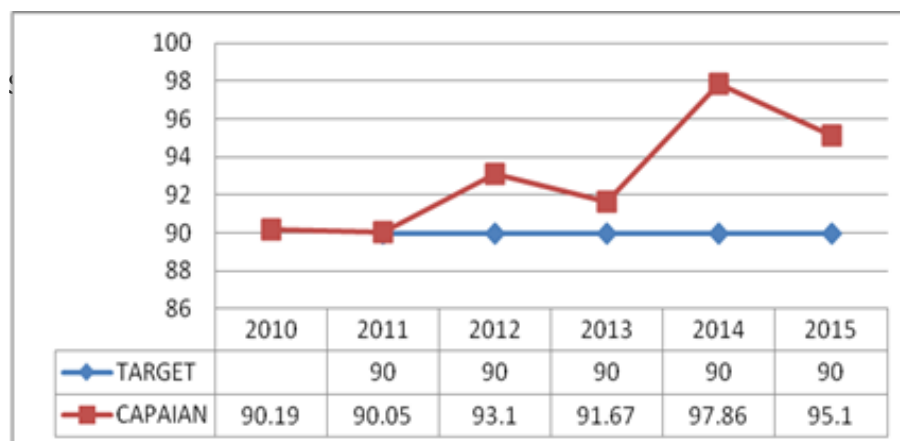
Sumber: Seksi Kesehatan Ibu dan Anak dan Pelayanan Medik KB

Angka Kematian Anak Balita (AKABA) di Kabupaten Bintan tahun 2015 sebesar 1,9 per 1.000 Kelahiran Hidup (6 kasus), bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya terjadi penurunan AKABA yaitu : 1,31 per 1.000 KH (2012) dan 2,63 per 1000 KH (2013), Angka tersebut telah sesuai target RPJMD 2015 yaitu 3 per 1.000 KH. Dari 7 Kasus AKABA di Kabupaten Bintan terjadi di UPTD Puskesmas Teluk Sasah 1 orang, UPTD Puskesmas Tanjung Uban 1 orang, UPTD Puskesmas Kuala Sempang 1 orang, UPTD Puskesmas Numbing 1 orang, UPTD Puskesmas Teluk Sebong 1 orang, UPTD Puskesmas Sei Lekop 1 orang dan UPTD Puskesmas Teluk Bintan 1 orang. Bila ditelusuri dari penyebab kematian Balita tersebut adalah sebagai berikut : Demam kejang 1 kasus, Kecelakaan 1 Kasus, DBD 1 kasus, Aspirasi 1 kasus, tenggelam 1 kasus, kelaianan jantung 1 kasus dan infeksi kelainan sel darah 1 kasus.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk menurunkan angka kematian Balita tersebut adalah : (a) Mengoptimalkan kelas ibu balita dan SDIDTK dan (b) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengenali dan mengatasi masalah kesehatan dan keselamatan anak balita.

## (12) Cakupan Pelayanan Ibu Nifas

Grafik 4.21 : Cakupan Pelayanan Ibu Nifas, 2010 - 2015



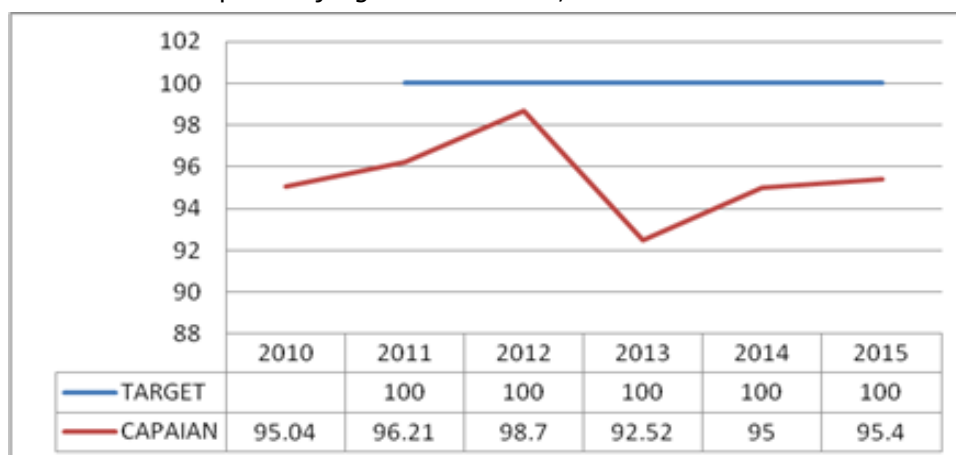
Sumber: Seksi Kesehatan Ibu dan Anak dan Pelayanan Medik KB

Cakupan Pelayanan Ibu Nifas (KF.3) di Kabupaten Bintan tahun 2015 sebesar 95,1 persen, bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya terjadi penurunan yaitu : 97,86 persen (2014), Angka tersebut sudah melampaui target RPJMD 2015 yaitu 90 persen.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan KF3 tersebut dengan aktif melakukan kunjungan pasca salin, baik persalinan Nakes maupun persalinan non Nakes.

## (13) Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

Grafik 4.22 : Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4, 2010 - 2015



Sumber: Seksi Kesehatan Ibu dan Anak dan Pelayanan Medik KB

Berdasarkan pencatatan kartu Kohort Kunjungan ibu hamil, Cakupan Kunjungan Ibu Hamil 4 kali (K4) di Kabupaten Bintan tahun 2015 sebesar 95.4 persen dari 3.287 Ibu Hamil, jika dibanding capaian

K4 tahun sebelumnya angka ini mengalami kenaikan, yaitu 95 persen (2014), namun angka ini masih dibawah target RPJMD yaitu 100 persen.

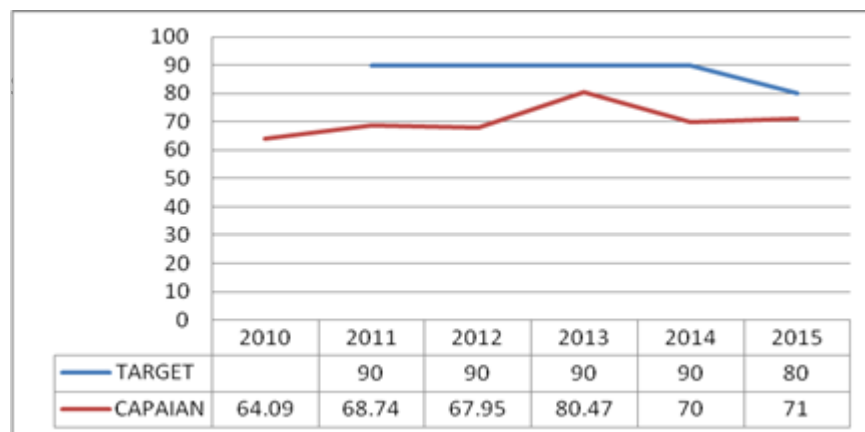
Indikator diatas memperlihatkan akses pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil dan tingkat kepatuhan klien dalam memeriksakan kehamilannya minimal empat kali ke tenaga kesehatan belum tercapai karena ibu hamil memeriksakan kehamilannya pada trimester II sehingga tidak memenuhi standart, adapun yang dimaksud pelayanan kesehatan memenuhi standart pelayanan adalah sebagai berikut : Pemeriksaan tekanan darah, berat badan, status gizi, status imunisasi TT, tinggi fundus uteri, letak janin, pemeriksaan laboratorium sederhana (Hb, protein urine, golongan darah, Pemberian buku KIA, Fe 90 tablet, imunisasi TT sesuai status, penanganan kasus sesuai kompetensi, rujukan dan konseling efektif tentang persiapan persalinan dan pencegahan komplikasi, pengenalan tanda bahaya, perbaikan gizi ibu hamil, penyuluhan tentang inisiasi menyusui dini dan ASI eksklusif, KB pasca persalinan. Selain standar tersebut pelayanan antenatal harus dilaksanakan sesuai dengan SPM minimal 1 kali pada trimester I, 1 kali pada trimester II, dan 2 kali pada trimester III. Dengan memeriksakan kehamilan minimal 4 kali ke tenaga kesehatan diharapkan adanya kelainan kehamilan dapat dideteksi secara dini dan ditangani termasuk rujukannya.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian K4 mengoptimalkan pelaksanaan kelas ibu hamil, Peningkatan koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam peningkatan pelayanan antenatal terpadu seperti dengan bidang P2PL untuk pemeriksaan HIV dan malaria bagi ibu hamil, peningkatan kerjasama dengan organisasi IBI melalui pemeriksaan ibu hamil dan golongan darah, pembinaan dukun bayi, sedangkan upaya yang akan terus dilakukan adalah meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui kader posyandu, perangkat desa dan masyarakat dengan

mengintensifkan P4K dengan stiker dan penggunaan buku KIA, meningkatkan pengetahuan dan perubahan perilaku ibu hamil melalui kelas ibu hamil, meningkatkan kualitas pelayanan antenatal care melalui ANC terpadu dengan bagian laboratorium, gizi dan program yang terkait.

#### (14) Cakupan Pelayanan Anak Balita (Minimal 8 Kali)

Grafik 4.23 : Cakupan Pelayanan Anak Balita, 2010 - 2015



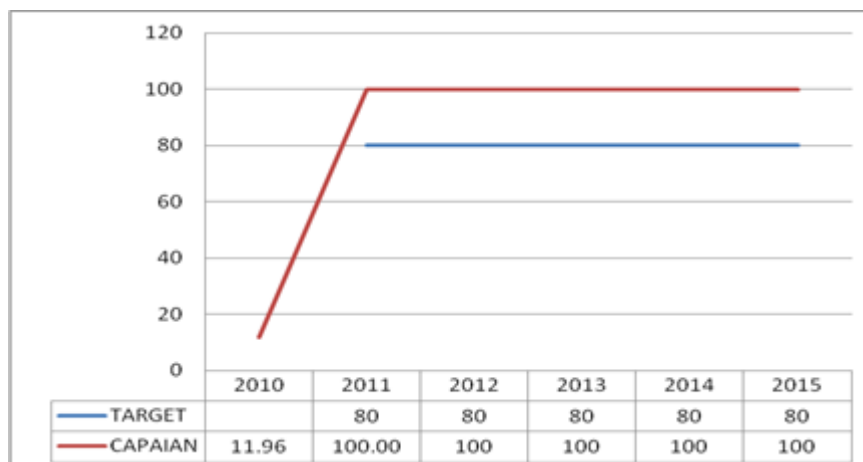
Sumber: Seksi Kesehatan Ibu dan Anak dan Pelayanan Medik KB

Angka cakupan pelayanan anak Balita 8 kali di Kabupaten Bintan tahun 2015 yaitu 71 persen, bila dibanding tahun sebelumnya terjadi peningkatan sebesar 1 (satu) persen yaitu : 70 persen dari 2014, pencapaian cakupan ini disebabkan karena pelaksanaan program Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) setahun 2 kali belum tercapai, sweeping belum maksimal serta memperoleh pemantauan pertumbuhan 8 (delapan) kali, pemantauan perkembangan minimal 2 (dua) kali dan mendapat 2 (dua) kali vitamin A.

Upaya-upaya yang telah dilakukan adalah dengan mengoptimalkan Program Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) di Posyandu dan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini).

### (15) Cakupan Neonatal Dengan Komplikasi Yang Ditangani

Grafik 4.24 : Cakupan Neonatal Dengan Komplikasi Yang Ditangani, 2010 – 2015



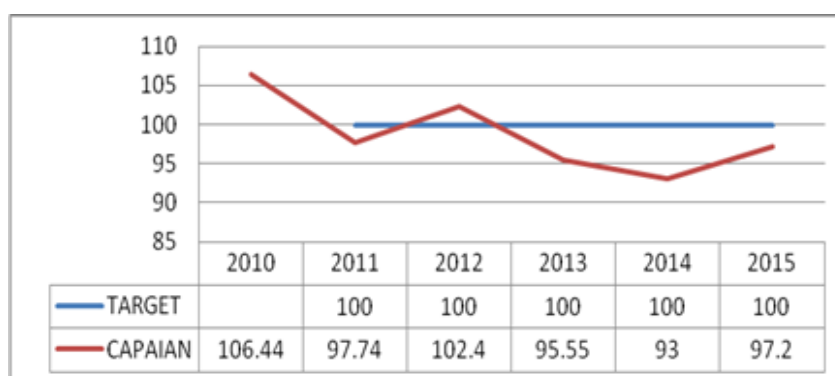
Sumber: Seksi Kesehatan Ibu dan Anak dan Pelayanan Medik KB

Tahun 2015, neonatal dengan komplikasi yang ditemui sebanyak 344 neonatal dari 471 neonatal yang ada (73 persen) dan semua Neonatal yang mengalami komplikasi diberikan penanganan sesuai standart dan dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih memadai seperti Puskesmas perawatan dan Rumah Sakit.

Upaya-upaya yang telah dilakukan yaitu melakukan penjarangan atau mendeteksi ibu hamil yang mempunyai resiko sedini mungkin, Meningkatkan kompetensi tenaga Kesehatan terutama penolong persalinan (Bidan) melalui bimbingan teknis dan pelatihan.

### (16) Persentase Anak di Bawah 1 Tahun Yang di Immunisasi Campak

Grafik 4.25 : Persentase Anak di Bawah 1 Tahun Yang di Immunisasi Campak, 2010 – 2015



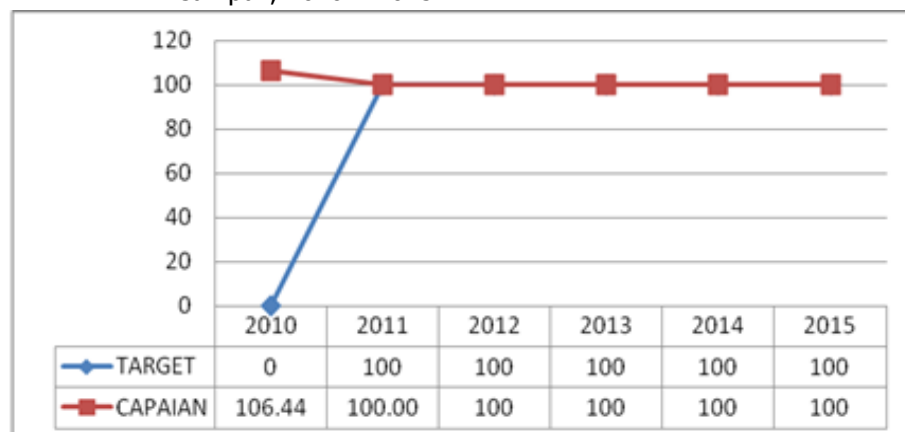
Sumber: Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit

Data diatas menunjukkan bahwa persentase anak di bawah 1 tahun yang di imunsasi campak belum mencapai target (100 persen, RPJMD 2011-2015) yaitu 97.2 persen (2015). Bila dilihat dari 5 (lima) tahun, pencapaian target tertinggi di tahun 2012 (102,4 persen) dan capaian target terendah pada tahun 2014 yaitu 93 persen. Kemudian meningkat pada tahun 2015 yaitu 97.2 persen.

Imunisasi campak diberikan pada anak usia 9 bulan, pada tahun 2015 capaian campak belum mencapai 100 persen (97.2 persen) dikarenakan sasaran yang digunakan adalah kelahiran bayi hidup tahun 2015 sehingga bayi yang lahir di tahun 2015 yaitu dari bulan April sampai Desember belum di imunisasi campak, tetapi bila ditinjau dari program berdasarkan bayi yang terdata (by name by addres) sudah semua bayi diberikan imunisasi campak, sesuai dengan jadwal waktu pemberian.

### **(17) Persentase Anak Usia 12-23 Bulan Yang di Imunisasi Campak**

Grafik 4.26 : Persentase Anak Usia 12-23 Bulan Yang di Imunisasi Campak, 2010 – 2015



Sumber: Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit

Campak adalah penyakit yang sangat potensial untuk menimbulkan wabah akan tetapi penyakit ini dapat dicegah dengan pemberian imunisasi campak. Sebelum imunisasi campak dipergunakan secara luas di dunia hampir setiap anak dapat terinfeksi campak. Angka kesakitan campak di Indonesia sekitar 1 juta pertahun

dengan 30.000 kematian, oleh karena itu dilaksanakan akselerasi dan menjaga kesinambungan dari reduksi campak. Strategi untuk kegiatan ini adalah cakupan rutin yang tinggi (>90%) di setiap Kabupaten/Kota serta memastikan semua anak kesempatan kedua untuk imunisasi campak.

Di Kabupaten Bintan program campak telah dimulai sejak tahun 1984 sejalan dengan program nasional dengan kebijakan memberikan 1 dosis pada bayi usia 9-12 bulan. Saat ini kegiatan pengendalian campak di Kabupaten Bintan adalah imunisasi rutin bayi usia 9-12 bulan, kegiatan BIAS pada anak kelas 1 sekolah dasar dan penguatan surveilans campak. Untuk kegiatan Nasional ditambah dengan imunisasi tambahan berupa Crash Program Campak pada anak balita dan Catch Up Campaign pada anak sekolah dasar di daerah risiko tinggi. Cakupan imunisasi campak Kabupaten Bintan pada tahun 2010 sampai dengan 2015 sudah sangat baik lebih dari yang ditargetkan Nasional (90%), secara urutan yaitu 106,44 persen, 97,74 persen, 102,4 persen, 95,5 persen, 93 persen dan 97.2 persen, ini artinya Kabupaten Bintan tidak termasuk dalam daerah risiko tinggi sehingga tidak perlu melaksanakan imunisasi tambahan berupa Crash Program Campak dan Catch Up Campaign pada anak sekolah dasar.

Imunisasi campak yang selama ini dilaksanakan di Kabupaten Bintan adalah iminusasi rutin pada bayi usia kurang dari 12 bulan sedangkan untuk usia 12 sampai dengan 23 bulan tidak dilakukan lagi sejak terakhir kali pada tahun 2010 dan akhir tahun 2014 mulai digalakkan kembali oleh Kementrian Kesehatan RI. Kegiatan imunisasi campak usia 12 sampai dengan 23 bulan tidak dilaksanakan lagi karena hasil cakupan imunisasi campak rutin pada bayi kurang dari 12 bulan telah lebih dari target nasional yaitu 90 persen, sehingga tidak perlu lagi melaksanakan imunisasi tambahan untuk usia 12 sampai dengan 23 bulan, dengan kata lain semua balita telah mendapatkan imunisasi campak. Jika suatu daerah telah mencapai cakupan



imunisasi campak rutin 90 persen diharapkan daerah tersebut telah terbentuk lingkaran kekebalan terhadap campak, sehingga jika terdapat kasus campak tidak akan terjadi penularan yang meluas karena anak-anak tersebut telah memiliki kekebalan terhadap campak.

**a. Permasalahan dan Solusi**

**1) Permasalahan**

- a. Penemuan kasus balita gizi buruk dan kurang gizi baru setiap tahunnya
- b. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat membawa balita rutin ke Posyandu untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan balitanya
- c. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pemberian makanan bayi, Anak, ASI eksklusif dan MP-ASI
- d. Penemuan kekeliruan dalam penimbangan dan pengukuran balita serta pencatatan dan pelaporan data oleh kader atau TPG.
- e. Kurangnya tenaga ahli kebidanan (SpOG) dan ahli anak (SpA) serta sarana dan prasarana di Rumah Sakit Bintan sebagai tempat rujukan ibu hamil dengan resiko tinggi
- f. Tidak aktifnya Tim PONED yang sudah ada dikerenakan personil tim tidak lengkap
- g. Sarana dan prasarana Polindes yang tidak memadai sebagai tempat pertolongan persalinan dan pemasangan MKJP
- h. Masih terdapat dukun beranak aktif di Kabupaten Bintan
- i. Kurangnya kompetensi bidan desa dalam melakukan pelayanan kebidanan terutama bidan keluarga
- j. Rendahnya minat PUS untuk menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang
- k. Tidak adanya keluarga yang mendampingi Lansia untuk mengikuti kegiatan Posyandu setiap bulan
- l. Belum semua Puskesmas dan sekolah memiliki tenaga terlatih PKPR dan konselor sebaya

## **2) Solusi**

- a. Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan balita gizi buruk melalui pembinaan gizi secara terus menerus, pemberian PMT pemulihan dan perawatan khusus gizi buruk
- b. Memberikan dukungan sarana dan prasarana, pemahaman program dan pembinaan yang berkesinambungan kepada kader, masyarakat dan sector terkait
- c. Meningkatkan frekuensi dan jumlah sasaran penyuluhan tentang PMBA
- d. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan kader dan petugas dalam mendukung surveilans gizi agar tersedia data yang akurat
- e. Merencanakan pendidikan dan pelatihan PONED untuk melengkapi personil yang kosong
- f. Melakukan penyuluhan ke Pasangan Usia Subur (PUS)/Wanita Usia Subur (WUS) tentang KB tentang MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang)
- g. Meningkatkan pendekatan ke dukun beranak agar berkoordinasi dengan bidan setempat dalam menangani persalinan dan pasca persalinan
- h. Meningkatkan kompetensi bidan di desa melalui pelatihan penanganan persalinan dan seminar
- i. Memberikan informasi tentang kesehatan lansia bagi keluarga dan masyarakat dilingkungan lansia berada sehingga mampu mengenali dan mengatasi permasalahan kesehatan lansia
- j. Meningkatkan keterampilan tenaga kesehatan dan pembinaan bagi kader Posyandu Lansia untuk memantau dan menilai kemajuan lansia setiap bulan
- k. Melaksanakan pelatihan pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) bagi tenaga kesehatan di Puskesmas dan Konselor sebaya di setiap SMP dan SMA sederajat

#### **4) Program Pengendalian Penyakit**

##### **a. Pelaksanaan Program**

- (1) Kegiatan peningkatan surveilan epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.153.498.800,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.148.817.080,- atau 96,95%. Hasil kegiatan ini adalah terlaksananya surveilans epidemiologi dan penanggulangan KLB penyakit melalui penyelidikan epidemiologi < 24 jam, terlaksananya evaluasi EWARS (Early Warning Alert Response System), tersedianya operasional surveilan epidemiologi dan penanggulangan KLB.
- (2) Kegiatan peningkatan imunisasi dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 162.730.750; dengan realisasi sebesar Rp 156.940.160; atau 96.44%. Hasil kegiatan ini adalah terlaksananya imunisasi dasar lengkap melalui evaluasi program imunisasi meliputi koordinasi BIAS (Bulan Imunisasi Anak Sekolah), pendataan bayi dan balita, sosialisasi penggunaan dan perawatan cold chain.
- (3) Kegiatan Penanggulangan dan Pemberantasan Penyakit TBC dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.114.573.000; dengan realisasi sebesar Rp.108.228.195; atau 94.46%. Hasil kegiatan ini adalah terlaksananya penanganan kasus TB melalui pemeriksaan 5.755 slide, terlaksananya pertemuan SITT TB diikuti 18 peserta terdiri dari; 14 orang pengelola program TBC Puskesmas, 2 orang pengelola program TB RSUD Bintan dan Tanjung Uban serta 2 orang pengelola TB di Lapas. Selain itu juga terlaksananya workshop TB yang diikuti 10 peserta pengelola program TB yang belum mengikuti Pelatihan Fasyankes dengan narasumber dari Tim Peltih Provinsi yang telah mengikuti TOT Fasyankes. bahan medis (mantoux test) untuk kasus TB anak.

- (4) Kegiatan Penanggulangan dan Pemberantasan Penyakit DBD dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.155.298.000; dengan realisasi sebesar Rp.153.542.000; atau 98.87%. Hasil kegiatan ini adalah terlaksananya penyelidikan epidemiologi pada 404 kasus, terlaksananya fogging focus (pengasapan) di 404 titik, terlaksananya abatesasi secara berkala oleh para Juru Pemantau Jentik (Jumantik).
- (5) Kegiatan Penanggulangan dan Pemberantasan Penyakit Diare dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 56.796.895; dengan realisasi sebesar Rp 56.067.800; atau 98,72%. Hasil kegiatan ini adalah terlaksananya sosialisasi diare, terlaksananya evaluasi program penanggulangan dan pemberantasan penyakit diare diikuti 15 pengelola program Diare.
- (6) Kegiatan Penanggulangan dan Pemberantasan Penyakit Pneumonia dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.51.384.090; dengan realisasi sebesar Rp.42.618.050; atau 82.94%. Hasil kegiatan ini adalah terlaksananya sosialisasi penyakit pneumonia dan terlaksananya evaluasi program penanggulangan dan pemberantasan penyakit pneumonia diikuti 15 pengelola program pneumonia.
- (7) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Klinik Infeksi Menular Seksual (IMS) dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 146.854.350; dengan realisasi sebesar Rp 146.568.700; atau 99,81%. Hasil kegiatan ini adalah terlaksananya pelayanan kesehatan di klinik IMS maupun Layanan Komprehensif Berkesinambungan (LKB) dan mobile Voluntary Counselling and Testing (VCT).
- (8) Kegiatan Penanggulangan dan Pencegahan Penyakit Malaria dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.311.401.450; dengan realisasi sebesar Rp.306.952.550; atau 98,57%. Hasil kegiatan ini adalah terlaksananya Mass Fever Survey (MFS),

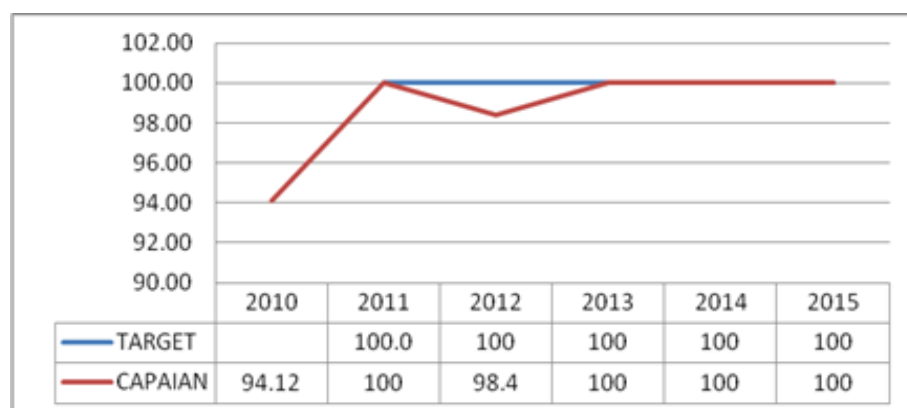
terlaksananya Mass Blood Survey (MBS), terlaksananya penyemprotan rumah dan larvaciding, tersedianya bahan kimia fcam untuk pencegahan penyakit malaria.

- (9) Kegiatan Partisipasi Komisi penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) dalam Upaya Penanggulangan HIV/AIDS dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.193.615.700; dengan realisasi sebesar Rp.188.528.7000; atau 97.37%. Hasil kegiatan ini adalah terlaksananya operasional KPAD, terlaksananya sosialisasi HIV AIDS bagi kelompok nelayan, terlaksananya sosialisasi HIV AIDS di daerah berisiko dan terlaksananya kampanye hari AIDS sedunia.
- (10) Kegiatan Penanggulangan Pemberantasan Penyakit Filariasis dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.74.572.000; dengan realisasi sebesar Rp.67.944.950; atau 91,11%. Hasil kegiatan ini adalah terlaksananya pemberian obat massal pencegahan (POMP) penyakit Filariasis bagi 77.805 jiwa dari 129.561 jiwa atau berkisar 60.05 persen di 10 kecamatan.

Dengan pencapaian indikator kinerja daerah sebagai berikut :

### **(1) Penyelidikan Epidemiologi Kurang Dari 24 Jam**

Grafik 4.27 : Penyelidikan Epidemiologi Kurang Dari 24 Jam



Sumber: Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit

Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah salah satu status yang diterapkan di Indonesia untuk mengklasifikasikan peristiwa

merebaknya suatu wabah penyakit. Status KLB diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 949/MENKES/SK/VII/2004, KLB dijelaskan sebagai timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Kriteria KLB mengacu pada Keputusan Dirjen P2PL No. 451/91, tentang Pedoman Penyelidikan dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa. Menurut Keputusan ini, suatu kejadian dinyatakan luar biasa jika ada unsur : timbulnya suatu penyakit menular yang sebelumnya tidak ada atau tidak dikenal; peningkatan kejadian penyakit/kematian terus-menerus selama 3 kurun waktu berturut-turut menurut jenis penyakitnya (jam, hari, minggu); peningkatan kejadian penyakit/kematian 2 kali lipat atau lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya (jam, hari, minggu, bulan, tahun); jumlah penderita baru dalam satu bulan menunjukkan kenaikan 2 kali lipat atau lebih bila dibandingkan dengan angka rata-rata perbulan dalam tahun sebelumnya.

Di wilayah Kabupaten Bintan pada tahun 2015 telah terjadi 3 (tiga) kali KLB dan telah dilakukan Penyelidikan Epidemiologi (PE) < 24 jam. Ada 2 (dua) jenis KLB yang terjadi yaitu keracunan makanan dan DBD. KLB keracunan makanan terjadi di Pesantren Madani Ceruk Ijuk Toapaya Selatan, sedangkan KLB DBD terjadi di Kecamatan Bintan Utara dan Kecamatan Teluk Sebong. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan sebagai berikut:

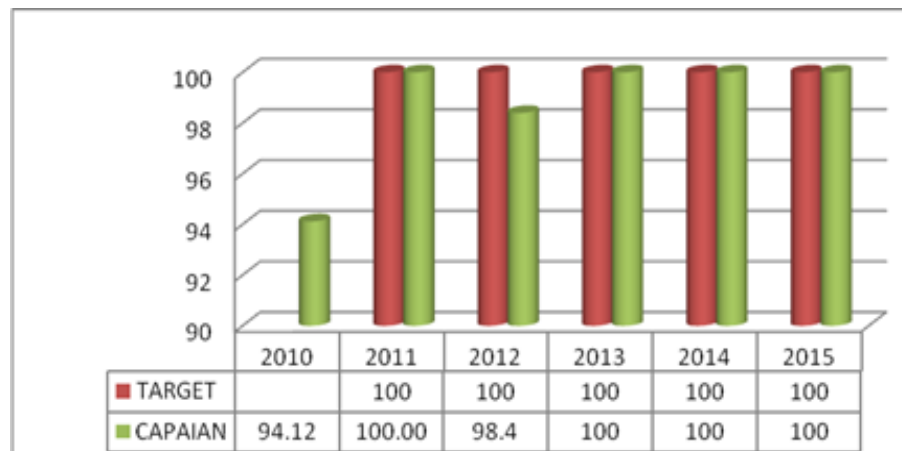
1. KLB Keracunan Pangan di wilayah kerja UPTD Puskesmas Toapaya (Pesantren Madani Ceruk Ijuk) dari tanggal 5 Februari 2015 sampai tanggal 6 Februari 2015 dengan jumlah orang yang keracunan sebanyak 44 orang.
2. KLB DBD di Kelurahan Tanjung Uban Kota, Tanjung Uban Selatan dan Tanjung Uban Utara Kecamatan Bintan Utara wilayah kerja Puskesmas Tanjung Uban kasus mulai meningkat pada minggu ke

28 tepatnya dipertengahan bulan Juli dan berakhir pada minggu ke 52 di bulan Desember dengan jumlah 102 kasus. Kasus DBD di Kecamatan Bintan Utara sampai dengan bulan Desember 2015 berjumlah 132 kasus dengan *incident rate* (IR) 5.9 per 1.000 penduduk yang artinya ada 6 orang yang menderita DBD diantara 1.000 penduduk Kecamatan Bintan Utara. Jumlah kematian akibat DBD di Kecamatan Bintan Utara sebanyak 1 orang yang bersal dari Kelurahan Tanjung Uban Kota dengan *Case Fatality Rate* (CFR) sebesar 0.7 yang artinya jumlah kematian akibat penyakit DBD di Kecamatan Bintan Utara sebanyak 7 kasus per 1.000 kasusDBD yang ditemukan.

3. KLB DBD di Kelurahan Kota Baru, Desa Seborg Lagoi, Desa Seborg Pereh dan Desa Sri Bintan KecamatanTeluk Seborg wilayah kerja Puskesmas Teluk Seborg dan Sri Bintan. Kasus mulai meningkat pada minggu ke 38 tepatnya di pertengahan bulan September dan berakhir pada minggu ke 52 bulan Desember, dengan jumlah kasus sebanyak 71 kasus. Kasus DBD di Kecamatan Teluk Seborg sampai dengan bulan Desember 2015 berjumlah 87 kasus dengan *Incident Rate* (IR) 4.9/1.000 penduduk yang artinya ada 5 orang yang menderita DBD diantara 1.000 penduduk Kecamatan Teluk Seborg. Jumlah kematian akibat DBD di Kecamatan Teluk seborg sebanyak 1 orang yang berasal dari Desa Sri Bintan dengan *Case Fatality Rate* (CFR) sebesar 1,1 yang artinya jumlah kematian akibat DBD di Kecamatan Teluk Seborg adalah 1 kasus per 1.000 kasus DBD positif yang ditemukan.

## (2) Persentase Desa Yang Mencapai UCI

Grafik 4.28 : Presentase Desa Mencapai UCI



Sumber: Seksi Pencegahan dan Pengamatan Penyakit

Kegiatan imunisasi dasar lengkap merupakan pemberian vaksin kepada bayi umur < 1 tahun yang meliputi BCG, Polio, DPT+HB dan Campak. Pemberian vaksin ini bertujuan untuk mencegah penyakit – penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) yaitu Difteria, Pertusis, Tetanus Neonatorum, Campak, Polio dan Hepatitis B. sebagai indikator keberhasilan program imunisasi di tingkat desa/kelurahan adalah jika imunisasi dasar lengkap telah mencapai 90% dari jumlah bayi yang ada atau disebut juga dengan Universal Child Immunization (UCI).

Di Kabupaten Bintan untuk tahun 2011, 2013, 2014 dan 2015 semua desa/kelurahan telah UCI, sedangkan di tahun 2012 ada 1 desa yaitu desa Mantang Besar yang belum UCI. Desa Mantang Besar pada tahun 2012 belum mencapai 90 persen cakupan imunisasi dasar lengkap sehingga desa ini belum UCI, dengan permasalahan adanya kesenjangan data estimasi dengan data riil sasaran dan ada juga balita yang telah diimunisasi akan tetapi belum tercatat oleh petugas kesehatan. Berdasarkan permasalahan ini pada tahun 2015 dinas kesehatan kabupaten Bintan beserta puskesmas yang ada di kabupaten bintan bekerja sama dengan kader-kader posyandu serta bidan desa untuk mencatat semua bayi by name dan by address yang

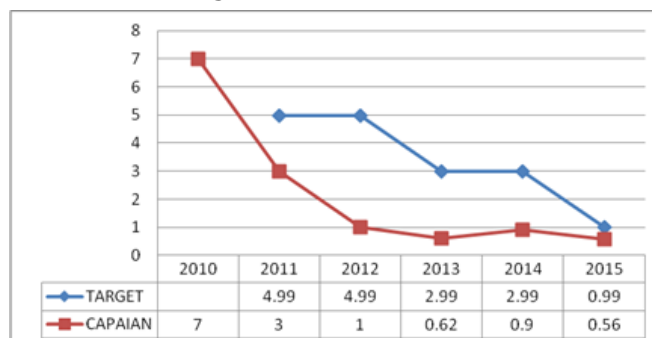


diimunisasi di wilayah kerjanya masing-masing, serta menggunakan data sasaran riil yang didapatkan dan disejalkan dengan data dari Bidang Kesehatan Keluarga khususnya Seksi Kesehatan Ibu dan Anak.

Usaha-usaha yang akan dilakukan kedepannya untuk mempertahankan semua desa/kelurahan tetap UCI sehingga tidak terulang kembali kejadian di tahun 2012 dimana tahun sebelumnya semua Desa/Kelurahan telah UCI. Tahun mendatang yakni tahun 2016 akan berusaha untuk meningkatkan dan mempertahankan cakupan imunisasi dasar lengkap lebih dari 90 persen. Adapun usaha-usaha yang direncanakan antara lain sweeping, pendataan bayi, sosialisasi pentingnya imunisasi dan PD3I, sosialisasi vaksin baru, menjaga logistic vaksin tetap lancar dan penggunaan vaksin yang efektif dan efisien serta tetap menjalin hubungan kerja sama yang baik antara kader, bidan desa, petugas kesehatan yang melaksanakan imunisasi dan bidang-bidang yang ada di dinas kesehatan Kabupaten Bintan.

### (3) Angka Penemuan Kasus Malaria Per 1.000 Penduduk (API)

Grafik 4.29 : Angka Penemuan Kasus Malaria Per 1.000 Penduduk (API)



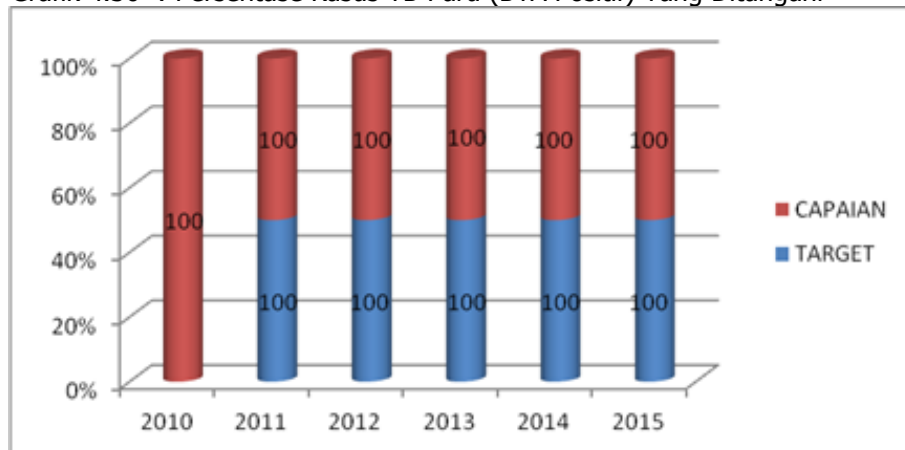
Sumber: Seksi Pengendalian Penyakit

Grafik di atas menunjukkan bahwa angka penemuan kasus malaria tahun 2015 sebesar 0.59‰ dengan jumlah kasus 89. Jumlah ini mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2014 yakni 0,9‰. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan kasus malaria, serta masih ditemukannya penularan setempat (indigenous). Namun angka

API Kabupaten Bintan sudah di bawah target Nasional (API <1‰). Beberapa upaya pengendalian telah dilakukan antara lain: 1) Meningkatkan akses layanan yang bermutu, 2) Penemuan dini dan pengobatan sesuai standar, 3) Pencegahan dan pengendalian vektor dan risiko secara terpadu, 4) Penguatan kemitraan, 5) Pemberdayaan dan kemandirian masyarakat, 6) Pemanfaatan informasi strategis untuk pengembangan program, 7) Penguatan promosi, advokasi dan mobilisasi sosial, 8) Mendorong komitmen pemerintah daerah dan Pusat.

#### (4) Persentase Kasus TB Paru (BTA Positif) Yang Ditangani

Grafik 4.30 : Persentase Kasus TB Paru (BTA Positif) Yang Ditangani



Sumber: Seksi Pengendalian Penyakit

Berdasarkan grafik diatas, jumlah penemuan kasus TB Paru BTA Positif di Kabupaten Bintan Tahun 2015 sebesar 100 kasus (160/100.000 penduduk). Jumlah penemuan ini menurun jika dibanding dengan tahun 2014 yaitu sebesar 126 kasus. Namun seluruh kasus TB Paru BTA Positif yang ditemukan 100% sudah dilakukan pengobatan sesuai dengan rekomendasi WHO yaitu menggunakan Obat Anti Tuberkulosis (OAT) dan setiap penderita diawasi/dipantau oleh seorang Pengawas Menelan Obat (PMO).

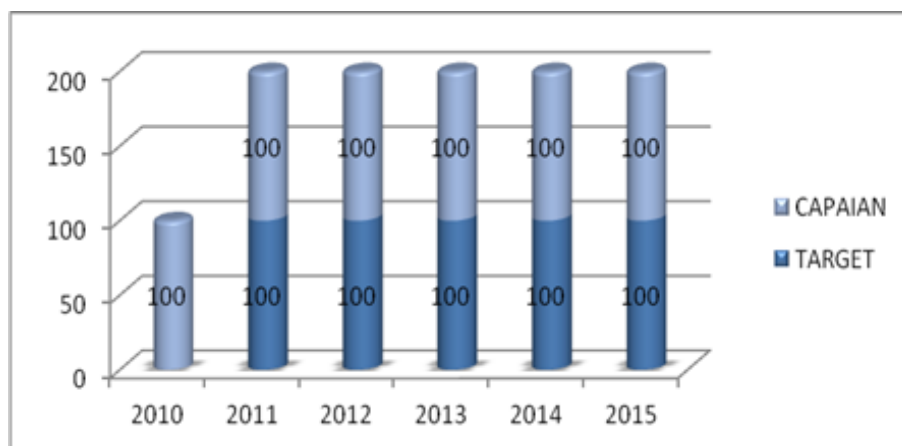
Terjadinya penurunan penemuan kasus TB Paru BTA Positif di Kabupaten Bintan disebabkan oleh penemuan yang telah dilakukan dengan maksimal melalui penjarangan suspek TB di dalam maupun

diliuar gedung, kontak serumah, serta tingginya tingkat kepatuhan penderita TB dalam menjalani pengobatan secara tuntas, sehingga dengan menelan obat secara teratur dan tuntas maka otomatis menurunkan penularan TB kepada masyarakat lainnya.

Adapun sebaran penemuan Kasus dari 100 kasus TB Paru BTA Positif yang ditemukan di Kabupaten Bintan, yaitu: UPTD Puskesmas Kijang 15 kasus, UPTD Puskesmas Sei Lekop 2 kasus, UPTD Puskesmas Toapaya 9 kasus, UPTD Puskesmas Kawal 5 kasus , UPTD Puskesmas Teluk Sebong 5 kasus, UPTD Puskesmas Sri Bintan 1 kasus, UPTD Puskesmas Berakit 1 kasus, UPTD Teluk Bintan 3 kasus, UPTD Puskesmas Kuala Sempang 2 kasus , UPTD Puskesmas Teluk Sasah 7 kasus , UPTD Puskesmas Tanjung Uban 5 kasus, UPTD Puskesmas Tambelan 3 kasus, RSUD Tanjung Uban Provinsi Kepri 10 kasus, dan RSUD Bintan 29 kasus

## (5) Persentase Kasus DBD Yang Ditangani

Grafik 4.31 : Persentase Kasus DBD Yang Ditangani



Sumber: Seksi Pengendalian Penyakit

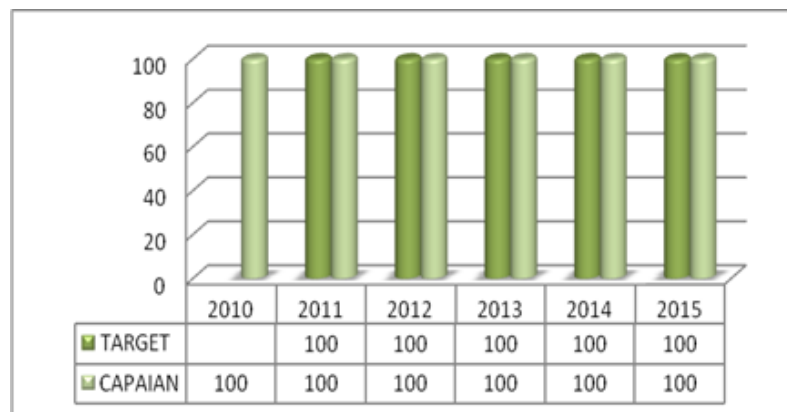
Tabel diatas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kasus pada tahun 2015 sebanyak 403 dari tahun sebelumnya yaitu 512 kasus DBD dengan 2 (dua) kematian. Peningkatan kasus tersebut disebabkan perubahan iklim dan perubahan perilaku masyarakat yang menampung air tanpa ditutup rapat sehingga menjadi wadah perindukan jentik nyamuk (vektor DBD). Keberadaan jentik *Aedes* di

suatu daerah merupakan indikator terdapatnya populasi nyamuk *Aedes* di daerah tersebut.

Untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian karena penyakit DBD telah dilakukan beberapa upaya pengendalian penyakit DBD, dimulai dengan Penyelidikan Epidemiologi (PE) setelah adanya laporan kasus dari Rumah Sakit/Puskesmas. Kemudian dilakukan pengasapan (*Fogging Focus*) dan abatesasi massal dengan radius  $\pm 100$  meter dari tempat tinggal kasus. Selain itu lebih mengoptimalkan kegiatan PSN dengan 3 M Plus secara serentak serta menjaga kebersihan lingkungan kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

## (6) Persentase Kasus Diare Yang Ditangani

Grafik 4.32 : Persentase Kasus Diare Yang Ditangani



Sumber: Seksi Pengendalian Penyakit

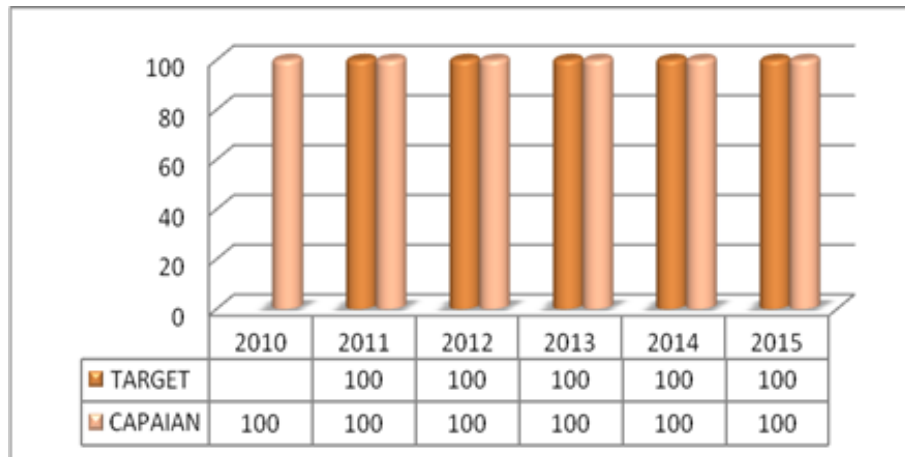
Persentase penanganan kasus diare di Kabupaten Bintan tahun 2015 yakni 100 persen artinya telah memenuhi target Kabupaten Bintan pada tahun 2015. Pada tahun 2014 jumlah kasus diare sebanyak 2.895 kasus dan pada tahun 2015 terjadi penurunan kasus menjadi 2.440 kasus.

Adapun prinsip tatalaksana diare yang tepat dan direkomendasikan oleh WHO-UNICEF dan dilaksanakan di setiap sarana pelayanan kesehatan sebagai berikut : (1) Pemberian oralit, (2) Pemberian obat zinc selama 10 hari, (3) Pemberian ASI dan

makanan sesuai umur, (4) Pemberian antibiotik selektif serta memberikan KIE kepada ibu/pengasuh.

## (7) Persentase Kasus Pneumoni Yang Ditangani

Grafik 4.33 : Persentase Kasus Pneumoni Yang Ditangani



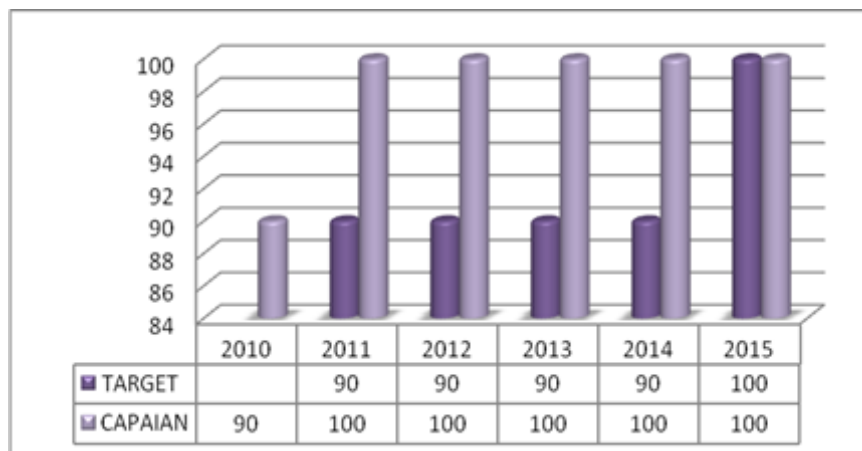
Sumber: Seksi Pengendalian Penyakit

Persentase penanganan kasus pneumonia telah mencapai target yakni 100%. Namun penemuan kasus pneumonia di Kabupaten Bintan tahun 2015 masih jauh dari target yaitu 2,6% artinya masih rendahnya penemuan kasus di Kabupaten Bintan khususnya di Sarana Pelayanan Kesehatan (Puskesmas, Pustu, Polindes/Poskesdes).

Penyebab rendahnya penemuan kasus disebabkan karena : (1) Perbedaan persepsi antara pengelola program dalam mengklasifikasikan pneumonia dengan dokter dalam menegakkan diagnosa pneumonia, (2) Kurangnya sarana untuk mendukung penemuan kasus ISPA, (4) Sumber data ISPA sebagian besar dari Puskesmas belum mencakup klinik, praktek, dan sarana kesehatan lain, (5) Pemberdayaan masyarakat belum optimal.

## (8) Persentase Pelayanan di Klinik IMS dan HIV/AIDS

Grafik 4.34 : Persentase Pelayanan di Klinik IMS dan HIV/AIDS



Sumber: Seksi Pengendalian Penyakit

Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan di klinik IMS di Kabupaten Bintan tahun 2015 dilaksanakan pada 2 (dua) klinik IMS yaitu Klinik IMS Sri Indah Batu 24 Toapaya dan Klinik IMS Sri Senyum Batu 79 Tanjung Uban serta 2 (dua) Layanan Komprehensif Berkesinambungan (LKB) yaitu LKB Puskesmas Toapaya, LKB Puskesmas Kijang.

Berdasarkan grafik diatas persentase capaian pelayanan diklinik IMS dan HIV/AIDS di Kabupaten Bintan sudah diatas target MDGs (90%) yaitu 100%. Dimana setiap orang yang berkunjung ke klinik IMS dan menderita penyakit IMS akan diberikan pengobatan sesuai standar yang berlaku. Pada tahun 2015 jumlah orang yang berkunjung ke klinik IMS untuk memeriksakan kesehatannya mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2014 yaitu dari 905 kunjungan menjadi 832 kunjungan. Dari 832 kunjungan yang berkunjung klinik IMS, 612 kunjungan dinyatakan positif menderita penyakit IMS.

Penurunan kunjungan di klinik IMS dan HIV/AIDS disebabkan adanya issue tentang penutupan lokalisasi sehingga banyak WPS pindah ke lokalisasi daerah lain. Selain itu masih tingginya stigma

negative masyarakat terhadap orang yang berkunjung ke klinik IMS maupun LKB.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Bintan, puskesmas terkait dan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah Bintan untuk meningkatkan kunjungan masyarakat baik yang beresiko rendah maupun tinggi antara lain: melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya memeriksakan kesehatan di klinik IMS, mendekatkan layanan IMS kepada masyarakat melalui Layanan Komprehensif Berkesinambungan (LKB) di puskesmas sehingga masyarakat mau berkunjung ke layanan tersebut guna memeriksakan kesehatannya.

### **(9) Prevalensi Malaria dan Angka Kematian**

Tabel 4.6 : Prevalensi Malaria dan Angka Kematian

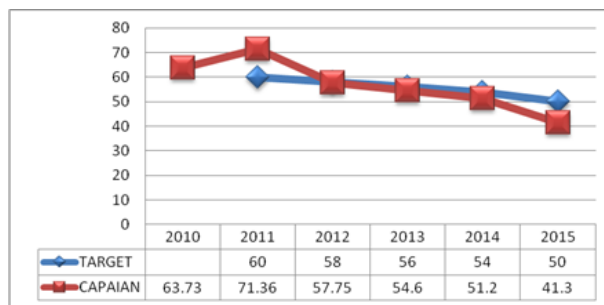
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TARGET		55/0	50/0	45/0	40/0	35/0
CAPAIAN	59.13/0	42/0	0.81/0	0.06/0	0.09/0	0.06/0

Sumber: Seksi Pengendalian Penyakit

Prevalensi malaria di Kabupaten Bintan tahun 2015 yaitu 0,06%, dengan angka kematian 0 jiwa. Bila dibandingkan dengan tahun 2014 prevalensi malaria terjadi penurunan yaitu 0,09% menjadi 0,06%. Penurunan kasus malaria pada tahun 2015 disebabkan karena adanya penurunan kasus malaria positif yakni dari 138 menjadi 89 dan penularan setempat (*indigenous*). Namun demikian angka kematian karena malaria masih tetap 0.

## (10) Angka Penemuan Kasus BTA Positif Baru

Grafik 4.35 : Angka Penemuan Kasus BTA Positif Baru



Sumber: Seksi Pengendalian Penyakit

Berdasarkan grafik diatas, angka penemuan penderita Tuberculosis BTA Positif Baru / Case Detection Rate (CDR) di Kabupaten Bintan tahun 2015 mengalami penurunan 9,9 persen dari tahun sebelumnya (2014) yaitu dari 51,2 persen menjadi 41.3 persen. Capaian penemuan penderita TBC BTA positif baru dibawah target RPJMD Kabupaten Bintan 2015 yaitu 50 persen dan target minimal nasional yaitu 70 persen.

Penurunan penemuan penderita TBC BTA positif baru kemungkinan kasus TBC yang ditemukan dan diobati secara tuntas melalui strategi DOTS dengan menggunakan OAT (rekomendasi WHO) dan terdapat 2 (dua) fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang belum memiliki tenaga analis.

Untuk meningkatkan angka penemuan kasus Tuberculosis BTA Positif Baru, berbagai upaya telah di lakukan, diantaranya : melakukan penjaringan suspek TB baik di dalam maupun di luar gedung, Meningkatkan jejaring internal tiap unit pelayanan kesehatan maupun jejaring eksternal antara UPK dengan melibatkan petugas pustu, polindes, kader, PKK, tokoh masyarakat, klinik swasta maupun DPS yang ada di wilayah Kabupaten Bintan, melakukan survey kontak serumah terhadap setiap penderita TB BTA Postif, pengembangan Kemitraan dan jejaring internal maupun jejaring eksternal, khususnya ke Lapas, Rumah Sakit Tanjung Uban dan Rumah Sakit Bintan melalui penandatanganan MoU/Nota Kesefahaman tentang penerapan



strategi DOTS di UPK tersebut, melakukan skrining TB pada setiap WBP baru, melakukan sosialisasi dan AKMS TB ke tingkat desa dengan melibatkan anggota TNI yang telah mendapatkan pelatihan sebagai kader TB, melakukan pemutaran film TB di desa.

#### **(11) Prevalensi Tuberkulosis Dan Angka Kematian Penderita Tuberkulosis Dengan Sebab Apapun Selama Pengobatan OAT Per 100.000 Penduduk**

Tabel 4.7 : Prevalensi Tuberkulosis Dan Angka Kematian Penderita Tuberkulosis Dengan Sebab Apapun Selama Pengobatan OAT Per 100.000 Penduduk

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>TARGET</b>		98.7/2.5	97.8/2.3	96.9/2.1	95.8/1.9	95.2/1.7
<b>CAPAIAN</b>	99.03/2.81	106.32/2.67	84.38/2.52	86.1/5.61	86.9/3.3	95/2.6

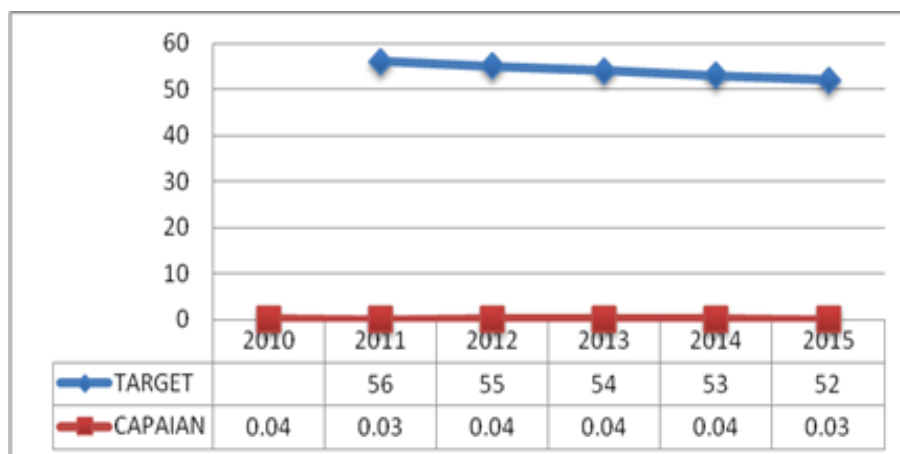
Sumber: Seksi Pengendalian Penyakit

Berdasarkan grafik diatas prevalensi tuberculosi dan angka kematian tuberculosi dengan sebab apapun selama pengobatan OAT per 100.000 penduduk di Kabupaten Bintan tahun 2015 (95 persen) meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2014 (86,9 persen). Namun capaian angka tersebut masih dibawah target MDGs Tahun 2015 (95,2 persen). Sedangkan angka kematian akibat penyakit Tuberculosis pada tahun 2015 (2,6 persen) mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2014 yang lalu yaitu 3,3 persen. Angka kematian ini melebihi target MDGs Tahun 2015 yaitu 1,7 persen. Dari 4 kasus kematian akibat penyakit Tuberculosis sebagian besar disebabkan oleh penderita merupakan pasien HIV- AIDS dengan ko-infeksi TB (2 orang) dan karena factor usia. Adapun kasus kematian ini ditemui di RSUD Tanjung Uban 1 orang, UPTD Puskesmas Teluk Sebong 1 orang, UPTD Puskesmas Teluk Bintan 1 orang dan UPTD Puskesmas Tanjung Uban 1 orang. Pada tahun 2015 CNR di Kabupaten Bintan mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 201 yang lalu yaitu dari 186 menjadi 162 kasus.

Untuk meningkatkan angka CNR dan menurunkan angka kematian, pada tahun 2015 berbagai upaya telah dilakukan diantaranya : Mendekatkan akses layanan pengobatan TB ke masyarakat dengan menempatkan OAT di unit pelayanan kesehatan yang dekat dengan domisili atau tempat tinggal pasien TB, Setiap pasien didampingi oleh Pengawas Menelan Obat (PMO) dimana PMO tersebut dipilih sendiri oleh pasien dan disetujui oleh petugas kesehatan, skrining HIV pada setiap suspek TB dengan melihat factor resiko, serta melakukan skrining TB pada semua pasien HIV tanpa melihat faktor resiko.

## (12) Prevalensi HIV/AIDS

Grafik 4.36 : Prevalensi HIV/AIDS



Sumber: Seksi Pengendalian Penyakit

Prevalensi HIV/AIDS pada tahun 2015 di Kabupaten Bintan yaitu 0,03%. Angka ini menurun dari angka prevalensi HIV/AIDS tahun 2014 yang lalu yaitu 0,04%. Angka prevalensi HIV/AIDS di Kabupaten Bintan tahun 2015 dibawah batas maksimal prevalensi HIV/AIDS Nasional yaitu 0,5% dengan demikian prevalensi HIV/AIDS tercapai.

Hasil temuan penderita HIV/AIDS di Kabupaten Bintan selama tahun 2014 yang tercatat di Klinik CST Edelwais RSUD Tanjung Uban dan Klinik CST Kemuning RSUD Tanjungpinang di temukan 24 kasus HIV, angka penemuan kasus ini menurun jika dibandingkan dengan penemuan kasus HIV tahun 2014 yang berjumlah 34 kasus HIV baru.

Adapun sebaran kasus HIV tahun 2015 di Kabupaten Bintan berdasarkan domisili penderita per Kecamatan yaitu 3 kasus di Kecamatan Bintan Pesisir, 5 kasus di Kecamatan Bintan Timur, 3 kasus di Kecamatan Bintan Utara, 2 kasus di Kecamatan Teluk Sebong, 3 kasus di Kecamatan Seri Kuala Lobam, 4 kasus di Kecamatan Gunung Kijang, dan 3 kasus di Kecamatan Toapaya.

Sedangkan hasil temuan penderita AIDS sebanyak 28 kasus. Angka penemuan kasus ini meningkat jika dibandingkan dengan penemuan kasus HIV tahun 2014 yang berjumlah 24 kasus AIDS baru dengan sebaran kasus berdasarkan domisili penderita, yaitu: 12 kasus di Kecamatan Bintan Timur, 5 kasus di Kecamatan Bintan Utara, 4 kasus di Kecamatan Gunung Kijang, 1 kasus di Kecamatan Mantang, 3 kasus di Kecamatan Seri Kuala Lobam, 1 kasus di Kecamatan Teluk Bintan, 1 kasus di Kecamatan Teluk Sebong dan 1 kasus di Kecamatan Toapaya. Sedangkan jumlah kematian yang di akibatkan oleh AIDS selama tahun 2015 adalah sebanyak 6 kasus. Seluruh kasus yang ditemukan telah dilakukan Voluntary Counseling dan Testing (VCT), dan setiap OHDA didampingi oleh Manejer Kasus (MK) sehingga memperoleh Care Supporting and Treatment (CST). Selain itu juga dalam penanganan ODHA dan OHIDA telah dilakukan kerjasama lintas program dan sektor termasuk LSM, KPA Bintan.

## **b. Permasalahan dan Solusi**

### **1)Permasalahan**

- a. Belum semuanya Puskesmas menggunakan *cold chain* vaksin yang standart sebagaimana di rekomendasikan oleh WHO yaitu buka atas
- b. Penetapan sasaran menggunakan data estimasi sehingga data sasaran cukup tinggi berbanding data sebenarnya (data riil)
- c. Pemborosan penggunaan salah satu antigen (vaksin) dalam kegiatan Posyandu

- d. Terdapat informasi yang masih keliru tentang DBD dan penanggulangannya
- e. Rendahnya pemahaman petugas di Puskesmas tentang tatalaksana diare
- f. Adanya perbedaan persepsi definisi operasional (DO) pneumoni di Puskesmas
- g. Perubahan iklim yang tidak terkendali dan mobilitas penduduk yang tinggi dari dan ke daerah endemis

## **2) Solusi**

- a. Penyediaan cold chain untuk Puskesmas sesuai dengan rekomendasi WHO yaitu buka atas
- b. Penggunaan data riil dalam menetapkan sasaran untuk meminimalkan kesenjangan data sasaran
- c. Permintaan vaksin dihitung sesuai kebutuhan (sasaran) Posyandu untuk menghindari pemborosan dalam penggunaan vaksin
- d. Mengintensifkan sosialisasi agar masyarakat mendapat informasi yang menyeluruh tentang DBD dan cara penanggulangannya
- e. Perlunya penyegaran bagi pengelola program diare di Puskesmas tentang tata laksana kasus diare
- f. Persamaan persepsi definisi operasional (DO) pneumoni dengan pihak-pihak terkait (dokter, pengelola program, petugas poli/ yang sudah dilatih MTBS) dalam rapat bulanan
- g. Perlu adanya pengawasan dan intervensi terhadap tempat yang berpotensi menjadi perindukan nyamuk malaria

## **5) Program Penyehatan Lingkungan**

### **a. Pelaksanaan Program**

- (1) Kegiatan peningkatan upaya penyehatan lingkungan dilaksanakan dengan alokasi Rp.69.057.835,- realisasi sebesar Rp.51.197.050,- atau 74,14%. Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah terselenggaranya pembinaan, pengawasan dan

pemeriksaan pada 786 Tempat Pengolahan Makanan/ Minuman (TPM), Tempat Tempat Umum (TTU). 638 Tempat Pengolahan Makanan/Minuman (TPM) diantaranya memenuhi persyaratan Hygiene Sanitasi Makanan Minuman (HSMM), yaitu; 162 buah rumah makan/restoran, 54 buah jasa boga, 38 buah depot air minum isi ulang, 384 buah makanan jajanan. Sedangkan 148 TPM dilakukan pembinaan secara rutin dari petugas puskesmas dan Dinas Kesehatan, terselenggaranya sosialisasi penjamah makanan dan minuman untuk Rumah Makan/ Restoran, jasa Boga dan Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Bintan Timur dan Kecamatan Bintan Utara dengan jumlah peserta masing-masing kecamatan 40 orang yang dilaksanakan selama 1 hari.

- (2) Kegiatan peningkatan dan pemantapan penyelenggaraan akselerasi desa sehat dilaksanakan dengan alokasi Rp.239.811.425,- realisasi sebesar Rp.233.871.531,- atau 97,52%. Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah terbangunnya sarana air minum berupa sumur gali sejumlah 18 (delapan belas) unit yang tersebar di 4 kelurahan dan 5 desa yaitu; Desa Tembeling 2 unit (Kecamatan Teluk Bintan), Kelurahan Kijang Kota 2 unit dan Kelurahan Sei Lekop 2 unit (Kecamatan Bintan Timur), Kelurahan Toapaya 2 unit (Kecamatan Toapaya), Kelurahan Kawal 2 unit (Kecamatan Gunung Kijang), (e) Desa Sebong Pereh 2 unit (Kecamatan Teluk Sebong), Desa Air Glubi 2 unit (Kecamatan Bintan Pesisir) serta Desa Kuala Sempang 2 unit dan Desa Teluk Sasah 2 unit (Kecamatan Seri Kuala Lobam).
- (3) Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan dengan alokasi Rp.74.562.950,- realisasi sebesar Rp.60.576.080,- atau sebesar 81,24%. Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah terselenggaranya gotong royong atau Gerakan Jum'at Bersih dalam rangka penanggulangan DBD, malaria dan chikungunya, tersedianya

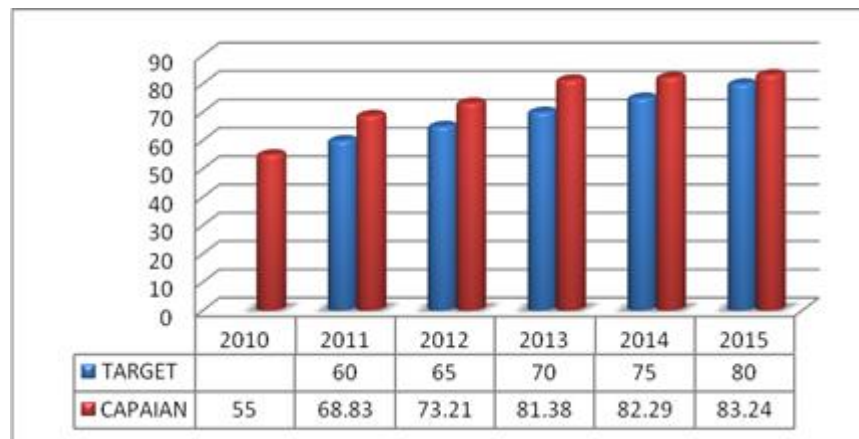
tempat sampah sebanyak 27 buah untuk seluruh Puskesmas di wilayah Kabupaten Bintan.

- (4) Kegiatan peningkatan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan dengan alokasi Rp.200.000.000,- realisasi sebesar Rp.117.871.440 atau sebesar 58,94%. Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah terselenggaranya pemicuan STBM dan telah terbangun sebanyak 400 unit jamban keluarga hasil swadaya masyarakat.

Dengan pencapaian indikator kinerja daerah sebagai berikut :

### (1) Persentase Rumah Sehat

Grafik 4.37 : Persentase Rumah Sehat



Sumber: Seksi Penyehatan Lingkungan

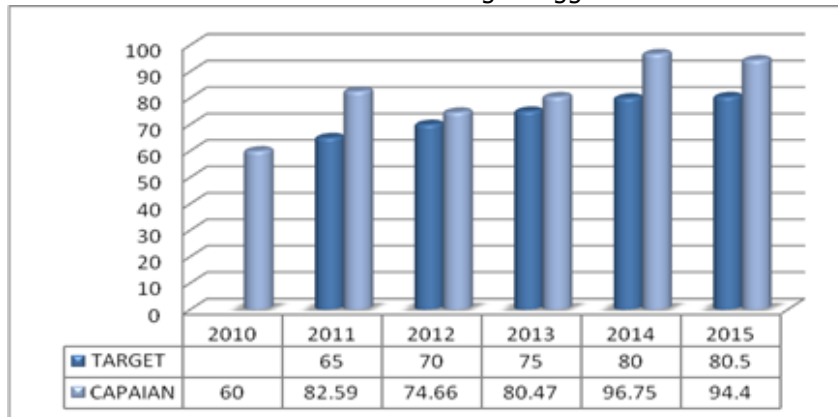
Berdasarkan hasil capaian rumah sehat Kabupaten Bintan tahun 2015 dari 39.820 RT terdapat 33.148 RT yang dinyatakan sehat atau sekitar 83.24 persen. sedangkan 6.672 rumah tangga masih dinyatakan belum memenuhi syarat rumah sehat, hal tersebut dikarenakan sebagian masyarakat Bintan tergolong miskin.

Kriteria penilaian rumah sehat meliputi ketersediaan sarana sanitasi dasar diantaranya kepemilikan jamban sehat, sumber air bersih/minum, saluran pembuangan air limbah dan tempat sampah serta dilihat dari segi bangunan seperti pencahayaan yang cukup, ventilasi, dan lantai bangunan. Seiring dengan status ekonomi masyarakat yang membaik dan bantuan Program RTLH terealisasi

dengan baik setiap tahunnya dan kesadaran masyarakat menggunakan/ menempati rumah yang sehat semakin tinggi.

## (2) Persentase Penduduk Yang Menggunakan Jamban Sehat

Grafik 4.38 : Persentase Penduduk Yang Menggunakan Jamban Sehat



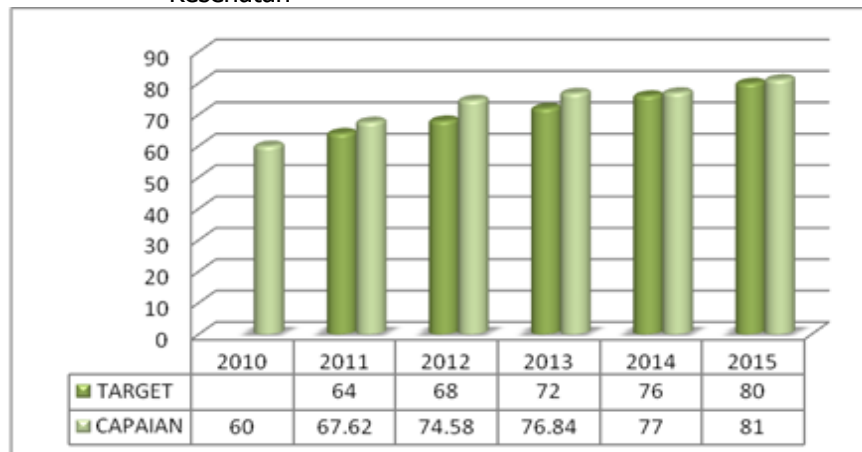
Sumber: Seksi Penyehatan Lingkungan

Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat Kabupaten Bintan tahun 2015 dari 39.820 RT terdapat 37.596 RT atau sekitar 94.4 persen. Sedangkan 2.224 rumah tangga belum menggunakan jamban sehat, hal tersebut dikarenakan sebagian masyarakat Bintan tinggal di daerah pesisir pantai dan perkebunan. Tingkat kesadaran masyarakat untuk menggunakan jamban sehat semakin tinggi, hal ini sejalan dengan dicanangkannya Program STBM di Kabupaten Bintan tahun 2011 yaitu Stop Buang Air Besar Sembarangan dan telah dilaksanakannya kegiatan pemucuan terhadap kelompok masyarakat/ komunitas oleh petugas dari Dinas Kesehatan beserta petugas sanitasi puskesmas di masing-masing wilayah kerjanya untuk merubah perilaku masyarakat yang masih buang air besar sembarangan menjadi buang air besar di jamban, serta ditunjang dengan adanya komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan bantuan peningkatan kualitas jamban bagi masyarakat yang telah berubah perilaku dan bersedia membangun jamban sederhana untuk ditingkatkan menjadi jamban sehat. Pada tahun 2015 telah terbangun 2.395 unit jamban hasil swadaya masyarakat

dan 18 desa/ kelurahan yang telah menjadi Desa/ Kelurahan ODF (Open Defecation Free). ODF bertujuan untu mengetahui keabsahan atas laporan yang telah disampaikan dan melakukan kunjungan lapangan oleh tim verifikasi (Permenkes 03, 2014)

### (3) Persentase Tempat Pengelolaan Makanan Yang Memenuhi Syarat Kesehatan

Grafik 4.39 : Persentase Tempat Pengelolaan Makanan Yang Memenuhi Syarat Kesehatan



Sumber: Seksi Penyehatan Lingkungan

Persentase tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat kesehatan Kabupaten Bintan tahun 2015 dari 786 TPM terdapat 638 TPM yang memenuhi syarat kesehatan atau sekiatar 81 persen. Bila dilihat dari tahun 2010-2014, persentase tempat pengelolaan makanan yang memenuhi persyaratan mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan tingkat kesadaran penanggung jawab dan pengelola rumah makan/restoran dan jasa boga semakin meningkat serta pembinaan secara berkala dilakukan Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan.

Pada tahun 2015, jumlah tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat kesehatan di Kabupaten Bintan sebanyak 638 buah, terdiri dari; 162 buah rumah makan/restoran, 54 buah jasa boga, 38 buah depot air minum isi ulang, 384 buah makanan jajanan. Sedangkan 148 tempat pengelolaan makanan tidak memenuhi syarat kesehatan karena sebagian besar TPM belum memiliki sarana sanitasi

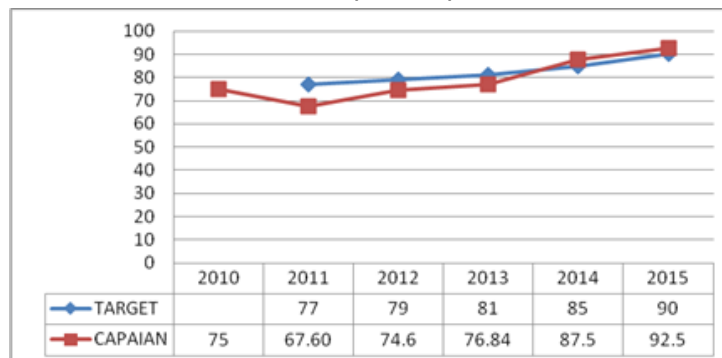


dasar layak, seperti; ketersediaan air bersih untuk cuci tangan, ketersediaan tempat sampah dan ketersediaan toilet/WC.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan persentase TPM yang memenuhi syarat kesehatan melalui pertemuan sosialisasi hygiene dan sanitasi bagi penanggungjawab dan penjamah makanan pada rumah makan/restoran, jasa boga dan depot air minum isi ulang.

#### (4) Persentase Tempat-tempat Umum Sehat

Grafik 4.40 : Persentase Tempat-tempat Umum Sehat



Sumber: Seksi Penyehatan Lingkungan

Persentase tempat-tempat umum sehat Kabupaten Bintan tahun 2015 dari 619 TTU yang di bina terdapat 573 TTU yang sehat atau sekitar 92,5 persen. Bila dilihat dari tahun 2010-2014, persentase tempat-tempat umum sehat mengalami peningkatan.

Peningkatan persentase TTU Sehat karena sebagian besar bangunan/TTU yang ada merupakan milik Pemerintah Daerah yang sudah memiliki sarana sanitasi dasar yang memadai dan memenuhi syarat, seperti: ketersediaan air bersih, jamban sehat dan tempat sampah. Hal ini menunjukkan bahwa target TTU Sehat sesuai RPJMD Kabupaten Bintan sebesar 85% sudah tercapai.

Pada tahun 2015 di Kabupaten Bintan terdapat 619 TTU yang dibina, terdiri dari; 58 unit sarana kesehatan, 124 unit sarana pendidikan, 295 unit sarana ibadah, 98 unit perkantoran dan 44 unit hotel/resort.

Pada umumnya permasalahan yang terdapat sarana dan fasilitas umum, yaitu; penyediaan air bersih, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) dan Sarana Pembuangan Air Limbah (SPAL).

Alternatif penyelesaiannya adalah peningkatan sarana dan fasilitas laboratorium kesehatan, seperti; penambahan alat *spectrophotometer* untuk pemeriksaan kualitas air minum yang lengkap yaitu pemeriksaan fisik, kimia, bakteriologi dan radioaktif serta bangunan khusus untuk laboratorium kesehatan lingkungan.

## (5) Persentase Penyakit Berbasis Lingkungan

Grafik 4.41 : Persentase Penyakit Berbasis Lingkungan



Sumber: Seksi Penyehatan Lingkungan

Persentase penyakit berbasis lingkungan tahun 2015 di bawah target RPJMD Kabupaten Bintan yaitu 16.8 persen, sedangkan target RPJMD 2015 sebesar 30 persen. Indikator persentase penyakit berbasis lingkungan merupakan indikator negatif, maka pencapaian indikator ini di nilai berhasil.

Penyakit-penyakit berbasis lingkungan merupakan penyakit yang dipengaruhi oleh interaksi manusia dengan lingkungannya, baik fisik, sanitasi maupun perubahan iklim, terdiri dari : 2.480 kasus Diare, 1 kasus Hepatitis A, 374 kasus demam dengue, 512 kasus DBD, 81 kasus Malaria, 12.435 kasus ISPA, 41 kasus Pneumoni, 162 kasus TB, 3 kasus Scabies dan 12 kasus *hand foot and mouth deasees (HFMD)*.

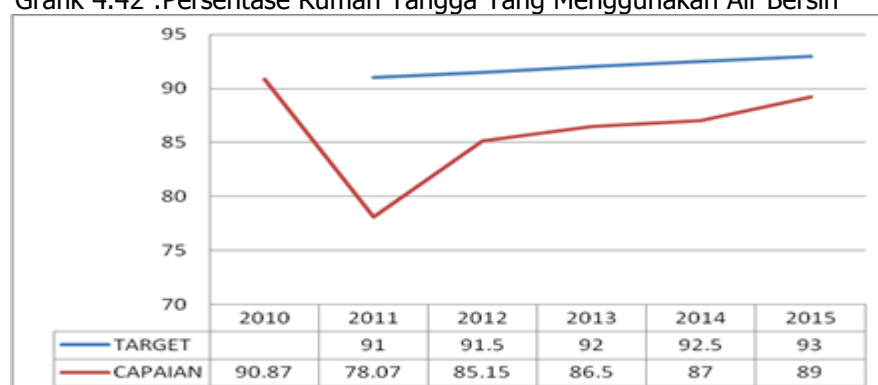
Keracunan makanan belum bisa ditangani sepenuhnya karena kesadaran masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat

(PHBS) kurang, terbatasnya laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan, sehingga bila ada peningkatan kasus sampel harus dirujuk ke BTKL Batam.

Upaya yang dilakukan adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia petugas sanitasi puskesmas baik melalui pelatihan maupun peningkatan pendidikan.

## (6) Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Air Bersih

Grafik 4.42 :Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Air Bersih



Sumber: Seksi Penyehatan Lingkungan

Jumlah penduduk yang menggunakan akses air bersih sebanyak 134.802 jiwa (89%) dari 151.123 jiwa. Jika dilihat dari tahun 2010-2014 terjadi peningkatan jumlah penduduk yang menggunakan air bersih, peningkatan ini dikarenakan kesadaran masyarakat untuk menggunakan air bersih/ minum tinggi dan sejalan dengan pelaksanaan program pembangunan sarana air bersih/minum terutama untuk daerah yang rawan air dan penyakit yang ditimbulkan oleh penggunaan air minum tinggi, melalui sumber pendanaan pembangunan air bersih/ minum yang berasal dari dana APBN dan APBD Kabupaten/Provinsi.

Pada tahun 2015 penduduk yang menggunakan akses air bersih berjumlah 134.802 jiwa yang terdiri dari 20.485 unit sarana sumur gali terlindung dengan jumlah pengguna 98.837 jiwa, 20 unit jaringan perpipaan (PDAM dan BP-SPAM) dengan pengguna 35.965 jiwa.

Namun pencapaian tersebut masih dibawah target RPJMD Kabupaten Bintan tahun 2015 yaitu 93 persen. Hal ini dikarenakan masih banyaknya RT yang menggunakan air bersih yang bersumber dari Sumur Gali (SGL) yang tidak memenuhi syarat kesehatan sesuai dengan Permenkes Nomor 461 Tahun 1990 Tentang Persyaratan Kualitas Air Bersih, antara lain: fisik meliputi warna, kekeruhan, bau, mikrobiologi meliputi coliform dan total coliform dan kimia meliputi kadar magnesium, besi, aluminium dan lain-lain.

**b. Permasalahan dan Solusi**

**1)Permasalahan**

- a. Masih banyaknya rumah penduduk yang masih berupa bangunan semi permanen yang dibangun di pesisir pantai dan tidak membuat sarana pembuangan limbah rumah tangga/ sarana sanitasi dasar, kurang tersedianya sarana air minum masyarakat yang memenuhi syarat kesehatan, serta tingkat kepadatan penghuni rumah.
- b. Masih adanya masyarakat yang berperilaku buang air besar sembarangan yaitu di kebun atau parit,dan pada umumnya masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai masih menggunakan jamban sederhana (cemplung) yang tidak memenuhi syarat kesehatan karena kotoran/ tinja langsung dibuang ke laut, seperti jamban di atas laut, jarak jamban dengan septictank dekat dengan sumber air minum, hal ini disebabkan oleh kesadaran masyarakat yang masih kurang untuk berperilaku hidup bersih dan sehat;
- c. Pada umumnya dapur pengolahan makanan tidak memenuhi syarat kesehatan
- d. Pemeriksaan kesehatan karyawan minimal 6 bulan sekali belum dilaksanakan
- e. Kondisi sanitasi yang masih kurang baik, seperti : masih terdapatnya sampah berserakan di beberapa TPM

- f. Masih adanya TPM yang belum memiliki sarana sanitasi dasar/ kurang memenuhi syarat kesehatan seperti ketersediaan Jamban Sehat dan Tempat Cuci Tangan
- g. Personal Hygiene yang masih kurang
- h. Penggunaan perlengkapan kerja saat mengolah makanan seperti : masker, celemek, penutup kepala, sarung tangan masih belum dilaksanakan
- i. Tempat-Tempat Umum (TTU) sehat sarana dan fasilitas sanitasi masih kurang, seperti :
  - o Penyediaan air bersih
  - o Tempat Pembuangan Sementara/ Tempat Sampah
  - o Sarana pembuangan Air Limbah (SPAL)
- j. Penyakit-penyakit berbasis lingkungan seperti : Diare, Hepatitis A, keracunan makanan belum bisa ditangani sepenuhnya karena kesadaran masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) kurang, terbatasnya laboratorium Dinas Kesehatan Kab. Bintan, sehingga bila ada peningkatan kasus sampel harus dirujuk ke BTKL Batam;
- k. Masih banyaknya rumah tangga yang menggunakan air bersih yang bersumber dari Sumur Gali (SGL) yang tidak memenuhi syarat kesehatan sesuai dengan Permenkes 461 tahun 1990 tentang Persyaratan Kualitas Air Bersih, diantara : SGL yang bercincin dan tidak terlindung, SGL yang dekat septictank dan pembuangan limbah rumah tangga;

## **2) Solusi**

- a. Pengusulan perencanaan dokumen UPL/UKL di APBD murni sehingga memberi keleluasaan kepada konsultan untuk menyiapkan dokumen ini
- b. Koordinasi intensif dengan instansi terkait tentang survey sejenis (Environment Health Risk Assesment/EHRA) dengan sasaran sanitasi dasar

## **6) Program Peningkatan Jangkauan Pelayanan Kesehatan**

### **a. Pelaksanaan Program**

- (1) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.758.900.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.697.803.100,- atau 96,53%. Hasil pelaksanaan kegiatan ini tersedianya sarana prasarana di 15 Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan berupa terlaksananya pekerjaan Perencanaan Rehab Pustu Bintan Buyu, Bekapur dan E Kang Anculai, Polindes Mantang Besar, Rumah Dinas Type 36 dan 45 beserta pelaksanaan dan pengawasannya, tersedianya mebel untuk 15 Puskesmas.
- (2) Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pelayanan Kesehatan Dasar merupakan kegiatan yang bersumber dari 2 jenis pendanaan yaitu APBN untuk kegiatan utama berupa dana transfer dari Pusat ke Kas Daerah dan APBD sebagai pendamping dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.741.300.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.607.008.350,- atau 95,10%. Hasil kegiatan ini adalah terlaksananya pekerjaan DED pembangunan IPAL di 6 Puskesmas, Pengadaan IPAL Puskesmas di Kawal, Sri Bintan, Teluk Bintan, Sei Lekop, Mantang dan Kelong.
- (3) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Sri Bintan dan Jaringannya dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.180.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.140.097.100,- atau 77.83%. Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya pelayanan kesehatan peserta JKN di wilayah kerja Puskesmas Sri Bintan dan jaringannya (Pustu/Polindes). Pembayaran jasa transaksi keuangan, honorarium insentif, penggandaan. Tersedianya alat tulis kantor,

obat-obatan, bahan kimia, bahan medis habis pakai, dan alat kedokteran umum.

- (4) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Peserta JKN di Puskesmas Berakit dan Jaringannya dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.91.800.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.68.074.003,- atau 74.15%. Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah pembayaran jasa transaksi keuangan, honorarium insentif petugas, cetak, penggandaan. Tersedianya alat tulis kantor, obat-obatan, bahan medis habis pakai dan terlaksananya pelayanan kesehatan untuk 2.000 jiwa peserta JKN di wilayah kerja Puskesmas Berakit dan Jaringannya (Pustu/Polindes).
- (5) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Peserta JKN di Puskesmas Mantang dan Jaringannya dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.115.384.921,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.77.387.000,- atau 67.07%. Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah pembayaran jasa transaksi keuangan, honorarium insentif petugas, cetak, penggandaan. Tersedianya alat tulis kantor, obat-obatan, bahan medis habis pakai dan terlaksananya pelayanan kesehatan untuk 1.467 jiwa peserta JKN di wilayah kerja Puskesmas Mantang dan Jaringannya (Pustu/Polindes).
- (6) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Peserta JKN di Puskesmas Kelong dan Jaringannya dengan alokasi anggaran sebesar Rp.287.646.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.189.977.476,- atau 66.05%. Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah pembayaran jasa transaksi keuangan, honorarium insentif petugas, cetak, penggandaan. Tersedianya alat tulis kantor, bahan bakar minyak, obat-obatan, bahan medis habis pakai dan terlaksananya pelayanan kesehatan untuk 2.374 jiwa peserta

JKN di wilayah kerja Puskesmas Kelong dan Jaringannya (Pustu/Polindes).

- (7) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Peserta JKN di Puskesmas Tambelan dan Jaringannya dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.302.202.928,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.253.842.650,- atau 84%. Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah pembayaran jasa transaksi keuangan, honorarium insentif petugas, cetak, penggandaan. Tersedianya alat tulis kantor, obat-obatan, bahan kimia, meubelair dan terlaksananya pelayanan kesehatan untuk 3.600 peserta JKN di wilayah kerja Puskesmas Tambelan dan Jaringannya (Pustu/Polindes).
- (8) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Peserta JKN di Puskesmas Toapaya dan Jaringannya dengan alokasi anggaran sebesar Rp.197.809.400,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.162.784.516,- atau 82.29%. Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah pembayaran jasa transaksi keuangan, honorarium insentif petugas, cetak, penggandaan. Tersedianya alat tulis kantor, tabung gas, obat-obatan, bahan kimia, bahan medis habis pakai dan terlaksananya pelayanan kesehatan untuk 2.396 jiwa peserta JKN di wilayah kerja Puskesmas Toapaya dan Jaringannya (Pustu/Polindes).
- (9) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Peserta JKN di Puskesmas Teluk Bintan dan Jaringannya dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.123.830.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.111.889.718,- atau 90.36%. Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah pembayaran jasa transaksi keuangan, honorarium insentif petugas, cetak, penggandaan. Tersedianya alat tulis kantor, obat-obatan, bahan medis habis pakai dan terlaksananya



- pelayanan kesehatan untuk 1.335 jiwa peserta JKN di wilayah kerja Puskesmas Teluk Bintan dan Jaringannya (Pustu/ Polindes).
- (10) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Peserta JKN di Puskesmas Sei. Lekop dan Jaringannya dengan alokasi anggaran sebesar Rp.231.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.195.300.443,- atau 84.55%. Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah pembayaran jasa transaksi keuangan, honorarium insentif petugas, cetak, penggandaan. Tersedianya alat tulis kantor, bahan medis habis pakai dan terlaksananya pelayanan kesehatan untuk 3.500 jiwa peserta JKN di wilayah kerja Puskesmas Sei. Lekop dan Jaringannya (Pustu/Polindes).
- (11) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Peserta JKN di Puskesmas Kuala Sempang dan Jaringannya dengan alokasi anggaran sebesar Rp.149.698.600,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.142.198.355,- atau 94.99%. Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah pembayaran jasa transaksi keuangan, honorarium insentif petugas, cetak, penggandaan. Tersedianya alat tulis kantor, bahan kimia, bahan medis habis pakai dan terlaksananya pelayanan kesehatan untuk 2.063 jiwa peserta JKN di wilayah kerja Puskesmas Kuala Sempang dan Jaringannya (Pustu/Polindes).
- (12) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Peserta JKN Non Kapitasi di Puskesmas Sri Bintan dan Jaringannya dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.12.550.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.4.800.000,- atau 28.92%. Kegiatan ini ditujukan bagi persalinan peserta JKN Non Kapitasi di Puskesmas Sri Bintan dan Jaringannya. Hasil kegiatan ini adalah pembayaran honorarium insentif petugas dan pendamping PNS dan Non PNS.
- (13) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Peserta JKN Non Kapitasi di Puskesmas Berakit dan Jaringannya dilaksanakan

dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- atau 0%. Kegiatan ini ditujukan bagi 35 persalinan peserta JKN Non Kapitasi di Puskesmas Berakit dan Jaringanya. Anggaran tidak dicairkan karena pada tahun 2015 semua Ibu bersalin di wilayah kerja Puskesmas Berakit dan Jaringanya merupakan peserta KBS dan dengan biaya mandiri.

- (14) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Peserta JKN Non Kapitasi di Puskesmas Mantang dan Jaringanya dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.200.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- atau 0%. Anggaran tidak dicairkan karena pada tahun 2015 semua Ibu bersalin di wilayah kerja Puskesmas Mantang dan Jaringanya merupakan peserta KBS dan dengan biaya mandiri.
- (15) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Peserta JKN Non Kapitasi di Puskesmas Kelong dan Jaringanya dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.52.200.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- atau 0%. Anggaran tidak dicairkan karena pada tahun 2015 semua Ibu bersalin di wilayah kerja Puskesmas Kelong dan Jaringanya merupakan peserta KBS dan dengan biaya mandiri.
- (16) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Peserta JKN Non Kapitasi di Puskesmas Tambelan dan Jaringanya dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.108.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.37.174.000,- atau 34.42%. Kegiatan ini ditujukan bagi 63 persalinan peserta JKN Non Kapitasi di Puskesmas Tambelan dan Jaringanya. Hasil kegiatan ini adalah tersedianya bahan bakar minyak dan meubelair.
- (17) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Peserta JKN Non Kapitasi di Puskesmas Toapaya dan Jaringanya dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.9.750.000,- dengan

realisasi anggaran sebesar Rp.6.800.000,- atau 69.74%. kegiatan ini ditujukan bagi 15 persalinan peserta JKN Non Kapitasi di Puskesmas Toapaya. Hasil kegiatan ini adalah pembayaran honorarium insentif petugas.

- (18) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Peserta JKN Non Kapitasi di Puskesmas Teluk Bintan dan Jaringannya dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.9.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- atau 0%. Anggaran tidak dicairkan karena pada tahun 2015 semua Ibu bersalin di wilayah kerja Puskesmas Teluk Bintan dan Jaringannya merupakan peserta KBS dan dengan biaya mandiri.
- (19) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Peserta JKN Non Kapitasi di Puskesmas Sei. Lekop dan Jaringannya dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.14.400.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- atau 0%. Lekop dan Jaringannya. Anggaran tidak dicairkan karena pada tahun 2015 semua Ibu bersalin di wilayah kerja Puskesmas Sei. Lekop dan Jaringannya merupakan peserta KBS dan dengan biaya mandiri.
- (20) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Peserta JKN Non Kapitasi di Puskesmas Kuala Sempang dan Jaringannya dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.10.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- atau 0%. Anggaran tidak dicairkan karena pada tahun 2015 semua Ibu bersalin di wilayah kerja Puskesmas Kuala Sempang dan Jaringannya merupakan peserta KBS dan dengan biaya mandiri.
- (21) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan di BLUD Unit Kerja Puskesmas Kawal dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.362.058.194,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.352.045.691,- atau 97.23%. Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya obat-obatan, bahan kimia, bahan medis habis pakai dan terlaksananya bimbingan teknis Penyusunan Laporan

Keuangan BLUD berbasis Standar Akutansi Pemerintah (SAP) dan Standar Akutansi Keuangan (SAK).

- (22) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan di BLUD Unit Kerja Puskesmas Teluk Sasah dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.405.302.798,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.372.426.021,- atau 91.89%. Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah pemberian jasa pelayanan untuk pns dan non pns. Tersedianya meubelair, alat tulis kantor, cetak dan penggandaan, terlaksananya operasional BLUD, tersedianya obat-obatan, bahan kimia, bahan medis, 1 unit personal computer, meja kerja pejabat , alat kedokteran umum, alat kedokteran gig dan terlaksananya 1 kegiatan bimbingan teknis Penyusunan Laporan Keuangan BLUD berbasis Standar Akutansi Pemerintah (SAP) dan Standar Akutansi Keuangan (SAK).
- (23) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan di BLUD Unit Kerja Puskesmas Kijang dengan alokasi anggaran sebesar Rp.969.036.982,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.687.406.007,- atau 70,94%. Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah pemberian jasa pelayanan untuk pns dan non pns. Tersedianya meubelair, alat tulis kantor, cetak dan penggandaan, terlaksananya operasional BLUD dan terlaksananya 1 kegiatan bimbingan teknis Penyusunan Laporan Keuangan BLUD berbasis Standar Akutansi Pemerintah (SAP) dan Standar Akutansi Keuangan (SAK).
- (24) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan di BLUD Unit Kerja Puskesmas Tanjung Uban dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.859.890.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.687.289.843,- atau 79.93%. Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah pemberian jasa transaksi keuangan, panitia pelaksanaan kegiatan dan uang transportasi PNS. Pembayaran listrik, telepon, surat kabar, internet, cetak dan penggandaan. Tersedianya obat-

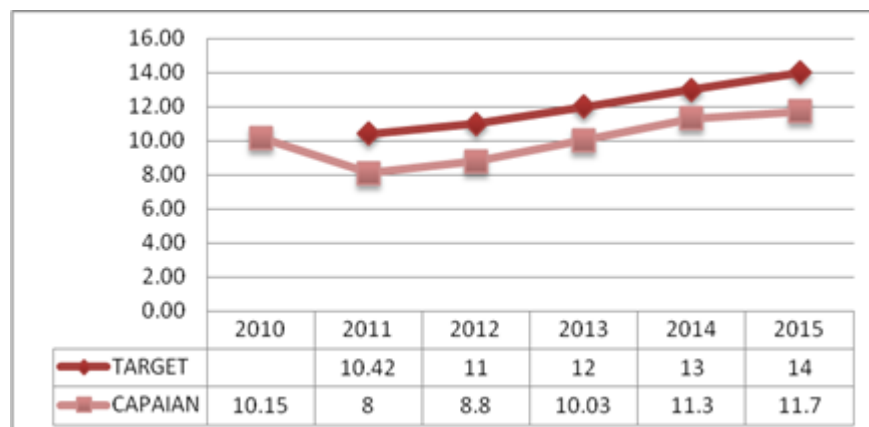
obatan, bahan kimia, bahan medis, alat tulis kantor, lemari, air conditioner, personal computer, operasional BLUD dan 1 bimbingan teknis tentang Penyusunan Laporan Keuangan BLUD berbasis Standar Akutansi Pemerintah (SAP) dan Standar Akutansi Keuangan (SAK).

- (25) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan dasar di PPK-BLUD Unit Kerja Puskesmas Teluk Sebung dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.663.820.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.564.367.633,- atau 85.02%. Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah pemberian jasa transaksi keuangan, panitia pelaksanan kegiatan dan uang transportasi PNS. Pembayaran listrik, telepon, surat kabar, internet, cetak dan penggandaan, service, perawatan gedung kantor. Tersedianya obat-obatan, bahan kimia, bahan medis, alat tulis kantor, lemari, *air conditioner*, personal komputer dan operasional BLUD.

Dengan pencapaian indikator kinerja daerah sebagai berikut :

### (1) Rasio Posyandu Per 1.000 Balita

Grafik 4.43 :Rasio Posyandu Per 1.000 Balita



Sumber: Seksi Gizi Masyarakat

Posyandu merupakan lembaga kemasyarakatan sebagai wadah yang mampu memberikan pelayanan kesehatan dan sosial dasar masyarakat. Posyandu aktif di Kabupaten Bintan tahun 2015 adalah 162 buah. Jika dibandingkan dengan jumlah

balita yang ada di Kabupaten Bintan 11.549 dengan rata-rata rasio jumlah Posyandu per 1.000 balita sudah diatas standar Nasional yaitu 11,7. Belum tercapainya rasio Posyandu per 1.000 balita karena belum dimanfaatkan secara maksimal fungsi Pokbang dan perencanaan pembangunan Posyandu di tahun berikutnya. Upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan fungsi Pokbang menjadi Posyandu dan pembangunan Posyandu yang direncanakan pada tahun 2015 dan 2016.

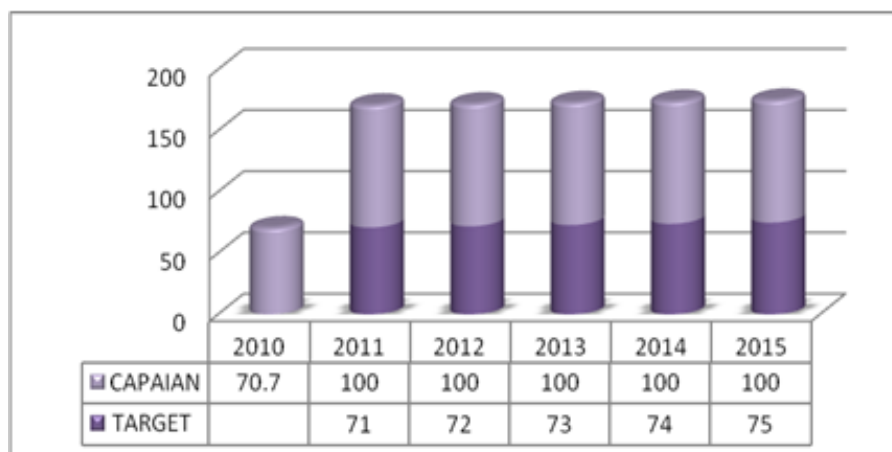
Untuk rasio Posyandu per Puskesmas bervariasi. Rasio Posyandu yang tertinggi adalah di UPTD Puskesmas Sri Bintan sebesar 30 per 1.000 balita dan terendah di UPTD Puskesmas Teluk Sasah sebesar 5,7 per 1.000 balita.

Perkembangan jumlah Posyandu di kabupaten Bintan empat tahun terakhir cukup tinggi yaitu 140 Posyandu pada tahun 2010, 146 Posyandu tahun 2011, 150 Posyandu tahun 2012, 153 Posyandu tahun 2013, 158 Posyandu tahun 2014 dan di tahun 2015 menjadi 162. Meningkatnya jumlah posyandu didukung juga dengan adanya bantuan pembangunan posyandu baru melalui dana APBD dan DAK anggaran pengentasan kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau. Hampir seluruh Posyandu di Kabupaten Bintan telah memiliki bangunan permanen.

Dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten terhadap program Posyandu cukup tinggi antara lain untuk ketersediaan logistik posyandu, biaya operasional posyandu, honor kader posyandu serta peningkatan kinerja kader posyandu melalui workshop kader serta pembinaan rutin. Kegiatan pada sebagian posyandu juga telah berintegrasi dengan berbagai program dan pelayanan sosial dasar lainnya seperti pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, PHBS, kesehatan usia lanjut (Posyandu lansia), Bina Keluarga Balita dan Pos PAUD, percepatan penganeekaragaman pangan.

## (2) Persentase Posyandu Aktif

Grafik 4.44 :Persentase Posyandu Aktif

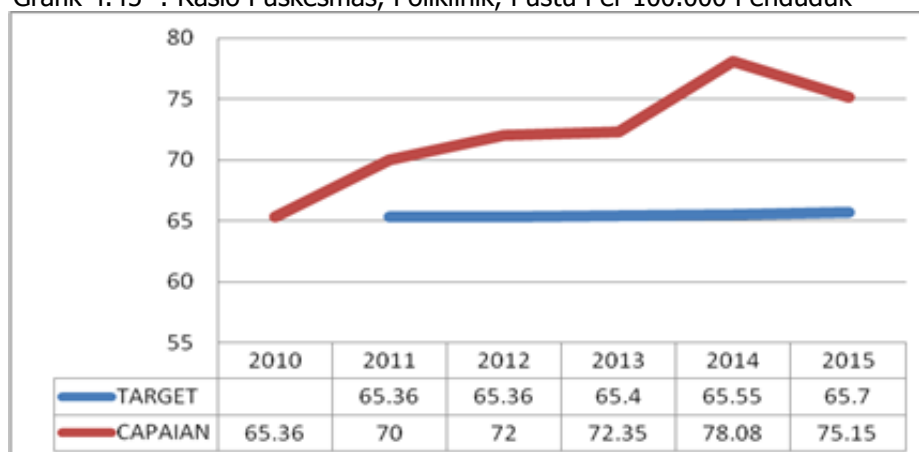


Sumber: Seksi Gizi Masyarakat

Dari 162 Posyandu yang ada di Kabupaten Bintan tahun 2015 semuanya aktif sesuai dengan fungsinya setiap bulan dan tetap dalam pengawasan Puskesmas setempat, dengan rincian sebagai berikut: Posyandu Purnama sebanyak 90.12 persen, Posyandu Mandiri sebanyak 9.87 persen (16 Posyandu) dan tidak ada lagi Posyandu dengan strata Pertama dan Madya.

## (3) Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per 100.000 Penduduk

Grafik 4.45 : Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per 100.000 Penduduk



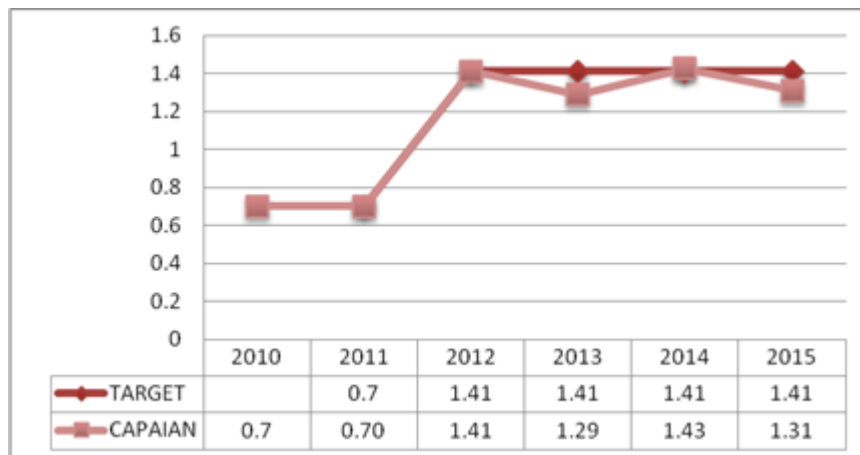
Sumber: Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan

Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Kabupaten Bintan per 100.000 penduduk tahun 2015 sebesar 75.15, nilai rasio tersebut telah melampaui target tahun 2015 yaitu 65.7, jika dibandingkan dengan angka rasio tahun 2014 terjadi penurunan angka rasio yaitu 78.08

persen. Menurunnya angka rasio tersebut disebabkan penambahan 1 (satu) UPTD Puskesmas di tahun 2015 yaitu UPTD Puskesmas Numbing. Jumlah keseluruhan fasilitas pelayanan primer (Puskesmas, Poliklinik, Pustu dan Polindes/Poskesdes) sebanyak 115 unit dengan jumlah penduduk yang mengalami peningkatan dari 151.123 jiwa tahun 2014 menjadi 153.020 jiwa di tahun 2015.

#### (4) Rasio Rumah Sakit Per 100.000 Penduduk

Grafik 4.46 : Rasio Rumah Sakit Per 100.000 Penduduk



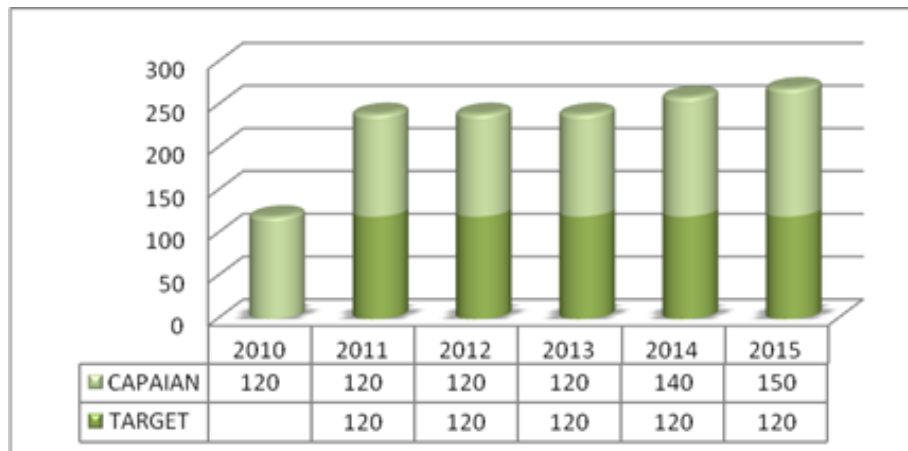
Sumber: Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan

Rasio Rumah Sakit per 100.000 penduduk tahun 2015 sebesar 1.31, nilai tersebut dibawah target rasio tahun 2015 yaitu sebesar 1.41. Jumlah Rumah Sakit di Kabupaten Bintan tahun 201 tetap sama dengan jumlah di tahun 2014 yaitu 2 (dua) Rumah Sakit dengan jumlah penduduk 153.020 jiwa (BPS, 2015). Angka rasio tersebut merupakan perbandingan dari jumlah Rumah Sakit yang ada di wilayah Kabupaten Bintan dengan jumlah penduduk di kali 100.000.



## (5) Cakupan Puskesmas

Grafik 4.47 : Cakupan Puskesmas



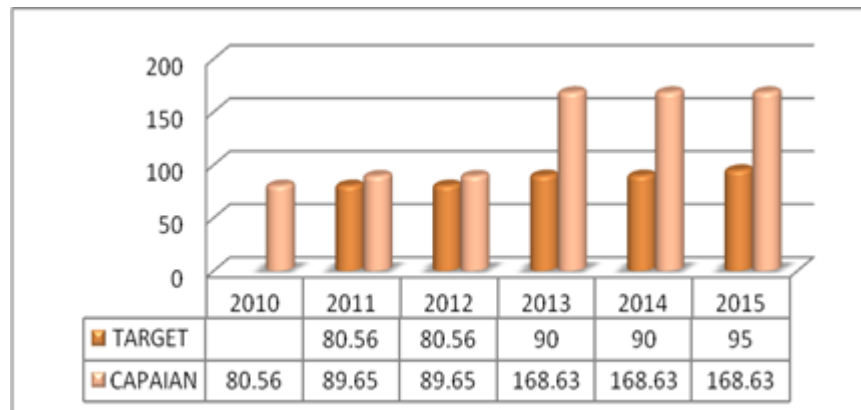
Sumber: Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan

Cakupan Puskesmas di Kabupaten Bintan tahun 2015 sebesar 150 persen, angka tersebut telah melampaui target tahun 2015 yaitu sebesar 120 persen.

Cakupan Puskesmas merupakan perbandingan jumlah Puskesmas dengan jumlah Kecamatan yang ada di Kabupaten Bintan. Tahun 2015, UPTD Puskesmas berjumlah 15 unit dalam 10 Kecamatan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap Kecamatan di Kabupaten Bintan sudah memiliki Puskesmas, bahkan ada Kecamatan yang memiliki lebih dari 1 Puskesmas seperti; (1) Kecamatan Teluk Sebong memiliki 3 Puskesmas yaitu: UPTD Puskesmas Teluk Sebong, UPTD Puskesmas Sri Bintan dan UPTD Puskesmas Berakit, (2) Kecamatan Bintan Timur yaitu; UPTD Puskesmas Kijang dan UPTD Puskesmas Sei Lekop, (3) Kecamatan Bintan Pesisir yaitu UPTD Puskesmas Kelong dan UPTD Puskesmas Numbing serta (4) Ada UPTD Puskesmas yang memiliki wilayah kerjanya di 2 Kecamatan yakni UPTD Puskesmas Kuala Sempang yakni Kecamatan Seri Kuala Lobam dan Kecamatan Teluk Bintan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akses pelayanan kesehatan di Kabupaten Bintan sangat baik.

## (6) Cakupan Pembantu Puskesmas

Grafik 4.48 : Cakupan Pembantu Puskesmas



Sumber: Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan

Cakupan Pembantu Puskesmas meliputi Pustu dan Polindes/Poskesdes yang merupakan jejaring dari Puskesmas. Tahun 2015, cakupan pembantu Puskesmas sebesar 168.63 persen, angka tersebut jauh melampaui target tahun 2015 yaitu sebesar 95 persen. Cakupan Pembantu Puskesmas adalah perbandingan jumlah Pustu dan Polindes/Poskesdes yaitu sebanyak 86 unit berbanding dengan jumlah Desa/Kelurahan yang ada di Kabupaten Bintan yakni 51 Desa/Kelurahan. Jumlah Puskesmas Pembantu tidak mengalami penambahan (28 unit) begitu juga dengan jumlah Polindes/Poskesdes yakni 58 unit. Dapat disimpulkan bahwa di setiap Desa/Kelurahan di Kabupaten Bintan telah memiliki Pustu, Polindes/Poskesdes, bahkan ada di beberapa Desa/Kelurahan memiliki 2 unit fasilitas pelayanan kesehatan sekaligus yakni Pustu dan Polindes/Poskesdes.

### b. Permasalahan dan Solusi

Belum adanya peraturan daerah tentang mekanisme pencairan dana operasional JKN. Solusinya adalah menyusun peraturan daerah tentang mekanisme pencairan dana operasional JKN.

## 7) Program Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Bagi Masyarakat Miskin

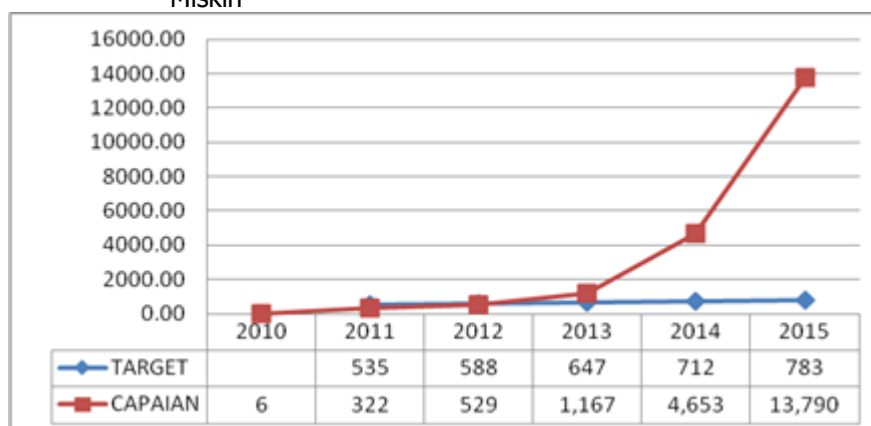
### a. Pelaksanaan Program

Kegiatan Peningkatan Pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat miskin dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran Rp.13.351.099.000,- realisasi Rp.11.031.080.459,- atau 82,62%. Hasil kegiatan ini adalah terpenuhinya cakupan pelayanan Kesehatan Rujukan bagi pasien masyarakat miskin Kabupaten Bintan tahun 2015 sebesar 3.530 kunjungan dengan rincian : RSUD Tanjungpinang 526 kunjungan, RSUD Bintan 604 kunjungan, RSAL dr. Midiyato Tanjungpinang 452 kunjungan, RSUP Provinsi Kepri 1.258 kunjungan, RSUP Busung Provinsi Kepri 593 kunjungan, RSOB Badan Pengawasan Batam 17 kunjungan, RSCM Jakarta 23 kunjungan, RS Jantung Harapan Kita Jakarta 5 kunjungan, RS Jiwa Tampan Pekanbaru 8 kunjungan, RS Kanker Dharmais Jakarta 13 kunjungan, RS Abdul Aziz Singkawang 20 kunjungan, RSUD Embung Fatimah Batam 11 kunjungan. Selain itu terwujudnya koordinasi antara pemerintah daerah Kabupaten Bintan dengan rumah sakit rujukan di dalam maupun di luar Kabupaten Bintan.

Dengan capaian indikator pembangunan daerah sebagai berikut:

### (1) Jumlah Pelayanan Kesehatan Dasar Dan Rujukan Bagi Masyarakat Miskin

Grafik 4.49 : Jumlah Pelayanan Kesehatan Dasar Dan Rujukan Bagi Masyarakat Miskin



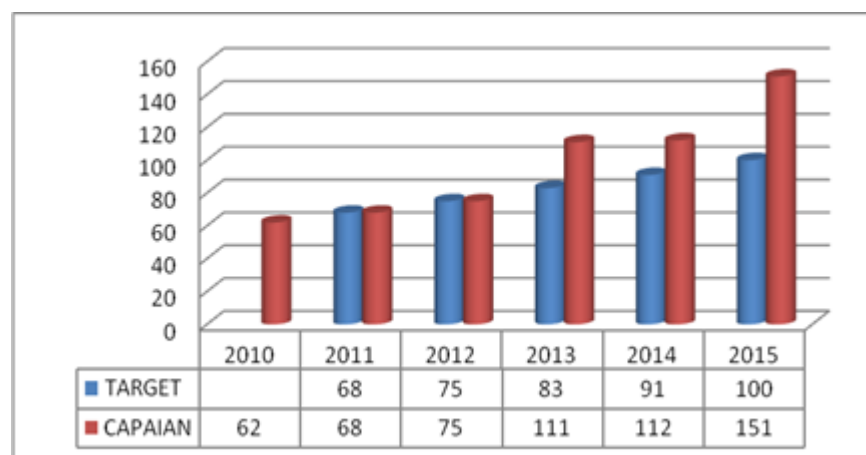
Sumber: Seksi Jaminan Kesehatan Masyarakat

Jumlah pelayanan Kesehatan Dasar dan rujukan bagi masyarakat miskin Kabupaten Bintan tahun 2015 sebesar 13.790 kunjungan dengan rincian pelayanan menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) sebesar 4.777 kunjungan dan yang menggunakan Kartu Bintan Sejahtera (KBS) sebesar 9.013 kunjungan, bila dibandingkan tahun sebelumnya terjadi peningkatan sebanyak 9.137 kunjungan dari 4.653 kunjungan (2014). Hal ini disebabkan karena pencatatan tahun sebelumnya hanya menghitung pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat miskin.

Berdasarkan jumlah pelayanan rujukan tahun 2015 dibanding tahun sebelumnya yaitu 4.653 menjadi 3.423 dikarenakan oleh program pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kabupaten Bintan sebagian telah diintegrasikan ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan sebanyak 1.140 jiwa sebagai peserta PBI APBD abupaten Bintan.

## (2) Jumlah Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Usia Lanjut (USILA)

Grafik 4.50 : Jumlah Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Usia Lanjut (USILA)



Sumber: Seksi Jaminan Kesehatan Masyarakat

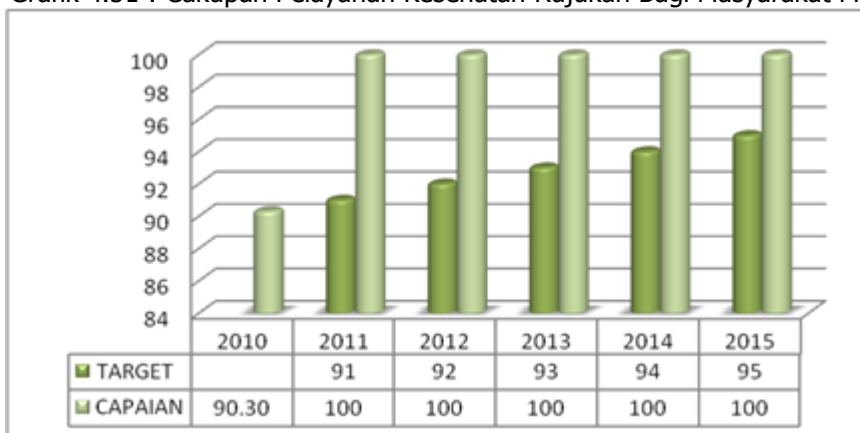
Jumlah pelayanan kesehatan rujukan bagi Usia Lanjut Kabupaten Bintan tahun 2015 sebanyak 151 unit, bila dibandingkan tahun sebelumnya terjadi peningkatan sebanyak 39 unit yaitu dari 112 unit pada tahun 2014, hal ini disebabkan bertambahnya MoU dengan

fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut (rujukan) di luar Kabupaten Bintan dan meningkatnya Umur Harapan Hidup serta meningkatnya kepedulian masyarakat usila terhadap kesehatan.

Cakupan pelayanan Kesehatan Rujukan bagi pasien masyarakat miskin Kabupaten Bintan tahun 2015 sebesar 3.530 kunjungan dengan rincian : RSUD Tanjungpinang 526 kunjungan, RSUD Bintan 604 kunjungan, RSAL Midiyato Tanjungpinang 452 kunjungan, RSUP Tanjungpinang 1.258 kunjungan, RSUP Tanjung Uban 593 kunjungan, RSOB Badan Pengawasan Batam 17 kunjungan, RSCM Jakarta 23 kunjungan, RS Jantung Harapan Kita Jakarta 5 kunjungan, RS Jiwa Tampan Pekanbaru 8 kunjungan, RS Kanker Dharmais Jakarta 13 kunjungan, RS Abdul Aziz Singkawang 20 kunjungan , RS Embung Fatimah Batam 11 kunjungan.

### (3) Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Masyarakat Miskin

Grafik 4.51 : Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Masyarakat Miskin

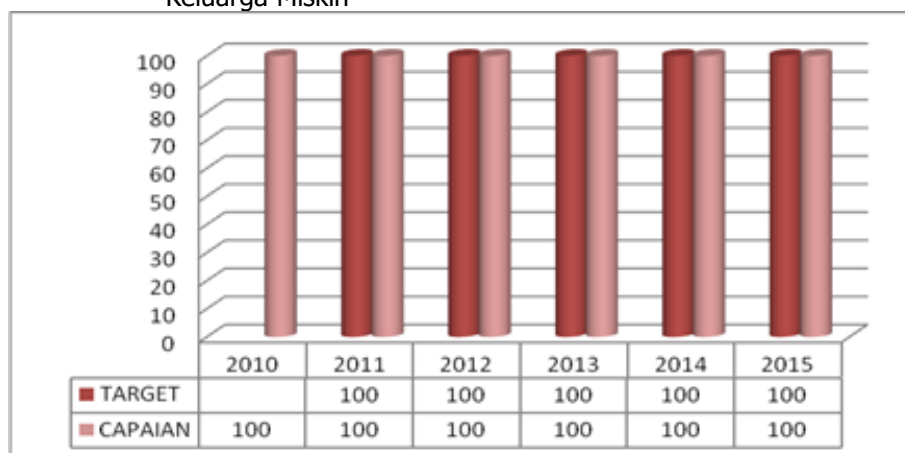


Sumber: Seksi Jaminan Kesehatan Masyarakat

Dari 6.238 Usila yang memnfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama (Puskesmas), 3.530 Usila memerlukan rujukan ke tingkat fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan (RS). Kesemuanya Usila yang memerlukan rujukan sudah di rujuk sesuai dengan kebutuhannya.

#### (4) Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usis 6-24 Keluarga Miskin

Grafik 4.52 : Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usis 6-24 Keluarga Miskin

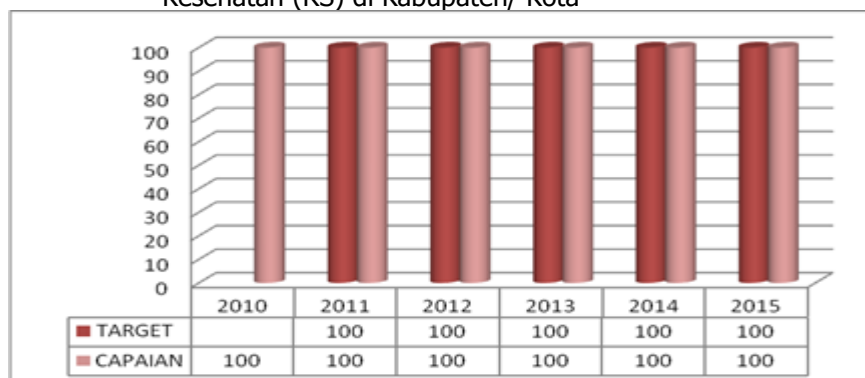


Sumber: Seksi Gizi Masyarakat

Pengadaan MP-ASI didukung oleh adanya bantuan program pengentasan kemiskinan Kabupaten Bintan dan Provinsi Kepulauan Riau. Cakupan pemberian Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) bagi keluarga miskin di Kabupaten Bintan telah mencapai target 100 persen, dimana seluruh anak usia 6-24 bulan dari keluarga miskin telah diberikan MP-ASI berupa biskuit MP-ASI. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berupa susu juga diberikan pada balita kurang gizi. Jumlah anak yang mendapatkan MP-ASI tahun 2013 sampai dengan 2015 bervariasi. Pada tahun 2015 dibagikan kepada sasaran balita yang berkunjung ke Posyandu sekaligus untuk mendukung kunjungan balita ke Posyandu.

## (5) Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 Yang Diberikan Sarana Kesehatan (RS) di Kabupaten/ Kota

Grafik 4.53 : Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 Yang Diberikan Sarana Kesehatan (RS) di Kabupaten/ Kota



Sumber: Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan

Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 Yang Diberikan Sarana Kesehatan (RS) di Kabupaten Bintan pada tahun 2015 mencapai 100 persen, angka tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan pada tahun 2015 sebesar 100 persen.

Dari data tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa di seluruh RS yang ada di wilayah Kabupaten Bintan telah mampu memberikan Pelayanan Gawat Darurat level 1, pada masyarakat yang membutuhkan pelayanan kegawatdaruratan.

### b. Permasalahan dan Solusi

#### 1) Permasalahan

- a. Terlambatnya pembayaran tagihan Rumah Sakit pelayanan bulan Juli dan Agustus dimana pembayaran dilaksanakan pada bulan November 2015 dikarenakan menunggu kiriman uang dari Provinsi Kepulauan Riau. Program pelayanan kesehatan masyarakat miskin dibiayai dengan formula 1 : 2 dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan menyiapkan 1 bagian dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyiapkan 2 bagian. Namun kenyataannya sampai bulan November 2015 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau belum mengirimkan dana yang dijanjikan tersebut, akibatnya

tagihan pelayanan Rumah Sakit yang telah diberikan belum dapat dibayarkan. Sementara itu tagihan terbesar dari Rumah Sakit Angkatan Laut (RSAL) dr. Midiyato Tanjungpinang sebesar Rp 1.2 milyar (periode bulan April s.d Juli 2015). Hal ini menyebabkan Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan mendapat tagihan secara lisan, tulisan dan didatangi langsung oleh pihak RSAL.

- b. Tagihan bulan November dan Desember 2015 hampir tidak dapat dibayarkan pada tahun 2016, hal ini karena dana sharing dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau belum kunjung tiba.

## **2) Solusi**

- a. Melakukan advokasi kepada stakeholder untuk memprioritaskan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk membayar tagihan pelayanan Rumah Sakit
- b. Meng-integrasikan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dengan Jaminan Kesehatan (JKN) yang dikelola oleh BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan

## **8) Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan**

### **a. Pelaksanaan Program**

- (1) Kegiatan Peningkatan ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran Rp.1.795.862.000 Realisasi sebesar Rp.1.782.655.960 atau 99,26%. hasil kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan untuk masyarakat Kabupaten Bintan melalui penyediaan obat dilakukan melalui mekanisme lelang sederhana sebanyak 46 item obat.
- (2) Kegiatan Peningkatan ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan (DAK BINFAR) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran Rp.1.425.358.000 Realisasi sebesar Rp.1.321.485.982 atau 92,71%. hasil kegiatan

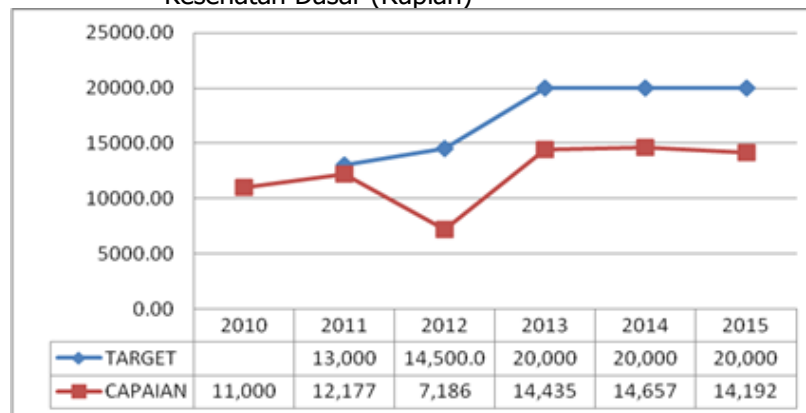


ini adalah terpenuhinya kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan untuk masyarakat Kabupaten Bintan melalui penyediaan obat dilakukan mekanisme e-purchasing menggunakan katalog elektronik sebanyak 76 item obat dengan distributor sebanyak 12 perusahaan.

- (3) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kefarmasian dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.65.282.175 dan realisasi sebesar Rp.65.171.080 atau 99,83%. Hasil kegiatan ini adalah terlaksananya monitoring dan evaluasi pekerjaan kefarmasian berupa pengelolaan obat, pelayanan farmasi klinik dan peningkatan kapasitas kefarmasian serta kegiatan verifikasi dan pemusnahan obat rusak dan kadaluwarsa dengan capaian indikator persentase penggunaan obat rasional di sarana pelayanan kesehatan sebesar 55,2% dan persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai dengan standar sebesar 60%.
- (4) Kegiatan pengadaan alat kesehatan di Puskesmas, Pustu dan Polindes dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.9.298.900 dan realisasi sebesar Rp.9.298.90 atau 100%. Hasil kegiatan ini adalah tersedianya data/informasi alat kesehatan melalui survey pasar.
- (5) Kegiatan pengadaan alat kesehatan di Puskesmas, Pustu dan Polindes (DAK) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.780.350.000 dan realisasi sebesar Rp.111.480.010 atau 6,26%. Hasil kegiatan ini adalah tersedianya data/informasi alat kesehatan melalui survey pasar dan tersedinya 2 unit mikroskop binocular untuk UPTD Puskesmas Teluk Sebong dan Tanjung Uban.

## (6) Ketersediaan Obat Per Kapita Per Tahun di Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar (Rupiah)

Grafik 4.54 : Ketersediaan Obat Per Kapita Per Tahun di Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar (Rupiah)



Sumber: Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman

Ketersediaan obat perkapita pertahun adalah kemampuan pemerintah daerah untuk menyiapkan obat dan perbekalan kesehatan perorang di pelayanan kesehatan dasar. Menurut Rencana Strategis 2015-2019 Kemenkes RI sasaran kegiatan Peningkatan Ketersedian Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan adalah tersedianya obat, vaksin dan perbekalan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau di pelayanan kesehatan pemerintah dan diharapkan pada tahun 2015 mampu mencapai Rp.18,000 perkapita.

Pencapaian ketersediaan obat perkapita tahun 2015 sebesar Rp.14,192,- bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, pencapaian sangat fluktuatif dimana dari tahun 2010 ke tahun 2011 terjadi kenaikan sebesar 10.7 persen (Rp 12,177) tetapi ditahun 2012 terjadi penurunan yang tajam sebesar 40.99 persen (Rp 7,186) sehingga pada tahun 2012 terjadi kekurangan obat dan perbekalan kesehatan. Pada tahun 2013 terjadi kenaikan 100.88 persen dengan pencapaian sebesar Rp.14,435 perkapita dan di tahun 2014 naik sebesar 1.54 persen dengan pencapaian sebesar Rp.14.657 perkapita. Untuk pencapaian target Nasional sesuai Renstra pada tahun 2015 sebesar Rp.18.000 belum tercapai.

Belum tercapainya target tahun 2015 dikarenakan alokasi anggaran pengadaan obat dan perbekalan kesehatan sebesar

Rp.2,144,717,000 dengan jumlah penduduk tahun 2014 sebanyak 151.123 penduduk. Anggaran pengadaan obat dan perbekalan kesehatan pada tahun 2015 bersumber dari DAK Bina Farmasi sebesar Rp.1,425,358,000 dan APBD II sebesar Rp.719,359,000. Total anggaran kegiatan peningkatan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sebesar Rp.3,221,220,000, memang terlihat besar tetapi penganggaran tersebut tidak hanya dialokasikan untuk ketersediaan (pengadaan) obat dan perbekalan kesehatan tapi juga dialokasikan untuk kegiatan program, pengadaan bahan kimia (reagen laboratorium), pengadaan perbekalan kesehatan gigi, pemeriksaan uji mutu obat dan kelengkapan administrasi pengelolaan kefarmasian yang merupakan pendukung dalam pelayanan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan.

Untuk memenuhi kebutuhan ketersediaan obat, Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan meminta bantuan *buffer stock* ke Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dan Kementerian Kesehatan (*buffer stock nasional*). Pencapaian target ketersediaan obat perkapita sebesar Rp.20,000,- perkapita akan tercapai dengan anggaran khusus untuk pengadaan obat dan perbekalan kesehatan sebesar Rp.3,3M dengan mempertimbangkan jumlah penduduk sebesar 160.000 jiwa. Pengalokasian anggaran sebesar tersebut dapat dicapai dengan penyusunan kembali perencanaan dan advokasi kepada pembuat kebijakan anggaran.

## (7) Persentase Penggunaan Obat Rasional di Sarana Pelayanan Kesehatan

Grafik 4.55 : Persentase Penggunaan Obat Rasional di Sarana Pelayanan Kesehatan



Sumber: Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman

Persentase penggunaan obat rasional di sarana pelayanan kesehatan untuk Kabupaten Bintan pada tahun 2015 sebesar 55.2 persen (target Nasional tahun 2014 adalah 55%) dengan hasil pemantauan indikator peresepan sebagai berikut :

Tabel 4.8 : Penggunaan Obat Nasional

No	Indikator	Batasan (%)	Tw I (%)	Tw II (%)	Tw III (%)	Tw IV (%)	Rata-rata (%)
1	Persentase penggunaan Antibiotik pada ISPA non Pneumonia	20	30.4	27.1	25.2	20.6	26,6
2	Persentase penggunaan Antibiotik pada Diare non spesifik	8	19.6	18.4	13.4	15.2	16.7
3	Persentase injeksi pada Myalgia	1	2.5	1.1	0	0.6	1
4	Rerata item jenis obat	2,6	2.5	2.8	2.4	2.1	2.4

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan

Capaian persentase Penggunaan Obat Rasional sebesar 55.2% disebabkan :

- a. Masih rendahnya penerapan formularium dan pedoman penggunaan obat secara rasional di pelayanan kesehatan dasar yang ditandai dengan tingginya penggunaan antibiotika pada diagnose penyakit ISPA non pneumoni dan penyakit diare non spesifik.

- b. Belum dilakukannya penegakkan diagnosa secara tepat, hal ini bisa jadi disebabkan karena kurangnya kemampuan dalam menegakkan diagnosa
- c. Rumus perhitungan indicator tersebut bersifat mutlak tanpa memperhitungkan kondisi puskesmas dengan jumlah kunjungan yang sedikit misalnya pada bulan tersebut terdata pasien dengan diagnose diare non spesifik sebanyak 2 orang dengan jumlah kasus diare sebanyak 3 orang sehingga otomatis persentase adalah sebesar 67% (jumlah kasus dalam 1 bulan dibandingkan dengan total kasus). Hal ini banyak terjadi di puskesmas dengan jumlah kunjungan dibawah 10 orang perhari. Kurangnya advokasi implementasi pemantauan peresepan obat oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau ke Kementerian Kesehatan juga menyebabkan tidak adanya solusi untuk pengambilan keputusan dengan kondisi pemantauan peresepan seperti di atas
- d. Kurangnya pelatihan mengenai penggunaan obat rasional untuk penulis resep (dokter) dan tenaga kefarmasian sehingga didapat persepsi dan pemahaman yang sama
- e. Kurangnya pengetahuan dan informasi kepada tenaga kesehatan dan masyarakat mengenai pemakaian obat secara rasional khususnya penggunaan antibiotika pada swamedikasi. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya masyarakat yang menyimpan obat dan antiobiotika dalam rumah tangga tanpa resep dari dokter.

Upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mencapai target pada tahun 2016 dengan melakukan sebagai berikut:

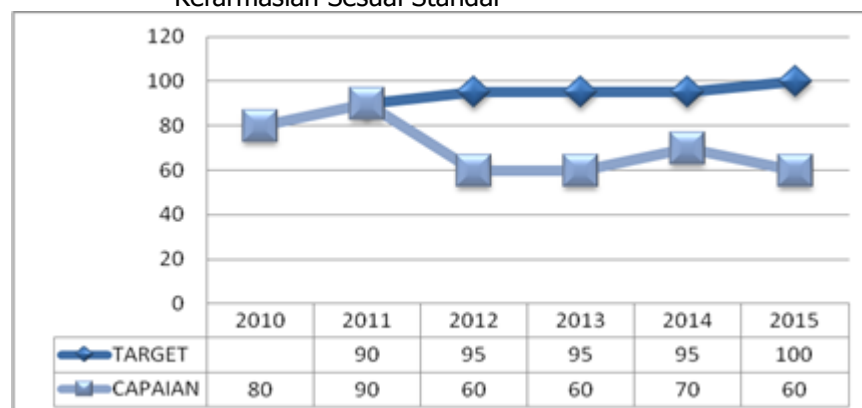
- a. Perlunya kebijakan untuk pelaksanaan Penggerakan Penggunaan Obat Rasional dengan adanya SK Gubernur yang diikuti SK Bupati untuk mendorong semua pihak untuk bersama-sama bertanggungjawab dalam mendukung penggunaan obat secara rasional khususnya penggunaan antibiotika secara bijak untuk

mencegah kondisi resistensi antibiotic dimana dari hasil penelitian tahun 2011, 70% pasien yang dirawat di rumah sakit mendapat antibiotika dan 50% sebetulnya tidak memerlukan terapi antibiotika sehingga bisa dipastikan telah terjadi resistensi antibiotika. Secara kasarnya adalah bila semua jenis antibiotic telah resisten maka tidak ada antibiotika yang efektif diberikan untuk terapi pengobatan.

- b. Dilaksanakan sosialisasi Penggerakan Penggunaan Obat Rasional kepada tenaga kesehatan yang akan dilakukan secara bertahap di tahun 2016 terhadap tenaga kesehatan di Puskesmas dengan cara langsung mensosialisasikan di pertemuan bulanan Puskesmas
- c. Melaksanakan sosialisasi program Cara Belajar Insan Aktif (CBIA) kepada kader dan masyarakat dalam rangka Penggerakan Penggunaan Obat Rasional melalui kegiatan CBIA dan Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat (GeMa CerMat)
- d. Perlunya pelatihan secara komprehensif dan berkelanjutan mengenai penggunaan obat rasional untuk tenaga medis dan tenaga kefarmasian.

### **(8) Persentase Pelayanan Kesehatan Yang Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar**

Grafik 4.56 : Persentase Pelayanan Kesehatan Yang Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar



Sumber: Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman

Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan

farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Adanya standar pelayanan kefarmasian di puskesmas bertujuan untuk :

- a. meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian;
- b. menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian; dan
- c. melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan Obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (patient safety).

Standar Pelayanan Kefarmasian di puskesmas meliputi:

- a. Pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai (perencanaan kebutuhan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan pelaporan dan pengarsipan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan).
- b. Pelayanan farmasi klinik (pengkajian resep, penyerahan obat dan pemberian informasi obat, Pelayanan Informasi Obat, konseling, visite, pemantauan dan pelaporan efek samping obat, pemantauan terapi obat serta evaluasi penggunaan obat).

Berdasarkan data per Desember 2015 Kabupaten Bintan memiliki puskesmas sebanyak 15 unit yang terdiri dari 5 puskesmas perawatan dan 10 puskesmas non perawatan. Pada tahun 2015 Puskesmas perawatan yang telah melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar adalah 60 persen (target Nasional pada tahun 2015 adalah 45 persen). Belum tercapainya target untuk puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar disebabkan sebagai berikut :

- a. SDM kefarmasian di puskesmas masih belum memenuhi persyaratan yaitu dari 15 Puskesmas hanya 2 yang dikelola oleh Apoteker (UPTD Puskesmas Tanjung Uban dan UPTD Puskesmas Kawal), 7 puskesmas oleh tenaga D3 kefarmasian, 3 Puskesmas tenaga Asisten Apoteker dan 3 Puskesmas dikelola oleh tenaga kesehatan lain sedangkan Puskesmas perawatan yang dikelola oleh Apoteker adalah 2 Puskesmas dan hanya Puskesmas Tanjung

Uban yang memiliki tenaga kefarmasian yang lengkap yaitu 1 orang Apoteker, 1 orang D3 Farmasi dan 1 orang Asisten Apoteker.

Undang-Undang Kesehatan No.36 tahun 2009, Pasal 108 menyatakan bahwa Praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut PP No. 51/2009 setiap pelayanan kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian yaitu apoteker dan dibantu dengan tenaga teknis kefarmasian (D3 dan Asisten Apoteker) sehingga hanya 13 persen (2 puskesmas) yang memenuhi persyaratan. Kondisi ini juga diperparah dengan beban kerja bagi sebagian pengelola karena juga merangkap sebagai pengelola program lain.

- b. Persentase penggunaan obat generic di pelayanan kesehatan pemerintah tahun 2015 sebesar 94.14 persen.
- c. Pemberian Informasi Obat sudah dilakukan di 15 puskesmas (100%) sedangkan Pelayanan Informasi Obat sudah dilakukan di 4 Puskemas secara aktif dan didokumentasikan. PIO dapat dilakukan oleh tenaga kefarmasian baik Apoteker, D3 Farmasi ataupun Asisten Apoteker. Untuk puskesmas yang dikelola oleh tenaga keperawatan hanya diperbolehkan memberikan informasi obat secara terbatas.
- d. Standar Operasional Prosedur untuk pelayanan kefarmasian sudah ada di 13 Puskesmas (86.7 persen) dan diharapkan menjadi acuan dalam pelaksanaan pelayanan kefarmasian



- e. Konseling terhadap pasien baik pasien rawat jalan maupun rawat inap sudah dilakukan di 2 puskesmas (100%) dan terdokumentasi. Konseling hanya boleh dilakukan oleh tenaga Apoteker. Pelayanan homecare oleh Apoteker sudah dilaksanakan oleh 1 Puskesmas dari 2 Puskesmas (50 persen) dan terdokumentasi.
- f. Kondisi kamar obat (apotek) sebagian besar masih belum memenuhi syarat untuk pelayanan farmasi klinik seperti Pelayanan Informasi Obat atau Konseling terhadap pasien dan sebagian masih melaksanakan fungsi non kefarmasian (sebagai kasir)
- g. Kondisi gudang obat induk yang belum memenuhi persyaratan dalam menjamin kualitas obat. Baik sarana dan prasarana belum memenuhi persyaratan untuk bisa dimanfaatkan dalam menjamin mutu dan keamanan obat.
- h. Kurangnya pelatihan tentang pelayanan kefarmasian bagi pengelola obat. Selama tahun 2014-2015 tidak ada Puskesmas yang mengikuti pelatihan tentang pelayanan kefarmasian, sedangkan sepanjang tahun 2012-2013 hanya 5 puskesmas yang telah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Bapelkes di Batam
- i. Dalam mendukung pelayanan kefarmasian, puskesmas telah didistribusikan perlengkapan kefarmasian seperti buku LPLPO, kartu stok, etiket biru dan etiket putih. Untuk meningkatkan edukasi kepada masyarakat telah diberikan leaflet mengenai Antibiotika, Obat Generik dan Diare

Untuk meningkatkan pencapaian target di tahun 2015 ini diperlukan sebagai berikut :

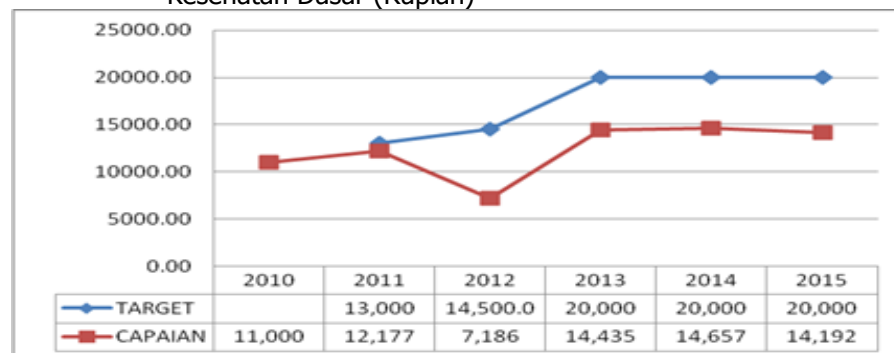
- a. Perlunya rasionalisasi kuantitas tenaga kefarmasian sesuai dengan PP No. 51 th 2009 tentang tenaga kefarmasian dimana pelayanan kefarmasian di puskesmas harus dilakukan oleh Apoteker dan dibantu dengan tenaga teknis kefarmasian (D3 dan Asisten Apoteker). Bila tidak memungkinkan dapat ditugaskan tenaga

kesehatan lainnya membantu tenaga kefarmasian secara resmi sehingga dapat diberikan wewenang dalam membantu pekerjaan kefarmasian

- b. Perlunya pelatihan secara komprehensif dan berkelanjutan mengenai pelayanan kefarmasian untuk tenaga kefarmasian sehingga meningkatkan kompetensi tenaga kefarmasian
- c. Perlunya kebijakan tentang fungsi kamar obat dan tenaga kefarmasian sehingga pelayanan kefarmasian dapat maksimal dilaksanakan
- d. Perlunya peningkatan prasarana gudang obat sehingga obat sebagai produk khusus terjamin secara kualitas dan kuantitas
- e. Perlunya disediakan ruang khusus untuk PIO (Pelayanan Informasi Obat) dan Konseling yang nyaman untuk pasien dalam berkomunikasi dengan tenaga kefarmasian.

#### **(9) Ketersediaan Obat Per Kapita Per Tahun di Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar (Rupiah)**

Grafik 4.57 : Ketersediaan Obat Per Kapita Per Tahun di Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar (Rupiah)



Sumber: Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman

Ketersediaan obat perkapita pertahun adalah kemampuan pemerintah daerah untuk menyiapkan obat dan perbekalan kesehatan perorang di pelayanan kesehatan dasar. Menurut Rencana Strategis 2015-2019 Kemenkes RI sasaran kegiatan Peningkatan Ketersedian Obat Publik dan Perbekalan Keseghatan adalah tersedianya obat, vaksin dan perbekalan kesehatan yang bermutu, merata dan

terjangkau di pelayanan kesehatan pemerintah dan diharapkan pada tahun 2015 mampu mencapai Rp.18,000 perkapita.

Pencapaian ketersediaan obat perkapita tahun 2015 sebesar Rp.14,192 perkapita bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, pencapaian sangat fluktuatif dimana dari tahun 2010 ke tahun 2011 terjadi kenaikan sebesar 10.7 persen (Rp.12,177) tetapi ditahun 2012 terjadi penurunan yang tajam sebesar 40.99 persen (Rp.7,186) sehingga pada tahun 2012 terjadi kekurangan obat dan perbekalan kesehatan. Pada tahun 2013 terjadi kenaikan 100.88 persen dengan pencapaian sebesar Rp.14,435 perkapita dan di tahun 2014 naik sebesar 1.54 persen dengan pencapaian sebesar Rp.14.657 perkapita. Untuk pencapaian target Nasional sesuai Renstra pada tahun 2015 sebesar Rp.18.000 belum tercapai.

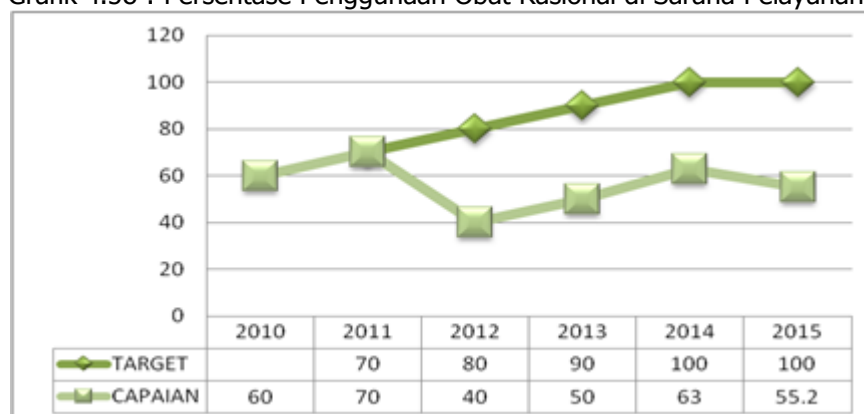
Belum tercapainya target tahun 2015 dikarenakan alokasi anggaran pengadaan obat dan perbekalan kesehatan sebesar Rp.2,144,717,000 dengan jumlah penduduk tahun 2014 sebanyak 151.123 penduduk. Anggaran pengadaan obat dan perbekalan kesehatan pada tahun 2015 bersumber dari DAK Bina Farmasi sebesar Rp.1,425,358,000 dan APBD II sebesar 719,359,000. Total anggaran kegiatan peningkatan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sebesar Rp.3,221,220,000, memang terlihat besar tetapi penganggaran tersebut tidak hanya dialokasikan untuk ketersediaan (pengadaan) obat dan perbekalan kesehatan tapi juga dialokasikan untuk kegiatan program, pengadaan bahan kimia (reagen laboratorium), pengadaan perbekalan kesehatan gigi, pemeriksaan uji mutu obat dan kelengkapan administrasi pengelolaan kefarmasian yang merupakan pendukung dalam pelayanan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan.

Untuk memenuhi kebutuhan ketersediaan obat, Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan meminta bantuan *buffer stock* ke Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dan Kementerian Kesehatan (*buffer stock*

*nasional*). Pencapaian target ketersediaan obat perkapita sebesar Rp.20,000 perkapita akan tercapai dengan anggaran khusus untuk pengadaan obat dan perbekalan kesehatan sebesar Rp.3,3 M dengan mempertimbangkan jumlah penduduk sebesar 160.000 jiwa. Pengalokasian anggaran sebesar tersebut dapat dicapai dengan penyusunan kembali perencanaan dan advokasi kepada pembuat kebijakan anggaran.

### (10) Persentase Penggunaan Obat Rasional di Sarana Pelayanan Kesehatan

Grafik 4.58 : Persentase Penggunaan Obat Rasional di Sarana Pelayanan Kesehatan



Sumber: Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman

Tabel 4.9 : Persentase penggunaan obat rasional

No	Indikator	Batasan (%)	Tw I (%)	TW II (%)	TW III (%)	TW IV (%)	Rata-rata (%)
1	Persentase penggunaan Antibiotik pada ISPA non Pneumonia	20	30.4	27.1	25.2	20.6	26,6
2	Persentase penggunaan Antibiotik pada Diare non spesifik	8	19.6	18.4	13.4	15.2	16.7
3	Persentase injeksi pada Myalgia	1	2.5	1.1	0	0.6	1
4	Rerata item jenis obat	2,6	2.5	2.8	2.4	2.1	2.4

Sumber : Dinas Kesehatan, 2015

Persentase penggunaan obat rasional di sarana pelayanan kesehatan untuk Kabupaten Bintan pada tahun 2015 sebesar 55.2 persen (target Nasional tahun 2014 adalah 55%) dengan hasil pemantauan indikator peresepan sebagai berikut :

Capaian persentase Penggunaan Obat Rasional sebesar 55.2% disebabkan :

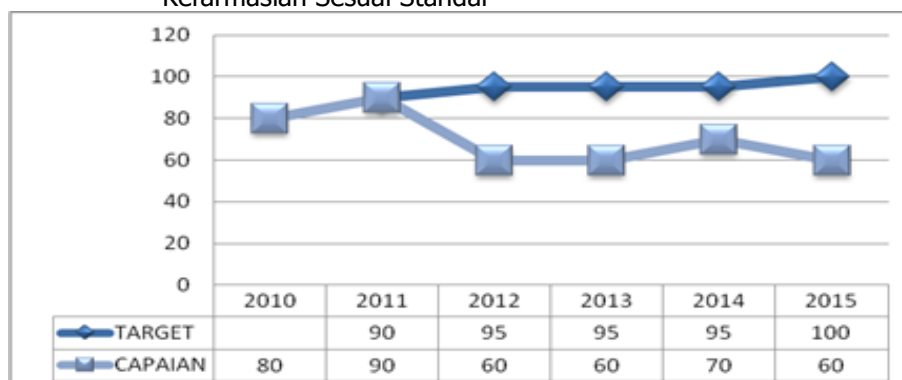
- f. Masih rendahnya penerapan formularium dan pedoman penggunaan obat secara rasional di pelayanan kesehatan dasar yang ditandai dengan tingginya penggunaan antibiotika pada diagnose penyakit ISPA non pneumoni dan penyakit diare non spesifik.
- g. Belum dilakukannya penegakkan diagnosa secara tepat, hal ini bisa jadi disebabkan karena kurangnya kemampuan dalam menegakkan diagnosa
- h. Rumus perhitungan indicator tersebut bersifat mutlak tanpa memperhitungkan kondisi puskesmas dengan jumlah kunjungan yang sedikit misalnya pada bulan tersebut terdata pasien dengan diagnose diare non spesifik sebanyak 2 orang dengan jumlah kasus diare sebanyak 3 orang sehingga otomatis persentase adalah sebesar 67% (jumlah kasus dalam 1 bulan dibandingkan dengan total kasus). Hal ini banyak terjadi di puskesmas dengan jumlah kunjungan dibawah 10 orang perhari. Kurangnya advokasi implementasi pemantauan peresepan obat oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau ke Kementerian Kesehatan juga menyebabkan tidak adanya solusi untuk pengambilan keputusan dengan kondisi pemantauan peresepan seperti di atas
- i. Kurangnya pelatihan mengenai penggunaan obat rasional untuk penulis resep (dokter) dan tenaga kefarmasian sehingga didapat persepsi dan pemahaman yang sama
- j. Kurangnya pengetahuan dan informasi kepada tenaga kesehatan dan masyarakat mengenai pemakaian obat secara rasional khususnya penggunaan antibiotika pada swamedikasi. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya masyarakat yang menyimpan obat dan antiobiotika dalam rumah tangga tanpa resep dari dokter.

Upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mencapai target pada tahun 2016 dengan melakukan sebagai berikut:

- e. Perlunya kebijakan untuk pelaksanaan Penggerakan Penggunaan Obat Rasional dengan adanya SK Gubernur yang diikuti SK Bupati untuk mendorong semua pihak untuk bersama-sama bertanggungjawab dalam mendukung penggunaan obat secara rasional khususnya penggunaan antibiotika secara bijak untuk mencegah kondisi resistensi antibiotic dimana dari hasil penelitian tahun 2011, 70% pasien yang dirawat di rumah sakit mendapat antibiotika dan 50% sebetulnya tidak memerlukan terapi antibiotika sehingga bisa dipastikan telah terjadi resistensi antibiotika. Secara kasarnya adalah bila semua jenis antibiotic telah resisten maka tidak ada antibiotika yang efektif diberikan untuk terapi pengobatan.
- f. Dilaksanakan sosialisasi Penggerakan Penggunaan Obat Rasional kepada tenaga kesehatan yang akan dilakukan secara bertahap di tahun 2016 terhadap tenaga kesehatan di Puskesmas dengan cara langsung mensosialisasikan di pertemuan bulanan Puskesmas
- g. Melaksanakan sosialisasi program Cara Belajar Insan Aktif (CBIA) kepada kader dan masyarakat dalam rangka Penggerakan Penggunaan Obat Rasional melalui kegiatan CBIA dan Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat (GeMa CerMat)
- h. Perlunya pelatihan secara komprehensif dan berkelanjutan mengenai penggunaan obat rasional untuk tenaga medis dan tenaga kefarmasian

## (11) Persentase Pelayanan Kesehatan Yang Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar

Grafik 4.59 : Persentase Pelayanan Kesehatan Yang Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar



Sumber: Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman

Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Adanya standar pelayanan kefarmasian di puskesmas bertujuan untuk :

- meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian;
- menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian; dan
- melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan Obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*).

Standar Pelayanan Kefarmasian di puskesmas meliputi:

- Pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai (perencanaan kebutuhan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan pelaporan dan pengarsipan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan).
- Pelayanan farmasi klinik (pengkajian resep, penyerahan obat dan pemberian informasi obat, Pelayanan Informasi Obat, konseling, visite, pemantauan dan pelaporan efek samping obat, pemantauan terapi obat serta evaluasi penggunaan obat).

Berdasarkan data per Desember 2015 Kabupaten Bintan memiliki puskesmas sebanyak 15 unit yang terdiri dari 5 puskesmas perawatan

dan 10 puskesmas non perawatan. Pada tahun 2015 Puskesmas perawatan yang telah melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar adalah 60 persen (target Nasional pada tahun 2015 adalah 45 persen). Belum tercapainya target untuk puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar disebabkan sebagai berikut :

- a. SDM kefarmasian di puskesmas masih belum memenuhi persyaratan yaitu dari 15 Puskesmas hanya 2 yang dikelola oleh Apoteker (UPTD Puskesmas Tanjung Uban dan UPTD Puskesmas Kawal), 7 puskesmas oleh tenaga D3 kefarmasian, 3 Puskesmas tenaga Asisten Apoteker dan 3 Puskesmas dikelola oleh tenaga kesehatan lain sedangkan Puskesmas perawatan yang dikelola oleh Apoteker adalah 2 Puskesmas dan hanya Puskesmas Tanjung Uban yang memiliki tenaga kefarmasian yang lengkap yaitu 1 orang Apoteker, 1 orang D3 Farmasi dan 1 orang Asisten Apoteker.
- b. Undang-Undang Kesehatan No.36 tahun 2009, Pasal 108 menyatakan bahwa Praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut PP No. 51/2009 setiap pelayanan kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian yaitu apoteker dan dibantu dengan tenaga teknis kefarmasian (D3 dan Asisten Apoteker) sehingga hanya 13 persen (2 puskesmas) yang memenuhi persyaratan. Kondisi ini juga diperparah dengan beban kerja bagi sebagian pengelola karena juga merangkap sebagai pengelola program lain.



- c. Persentase penggunaan obat generic di pelayanan kesehatan pemerintah tahun 2015 sebesar 94.14 persen.
- d. Pemberian Informasi Obat sudah dilakukan di 15 puskesmas (100%) sedangkan Pelayanan Informasi Obat sudah dilakukan di 4 Puskesmas secara aktif dan didokumentasikan. PIO dapat dilakukan oleh tenaga kefarmasian baik Apoteker, D3 Farmasi ataupun Asisten Apoteker. Untuk puskesmas yang dikelola oleh tenaga keperawatan hanya diperbolehkan memberikan informasi obat secara terbatas.
- e. Standar Operasional Prosedur untuk pelayanan kefarmasian sudah ada di 13 Puskesmas (86.7 persen) dan diharapkan menjadi acuan dalam pelaksanaan pelayanan kefarmasian
- f. Konseling terhadap pasien baik pasien rawat jalan maupun rawat inap sudah dilakukan di 2 puskesmas (100%) dan terdokumentasi. Konseling hanya boleh dilakukan oleh tenaga Apoteker. Pelayanan homecare oleh Apoteker sudah dilaksanakan oleh 1 Puskesmas dari 2 Puskesmas (50 persen) dan terdokumentasi.
- g. Kondisi kamar obat (apotek) sebagian besar masih belum memenuhi syarat untuk pelayanan farmasi klinik seperti Pelayanan Informasi Obat atau Konseling terhadap pasien dan sebagian masih melaksanakan fungsi non kefarmasian (sebagai kasir)
- h. Kondisi gudang obat induk yang belum memenuhi persyaratan dalam menjamin kualitas obat. Baik sarana dan prasarana belum memenuhi persyaratan untuk bisa dimanfaatkan dalam menjamin mutu dan keamanan obat.
- i. Kurangnya pelatihan tentang pelayanan kefarmasian bagi pengelola obat. Selama tahun 2014-2015 tidak ada Puskesmas yang mengikuti pelatihan tentang pelayanan kefarmasian, sedangkan sepanjang tahun 2012-2013 hanya 5 puskesmas yang telah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Bapelkes di Batam

- j. Dalam mendukung pelayanan kefarmasian, puskesmas telah didistribusikan perlengkapan kefarmasian seperti buku LPLPO, kartu stok, etiket biru dan etiket putih. Untuk meningkatkan edukasi kepada masyarakat telah diberikan leaflet mengenai Antibiotika, Obat Generik dan Diare.

Untuk meningkatkan pencapaian target di tahun 2015 ini diperlukan sebagai berikut :

- a. Perlunya rasionalisasi kuantitas tenaga kefarmasian sesuai dengan PP No. 51 th 2009 tentang tenaga kefarmasian dimana pelayanan kefarmasian di puskesmas harus dilakukan oleh Apoteker dan dibantu dengan tenaga teknis kefarmasian (D3 dan Asisten Apoteker). Bila tidak memungkinkan dapat ditugaskan tenaga kesehatan lainnya membantu tenaga kefarmasian secara resmi sehingga dapat diberikan wewenang dalam membantu pekerjaan kefarmasian
- b. Perlunya pelatihan secara komprehensif dan berkelanjutan mengenai pelayanan kefarmasian untuk tenaga kefarmasian sehingga meningkatkan kompetensi tenaga kefarmasian
- c. Perlunya kebijakan tentang fungsi kamar obat dan tenaga kefarmasian sehingga pelayanan kefarmasian dapat maksimal dilaksanakan
- d. Perlunya peningkatan prasarana gudang obat sehingga obat sebagai produk khusus terjamin secara kualitas dan kuantitas
- e. Perlunya disediakan ruang khusus untuk PIO (Pelayanan Informasi Obat) dan Konseling yang nyaman untuk pasien dalam berkomunikasi dengan tenaga kefarmasian.

## **b. Permasalahan dan Solusi**

### **1) Permasalahan**

- a. Belum terpenuhinya tenaga kefarmasian sesuai PP Nomor 51 Tahun 2009 Setiap pelayanan kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian yaitu apoteker dan dibantu dengan

tenaga teknis kefarmasian (D3 dan Asisten Apoteker), kondisi sekarang hanya 2 Apoteker sebagai pengelola obat di puskesmas.

- b. Kurangnya pelatihan tentang pelayanan kefarmasian yang komprehensif bagi pengelola obat.
- c. Kurangnya pelatihan terpadu antara tenaga kefarmasian, tenaga medis dan kepala puskesmas sebagai pemegang kebijakan di puskesmas mengenai penggunaan obat rasional
- d. Belum diakomodirnya sebagian besar kebutuhan alat kesehatan yang terdiri alat laboratorium, alat kedokteran umum dan kandungan dan lain-lain dalam pengadaan e-catalog sehingga memerlukan pelelangan.
- e. Pejabat yang ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PKK) menolak untuk melaksanakan pelelangan.

## **2) Solusi**

- f. Perlunya rasionalisasi kuantitas tenaga kefarmasian sesuai dengan PP Nomor 51 Tahun 2009
- g. Perlunya pelatihan secara komprehensif dan berkelanjutan mengenai pelayanan kefarmasian untuk tenaga kefarmasian sehingga meningkatkan kompetensi tenaga kefarmasian
- h. Mengidentifikasi kebutuhan alat kesehatan sesuai dengan e-catalog
- i. Pengkajian ulang terhadap penunjukan pejabat menjadi PPK agar tidak mengganggu proses pengadaan dan tidak memilih-milih metode pengadaan sesuai dengan peraturan yang ada

## **9) Program Pengawasan dan Pembinaan Persediaan Farmasi Pada Sarana Distribusi**

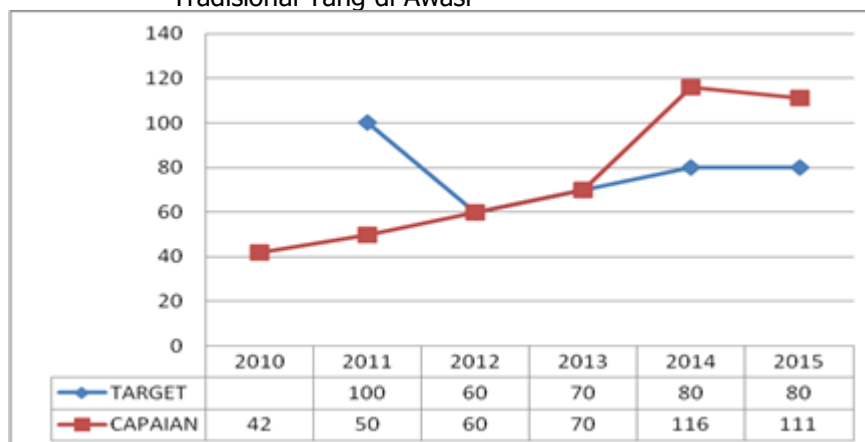
### **a. Pelaksanaan Program**

- (1) Kegiatan Peningkatan pengawasan dan pembinaan peredaran sediaan farmasi pada sarana distribusi dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.60.905.143 dengan realisasi sebesar Rp.54.322.400 atau 89,19%. Hasil kegiatan ini adalah terlaksananya pengawasan dan pembinaan sediaan farmasi dan makanan pada 89 sarana yaitu 2 Rumah Sakit, 14 Apotek, 24 Toko Obat, 43 swalayan/toko kelontong, 4 Penyedia Industri Rumah Tangga (PIRT) dan 2 produsen Air Minum Dalam Kemasan. Serta melakukan pemeriksaan pengelola Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) dalam rangka pemberian rekomendasi sertifikasi produk pangan industri rumah tangga terkait dengan Program Pengentasan Kemiskinan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Kegiatan Peningkatan SDM Bidang Farmasi, Makanan dan Minuman dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.94.720.000 dengan realisasi sebesar Rp.94.488.430 atau 99,76%. Hasil kegiatan ini adalah terselenggaranya pertemuan penyuluhan keamanan pangan bagi (pemilik/ penanggungjawab) industri rumah tangga pangan untuk mendapatkan sertifikat penyuluhan keamanan pangan sebagai persyaratan pengurusan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Selain itu terselenggaranya pertemuan pengelola obat.

Dengan pencapaian indikator kinerja pembangunan daerah sebagai berikut :

### (1) Persentase Sarana Distribusi/Produksi dan Penjualan Obat/Obat Tradisional Yang di Awasi

Grafik 4.60 : Persentase Sarana Distribusi/Produksi dan Penjualan Obat/Obat Tradisional Yang di Awasi



Sumber: Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman

Capaian persentase sarana distribusi/produksi dan penjualan obat/obat tradisional yang diawasi pada tahun 2015 sebesar 111% dengan jumlah sarana sebanyak 89 sarana dan bila dibandingkan dengan tahun 2014 turun sebesar 4,31%. Tetapi bila dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya terjadi kenaikan capaian setiap tahun yaitu 19,05% (tahun 2011), 20% (tahun 2012), 16,67% (tahun 2013) dan terbesar kenaikan sebesar 65,71% pada tahun 2014.

Penurunan capaian sebesar 4,31% dikarenakan adanya penyesuaian anggaran kegiatan sebesar 39% penurunan dari anggaran tahun 2014 dan diikuti penyesuaian lumpsum perjalanan dinas dalam daerah sehingga penurunan capaian menjadi terkoreksi dan tidak terjadi penurunan capaian secara signifikan.

Hasil pembinaan dan pengawasan tahun 2015 capaian sarana yang diperiksa yaitu rumah sakit, apotek, Pedagang Eceran Obat (toko obat), swalayan/toko kelontong, Produksi Industri Rumah Tangga Pangan dan produsen Air Minum Dalam Kemasan dengan rincian hasil pengawasan sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengawasan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang beredar di pasaran dan pemeriksaan sarana prasarana baik

di rumah sakit, apotek, toko obat berizin (pedagang eceran obat) yang ada di kabupaten Bintan. Tahun 2015 dilakukan pengawasan dan pembinaan terhadap 2 rumah sakit, 14 apotek dan 24 toko obat berizin (PEO)

- b. Melaksanakan pengawasan produk-produk makanan, minuman, perbekalan kesehatan rumah tangga dan kosmetik yang beredar di pasaran seperti tanggal kadaluarsa, nomor izin pendaftaran, kualitas fisik barang yang beredar. Tahun 2015 dilakukan pengawasan dan pembinaan sebanyak 43 swalayan/mini market/toko kelontong/gudang distribusi
- c. Melakukan pemeriksaan dan pembinaan sarana dan prasarana produksi industri rumah tangga pangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tahun 2015 dilakukan pengawasan dan pembinaan sebanyak 4 PIRT
- d. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan di sarana produksi Air Minum Dalam Kemasan sebanyak 2 sarana.

Dari hasil pembinaan dan pengawasan sarana distribusi dan produksi tahun 2015, yang perlu digarisbawahi adalah banyaknya temuan di sarana distribusi seperti swalayan/mini market/toko kelontong yaitu adanya produk pangan yang sudah kadaluarsa masih diperdagangkan (khususnya di Tambelan), adanya produk pangan dan produk Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) tanpa izin edar (registrasi), adanya produk yang dicurigai palsu, adanya produk pangan dengan registrasi yang tidak tepat dan adanya produk air minum dalam kemasan yang tidak layak jual beredar di masyarakat serta adanya temuan produk tahu yang mengandung Formalin berdasarkan hasil uji Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Kepulauan Riau.

Tindak lanjut yang dilakukan dalam pembinaan dan pengawasan' yaitu: (a) Pemusnahan produk yang tidak memenuhi syarat, (b) Pemberian edukasi berupa penyuluhan Cara Ritel Pangan yang Baik

bagi 40 sarana swalayan/minimarket/toko kelontong, (c) Pemberian peringatan public yang dikeluarkan Badan POM terkait dengan produk yang dilarang beredar, (d) Berkoordinasi dengan Balai POM di Batam untuk hal-hal yang dianggap perlu seperti pengujian sampel tahu dan melaporkan adanya produk yang dicurigai palsu.

Sehubungan dengan banyaknya temuan yang harus ditindaklanjuti diharapkan pada tahun 2016, anggaran pembinaan dan pengawasan di sarana distribusi dan produksi farmasi makanan dan minuman dapat disesuaikan sesuai dengan cakupan sasaran dan peningkatan kemampuan tenaga pengawas pangan Kabupaten dan penambahan SDM serta adanya kesempatan untuk melakukan penyuluhan mengenai pangan yang aman kepada pelaku usaha dan masyarakat.

## **b. Permasalahan dan Solusi**

### **1) Permasalahan**

Kurangnya tenaga kefarmasian atau tenaga non farmasi terlatih untuk pembinaan dan pengawasan di sarana produksi rumah tangga mengingat sebagian besar produsen berlatar belakang ekonomi, pendidikan dan sosial yang rendah sehingga harus dibina berkelanjutan untuk menjamin produk pangan yang dihasilkan aman dan bermutu.

### **2) Solusi**

- a. Pelatihan District Food Inspector (DFI) untuk tenaga kefarmasian atau tenaga kesehatan
- b. Pelatihan Training of Trainer (TOT) sebagai Penyuluh Keamanan Pangan
- c. Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk mendukung pelaksanaan pengawasan farmasi, makanan dan minuman sehingga berwenang dalam melakukan tindakan yang diperlukan pada saat pengawasan.

## **10) Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan**

### **a. Pelaksanaan Program**

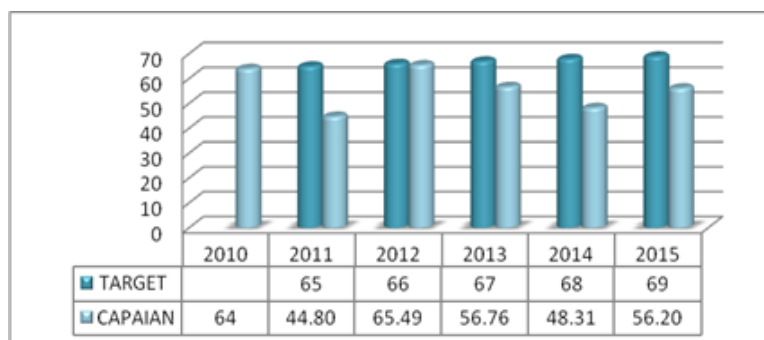
- (1) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.280.880.000,- realisasi sebesar Rp.198.670.610 atau 70,73%. Hasil kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan SDM tenaga kesehatan dalam memberikan pertolongan kegawatdarutan melalui pendidikan dan pelatihan *Basic Trauma Cardiac Life Support (BTCLS)* yang diikuti sebanyak 20 Peserta dengan mengutamakan perawat lulusan SPK serta panitia Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan.
- (2) Kegiatan Sertifikasi, Standarisasi dan Peningatan Mutu SDM Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran Rp.85.975.000,- realisasi sebesar Rp.85.867.200,- atau 99,87%. Hasil kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan bidan dalam persiapan menghadapi keadaan kegawatdaruratan kebidanan dengan mengirimkan bidan PNS untuk mengikuti pelatihan *BONELS (Basic Obstetri Neonatal Life Suport)* yang diadakan oleh BAPELKES Ciawi.
- (3) Kegiatan Sertifikasi Pelatihan SDM Kesehatan dilaksanakan oleh dinas Kesehatan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran Rp.99.806.000,- realisasi sebesar Rp.77.268.800 atau 77,42%. Hasil kegiatan ini terselenggaranya penilaian angka kredit bagi 132 pemangku jabatan fungsional.

Dengan pencapaian indikator kinerja daerah sebagai berikut :



## (1) Rasio Dokter Per 100.000 Penduduk

Grafik 4.61 : Rasio Dokter Per 100.000 Penduduk



Sumber: Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan

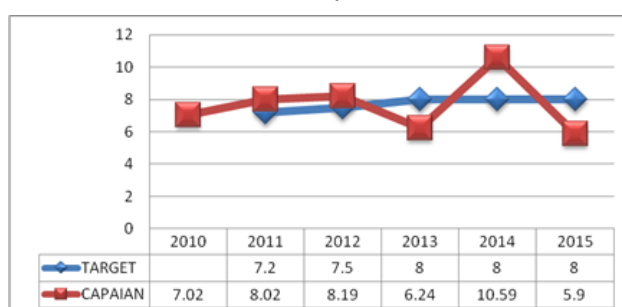
Rasio Dokter Per 100.000 penduduk di tahun 2015 di Kabupaten Bintan sebesar 56.20 per 100.000 penduduk, angka tersebut dibawah target yang di tetapkan pada tahun 2015 yang menargetkan angka rasio dokter umum sebesar 69 per 100.000 penduduk.

Peningkatan angka rasio dokter umum di tahun 2015 di bandingkan dengan angka rasio di tahun 2014 yaitu disebabkan bertambahnya dokter (86 orang) dan bertambahnya jumlah penduduk Kabupaten Bintan (153.020).

Upaya yang harus di lakukan untuk mencapai target di RPJMD tahun 2015 yang telah di tetapkan sebelumnya dan mendistribusikan tenaga dokter umum secara merata dengan mempertimbangkan kondisi geografis, jumlah penduduk dan angka kesakitan dalam suatu wilayah kerja Puskesmas.

## (2) Rasio Dokter Spesialis Per 100.000 Penduduk

Grafik 4.62 : Rasio Dokter Spesialis Per 100.000 Penduduk



Sumber: Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan

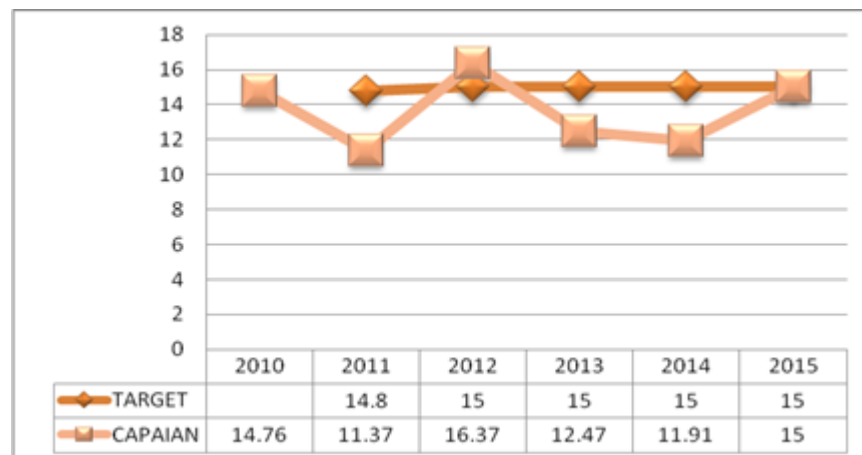
Rasio Dokter Spesialis Per 100.000 penduduk di tahun 2015 di kabupaten Bintan sebesar 5,9 per 100.000 penduduk, menurun di bandingkan dengan angka rasio di tahun 2014 yakni 10,59. Angka rasio tahun 2015 belum memenuhi target yang di tetapkan pada RPJMD yakni sebesar 8 per 100.000 penduduk.

Hal tersebut membuktikan bahwa jumlah tenaga dokter spesialis di Kabupaten Bintan belum memenuhi standar yang diharapkan dari segi Kuantitas, namun bila di nilai dari segi jenis spesialisasinya jumlah tersebut masih kurang karena masih ada beberapa jenis tenaga dokter spesialis yang belum ada di Kabupaten Bintan.

Upaya yang hendaknya dilakukan untuk melengkapi ragam dokter spesialis yang belum tersedia di Kabupaten Bintan yaitu perekrutan dokter spesialis yang belum tersedia melalui jalur PTT daerah, Pusat, dan Pengangkatan CPNS baik jalur khusus maupun Umum.

### (3) Rasio Dokter Gigi Per 100.000 Penduduk

Grafik 4.63 : Rasio Dokter Gigi Per 100.000 Penduduk



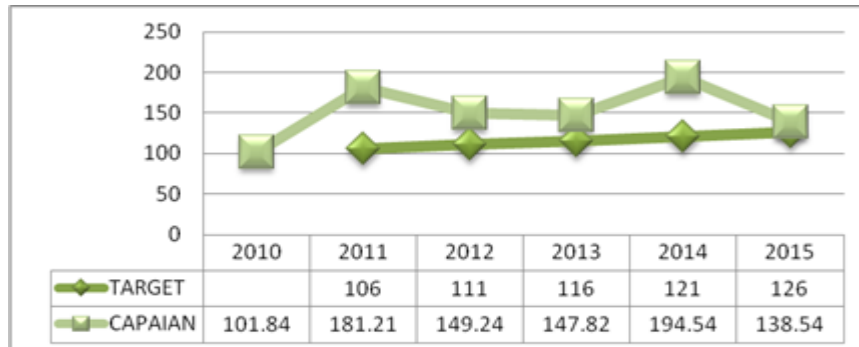
Sumber: Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan

Rasio Dokter Gigi di tahun 2015 di kabupaten Bintan sebesar 15 per 100.000 penduduk, angka tersebut sudah memenuhi target yang di tetapkan pada tahun 2015 sebesar 15 per 100.000 penduduk. Hal

tersebut membuktikan bahwa jumlah tenaga dokter gigi di Kabupaten Bintan sudah memenuhi jumlah yang diharapkan yaitu 23 orang.

#### (4) Rasio Perawat Per 100.000 Penduduk

Grafik 4.64 : Rasio Perawat Per 100.000 Penduduk



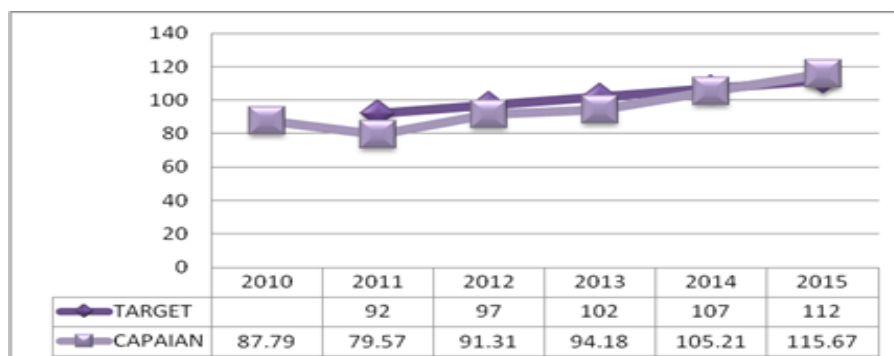
Sumber: Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar Dan Rujukan

Rasio Perawat Per 100.000 penduduk di tahun 2015 di Kabupaten Bintan sebesar 138,54 per 100.000 penduduk, menurun jika di bandingkan dengan rasio Perawat Per 100.000 penduduk di tahun 2014 yaitu sebesar 194,54 per 100.000 penduduk.

Angka tersebut sudah memenuhi target yang di tetapkan pada tahun 2015 sebesar 126 per 100.000 penduduk. Hal tersebut membuktikan bahwa jumlah tenaga perawat di Kabupaten Bintan telah memenuhi standar yang diharapkan dari segi Kuantitas, namun pendistribusian tenaga perawat khususnya di beberapa Puskesmas masih belum sesuai.

#### (5) Rasio Bidan Per 100.000 Penduduk

Grafik 4.65 : Rasio Bidan Per 100.000 Penduduk



Sumber: Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan

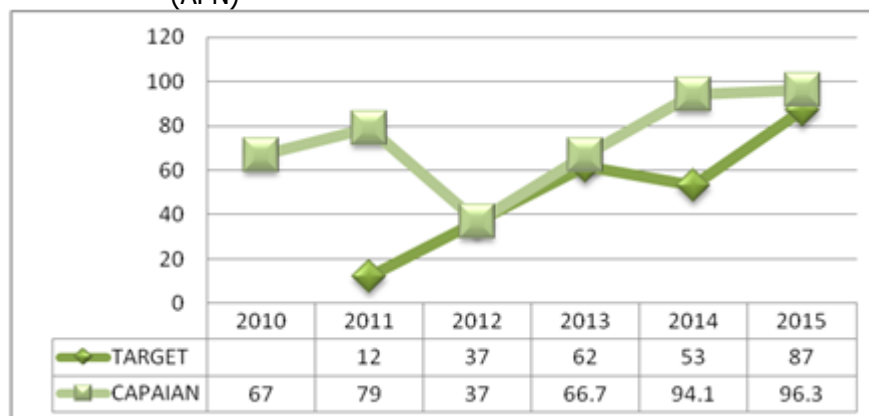
Rasio Bidan Per 100.000 penduduk di tahun 2015 di Kabupaten Bintan sebesar 115.67 per 100.000 penduduk, angka tersebut sudah memenuhi target yang ditetapkan pada tahun 2015 sebesar 112 per 100.000 penduduk.

Jumlah tenaga Bidan di Kabuapten Bintan sebanyak 177 orang meliputi tenaga Bidan PNS dan Tenaga Bidan PTT baik Pusat maupun Provinsi.

Upaya yang hendak dilakukan yaitu mendistribusikan Tenaga Bidan secara merata dengan memperhatikan kondisi geografis Kabupaten Bintan dan Kebutuhan akses pelayanan kesehatan oleh masyarakat.

#### **(6) Jumlah Bidan Yang Mendapatkan Sertifikat Asuhan Persalinan Normal (APN)**

Grafik 4.66 : Jumlah Bidan Yang Mendapatkan Sertifikat Asuhan Persalinan Normal (APN)



Sumber: Seksi Kesehatan Ibu dan Anak dan Pelayanan Medik KB

Ketersediaan Tenaga Bidan yang mampu memberikan Pelayanan Kebidanan yang berkualitas dan terstandar, sangat mempengaruhi dalam menurunkan AKI dan AKB sebagai indikator dari Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak.

Di Kabupaten Bintan pada tahun 2015, 96,3 persen Bidan telah mempunyai sertifikat Asuhan Persalinan Normal (APN). Dalam upaya meningkatkan kompetensi Bidan untuk memberikan pelayanan Kesehatan tersebut juga dilakukan peningkatan ketrampilan Bidan

dengan mengikuti Pelatihan Basic Obstetric and Neonatal Life Supor ( Bonels ).

**b. Permasalahan dan Solusi**

**1) Permasalahan**

- a. Masih terdapat tenaga paramedic (perawat) yang belum memiliki sertifikat BTCLS atau habis masa berlakunya
- b. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia Kesehatan di Kabupaten Bintan yang memiliki kompetensi di Bidang Geographic Information System (GIS) yang berguna untuk pemetaan survilliance, pemetaan informasi gizi, pemetaan penyakit, dan lainnya. Serta kurangnya kompetensi Fungsional Kesehatan untuk perhitungan Angka Kredit Rumpun Jabatan Fungsional Kesehatan.
- c. Belum adanya tenaga untuk perencana pelatihan yang memiliki sertifikat Manager of Trainer (MOT), Training of Trainer (TOT), dan Evaluasi Pasca Pelatihan (EPP) sebagai persyaratan untuk mendapatkan Akreditasi Pelatihan sehingga sertifikat yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan tida terakreditasi sehingga tidak dapat menjadi dasar untuk kenaikan pangkat.

**2) Solusi**

- a. Mengidentifikasi tenaga paramedic (perawat) yang belum mengikuti BTCL atau masa berlakunya sertifikat BTCLS telah habis untuk disertakan pada pelatihan dan pendidikan BTCLS tahun berikutnya
- b. Merencanakan Pelatihan GIS dan Pelatihan Kredit Poin bagi tim penilai Angka Kredit Rumpun Jabatan Fungsional Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan.
- c. Mengusulkan tenaga kesehatan untuk diikutkan sebagai peserta pelatihan Manager of Trainer (MOT), Training of Trainer (TOT), dan Evaluasi Pasca Pelatihan (EPP) sehingga sertifikat pelatihan yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan

Kabupaten Bintan terakreditasi dan dapat digunakan menjadi dasar untuk kenaikan pangkat.

## **11) Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan**

### **a. Pelaksanaan Program**

- (1) Kegiatan Penyusunan evaluasi MDGs dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.87.211.230,- realisasi sebesar Rp.85.610.425,- atau 98.16%. Hasil kegiatan ini adalah tersedianya data dan informasi 18 indikator capaian SPM bidang kesehatan dalam 1 laporan/buku. Pada tahun 2015 seluruh indikator capaian tersebut telah terpenuhi. Terlaksananya pertemuan evaluasi MDG's dan Standar Pelayanan Minimal bersama pengelola program di dinas kesehatan tentang percepatan pencapaian MDGs yang terangkum dalam 1 Laporan MDGS tahun 2014.
- (2) Kegiatan penyusunan Profil Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.146.006.000,- realisasi sebesar Rp.140.885.825,- atau 96,49%. Hasil kegiatan ini adalah tersedianya data dan informasi hasil pembangunan kesehatan yang komprehensif melalui penyusunan Profil Kesehatan Kabupaten Bintan Tahun 2014, yang memuat visualisasi data kesehatan dan fasilitasi data kesehatan. Selain itu juga terlaksananya sinkronisasi data pembangunan di bidang kesehatan yang melibatkan 14 Puskesmas dan pengelola program kesehatan di Dinas Kesehatan.
- (3) Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.692.797.000,- realisasi sebesar Rp.639.760.425 atau 92,34%. Hasil kegiatan ini adalah tersedianya data/informasi kesehatan yang akurat melalui

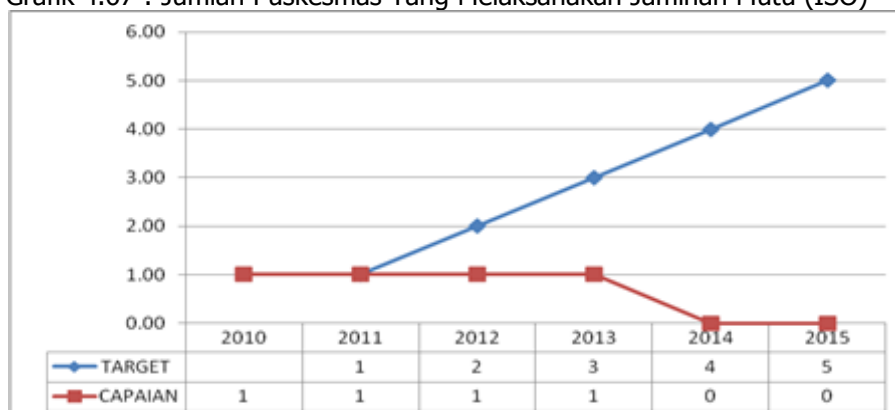
Pertemuan perencanaan dan evaluasi yang diikuti oleh 59 orang pengelola program SIK dan obat. Serta tersedianya peralatan pendukung Sistem Informasi Kesehatan.

- (4) Kegiatan Penyelenggaraan standarisasi, akreditasi dan mutu pelayanan kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.939.400,- realisasi sebesar Rp.48.038.400 atau 94,30%. Hasil kegiatan ini adalah peningkatan pengetahuan SDM dalam bidang standarisasi, akreditasi dan mutu pelayanan kesehatan yang dilaksanakan melalui pembinaan ke Puskesmas dalam rangka persiapan akreditasi.
- (5) Kegiatan Rapat Kerja Kesehatan Daerah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.285.594.900,- realisasi sebesar Rp.251.050.000 atau 87,90%. Hasil kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman terhadap isu-isu kesehatan yang terjadi serta alternatif penyelesaiannya dalam mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat, kegiatan dilaksanakan melalui rapat kerja kesehatan daerah dengan materi pembahasan pencapaian RPJMD Kabupaten Bintan di bidang kesehatan. Adapun narasumber rakerkesda ini dari BAPPEDA Kabupaten Bintan, Bagian Organisasi Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan dan Dinas Kesehatan. Rakerkesda dilaksanakan selama 4 hari diikuti 115 peserta yang berasal dari Dinas Kesehatan sebanyak 40 orang dan UPTD Puskesmas sebanyak 75 orang. Hasil rakerkesda tersebut adalah dari 56 indikator capaian RPJMD tahun 2014 ada 39 indikator yang sudah tercapai, 23 yang akan tercapai dan 1 indikator perlu usaha keras.

Dengan pencapaian indikator pembangunan daerah sebagai berikut :

## (1) Jumlah Puskesmas Yang Melaksanakan Jaminan Mutu (ISO)

Grafik 4.67 : Jumlah Puskesmas Yang Melaksanakan Jaminan Mutu (ISO)



Sumber: Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar Dan Rujukan

Sejak tahun 2014 tidak ada puskesmas yang menerapkan jaminan mutu ISO, sebelumnya terdapat 1 UPTD Puskesmas yang bersertifikasi ISO. Tidak adanya Puskesmas yang melaksanakan jaminan mutu (ISO) disebabkan karena, cukup besarnya biaya yang harus dikeluarkan Pemerintah Daerah untuk penerapan jaminan Mutu sesuai standar ISO, dan ditambah lagi penegasan dari Kementerian Kesehatan yang menyatakan penerapan standarisasi jaminan Mutu ISO di Puskesmas tidak tepat karena pengukuran standar melalui ISO masih banyak berfokus pada administrasi, sedangkan pada Jenis pelayanan kesehatan itu sendiri yang menjadi fungsi pokok puskesmas masih sangat kurang.

Dengan penegasan tersebut maka pada tahun 2014 seluruh fasilitas pelayanan primer yang salah satunya yaitu Puskesmas di seluruh Indonesia mulai di arahkan kepada persiapan penerapan Jaminan Mutu sesuai standar yang di tetapkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, melalui proses Akreditasi Puskesmas.



## **b. Permasalahan dan Solusi**

### **1) Permasalahan**

- a. Ketepatan waktu penyampaian data yang dibutuhkan untuk penyusunan laporan SPM, MDG's dan profil kesehatan belum terpenuhi karena wilayah kerja Kabupaten Bintan yang cukup luas serta terbatasnya sarana dan prasarana pendukung
- b. Belum tersedianya SIK yang terintegrasi (online)

### **2) Solusi**

- c. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
- d. Membangun Sistem Informasi Kesehatan terintegrasi (online) yang dapat mengolah data serta menyediakan informasi kesehatan yang evidence based dan akurat

## **12) Program Upaya Kesehatan Masyarakat**

### **a. Pelaksanaan Program**

- (1) Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan (P3K) dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.23.360.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.8.918.750,- atau 38.17%, keluaran dari kegiatan ini adalah Tersedianya Pelayanan P3K Rumah Sakit sehingga Terpenuhinya Pelayanan P3K Rumah Sakit.
- (2) Peningkatan Pelayanan Kesehatan oleh BLUD RSUD Kabupaten Bintan dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.034.098.100,- dan realisasi sebesar atau 51.48%. keluaran dari kegiatan ini adalah peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD di RSUD Kab. Bintan

### **b. Permasalahan dan Solusi**

Kurangnya anggaran yang terserap di Kegiatan Pengelolaan Keuangan melalui Badan Layanan Umum Daerah BLUD ini dikarenakan lambatnya pengesahan belanjanya pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan

di sahkan pada tanggal 02 November 2015 sehingga ada beberapa pekerjaan yang tidak bisa dilaksanakan pekerjaannya di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan.

### **13) Program Peningkatan Jangkauan Pelayanan Kesehatan**

#### **a. Pelaksanaan Program**

- (1) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.176.400.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.1.145.464.021,- atau 97.37 hasil dari kegiatan ini adalah Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan di RSUD Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih, Belanja Bahan Kebutuhan Pokok Keperluan Dapur, Belanja Administrasi Kepegawaian, Belanja Jasa TV Kabel, Belanja Jasa Instalasi Jaringan Listrik, 4 Unit Komputer/PC, 29 Unit UPS/ Stabilizer, Belanja Gordyn/ Vitrace/ Tirai/ Blind Shade, Belanja Modal Pengadaan Instalsi Listrik/Peralatan PABX, 1 unit lemari Filling Kabinet Mobile 1 Unit Pengadaan Sofa, Wastafel 3 Unit Handphone 4 Unit, Belanja Modal Pengadaan Timbal Radiologi dan Belanja Modal Pengadaan Rumah Insenerator 1 Keg sehingga Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan di RSUD
- (2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.851.102.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.1.744.591.044 atau 94.24%. keluaran dari kegiatan ini adalah Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan DAK di RSUD Belanja Mobil Ambulance 2 Unit, Belanja Alat Kedokteran (Ventilator 1 Unit) sehingga Terpenuhinya

Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan. Kegiatan ini dianggarkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).

**b. Permasalahan dan Solusi**

Pelaksanaan Program Peningkatan Jangkauan Pelayanan Kesehatan tidak terdapat permasalahan maupun kendala yang berarti sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana.

**14) Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan**

**a. Pelaksanaan Program**

- (1) Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.700.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.1.529.528.522,- atau 89.97%. hasil dari kegiatan ini adalah Terpenuhinya 286 Item Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan di RSUD.
- (2) Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.420.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.315.429.129,- atau 75.10%. hasil dari kegiatan ini Tersedianya 1 Keg Alat Kesehatan Rumah Sakit Alat Kedokteran Umum dan Alat Kedokteran Gigi.

**b. Permasalahan dan Solusi**

Pelaksanaan Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan tidak terdapat permasalahan maupun kendala yang berarti sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana.

**15) Program Manajemen Kesehatan**

**a. Pelaksanaan Program**

- (1) Penyusunan Standarisasi, Akreditasi dan Mutu Pelayanan Kesehatan, dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.189.037.200,- dan realisasi anggaran sebesar

Rp.176.332.250,- (93.28%). Hasil kegiatan ini adalah Tersedianya 1 Dokumen Persiapan Akreditasi RSUD Kabupaten Bintan.

- (2) Kegiatan Pengembangan Manajemen Database Pasien Rumah Sakit dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.115.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.114.686.000,- (99.72%) Hasil dari kegiatan ini adalah Tersedianya 1 aplikasi Manajemen Database Pasien RSUD Kabupaten Bintan sehingga terpenuhinya manajemen database RSUD Kabupaten Bintan
- (3) Kegiatan Penyusunan Profil Kesehatan dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.40.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.39.303.980 (98.26%). Hasil dari kegiatan ini adalah Tersedianya Buku Profil Kesehatan RSUD Kabupaten Bintan sebanyak 40 buah.
- (4) Kegiatan Pengelolaan Keuangan pada BLUD RSUD Kabupaten Bintan dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.127.440.000,- dan realisasi sebesar Rp.123.909.400,- (97.23%). Hasil dari kegiatan ini adalah Tersedianya Pengelolaan Keuangan BLUD RSUD Kabupaten Bintan sehingga Terpenuhinya Pengelolaan Keuangan BLUD RSUD Kabupaten Bintan
- (5) Kegiatan Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Rumah Sakit dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.90.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.76.337.500 (84.82). hasil dari kegiatan ini adalah Tersedianya Informasi tentang RSUD Kabupaten Bintan sehingga terpenuhinya Informasi tentang RSUD Kabupaten Bintan.

## **b. Permasalahan dan Solusi**

Pelaksanaan Program Manajemen Kesehatan Tahun tidak terdapat permasalahan maupun kendala yang berarti sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana.

### **4.1.3. Urusan Lingkungan Hidup**

Pencapaian indikator kinerja daerah pada **Misi Ketujuh** terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Bintan untuk urusan Kesehatan adalah sebagai berikut : Persentase penanganan sampah **88,00%**; Persentase penduduk berakses air minum **93,74%**; Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air **100%**; Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara **100%**; Prosentase luasan lahan yang telah ditetapkan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang diinformasikan **100%**; Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal **100%**; Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti **90%**; Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk **117** ; Rasio tempat pemakaman umum per 1000 penduduk **115**.

Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

#### **1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**

##### **a. Pelaksanaan Program**

- (1) Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan, dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp.98.240.000,- dan realisasi anggaran 85.876.536,- atau 87.42%. Hasil kegiatan ini adalah Terwujudnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan di 3 lokasi yaitu di Kecamatan Toapaya, Kecamatan Teluk Bintan, dan Kecamatan

Gunung Kijang, bertujuan supaya masyarakat mampu dan memahami pengelolaan persampahan, melaksanakan program 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dan Program Bank Sampah. Kegiatan ini dimulai sejak tahun 2012 dan sampai tahun 2015 jumlah partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan telah mencapai 20. kelompok. Untuk target capaian sasaran didalam RPJMD Pembentukan Kelompok Pengelolaan Persampahan pada Tahun 2015 ditargetkan hanya 6 kelompok.

- (2) Kegiatan Sosialisasi dan Promosi Gerakan Bintang Bersih yang dilaksanakan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.190.074.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.185.272.214, atau 97.47%. Hasil kegiatan adalah Terwujudnya Gerakan Bintang Bersih di Kabupaten Bintan dan telah memperoleh Penghargaan Adipura untuk Kategori Kota Kecil dari Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015. Pada tanggal **23 November 2015 Penghargaan Adipura Kategori Kota Kecil diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia di Jakarta.** Pelaksanaan Program ditujukan untuk mendukung pelaksanaan keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Bintan Melalui Kecamatan Bintan Timur dalam Program Adipura dan Kalpataru Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Untuk Program Adipura, dilaksanakan upaya-upaya Sosialisasi dan Promosi tentang Kegiatan Pengelolaan Sampah di tingkat komunal (RT/RW dan Sekolah) dan Administrasi dan Dokumentasi dalam Program Adipura Khususnya untuk Kegiatan Pengelolaan Sampah, Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Pengendalian Pencemaran Air, sedangkan untuk Program Kalpataru dilaksanakan melalui inventarisasi kegiatan- kegiatan kelompok dan perorangan dalam Pelestarian Lingkungan Hidup.

Kegiatan juga mengakomodir keikutsertaan dan keterlibatan BLH Kabupaten Bintan dalam Gerakan Bintan Bersih.

Capaian kegiatannya Terlaksanannya Sosialisasi dan Promosi Gerakan Bintan Bersih di Masyarakat Kabupaten Bintan. Capaian Tambahan ialah keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Bintan dalam Program Adipura dan Kalpataru 2016, dengan meraih Penghargaan Adipura untuk pertama kalinya di Kabupaten Bintan. Kegiatan ini juga terlibat aktif dalam pencapaian Kabupaten Bintan Meraih Penghargaan Kabupaten Sehat serta Penyelenggaraan Lomba Desa/ Kelurahan Siaga.

- (3) Kegiatan Penilaian Kecamatan. Kelurahan dan Desa Terbersih yang dilaksanakan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan dengan Alokasi Anggaran Rp.159.480.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.149.679.591,- atau 93.85.%. Hasil dari kegiatan ini terlaksananya pemilihan Kecamatan, Kelurahan dan Desa Terbersih pada Tahun 2015 pemenang untuk tingkat Kecamatan oleh Kecamatan Bintan Utara, untuk tingkat Kelurahan diraih oleh Kelurahan Tanjung Uban Utara dan untuk tingkat Desa diraih oleh Desa Mantang sedangkan untuk Kecamatan percontohan diraih oleh Kelurahan Kijang Kota.

**b. Permasalahan dan Solusi**

- 1) Pelaksanaan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan tidak terdapat permasalahan, maupun kendala yang berarti sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana.
- 2) Permasalahan pada kegiatan Sosialisasi dan Promosi Gerakan Bintan Bersih, Mengingat kegiatan ini merupakan pendukung pelaksanaan Program Nasional, sehingga perubahan yang terjadi ditingkat pusat sulit diakomodir pada kegiatan. Bentuk – bentuk Promosi masih awam dan belum dikemas secara menarik.

- 3) Solusinya, lebih meingkatkan intensitas koordinasi dengan tingkat pusat dan perlu dicarikan bentuk-bentuk promosi yang lebih menarik sehingga lebih efektif keberhasilan program di masyarakat.

## **2) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**

### **a. Pelaksanaan Program**

- (1) Kegiatan Pengendalian dan Penegakan Hukum Bidang Sumber Daya Alam (SDA) yang dilaksanakan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan dengan aloksi anggaran sebesar Rp.108.887.000, realisasi anggaran sebesar Rp.30.940.600,- atau 28.42% hasil kegiatan ini adalah terlaksananya dan terkendalinya peran serta masyarakat melalui pos pengaduan BLH Kabupaten Bintan, tercatat pada tahun 2015 dari 12 kasus pencemaran lingkungan yang ada baik kasus yang di laporkan/pengaduan masyarakat maupun laporan pengaduan oleh perusahaan akibat adanya dugaan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup sudah dapat di selesaikan atau di tindak lanjuti seluruhnya (100%).
- (2) Kegiatan pengendalian lingkungan hidup yang di laksanakan. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran Rp.136.599.800, realisai anggaran sebesar Rp 67.292.626,- atau 49.26%. hasil kegiatan ini terlaksananya dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan di 5 sektor yakni pertambangan, industri, pertanian/ kehutanan, perikanan dan pariwisata. Pengawasan telah di laksanakan di 62 perusahaan sebagai target RPJMN. Pengawasan telah mencapai target yang di tentukan (100%) termasuk capaian cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL.

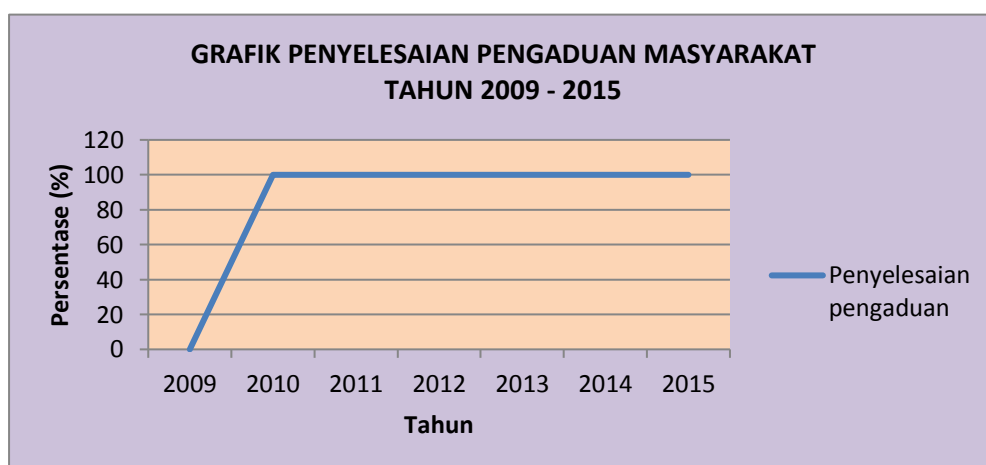


Tabel 4.10 : Perkembangan Pengaduan Masyarakat Tahun 2009 s/d 2015

No	Tahun	Persentase
1.	2009	-
2.	2010	100
3.	2011	100
4.	2012	100
5.	2013	100
6.	2014	100
7.	2015	100

Sumber: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan

Grafik 4.68 : Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Tahun 2009 - 2015



Sumber: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan

#### b. Permasalahan dan Solusi

Masih rendahnya kesadaran pengusaha industri/pemrakarsa kegiatan/badan usaha dalam mengelola lingkungan dan penyampaian pelaporan, solusi memperkuat pengawasan di bidang lingkungan hidup dan melaksanakan penegakan hukum di bidang lingkungan.

### 3) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

#### a. Pelaksanaan Program

- (1) Kegiatan Informasi Bidang Lingkungan Hidup yang dilaksanakan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan dengan Alokasi Anggaran Rp.97.202.456,- realisasi anggaran sebesar Rp.91.455.792,- atau 94.09%. Hasil kegiatan ini telah tersedianya data Informasi Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan melalui penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah

(SLHD). Dari hasil Pendataan yang telah dilakukan terdapat 14 status Lingkungan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan, Yaitu : luas lahan dan hutan, keanekaragaman hayati, air, udara, laut, pesisir dan pantai, iklim, bencana alam, kependudukan, pemukiman, kesehatan, pertanian, industri, pertambangan, energi, transportasi, pariwisata, limbah B3, rehabilitasi lingkungan, pengawasan Amdal, penegakan hukum, peran serta masyarakat dan kelembagaan.

- (2) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan se-Kabupaten Bintan yang dilaksanakan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan dengan Alokasi Anggaran Rp.75.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp.67.403.074 atau 98.87%. Hasil kegiatan ini telah mensosialisasikan-nya Peraturan Perundang-undangan **Lingkungan Hidup yaitu peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata**, Sosialisasi ini dilaksanakan di SMP 4 Bintan dan SMP 2 Bintan dan dihadiri 50 orang guru sekolah SD,SMP, dan SMA, diharapkan para peserta Sosialisasi dapat menerapkan Program Adiwiyata di Sekolah masing-masing guna mencapai Sekolah Peduli dan berbudaya Lingkungan.

#### **b. Permasalahan dan Solusi**

Pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup tidak terdapat permasalahan maupun kendala yang berarti sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana.

### **4) Program Pengawasan dan Pemantauan Lingkungan Hidup**

#### **a. Pelaksanaan Program**

- (1) Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan yang dilaksanakan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan dengan Alokasi

Anggaran Rp.171.130.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.170.599.368,- atau 99.7%. Hasil kegiatan ini telah dilaksanakannya Pemantauan Lingkungan Hidup melalui parameter kualitas air, udara dan tanah (fisika dan kimia) pada 20 titik sampel air, 14 sampel udara dan 14 sampel tanah tersebar di 10 Kecamatan Kabupaten Bintan. Dari hasil Pemantauan diperoleh kesimpulan bahwa dari ketiga parameter yang dilakukan memiliki rata-rata dibawah baku mutu Lingkungan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 51 tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Industri, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 58 tahun 1995 tentang baku mutu Limbah Cair Kegiatan Rumah Sakit, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 tahun 1995 tentang Baku Mutu untuk Emisi tidak bergerak, Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang Baku Mutu Kualitas air, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.21 tahun 2008 tentang Baku Mutu Emisi tidak bergerak kegiatan tenaga listrik, Peraturan Pemerintah Nomor 150 tahun 2000 tentang Baku Mutu untuk Biomassa.

- **Pemantauan Kualitas Air**

Pemantauan Kualitas Air adalah Penilaian Terhadap Kualitas Air pada outlet suatu usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan. Parameter utama yang digunakan untuk menilai kualitas air permukaan pada outlet adalah tercemar atau tidaknya outlet yang bersumber dari IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) serta bagaimana sistem pengolahan limbah yang digunakan. Dari data yang ada menunjukan Kualitas Air Permukaan yang bersumber dari outlet dari tahun 2011 s/d 2015 semakin baik dengan kata lain terjadi penurunan pencemaran Kualitas Air Permukaan. Adapun lokasi pengambilan sampel air. Permukaan adlah outlet Bintan Inti

Industrial Estate, Outlet Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Busung, Outlet Pertamina, Outlet Kawasan Wisata Lagoi, Outlet Bintang Lagoon Resort, PT.Tirta Madu (kolam indikator), Outlet PT.Pulau Bintang Djaya, Air Waduk Kolong, Sumur Kelong, Sumur Mantang (Mantang Lama/Depan Mushola), Hulu Sungai Kawal 1, Hulu Sungai Kawal 2, Tengah Sungai Kawal 1, Tengah Sungai Kawal 2, Muara Sungai Kawal, Waduk PDAM Gesek, Sungai Gesek 1, Sungai Gesek 3, Saluran Parit, Air Hujan. Namun pada tahun 2015 ada beberapa hasil analisa sampel air melebihi baku mutu yang telah ditetapkan diantaranya :

- Outlet IPAL Bintang Lagoon Resort parameter pH, BOD dan COD melebihi baku mutu sehingga disarankan agar PT. BRC dapat segera memperbaiki IPAL nya sehingga parameter kualitas air limbah ke lingkungan memenuhi standar baku yang ditetapkan.
- Outlet PT.Pulau Bintang Djaya pH melebihi baku mutu sehingga disarankan agar perusahaan dapat segera memperbaiki IPAL nya sehingga parameter kualitas air limbah ke lingkungan memenuhi standar baku yang ditetapkan.

• **Pemantauan Kualitas Udara**

Pemantauan Kualitas Udara adalah Penilaian terhadap kualitas udara emisi suatu usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin lingkungan. Acuan yang digunakan untuk melakukan pengujian kualitas udara emisi adalah :

- 1) PP Nomor 41 tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara.
- 2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 1995 tentang Baku mutu emisi sumber tidak bergerak.

- 3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 21 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Emisi sumber tidak bergerak bagi usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Tenaga Listrik Termal.

Dari data yang ada menunjukkan Kualitas Udara dari tahun 2011 s/d 2015 semakin membaik dengan kata lain terjadi penurunan pencemaran kualitas udara emisi. Adapun lokasi pengambilan sampel udara emisi adalah : ex Haust Drier PT.Pulau Bintan Djaya, Genset 1 PLN Bintan Timur, Genset 2 PLN Bintan Timur, Genset PT.Tirta Madu, Genset PLTN Indun Suri Tanjung Uban, Power Plant BRC Lagoi, Power House BIE Lobam.

Dari hasil analisa tidak didapatkan emisi yang melebihi baku mutu.

• **Pemantauan Tanah Biomassa**

Pemantauan Tanah Biomassa adalah penilaian terhadap kualitas biomassa (tanah) wilayah perkebunan, acuan yang digunakan untuk melakukan pengujian kualitas biomassa adalah : PP Nomor 150 tahun 2000 tentang pengendalian kerusakan tanah untuk produksi biomassa. Adapun lokasi pengambilan sampel tanah di Kecamatan Teluk Sebong pada : titik koordinat : E=104

- a) Titik koordinat: E=1040 28'05,47"N=010 07"02.16"
- b) Titik koordinat: E=1040 29'46,52" S=010 07"20.38"
- c) Titik koordinat: E=1020 17'52,94" S=000 20"47.51"
- d) Titik koordinat: E=1040 28'50,33" S=010 07"39.44"
- e) Titik koordinat: E=1040 28'46,01" S=010 07"43.34"
- f) Titik koordinat:E=1040 28'29,71" S= 010 07"22.65"
- g) Titik koordinat:E=1010 07'04,02" S= 010 07"04.02"

Dari hasil pengujianlaboratorium tanah dapat disimpulkan kondisi tanah memiliki kerusakan rendah. Secara garis besar

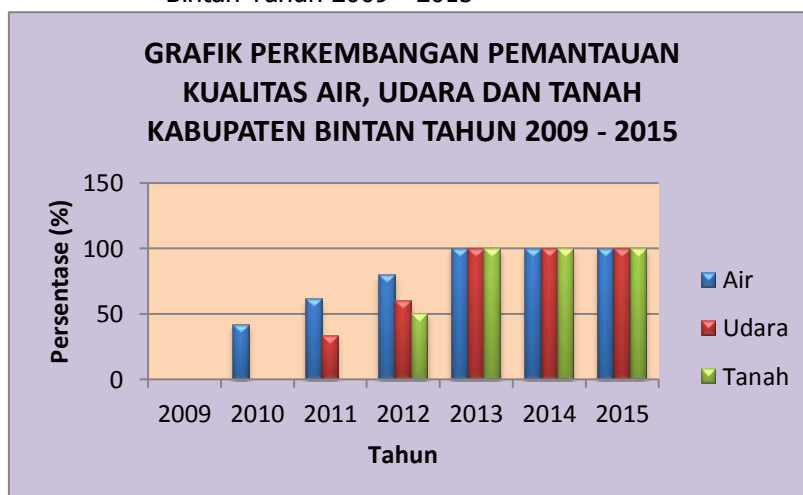
kualitas air dan udara di Kabupaten Bintan pada tahun 2015 lebih baik dari tahun 2014 dari 20 sampel, air 14 sampel udara dan 14 sampel tanah tahun 2015 menunjukkan berkurangnya parameter yang melebihi baku mutu dibandingkan tahun 2014. Begitu pula dengan kondisi tanah dinilai memiliki kerusakan rendah atau dapat disimpulkan dalam kondisi baik.

Tabel 4.11 : Perkembangan Pemantauan Kualitas Air, Udara dan Tanah di Kabupaten Bintan Tahun 2009 s/d 2015

No	Tahun	Air (%)	Udara (%)	Tanah (%)
1	2	3	4	5
1.	2009	-	-	-
2	2010	42	-	-
3.	2011	61	33	-
4.	2012	80	66	50
5.	2013	100	100	100
6.	2014	100	100	100
<b>7.</b>	<b>2015</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan

Grafik 4.69 : Perkembangan Pemantauan Kualitas Air, Udara Dan Tanah Kabupaten Bintan Tahun 2009 - 2015



Sumber: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan

- (2) Kegiatan Penentuan Status Kerusakan Biomassa yang dilaksanakan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran Rp.143.009.376,- realisasi anggaran sebesar Rp.128.051.750,- atau 89.54%. Hasil kegiatan ini adalah peta potensial kerusakan tanah dengan skala 1:50.000 dalam bentuk digital dari peta tersebut disusun perencanaan pemantauan

kerusakan tanah untuk produksi biomassa selama 5 (lima) tahun kedepan. Dasar Hukum pelaksanaan kegiatan PP Nomor 150 Tahun 2010, Permen LH Nomor 19 Tahun 2009, Permen LH Nomor 20 Tahun 2009 dan Permen LH Nomor 6 Tahun 2012.

- (3) Kegiatan Pengawasan B3 dan Limbah B3 yang dilaksanakan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran Rp.86.824.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp.86.519.030,- atau 99.65%. Hasil kegiatan Pengawasan Pengelolaan B3 dan Limbah B3 dilakukan pada usaha dan/atau kegiatan yang beroperasi di Kabupaten Bintan meliputi sektor industri, perhotelan dan pariwisata, kesehatan, listrik dan migas, pertambangan dan perkebunan. Pengawasan dilaksanakan dalam rangka mengetahui tingkat ketaatan perusahaan terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dalam melakukan pengelolaan B3 dan limbah B3 dasar hukum yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah PP No.74 tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun PP No.101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun. Kegiatan Pengawasan Pengelolaan B3 dilaksanakan pada 15 perusahaan Industri, 12 Perhotelan dan Pariwisata, 2 Rumah Sakit, 6 Perusahaan Listrik dan Migas, 4 Perusahaan Tambang dan 2 Perkebunan. Adapun Perusahaan yang telah memiliki izin TPS limbah B3 adalah 15 Perusahaan yaitu 9 Perusahaan Industri dikawasan BIE Lobam, 3 Migas, 2 Tambang, 1 Industri. Disarankan untuk kedepannya seluruh usaha dan/kegiatan di Kabupaten Bintan sudah memiliki TPS limbah B3 sehingga pengelolaan terhadap limbah yang dihasilkan lebih baik.

#### **b. Permasalahan dan solusi**

Minimnya SDM sebagai analisa laboratorium lingkungan maupun peralatan untuk pengujian pencemaran untuk mendukung kegiatan

pengendalian kualitas lingkungan hidup dan pengaduan masyarakat, solusinya melalui penambahan SDM bidang analisis laboratorium lingkungan untuk mendukung kegiatan pokok yang ada di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan.

## **5) Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**

### **a. Pelaksanaan Program**

- (1) Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Adiwiyata dilaksanakan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran Rp.152.700.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.150.297.800 atau 98.43% . Hasil kegiatan ini terbentuknya sekolah peduli dan berbudaya lingkungan dengan terpilihnya 10 sekolah Adiwiyata tingkat Kabupaten yakni : SMAN 4 Bintan, SDN No.001 Seri Kuala Lobam, SDN No.002 Seri Kuala Lobam, SDN No.003 Seri Kuala Lobam, SDN No.002 Gunung Kijang, SDN No.009 Bintan Timur, SDN No.011 Bintan Timur, SDN No.012 Bintan Timur, 4 sekolah adiwiyata tingkat provinsi yaitu : SMPN 1 Bintan, SMPN 3 Bintan, SMAN 3 Bintan, SMKN 1 Bintan, dan terpilihnya 2 sekolah adiwiyata tingkat nasional yaitu SMPN 5 Bintan dan SMAN 2 Bintan.
- (2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Saka Kalpataru dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran Rp.90.898.000.-, realisasi anggaran Rp.81.176.096 atau 89.35%. Hasil kegiatan ini pembinaan Saka kalpataru tentang materi krida 3R dan komposting yang berjumlah 80 orang.
- (3) Kegiatan Pengendalian sarana dan prasarana dalam rangka Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim (DAK) yang dilaksanakan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan dengan alokasi anggran Rp.1.695.027.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.0



atau 0%. Hasil dari kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan dikarenakan lahan tidak sesuai dengan petunjuk teknis.

**b. Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan pada kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana dalam rangka Adaptasi dan Mitigasi perubahan Iklim (Taman Hijau) adalah tidak tersedianya lahan, sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan

**6) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**

**a. Program dan Kegiatan**

- (1) Penyediaan Prasarana dan Sarana Persampahan, Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman dengan alokasi anggaran Rp.1.338.270.000,- dan realisasi sebesar 1.331.801.840,- atau 99,52%. Kegiatan ini adalah penyediaan segala kebutuhan satgas kebersihan akan terpenuhi baik peralatan kerja, bak sampah, pakaian kerja, pengadaan kendaraan (truk sampah) dan peralatan-peralatan lainnya. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan pengelolaan kebersihan di Kabupaten Bintan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Keluaran dari kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Persampahan pada tahun 2015 adalah tersedianya sarana kerja satgas untuk operasional kegiatan persampahan, antara lain: kantong plastik sampah 2000 buah, racun rumput 450 liter, pakaian kerja 258 stel, mesin rumput 15 unit, bak amrol 4 unit, 40 unit tong sampah terpilah 4 warna, dan pemeliharaan TPS 34 unit. Hasil (outcome) dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana persampahan. Dengan adanya pengadaan sarana dan prasarana persampahan yang dilakukan melalui kegiatan ini, maka diharapkan dapat meningkatkan pelayanan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Bintan kepada masyarakat terkait tentang kebersihan lingkungan. Hal ini disebabkan pelayanan yang dilakukan sangat

membutuhkan sarana prasarana kebersihan tersebut diatas, dan ditandai dengan peningkatan persentase penanganan sampah dari 86,8 % pada tahun 2014 menjadi 88 % pada tahun 2015 dan persentase sampah yang dikelola dari 43% pada tahun 2014 menjadi 45 % pada tahun 2015. Selain itu juga telah terjadi kenaikan angka pembangunan TPS dari 62 unit pada tahun 2014 menjadi 66 unit pada tahun 2015.

- (2) Peningkatan Kebersihan Jalan-jalan Umum dan Lingkungan Umum Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman dengan alokasi anggaran Rp.6.906.065.200,- dan realisasi sebesar Rp.6.606.038.221,- atau 95,66%. Kegiatan ini merupakan penyelenggaraan manajemen terhadap satgas kebersihan tersebut didalamnya adalah pembayaran gaji (upah) satgas kebersihan dan operasional yang dapat menunjang kebutuhan pelayanan kebersihan di Kabupaten Bintan. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan pengelolaan kebersihan di Kabupaten Bintan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Keluaran (output) dari kegiatan ini adalah terlaksananya peningkatan dan pengembangan kebersihan di Kecamatan, sedangkan hasil (outcomes) yang diperoleh dari kegiatan tersebut adalah meningkatnya kebersihan lingkungan Kecamatan di Kabupaten Bintan. Hal ini ditandai dengan peningkatan persentase persentase penanganan sampah dari 86,8 % pada tahun 2014 menjadi 88 % pada tahun 2015 dan persentase sampah yang dikelola dari 43% pada tahun 2014 menjadi 45 % pada tahun 2015. Di Kabupaten Bintan dengan luas daratan 1.613,51 Km<sup>2</sup> hanya memiliki 258 orang satgas kebersihan, 7 orang satgas taman dan 10 orang satgas di TPA Sei. Enam. Dengan demikian jumlah satgas kebersihan di DKPP Kabupaten Bintan adalah sebanyak 275 orang pada tahun 2015 yang melayani kebersihan lingkungan 10 kecamatan di

Kabupaten Bintan. Tentu jumlah tersebut sangat tidak seimbang, untuk itu sangat dibutuhkan penambahan anggota satgas kebersihan di Kabupaten Bintan.

- (3) Operasional dan Pengelolaan TPA Sei Enam, Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman dengan alokasi anggaran Rp.914.480.000,- dan realisasi sebesar Rp.913.033.731,- atau 99,84%. Kegiatan ini merupakan pemenuhan kebutuhan operasional TPA Sei. Enam mulai dari gaji (upah) satgas, service kendaraan alat berat, pemeliharaan Pos Jaga, Pengadaan Pakaian Kerja satgas, dan Pembangunan sarana prasarana penunjang kegiatan di TPA Sei. Enam. Keluaran (output) dari kegiatan ini adalah tersedianya operasional dan pengelolaan TPA Sei. Enam antara lain: upah 10 orang satgas, pemeliharaan alat berat, pemeliharaan pos jaga, bakteri, pemasangan kanstin, 1 unit Rumah Pemilah Sampah, 1 unit pencacah plastik, 1 unit sumur pantau dan instalasi, 1 unit belt conveyor, dan peningkatan pembangunan Rumah Pemilah Sampah (Bak, Tanjakan, dan drainase). Sedangkan hasil (outcome) yang diperoleh dari kegiatan tersebut adalah terlaksananya operasional dan pengelolaan TPA Sei Enam. Keberadaan TPA Sei. Enam juga diharapkan meningkatkan persentase penanganan sampah dan sampah yang dikelola di Kabupaten Bintan.
- (4) Penyusunan Buku Data Spesifikasi Sampah di TPS Se-Kabupaten Bintan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman dengan alokasi anggaran Rp.64.040.000,- dengan realisasi sebesar Rp.63.646.900,- atau 99,39%. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk penyusunan Buku Data Spesifikasi Sampah di TPS Se-Kabupaten Bintan merupakan kegiatan pendataan komposisi sampah yang ada di TPS se-Kabupaten Bintan. Data ini juga berisikan potensi

ekonomis sampah yang ada di TPS tersebut. Keluaran (output) dari kegiatan ini adalah terlaksananya penyusunan data spesifikasi sampah di TPS Se-Kabupaten Bintan. Sedangkan hasil (outcome) yang diperoleh dari kegiatan tersebut adalah tersedianya dokumen data spesifikasi sampah di TPS se-Kabupaten Bintan.

- (5) Operasional UPTD Kebersihan Kegiatan Operasional UPTD Kebersihan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman dengan alokasi anggaran Rp.17.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.16.834.540,- atau 99,03%. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang ditujukan untuk kebutuhan operasional UPTD Kebersihan di Tanjung Uban selama 1 tahun. Keluaran (output) dari kegiatan ini adalah tersedianya operasional UPTD Kebersihan Tanjung Uban selama 1 tahun. Sedangkan hasil (outcome) yang diperoleh dari kegiatan tersebut adalah terlaksananya operasional UPTD Kebersihan Tanjung Uban.

Rencana pengembangan sistem persampahan di Kabupaten Bintan diarahkan dikelola secara terpadu antara pemerintah dan masyarakat. Partisipasi masyarakat terutama diarahkan untuk membuat bak-bak sampah baik yang dilakukan secara individual maupun secara kelompok, dan pengangkutan sampah dari bak-bak sampah melalui gerobak sampah yang disediakan ke lokasi tempat pembuangan sementara (TPS). Dalam hal ini pengadaan bak amrol dan penempatannya juga dapat diperhitungkan sebagai Tempat Pembuangan Sementara (TPS). Rencana pelayanan pengelolaan sampah tersebut untuk melayani sampah-sampah dari rumah tangga, kawasan komersil seperti pasar dan pertokoan, perkantoran, serta pusat pemerintahan.

Sedangkan sistem pengolahan persampahan untuk daerah-daerah yang belum terjangkau oleh sistem pelayanan ini, diarahkan penanganannya dilakukan melalui pengolahan secara individu atau secara

komunal setempat, melalui cara pengomposan maupun melakukan 3R (*reduce, reuse, recycle*) dengan menggunakan sistem Bank Sampah. Dengan sistem pengelolaan persampahan seperti ini diharapkan dapat dihindari terjadinya masalah-masalah lingkungan seperti pencemaran lingkungan, timbulnya genangan, gangguan estetika dan penyebaran penyakit.

Beberapa program yang akan dikembangkan dalam pengembangan sistem pengelolaan persampahan di Kabupaten Bintan, yaitu:

- Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di masing-masing Kecamatan di Kabupaten Bintan.
- Pendataan Bank Sampah yang telah dikembangkan oleh instansi terkait.
- Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan, dan telah dioperasikan seluas 5 hektar di Kecamatan Bintan Timur sedangkan 5 Hektar untuk wilayah Kecamatan Bagian Utara.

Tabel 4.12 Persentase penanganan sampah

<b>No.</b>	<b>Tahun</b>	<b>Indeks</b>
<b>1</b>	2015	88 %
<b>2</b>	2014	86,8 %
<b>3</b>	2013	86,2 %
<b>4</b>	2012	4,3 %
<b>5</b>	2011	4,3 %

Sumber : Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman

Penanganan sampah di Kabupaten Bintan ditandai dengan pelayanan pengangkutan sampah dari seluruh TPS di Kabupaten Bintan untuk dibawa ke TPA Sei Enam untuk Kecamatan Bintan Timur dan TPA/lahan pertanian milik warga yang terdekat untuk Kabupaten Bintan wilayah utara. Penanganan sampah di Kabupaten Bintan masih belum mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun 2014 ke tahun 2015 yaitu sekitar 88 % dari jumlah timbulan sampah masyarakat di Kabupaten Bintan. Penanganan

sampah belum sepenuhnya sesuai dengan target di rentra SKPD karena beberapa hal antara lain:

1. Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan dan kebersihan seperti TPS permanen, TPST, Rumah Kompos dan TPA.
2. Sulitnya mendapatkan lahan atau lokasi guna ditempatkan TPS permanen atau amrol dan TPA dikarenakan kurangnya pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya sarana dan prasarana tersebut dalam pengelolaan persampahan yang aman terhadap lingkungan.
3. Banyak lahan-lahan kosong yang dijadikan tempat pembuangan sampah oleh masyarakat di Kabupaten Bintan.
4. Budaya masyarakat di Kabupaten Bintan yang masih membakar sampah dan menimbun sampah di lingkungan rumah masing-masing dikarenakan jarak yang jauh dengan TPS.

Tabel 4.13 : Persentase sampah yang dikelola

<b>No.</b>	<b>Tahun</b>	<b>Indeks</b>
<b>1</b>	<b>2015</b>	<b>50 %</b>
2	2014	45 %
3	2013	36,14 %
4	2012	21 %
5	2011	-

Sumber : Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman

Persentase sampah yang dikelola oleh Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Bintan ditandai dengan jumlah sampah yang masuk ke TPA sebagai sarana prasarana pengelolaan persampahan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan dibandingkan sampah yang ditimbulkan atau dihasilkan oleh masyarakat di Kabupaten Bintan. Dengan demikian sampah yang dapat dikelola oleh DKPP Kabupaten Bintan pada tahun 2015 belum berbeda jauh terhadap pengelolaan sampah di tahun 2014 yaitu hanya sebesar 50 %. Kendala yang dialami dalam pengelolaan sampah, antara lain:

1. Kurangnya armada pengangkutan sampah sehingga terdapat wilayah – wilayah kecamatan di Kabupaten Bintan yang masih belum terlayani dalam hal pengangkutan sampahnya.
2. Belum adanya TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) sampah di Kabupaten Bintan wilayah utara yang meliputi Kecamatan Teluk Sebong, Kecamatan Seri Kuala Lobam dan Kecamatan Bintan Utara.

Tabel 4.14 : Persentase volume pengurangan sampah melalui 3R

No.	Tahun	Indeks
<b>1</b>	<b>2015</b>	<b>14 %</b>
2	2014	12 %
3	2013	4 %
4	2012	4 %
5	2011	-

Sumber : Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman

Persentase volume pengurangan sampah melalui 3R ditandai dengan banyaknya jumlah sampah yang sudah dikelola oleh masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan pembentukan kelompok masyarakat yang peduli terhadap lingkungan khususnya terhadap sampah.

Pemberdayaan masyarakat terhadap kelompok masyarakat yang peduli lingkungan tersebut dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan. Oleh karena itu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Bintan hanya melakukan pendataan sekunder terhadap data yang dihasilkan dari hasil pembinaan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan tersebut.

Adapun kelompok masyarakat yang peduli lingkungan hidup di Kabupaten Bintan telah dibentuk sebanyak 6 kelompok yaitu Kecamatan Bintan Timur, Kecamatan Toapaya, Kecamatan Gunung Kijang, Kecamatan Mantang, Kecamatan Tambelan dan Kecamatan Bintan Utara. Dan dimasing-masing Kelompok Masyarakat terdapat bagian khusus yang menangani persampahan melalui sistem 3R yang dikenal dengan Bank Sampah. Bank Sampah yang telah aktif melakukan aktifitas pengelolaan sampah yaitu di Kecamatan Gunung Kijang dan Kecamatan Bintan Timur

sebanyak  $\pm 14$  unit. Dari keseluruhan Bank Sampah yang ada di Kabupaten Bintan diperoleh data sekunder jumlah sampah yang dikelola oleh masyarakat adalah sebanyak sekitar 20.000 Kg (20 ton) selama setahun. Bila dibandingkan dengan jumlah timbulan sampah, maka diperoleh persentase volume pengurangan sampah melalui 3R di Kabupaten Bintan sekitar 15 %.

Adapun yang menjadi kendala terhadap proses 3R di Kabupaten Bintan, antara lain:

1. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terhadap fungsi dan keberadaan Bank Sampah di Kabupaten Bintan sehingga banyak masyarakat yang belum mengerti tentang arti pentingnya 3R didalam kehidupan sehari-hari dan lingkungan sekitar.
2. Kurangnya dukungan anggaran karena adanya keterbatasan kemampuan anggaran daerah Kabupaten Bintan dalam mendukung operasional Bank Sampah.

Tabel 4.15 : Rasio Tempat Pembuangan Sampah Persatuan Penduduk

No.	Tahun	Indeks
<b>1</b>	<b>2015</b>	<b>117</b>
2	2014	62
3	2013	57
4	2012	57
5	2011	53

Sumber : Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman

Kabupaten Bintan memiliki luas areal daratan 1.319,51 km<sup>2</sup> dengan sepuluh kecamatan. Persampahan menjadi salah satu masalah utama dikarenakan belum adanya suatu sistem pengelolaan yang terpadu. Adapun sarana dan prasarana persampahan yang telah disediakan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Bintan, antara lain : TPS (Tempat Pembuangan Sementara) sejumlah 62 unit (35 unit berada di Kijang Kec. Bintan Timur, 5 unit berada di Kawal Kec. Gunung Kijang, 10 unit berada di Tanjung Uban Kec. Bintan Utara, 2 unit berada di Kec. Teluk Bintan, 2 unit berada di Kec. Teluk Sebong, dan 3 unit berada di Kec. Seri Kuala Lobam, 3 unit di Kel. Sei. Lekop dan 2 unit di Kelurahan Kijang Kota di Kecamatan Bintan Timur). Truk pengangkut sampah (terdiri atas Dump



truck sampah sejumlah 15 unit, Motor kaisar sampah sejumlah 12 unit, sampan sampah sejumlah 1 unit), Gerobak sampah, dan sarana pendukung lain untuk pengelolaan sampah.

Menurut hasil perhitungan terhadap jumlah timbulan sampah maka diperoleh jumlah TPS yang dibutuhkan di Kabupaten Bintan adalah sebanyak 115 unit, namun sampai dengan tahun 2015 hanya terdapat 62 unit TPS (termasuk amrol) di Kabupaten Bintan. Bila dibandingkan dengan jumlah TPS pada tahun 2014 terjadi peningkatan beberapa unit dikarenakan adanya penambahan pengadaan TPS permanen dan bak amrol di Kabupaten Bintan.

Kendala yang dialami dalam pengadaan TPS di Kabupaten Bintan, antara lain:

1. Adanya keterbatasan anggaran pemerintah daerah Kabupaten Bintan dalam penganggaran TPS.
2. Adanya penolakan masyarakat terhadap lokasi penempatan TPS maupun amrol yang direncanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan sehingga sangat sulit bagi pemerintah daerah untuk mencari lokasi penempatan TPS tersebut.

## **b. Permasalahan dan Solusi**

### **1) Permasalahan**

- a) Kurangnya Truk Sampah untuk pengangkutan sampah
- b) Kurangnya fasilitas pengolah sampah dan lindi di TPA Sei. Enam Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan.
- c) Kurangnya satgas kebersihan
- d) Belum adanya TPA di Bintan Bagian Utara.

### **2) Solusi**

- e) Dilakukan penambahan anggaran untuk pengadaan truk sampah dan operasionalnya.
- f) Dilakukan penambahan anggaran untuk pembangunan fasilitas pengolahan sampah dan lindi di TPA Sei. Enam agar

pengolahan dan pengelolaan sampah di TPA Sei. Enam dapat berjalan optimal.

- g) Dilakukan penambahan satgas kebersihan beserta operasional dan perlengkapan kerjanya agar pelayanan kebersihan di Kabupaten Bintan dapat berjalan lebih optimal.
- h) Dilakukan penganggaran untuk survey, pengadaan lahan, studi kelayakan, studi Amdal dan sebagainya terhadap pengadaan lahan TPA Bintan Bagian Utara.

## **7) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)**

### **a. Program dan Kegiatan**

- (1) Pembangunan/Pemeliharaan Taman Pemakaman Umum (TPU) dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman dengan alokasi anggaran Rp.849.170.000,- dan realisasi sebesar Rp.848.108.438,- atau 99,87%. Kegiatan Penataan Pemakaman sebagai mana tugas pokok dan fungsi nya adalah melaksanakan perencanaan dan pembangunan serta penataan TPU di Kabupaten Bintan agar dapat terlihat lebih tertata dengan baik dan indah. Keluaran (output) yang diperoleh dari kegiatan tersebut adalah terlaksananya sarana dan prasarana areal TPU antara lain: pemeliharaan TPU di Kabupaten Bintan, pengecatan pagar TPU Kamboja RT.04 RW.01 Kel. Tanjung uban Selatan Kecamatan Bintan Utara, Pagar dan Gapura pemakaman Banjar Kp. Sidoarjo RT. 02 RW. II Kelurahan Kawal Kecamatan Gunung Kijang, penataan TPU RT. 03 RW. VII Kel. Teluk Lobam Seri Kuala Lobam (TPU Taman Firdaus). Sedangkan hasil (outcomes) dari kegiatan tersebut adalah tersedianya sarana dan prasarana areal TPU di Kabupaten Bintan. Dengan luas TPU se-Kabupaten Bintan 996.823 M2, maka diperoleh rasio tempat pemakaman di Kabupaten Bintan sebesar 115 m2 per 1000 orang penduduk. Dengan demikian

kebutuhan lahan untuk TPU sangat tinggi baik pemakaman muslim dan pemakaman non muslim.

- (2) Pembangunan dan Pengelolaan Taman dan Ruang Terbuka Hijau dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman dengan alokasi anggaran Rp.1.456.428.250 dan realisasi sebesar Rp.1.399.331.729,- atau 96,08%. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Taman dan Ruang Terbuka Hijau merupakan kegiatan yang mengadakan pembangunan Taman Kota, Pulau Jalan beserta sarana dan prasarananya (Kursi Taman, Taman Bermain, Pagar, Pot Bunga dan Bunga). Pembangunan Taman Kota ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bintan dalam memenuhi kebutuhan Ruang Terbuka Hijau sebagai penyeimbang dari lajunya aktifitas kegiatan pembangunan di bidang ekonomi dan perindustrian di Kabupaten Bintan dan sebagai media sosialisasi antar warga masyarakat di Kabupaten Bintan. Hal ini sesuai dengan landasan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development). Keluaran (output) dari kegiatan ini adalah tersedianya sarana dan prasarana pertamanan (pupuk, bibit, obat dan sarana pembibitan tanaman) dan terlaksananya pembangunan taman kota, sebagai berikut : bahan obat-obatan pertanian, pupuk dan kompos, sarana pembibitan tanaman, tanah hitam dan pohon pelindung, perawatan sarana dan prasarana Taman Kota se-Kabupaten Bintan, pakaian kerja lapangan 7 pasang, Revisi DED Taman Kota Kec. SKL dan Sakera, Taman di depan kantor camat Teluk Bintan, Taman di Mantang, Taman dan Semenisasi di Simpang Pertigaan Gunung Lengkuas dan Kijang Kota, Taman di Pulau Pucung Desa Malang Rapat, Kec. Gunung Kijang, pot bunga besar (100 buah), pot bunga sedang (50 buah), kursi taman di pantai Malang Rapat (75 unit). Sedangkan hasil (outcomes) yang diperoleh dari kegiatan tersebut adalah

meningkatnya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau selama 1 tahun. Dengan demikian sampai dengan tahun 2015 Kabupaten Bintan telah membangun Ruang Terbuka Hijau seluas 192.801 m<sup>2</sup>, yang terdiri dari Taman Kota, Mini Zoo, pulau Jalan dan Taman-taman lainnya.

- (3) Operasional dan Pengelolaan Kebun Binatang Kijang. dilaksanakana oleh Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman dengan alokasi anggaran Rp.321.530.000,- dan realisasi sebesar Rp.280.631.960,- atau 87,28%. Dilaksanakan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan operasional pemeliharaan binatang dan pemeliharaan fasilitas Mini Zoo Kijang Kota. Keluaran (output) yang diperoleh dari kegiatan tersebut adalah tersedianya operasional dan pengelolaan kebun binatang Kijang sebagai berikut peralatan kebersihan dan bahan pembersih, bahan obat-obatan hewan, vitamin, pakan hewan, Pemeliharaan sarana dan prasarana Kebun Binatang (Mini Zoo) Kijang, pemeliharaan kandang kebun binatang, pemeliharaan alat-alat permainan. Hasil (outcomes) dari kegiatan ini adalah meningkatnya pengelolaan kebun binatang Kijang. Kebun Binatang Mini Zoo Kijang Kota juga termasuk didalam Ruang Terbuka Hijau yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan yang harus dipelihara dan mendapat perhatian dalam hal pemeliharaan binatang dan fasilitas yang ada didalamnya.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah bagian penting dari ekosistem perkotaan. RTH adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur di mana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka. RTH meliputi taman kota, taman wisata alam, taman rekreasi, taman lingkungan pemukiman, taman gedung perkantoran dan gedung komersial, lapangan olah raga, pemakaman umum, sepadan sungai, pantai dan kawasan jalur hijau.

Untuk sarana ruang terbuka hijau di Kabupaten Bintan yang dikelola oleh pemerintah daerah terdiri dari 3 (tiga) Taman umum besar yang berada di Kijang Kota seluas 7, 4 ha, Taman Sakera seluas 2 ha dan Taman Seri Kuala Lobam seluas 3 ha. Serta beberapa taman kecil berupa pulau-pulau jalan yang tersebar di kecamatan Kabupaten Bintan, Ruang Terbuka Hijau juga berada di fasilitas sosial dan fasilitas umum diantaranya taman dan parkir gedung olah raga, taman mesjid raya dan lapangan olah raga. Agregat / hasil yang telah dicapai pada TA 2015 dan 5 (lima) tahun terakhir adalah:

Tabel 4.16 : Luas ruang terbuka hijau yang dikelola

<b>No.</b>	<b>Tahun</b>	<b>Indeks</b>
<b>1</b>	<b>2015</b>	<b>192.801 m<sup>2</sup></b>
2	2014	191.351 m <sup>2</sup>
3	2013	186.126 m <sup>2</sup>
4	2012	129.865 m <sup>2</sup>
5	2011	-

Sumber : Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman

Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan sampai dengan tahun 2015 adalah :

1. Taman Kota Sakera (Kp. Bugis)      Kec. Bintan Utara : 20.000 M<sup>2</sup>
2. Taman Kota Sekilo Kecamatan Seri Kuala Lobam : 30.000 M<sup>2</sup>
3. Taman Kota Kijang Kota Kec. Bintan Timur : 74.000 M<sup>2</sup>
4. Pulau-pulau jalan      di Kabupaten Bintan : 21.890 M<sup>2</sup>
5. Taman Lain-lain : 46.911 M<sup>2</sup>

Sehingga total luas RTH yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan adalah sebesar 192.801 M<sup>2</sup>. Dengan demikian persentase luas RTH yang dikelola terhadap luas yang ditargetkan di renstra SKPD tahun 2015 (144.000 M<sup>2</sup>) yaitu sebesar 133,89 persen. Terjadi peningkatan dari luas RTH di tahun 2014 disebabkan oleh adanya penambahan pembangunan pulau-pulau jalan di beberapa lokasi di Kabupaten Bintan.

Tabel 4.17 Rasio tempat pemakaman umum per 1000 penduduk

No.	Tahun	Indeks
1	2015	115
2	2014	115
3	2013	120
4	2012	70,32
5	2011	-

Sumber : Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman

Sementara ini pemakaman umum yang ada di Kabupaten Bintan ada beberapa pemakaman yang berada di 7 Kecamatan, namun sampai saat ini belum dikelola oleh pemerintah daerah dengan total luas makam 996.823 M2. Telah terjadi penurunan daya dukung lahan pemakaman TPU karena adanya pertumbuhan jumlah penduduk dan meningkatnya jumlah penggunaan lahan pemakaman di setiap tahunnya, sedangkan lahan pemakaman tetap. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sangat dibutuhkan adanya penambahan lahan pemakaman di Kabupaten Bintan.

## **b. Permasalahan dan Solusi**

### **1) Permasalahan**

- a) Belum adanya database atau perencanaan pembangunan taman dan pulau jalan yang akan dibangun di Kabupaten Bintan
- b) Belum adanya database atau perencanaan pembangunan dan kebutuhan TPU yang akan dibangun di Kabupaten Bintan.
- c) Kurangnya lahan untuk hewan-hewan yang ada di Mini zoo Kijang Kota.

### **2) Solusi**

- d) Dilakukan penganggaran untuk adanya database atau perencanaan pembangunan taman dan pulau jalan yang akan dibangun di Kabupaten Bintan.
- e) Dilakukan penganggaran untuk adanya database atau perencanaan pembangunan dan kebutuhan TPU yang akan dibangun di Kabupaten Bintan.

- f) Dilakukan penambahan lahan untuk fasilitas pemeliharaan binatang di Mini Zoo Kijang Kota.

## **8) Program Peningkatan Prasarana Penerangan Jalan Umum**

### **a. Pelaksanaan Program**

- (1) Pemeliharaan Lampu Jalan / Fasilitas Umum dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman dengan alokasi anggaran Rp.742.020.800,- dan realisasi sebesar Rp.741.296.200,- atau 99,90%. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pemeliharaan seluruh lampu-lampu tersebut agar selalu dapat berfungsi dengan baik. Keluaran (output) yang diperoleh dari kegiatan tersebut adalah terpeliharanya lampu jalan / fasilitas umum sebagai berikut : Pemeliharaan Lampu Jalan se-Kabupaten Bintan (668 buah), Pemeliharaan Lampu Jalan 4 ornament di Kec. Bintim 3 unit, Kec. Binut 3 unit, Kec. Teluk Sebong 1 unit, Kec. Teluk Bintan 1 unit dan Kec. Gunung Kijang 2 unit, Kec. Toapaya 1 unit, Pemeliharaan Lampu Jalan Antik (8 buah) di kawasan ibukota pemerintahan, dan lampu jalan ornament antik se-Kabupaten Bintan (7 buah), pemeliharaan lampu jalan antik Relief Antam Kijang, Pemeliharaan Lampu Hias Sp. Gesek Kec. Toapaya, Lampu Taman Teluk Bakau Kec. Gunung Kijang. Hasil (outcomes) dari kegiatan ini adalah meningkatnya penerangan jalan umum / fasilitas umum di Kabupaten Bintan. Adapun data jumlah pengadaan titik lampu sampai dengan tahun 2014 adalah sebanyak 1.538 titik lampu. Dan jumlah tersebut menjadi target pemeliharaan selama tahun 2015. Pemeliharaan lampu jalan hanya dilakukan pada lampu jalan yang sudah mengalami kerusakan. Selama tahun 2015 diperoleh data bahwa pemeliharaan lampu jalan dilakukan pada 668 unit lampu jalan. Dengan demikian maka dapat diperoleh persentase pemeliharaan lampu jalan sebesar 43,44 % dari 1.538 unit lampu jalan yang ada.

- (2) Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan dan Fasilitas Umum dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman dengan alokasi anggaran Rp.1.691.190.000,- dan realisasi sebesar Rp.1.583.783.431,- atau 93,65%. Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan dan Fasilitas Umum ini dibutuhkan untuk melakukan perencanaan dan pembangunan serta pemasangan fasilitas PJU di jalan umum maupun untuk fasilitas umum di Kabupaten Bintan. Keluaran (output) yang diperoleh dari kegiatan tersebut adalah terlaksananya pengadaan dan pemasangan lampu jalan / fasilitas umum sebagai berikut : Penyambungan Baru Lampu Stadion Teluk Bintan (Instalasi Gedung + KWH meter 33.000 Watt), Lampu Single Ornament di stadion Teluk Bintan Kec. Teluk Bintan (4 buah), lampu jalan tenaga surya di TPA Sei. Enam (6 buah), lampu jalan Solar Cell beserta tiangnya di pelantar RT. 03, RT. 04 RW. II Desa Batu Lepuk Kecamatan Tambelan (8 buah), lampu jalan di Kecamatan Tambelan (27 unit), lampu 4 ornament di Kec. Teluk Bintan (1 unit), penyambungan 2 unit KWH Meter dan instalasi di TPA Sei. EnamKec. Bintim, lampu Solar Cell di Kec. Mantang (7 unit), lampu jalan di Kec. Bintan Pesisir (22 unit). Hasil (Outcomes) yang diperoleh adalah meningkatnya penerangan jalan/fasilitas umum. Pada tahun 2015, telah dilakukan pembangunan PJU di Kabupaten Bintan sebanyak 78 unit. Dengan demikian sampai dengan tahun 2015, Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Bintan telah membangun PJU sebanyak 1.616 unit di Kabupaten Bintan.
- (3) Penyusunan Database Titik Lampu di Kabupaten Bintan dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman dengan alokasi anggaran Rp.47.000.000,- dan alokasi anggaran sebesar Rp.46.805.000,- atau 99,59%.



Keluaran dari kegiatan ini adalah pendataan titik lampu yang sudah dibangun di Kabupaten Bintan.

Penerangan Jalan umum merupakan suatu pemenuhan kebutuhan kepada masyarakat. Penerangan Jalan Umum meliputi jalan-jalan protokol, jalan gang perumahan, jalan perkantoran, tempat wisata atau lampu taman.

Penerangan Jalan Umum telah menyebar Kecamatan pada Kabupaten Bintan. Adapun banyaknya pengadaan Lampu Jalan yang telah disediakan oleh Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman sampai dengan tahun 2014 adalah sebanyak 1.538 unit lampu jalan yaitu 329 buah lampu di Kec. Bintan Timur, 364 buah lampu di Kec. Gunung Kijang, 247 buah lampu di Kec. Bintan Utara, 153 buah lampu di Kec. Teluk Bintan, 97 buah lampu di Kec. Toapaya, 128 buah lampu di Kec. Seri Kuala Lobam, 28 buah lampu di Kec. Mantang, 145 buah lampu di Kec. Teluk Sebong, 19 buah lampu di Kec. Bintan Pesisir dan 28 buah lampu di Kec. Tambelan.

Tabel 4.18 : Jumlah Lampu Jalan Yang Telah Terpasang

No.	Tahun	Indeks
1	2015	1.616 unit
2	2014	1.538 unit
3	2013	1.013 unit
4	2012	606 unit
5	2011	506 unit

Sumber : Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman

Adapun data pengadaan titik lampu di seluruh kecamatan di Kabupaten Bintan sampai dengan tahun 2015 adalah sebanyak 1.616 unit yang terdiri dari:

1. Kecamatan Bintan Timur : 335 unit.
2. Kecamatan Gunung Kijang : 367 unit.
3. Kecamatan Bintan Utara : 247 unit.
4. Kecamatan Teluk Bintan : 154 unit.
5. Kecamatan Toapaya : 101 unit.
6. Kecamatan Seri Kuala Lobam : 128 unit.
7. Kecamatan Mantang : 35 unit.

8. Kecamatan Teluk Seborg : 145 unit.
9. Kecamatan Bintan Pesisir : 41 unit.
10. Kecamatan Tambelan : 63 unit.

Sehingga total titik lampu jalan yang telah dipasang oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan sampai dengan tahun 2015 adalah sebanyak 1.616 unit. Dengan demikian persentase titik lampu yang terpasang di Kabupaten Bintan terhadap bila dibandingkan dengan target renstra SKPD maka diperoleh persentase sebesar 200,49%. Dan bila dibandingkan dengan data tahun 2014 maka terjadi penambahan sebanyak 78 unit.

Tabel 4.19 : Persentase Titik Penerangan Jalan Umum yang Dipelihara

No.	Tahun	Indeks
<b>1</b>	<b>2015</b>	<b>43,44 %</b>
2	2014	43,44 %
3	2013	39 %
4	2012	30 %
5	2011	-

Sumber : Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman

Adapun data jumlah pengadaan titik lampu sampai dengan tahun 2014 adalah sebanyak 1.538 titik lampu. Dan jumlah tersebut menjadi target pemeliharaan selama tahun 2015. Pemeliharaan lampu jalan hanya dilakukan pada lampu jalan yang sudah mengalami kerusakan. Selama tahun 2015 diperoleh data bahwa pemeliharaan lampu jalan dilakukan pada 668 unit lampu jalan. Dengan demikian maka dapat diperoleh persentase pemeliharaan lampu jalan sebesar 43,44 persen dari 1.538 unit lampu jalan yang ada. Sedangkan bila dibandingkan dengan target pemeliharaan di renstra SKPD tahun 2014 (30%) maka dapat diperoleh peningkatan persentase yaitu sebesar 145%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terjadi peningkatan anggaran dan perhatian pemerintah daerah Kabupaten Bintan terhadap pelayanan Penerangan Jalan Umum dengan tetap menjaga kondisi lampu yang ada agar tetap hidup dengan kondisi baik.

## **b. Permasalahan dan Solusi**

### **1) Permasalahan**

- a) Sering tertunda atau keterlambatan membayar tagihan PJU sehingga lampu jalan sering dilaporkan mati (tidak hidup).
- b) Banyaknya PJU yang dilaporkan tidak hidup karena adanya kerusakan dan disambar petir.

### **2) Solusi**

- c) Koordinasi dengan DPPKD Kabupaten Bintan untuk lebih tepat waktu dalam pembayaran tagihan PJU di Kabupaten Bintan.
- d) Dilakukan perbaikan terhadap PJU yang rusak melalui kegiatan pemeliharaan PJU.

## **4.1.4. Urusan Pekerjaan Umum**

Pencapaian indikator kinerja daerah pada **Misi Kelima** terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Bintan untuk urusan Kesehatan adalah sebagai berikut : Persentase tingkat kemantapan jalan **95%**; Panjang jalan dilalui roda 4 : **749,49 Km**; Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 KM/Jam) **282,771 Km**;

Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

### **1) Program Penyediaan dan Pemberdayaan Sekolah dan Prasarana Pendidikan Lain**

#### **a. Pelaksanaan Program**

- (1) Kegiatan Pembangunan Pagar SD dan SMP dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum oleh dengan alokasi anggaran sebesar Rp.302.000.000 dan terealisasi sebesar Rp.298.744.360 atau 98,92%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pembangunan Pagar SD 002 Desa Dendun Kec. Mantang (P = 100 M x T = 1,5 M) Pembangunan Pagar (67 M') dan Batu Miring (18,5 M') SDN 007 Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur

- (2) Kegiatan Pembangunan Paving Blok Halaman SD dan SMP dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp.878.300.000 dengan realisasi sebesar Rp.854.163.600 atau sebesar 97,25%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksanya kegiatan pembangunan sebagai berikut :
- a) Pembangunan Paving Blok Halaman SD. 002 Desa Dendun Kec. Mantang (408 M2)
  - b) Pembangunan Paving Blok SD 005 Desa Penaga Kecamatan Teluk Bintan (672 M2)
  - c) Pembangunan Paving Blok SD 005 Cikolek Desa Toapaya Kec. Toapaya (620 M2)
  - d) Pembangunan Paving Blok SD 006 Lome Desa Toapaya Utara Kec. Toapaya (575 M2)
  - e) Pembangunan Paving Blok SMPN 17 Bintan Kec. Toapaya (656 M2)
- (3) Kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp.650.000.000 dengan realisasi sebesar Rp.640.029.670 atau sebesar 98,47%. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya :
- a) Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 005 Desa Kp. Hilir Kec. Tambelan (3 RKB)
  - b) Rehabilitasi SDN 02 Bintan Timur Kec. Bintan Timur (1 Paket)
  - c) Rehabilitasi SD 004 Kelas Jauh RT. 05/ RW. 03 Telang Besar Desa Mantang Besar Kec. Mantang (1 Paket)
- Hasil yang dicapai adalah Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Kelas Belajar sebanyak 8 RKB, dengan rincian sebagai berikut :  
Kec.Tambelan sebanyak 3 RKB, Kec.Bintan Timur 3 RKB, Kec.Mantang 2 RKB
- (4) Kegiatan Pembangunan RKB TK dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.500.000.000 pada APBD Murni dan Rp.0 pada APBD-P Murni

(5) Kegiatan Pembangunan Paving Blok SMA/MA/SMK dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp.212.000.000 dengan realisasi sebesar Rp.210.298.650 atau sebesar 99,20%. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a) Pembangunan Jalan Masuk (Buras Beton Bertulang 176 M2) dan Paving

b) Halaman (400 M2) SMK 3 Desa Malang Rapat Kec. Gunung Kijang

Hasil dari kegiatan ini adalah sebagai berikut  
Terlaksananya Pembangunan Paving Blok dan Buras Beron bertulang, dengan rincian sebagai berikut : Kec.Gunung Kijang Jalan Buras Beton Bertulang 176 M2 dan Paving Halaman (400 M2)

(6) Kegiatan Penyediaan Air Bersih dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp.137.000.000 dengan realisasi sebesar Rp.132.281.800 atau sebesar 96,56% Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Pembangunan Sarana Air Bersih SMK 3 Desa Malang Rapat Kec. Gunung Kijang (Perpipaan, Bak Penampungan, Pompa)

Hasil dari kegiatan ini adalah sebagai berikut : Terlaksananya Pembangunan Sarana Air Bersih Sekolah di Kec.Gunung Kijang jaringan perpipaan,bak penampungan dan pompa

(7) Kegiatan Rehabilitasi TK dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp.40.000.000 dengan realisasi sebesar Rp.39.974.000 atau sebesar 99,94%

(8) Kegiatan Pembangunan Gedung SMA/MA dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.655.000.000 dengan realisasi sebesar Rp.1.619.779.769

atau sebesar 97,87%. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Pembangunan Unit Sekolah Baru SMAN 8 Bintan Desa Mantang Lama Kec. Mantang (RKB, Majelis Guru, Aula, KM/WC)

Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut : Terlaksananya Pembangunan Ruang Kelas Belajar, Majelis Guru, Aula dan KM/WC di Kec.Gunung Mantang terdiri dari Ruang Kelas Baru (RKB), Majelis Guru Aula,KM/WC

#### **b. Permasalahan dan Solusi**

Dalam pelaksanaan Penyediaan dan Pemberdayaan Sekolah dan Prasarana Pendidikan Lain tidak ada kendala serta permasalahan sehingga program dapat dilaksanakan sesuai rencana.

### **2) Program Peningkatan Jangkauan Pelayanan Kesehatan**

#### **a. Pelaksanaan Program**

- (1) Kegiatan Peningkatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.008.100.000 dan terealisasi sebesar Rp.961.621.298 atau 95,39%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pekerjaan :
  - a) Pembangunan Rumah Bersalin Puskesmas Sei. Lekop Kec. Bintan Timur (70 M2)
  - b) Pembangunan Pagar (245 M), Dinding Penahan (42,50 M) dan Saluran Drainase (130 M) Puskesmas Kuala Sempang Kec. Seri Kuala Lobam.
  - c) Rehab Ringan Puskesmas Kel. Tanjung Uban Kota Kec. Bintan Utara (360 M2)

Hasil dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan

- (2) Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp.12.705.433.000 terealisasi sebesar Rp.12.680.418.967 atau sebesar 99,80%. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Pembangunan RSUD Kijang Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur (Tahap - 4) Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut : Terbangunnya Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Daerah, dengan rincian sebagai berikut: Pembangunan RSUD Kijang (Tahap-4) di Kec.Bintan Timur

**b. Permasalahan dan Solusi**

Dalam pelaksanaan Peningkatan Jangkauan Pelayanan Kesehatan tidak ada kendala serta permasalahan sehingga program dapat dilaksanakan sesuai rencana.

**3) Program Pembangunan Jalan dan jembatan**

**a. Pelaksanaan Program**

- (1) Kegiatan Pembangunan Jalan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.700.700.000 terealisasi sebesar Rp.6.691.438.571 atau sebesar 99,86%, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
- a) Pembangunan/Pengaspalan Jalan Kp.Sungai Angus Desa Malang Rapat Kec.Gunung Kijang (1 Km)
  - b) Pembangunan/Pengaspalan Jalan Kp. Tanah Merah Desa Penaga Kec.Teluk Bintan (Lanjutan) (730 M)
  - c) Pembangunan/Pengaspalan Jalan Kp. Banse Desa Penaga Kec. Teluk Bintan (Lanjutan) (700 m)

- d) Pembangunan Pembukaan Akses Jalan Karet RT.04/RW.02  
Kp. Bukit Sinjang Desa Toapaya

Hasil dari kegiatan ini adalah Terlaksananya pembangunan/pengaspalan serta peningkatan jalan dan jembatan yang tersebar di 3 kecamatan yaitu Kec.Gunung Kijang, Kec.Teluk Bintan dan Kec.Toapaya dengan panjang Jalan Aspal = 2,430 Km dan Pembukaan Jalan = 700 M.

- (2) Kegiatan Pembangunan Jalan (DAK) dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp.13.464.636.000 terealisasi sebesar Rp.13.451.168.860 atau sebesar 99,90% dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- a) Pembangunan/Peningkatan Jalan Cikolek-Kawal Kecamatan Toapaya - Gunung Kijang (2,6 km)
- b) Peningkatan dan Pelebaran Jalan dan Drainase Sp.Tugu Antam - Mini Zoo Kolong Enam - Lengkuas Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur (3 KM)
- c) Pembangunan Jalan Samping Masjid Besar Kel. Kawal Kec. Gunung Kijang (600M)

Hasil dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Pembangunan dan Jalan Aspal yang tersebar di 3 kecamatan yaitu Kec.Gunung Kijang, Kec.Bintan Timur dan Kec.Toapaya dengan panjang Jalan Aspal = 6,2 Km

- (3) Kegiatan Penunjang Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Jalan (DAK) dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp.125.600.000 terealisasi sebesar Rp.124.477.342 atau sebesar 99,11% dengan rincian kegiatan sebagai berikut : Belanja Bahan Pakai Habis; Belanja Perjalanan Dinas; Belanja Cetak dan Penggandaan. Hasil dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Operasional Penunjang Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Jalan (DAK).



(4) Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Jalan Poros Wilayah (DAK) dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.548.028.000 terealisasi sebesar Rp.5.538.678.642 atau sebesar 99,83% dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- a) Pembangunan/Pengaspalan Jalan Kp. Melayu Desa Gunung Kijang Kec. Gunung Kijang (1 Km x 4 M)
- b) Pembangunan Jalan Sidomulyo, KM 18 Kel. Sei Lekop Kec. Bintan Timur (1,1 Km)

Adapun dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Pembangunan Jalan Aspal pada 2 kecamatan yaitu Kec.Gunung Kijang dan Kec.Bintan Timur dengan panjang Jalan aspal= 2,1 Km

(5) Kegiatan Penunjang Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Jalan Poros Wilayah (DAK) dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp.51.650.000 terealisasi sebesar Rp.50.238.825 atau sebesar 97,27%. Hasil dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Operasional Penunjang Kegiatan Pembangunan Jalan Poros Wilayah (DAK).

(6) Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Jalan (DAK TAMBAHAN) dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.801.210.000 terealisasi sebesar Rp.2.795.588.777 atau sebesar 99,80% Keluaran dari kegiatan ini adalah Pembangunan Jembatan Kp. Banse Desa Penaga Kec. Teluk Bintan (30 M) Adapun hasil adalah Terlaksananya Pembangunan Jembatan.

#### **b. Permasalahan dan Solusi**

Dalam pelaksanaan Pembangunan Jalan dan jembatan tidak ada kendala serta permasalahan sehingga program dapat dilaksanakan sesuai rencana.

#### **4) Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan jembatan**

##### **a. Pelaksanaan Program**

- (1) Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.200.000.000 terealisasi sebesar Rp.2.187.519.570 atau sebesar 99,43%. Adapun hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah Terlaksananya Pemeliharaan Badan Jalan/Lapisan Permukaan/Aspal, Bahu Jalan dan Drainase Jalan, Dinding Penahan Tanah Jalan dan Jembatan.
- (2) Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Berkala Jalan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.689.400.000 terealisasi sebesar Rp.3.644.257.682 atau sebesar 98,78% hasil dari kegiatan ini adalah Pemeliharaan Berkala (Rehabilitasi) Jalan Raya Tambelan Kec.Tambelan (1,3 Km) Adapun hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah Terlaksananya Pemeliharaan Badan Jalan/Lapisan Permukaan/ Aspal Jalan .

##### **b. Permasalahan dan Solusi**

Dalam pelaksanaan Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan jembatan tidak ada kendala serta permasalahan sehingga program dapat dilaksanakan sesuai rencana.

#### **5) Program Pembangunan Drainase dan Gorong-gorong Jalan**

##### **a. Pelaksanaan Program**

- (1) Kegiatan Pembangunan dan perbaikan saluran drainase jalan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.537.000.000 terealisasi sebesar Rp.2.422.770.784 atau sebesar 95,50% keluaran dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Pembangunan Saluran Drainase Jalan dengan rincian kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

- Pembangunan saluran drainase sepanjang 4.484 M' yang dibangun di beberapa kecamatan antara lain Kec.Bintan Utara (2.534 M'), Kec.Toapaya (500 M'), Kec.Gunung Kijang (1.450 M')
- (2) Kegiatan Pembangunan Duiker, Box Culvert dan Gorong-Gorong Jalan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.585.000.000,- terealisasi sebesar Rp.1.409.039.747,- atau sebesar 88,90 % hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah Terlaksananya Pembangunan Box Culvert dengan rincian kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut Pembangunan box culvert sebanyak 6 buah yang dibangun di 2 kecamatan sebagai berikut :  
Kec.Bintan Utara (5 Unit), Kec.Seri Kuala Lobam (1 Unit)

**b. Permasalahan dan Solusi**

Dalam pelaksanaan Pembangunan Drainase dan Gorong-gorong Jalan tidak ada kendala serta permasalahan sehingga program dapat dilaksanakan sesuai rencana.

**6) Program Peningkatan Kapasitas Bidang Pekerjaan Umum**

**a. Pelaksanaan Program**

- (1) Kegiatan Pengadaan peralatan laboratorium pekerjaan umum dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp.201.450.000 terealisasi sebesar Rp.200.313.960 atau sebesar 99,44% dengan hasil yang diharapkan di akhir tahun anggaran adalah Terlaksananya pengadaan peralatan labor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan.
- (2) Kegiatan Operasional Pengelolaan UPT Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bintan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp.274.000.000 treealisasi sebesar Rp.262.890.015 atau sebesar 95,95%.

- (3) Kegiatan Operasional UPTD - PU Pengawasan Infrastruktur Jalan dan Bangunan di Tanjung Uban dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp.40.000.000 terealisasi sebesar Rp.39.978.000 atau sebesar 99,95 %. Adapun hasil yang diharapkan di akhir tahun anggaran adalah Terlaksananya operasional UPTD - PU pengawasan infrastruktur jalan dan bangunan di Kec. Bintan Utara, Kec. Seri Kuala Lobam, Kec. Teluk Sebong.
- (4) Kegiatan Operasional UPTD - PU Pengawasan Infrastruktur Jalan dan Bangunan di Kijang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp.60.000.000 terealisasi sebesar Rp.59.550.130 atau sebesar 99,25%. Adapun hasil yang diharapkan di akhir tahun anggaran adalah Terlaksananya operasional UPTD - PU pengawasan infrastruktur jalan dan bangunan di Kec. Bintan Timur, Kec. Mantang, Kec. Bintan Pesisir, Kec. Tambelan
- (5) Kegiatan Operasional UPTD - PU Pengawasan Infrastruktur Jalan dan Bangunan di Toapaya dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp.40.000.000 terealisasi sebesar Rp.39.672.840 atau sebesar 99,18%. Adapun hasil yang diharapkan di akhir tahun anggaran adalah Terlaksananya operasional UPTD - PU pengawasan infrastruktur jalan dan bangunan di Kec. Toapaya, Kec. Gunung Kijang, Kec. Teluk Bintan.

**b. Permasalahan dan Solusi**

Dalam pelaksanaan Program Peningkatan Kapasitas Bidang Pekerjaan Umum tidak ada kendala serta permasalahan sehingga program dapat dilaksanakan sesuai rencana.

## **7) Program Pembangunan dan Peningkatan Prasarana dan Sarana Umum / Sosial**

### **a. Pelaksanaan Program**

(1) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum dan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp.29.306.000.000 terealisasi sebesar Rp.28.851.457.165 atau sebesar 98,45%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksanya pembangunan sebagai berikut :

- a) Belanja Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat terdiri dari pembangunan/ rehabilitasi Mesjid/ Surau dan musholla (kec.Bintan Timur, Kec.Bintan Utara,Kec.Gunung Kijang dan Kec.Bintan Pesirsir), Pembangunan batu Miring PAUD (Kec.Bintan Timur) Pembangunan sarana Air Bersih (Kec.Bintan Timur), Pembangunan RKB (Kec.Teluk Sebung)
  - b) Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor yang terdiri dari Pembangunan gedung Lam di Kec.Bintan Timur dan Rehabilitasi kantor KUA Kec.Teluk Bintan
  - c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan yang terdiri dari Rehabilitasi Gedung Nasional Tanjung Uban Kec. Bintan Utara
  - d) Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga yang terdiri dari pembangunan Lapangan Bola di Kec.Bintan Timur dan Pembangunan Lapangan futsal di Kecamatan Tambelan.
- Adapun hasilnya adalah Terlaksananya Pembangunan / Peningkatan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Umum dan Sosial Kemasyarakatan.

(2) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Bumi Perkemahan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan alokasi

anggaran sebesar Rp.50.000.000 terealisasi sebesar Rp.49.775.000 atau sebesar 99,55%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Pembangunan Sarana Bumi Perkemahan.

**b. Permasalahan dan Solusi**

Dalam pelaksanaan Program Pembangunan dan Peningkatan Prasarana dan Sarana Umum / Sosial tidak ada kendala serta permasalahan sehingga program dapat dilaksanakan sesuai rencana.

**8) Program Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan**

**a. Pelaksanaan Program**

- (1) Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp.787.000.000 terealisasi sebesar Rp.758.670.197 atau sebesar 96,40%, keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Pembangunan Kantor Desa Kelong Kec. Bintang Pesisir (157 M2).
- (2) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp.707.780.000 terealisasi sebesar Rp.681.130.717 atau sebesar 96,23%. Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya Penambahan Sarana dan Prasarana Gedung EXPO Jl. Basuki Rahmat -Tanjungpinang (Gudang, Atap Kanopi Kantin/Struktur Membran, Meja Kursi Kantin, Bak Air, Mesin Air dan Bangunan Genset). Hasil adalah Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan dan Infrastruktur Penunjang.
- (3) Kegiatan Pembangunan Rumah Jabatan/Dinas/Asrama/ Mess dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.000.000.000 terealisasi sebesar Rp.932.079.618 atau sebesar 93,21%, dengan rincian kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut : Penambahan Pembangunan Asrama Pelajar (Rumah Adat) Tambelan di

Tanjungpinang (1 Gedung) Tahap I Adapun hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah Terlaksannaya Pembangunan Asrama Pelajar (Rumah Adat).

**b. Permasalahan dan Solusi**

Tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan program Peningkatan Perencanaan Teknis sehingga program dapat dilaksanakan sesuai rencana.

**9) Program Peningkatan Perencanaan Teknis**

**a. Pelaksanaan Program**

- (1) Kegiatan Perencanaan Teknis/DED Sarana & Prasarana SPAM dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp.400.000.000 terealisasi sebesar Rp.390.170.990 atau sebesar 97,54%. Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah Terlaksannaya Perencanaan Teknis (DED) Sarana dan Prasarana SPAM
- (2) Kegiatan Perencanaan Teknis (DED) Jalan Dan Jembatan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp.665.000.000 terealisasi sebesar Rp.649.724.980 atau sebesar 97,70% Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah Terlaksannaya Perencanaan Teknis (DED) penyusunan dokumen lingkungan hidup jalan dan jembatan
- (3) Kegiatan Perencanaan Teknis (DED) Sarana dan Prasarana Perumahan Permukiman dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp.717.500.000 terealisasi sebesar Rp.710.133.960 atau sebesar 98,97% Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah Terlaksannaya Perencanaan Teknis (DED) Penyusunan Dokumen Sarana dan Prasarana Perumahan Permukiman.

**b. Permasalahan dan solusi**

Tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan program Peningkatan Perencanaan Teknis sehingga program dapat dilaksanakan sesuai rencana.

**10) Program Pembangunan Sarana Kantor Pemerintahan Ibukota**

**a. Pelaksanaan Program**

Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Prasarana Gedung Kantor Pemerintah dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp.400.000.000 terealisasi Rp.397.085.730 atau sebesar 99,27%. Hasil adalah Terlaksananya Pembangunan Lapangan Tennis.

**b. Permasalahan dan Solusi**

Tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan program Pembangunan Sarana Kantor Pemerintahan Ibukota sehingga program dapat dilaksanakan sesuai rencana.